



**PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
INSPEKTORAT**

Alamat :Jln Kimyal - Dekai Email: Inspektoratyhk@mail.com

Sumohai, 27 Maret 2025

Nomor : 700/ 36 /LHR/IT/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kinerja Instansi
: Pemerintah Kabupaten
Yahukimo Tahun 2024

Kepada Yth:
Bupati Yahukimo
Di-
Sumohai

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah KabupatenYahukimo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Yahukimo, Nomor:700/IT/LHR/2025 tanggal 27 Maret 2025.

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret sampai dengan 31 Maret 2025.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid dan Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024.

6. Simpulan dan Rekomendasi

6.1. Simpulan

6.1.1. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Pemerintah (Laporan Kinerja/LKj) Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 6.1.1.1. Laporan Kinerja belum seluruhnya menampilkan data penting IP;
- 6.1.1.2. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi target kinerja yang sesuai dengan Penetapan Kinerja, yaitu antara lain untuk:
 - Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja KabupatenYahukimo
 - Prosentase menata arsip sesuai peraturan yang berlaku
 - Dll;
- 6.1.1.3. Laporan Kinerja belum menyajikan capaian kinerja IP yang memadai, masih terdapat indikator yang belum diukur, antara lain:
 - Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Frekuensi Pertemuan Ulama/Umaro
 - Jumlah sarana pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat
 - Jumlah pengunjung perpustakaan
 - Jumlah koleksi buku perpustakaan
 - Dll;
- 6.1.1.4. Laporan Kinerja belum disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
- 6.1.1.5. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan upaya perbaikan kedepan;
- 6.1.1.6. Laporan Kinerja belum seluruhnya menyajikan akuntabilitas keuangan.
- 6.1.2 Mekanisme Penyusunan
Kesimpulan terhadap Mekanisme penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - 6.1.2.1. Laporan Kinerja IP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki

tugas fungsi untuk itu;

- 6.1.2.2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja belum didukung dengan data yang memadai;
- 6.1.2.3. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja keunit penyusun Laporan Kinerja belum memadai karena belum adanya SOP atau surat edaran yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja keunit penyusun Laporan Kinerja (LKj);
- 6.1.2.4. Penanggungjawab pengumpulan data/informasi belum ditetapkan disetiap SKPD terkait/unit kerja;
- 6.1.2.5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) belum diyakini keandalannya;
- 6.1.2.6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) belum diketahui oleh unit kerja terkait.

6.1.3 Subtansi

Kesimpulan terhadap Substansi laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 6.1.3.1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
- 6.1.3.2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah selaras dengan RPJMD;
- 6.1.3.3. Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD;
- 6.1.3.4. Indikator Kinerja Utama belum dibuat secara formal;
- 6.1.3.5. Terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;
- 6.1.3.6. Indikator Kinerja Sasaran strategis secara umum telah memenuhi syarat SMART dan cukup namun masih terdapat pernyataan indikator Kinerja sasaran yang masih belum

berorientasi out come yaitu antara lain:

- Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Yahukimo
- Jumlah Perda yang diterbitkan
- Prosentase Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
- Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu
- Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD
- Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data pemerintah Kabupaten Yahukimo
- Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release)
- Jumlah fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat dan stakeholder lainnya (kali)
- Presentase guru berpendidikan min.S1/D4
- Frekuensi Pertemuan Ulama/Umaro
- Jumlah sarana pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat
- Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan
- Jumlah koleksi buku perpustakaan
- Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk.
- Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (kali/minggu)
- Jumlah Anggota Linmas
- Persentase terbinanya anggota linmas siaga bencana dengan 60 orang linmas
- persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor
- Jumlah Koperasi
- Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak dibidang usaha perdagangan
- Jumlah tenaga kerja terlatih

- Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;

6.1.3.7. Belum seluruh sasaran strategis disajikan perbandingan capaian kinerja dan analisa atas capaian kinerjanya yang dianggap memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami rekomendasikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo:

1. Dalam hal Format Laporan Kinerja, agar:

- Laporan Kinerja seluruhnya menampilkan data penting IP;
- Laporan Kinerja menyajikan informasi target kinerja sesuai dengan target di Penetapan Kinerja;
- Laporan Kinerja menyajikan capaian kinerja IP yang memadai;
- Laporan Kinerja disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
- Laporan Kinerja menyajikan upaya perbaikan kedepan;
- Laporan Kinerja menyajikan akuntabilitas keuangan.

2. Dalam hal Mekanisme Penyusunan, agar:

- Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja didukung dengan data yang memadai;
- Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja didukung dengan adanya SOP atau surat edaran yang berisi mekanisme

penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja (LKj);

- Penanggungjawab pengumpulan data/informasi ditetapkan di setiap SKPD terkait/unit kerja;
- Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) dapat diyakini keandalannya;
- Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) diketahui oleh unit kerja terkait.

3. Dalam hal Subtansi, agar:

- Indikator Kinerja Utama dibuat secara formal;
- Terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang masih berorientasi output, agar diubah menjadi berorientasi outcome;
- Sasaran Strategis disajikan perbandingan capaian kinerjanya dan analisa atas capaian kinerjanya yang dianggap memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya.

Terhadap Rekomendasi atas penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel terlampir dalam laporan ini.

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan sebagai bahan dan saran untuk perbaikan LAKIP Kabupaten Yahukimo.



PIR. INSPEKTUR,

CHARLES P. SITUMORANG, SE., M.SI., CFA., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19790604 200605 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKJ) Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 dapat diselesaikan. maka Kabupaten Yahukimo menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Yahukimo tahun 2024 dan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kabupaten Yahukimo 2021 - 2026

Penyusunan laporan ini berpedoman pada PERPRES Nomor 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Akuntabiliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PERMENPAN Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja ini berisikan capaian keberhasilan, faktor pendukung, kegagalan, hambatan dan solusi dari kegiatan yang diukur sebagaimana diperjanjikan dalam PK eselon II, III dan IV tahun 2024, laporan ini merupakan laporan tahun ke-3 dari masa RPJMD 2022 - 2026.

Demikian kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo pada masa yang akan datang.

Sumohai, 27 Maret 2025
BUPATI YAHUKIMO



DIDIMUS YAHULI, SH, MH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Pemerintah Kabupaten Yahukimo dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang dicapai pada tahun 2024 dengan menggunakan acuan pencapaian sasaran strategis dengan tolok ukur indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2024.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 terdapat 6 (enam) Misi, 20 (dua puluh) Tujuan dan 54 (Lima Puluh Empat) sasaran, dengan 58 (lima puluh Delapan) indikator sasaran, dimana pelaksanaannya di dukung sebanyak 115 program dan 309 Kegiatan, berdasarkan arah kebijakan yang di tetapkan dan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Yahukimo tahun 2024.

Dari uraian diatas maka capaian sasaran dalam visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Misi ke-I yaitu **"Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa"** terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja.
2. Misi ke-II yaitu **"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya"** terdapat 5 tujuan, 11 sasaran dan 11 indikator kinerja.
3. Misi III yaitu **"Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal"** terdapat 5 tujuan, 12 sasaran dan 12 indikator kinerja.
4. Misi IV yaitu **"Meningkatkan Kesadaran Hukum, Sosial, Politik dan HAM"** terdapat 4 tujuan, 11 sasaran dan 11 indikator kinerja.
5. Misi V yaitu **"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan"** terdapat 2 tujuan, 8 sasaran dan 8 indikator kinerja.
6. Misi VI yaitu **"Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdaya saing Dan Berintegritas"** terdapat 4 tujuan, 11 sasaran dan 11 indikator kinerja.

Hasil analisis pencapaian pengukuran indikator kinerja terhadap 20 (Dua Puluh) Tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah kabupaten Yahukimo terdapat 7 Indikator Tujuan dengan Target Tercapai sedangkan ada 13 Indikator Tujuan dikategorikan sebagai Indikator yang tidak tercapai

Selanjutnya, Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 54 (Lima Puluh Empat) Sasaran Strategis dan 58 (lima puluh Delapan) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 26 indikator Kinerja tercapai Sangat Tinggi, 1 Indikator Kinerja tercapai Tinggi, 1 Indikator

Kinerja tercapai sedang, 1 indikator kinerja atau tercapai rendah, 8 indikator kinerja tercapai sangat rendah dan 20 Indikator Kinerja tidak terealisasi, serta 1 Indikator masih dalam proses Audit.

Untuk pencapaian sasaran yang telah ditentukan program yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Yahukimo membuat kebijakan fiskal untuk Tahun 2024. Kebijakan fiskal tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan) berdasarkan Perbup Nomor 51 : Tahun 2024.

Akuntabilitas keuangan Kabupaten Yahukimo dapat digambarkan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2024, Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2024 sebesar Rp.2.092.259.257.780,00 atau 94,93% dari Anggarannya sebesar Rp.2.203.941.280.753,00 dan Realisasi belanja daerah sebesar Rp.2.102.162.688.597,00 atau 93,33% dari Anggaran sebesar Rp.2.252.288.621.269,00. Oleh karena itu pada tahun 2024 APBD Kabupaten Yahukimo mengalami defisit sebesar Rp.9.903.430.817,00.

Selanjutnya Realisasi pembiayaan daerah dari sisi penerimaan daerah pada tahun 2024 sebesar Rp.89.524.444.444,00 yang berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan dari sisi Pengeluaran pembiayaan, pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 62.150.866.666,00 dalam bentuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Mengingat belum efektifnya proses pelaksanaan SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo maka Pelaporan Kinerja masih jauh dari sempurna. Keterbatasan tersebut juga berdampak pada penilaian efisiensi dan efektifitas kinerja belum sepenuhnya dapat disajikan. Secara umum penerapan dan pengembangan sistem AKIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo pada Tahun 2024 secara konsisten telah mengarah kepada peningkatan sistem AKIP yang berkelanjutan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Gambaran Umum Kabupaten Yahukimo	5
1) Kondisi Geografi Daerah	5
2) Kondisi Demografi Daerah	13
1.5 Kondisi Ekonomi	19
1.6 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	24
1.7 Susunan Perangkat Daerah	28
1.8 Isu-isu Strategis	35
1.9 Sistematika Penulisan	43
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	 46
2.1 Visi dan Misi	46
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	51
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	55
2.4 Program Pembangunan Daerah	67
2.5 Penetapan Kinerja	85
2.6 Perjanjian Kinerja	99
2.7 Kebijakan Keuangan	107
1) Belanja Daerah	107
2) Pembiayaan Daerah	109
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	 110
3.1 Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Organisasi	110
3.2 Capaian Kinerja Kabupaten Yahukimo	113
3.3 Realisasi Anggaran	291
1. Realisasi Pendapatan Daerah	292
2. Realisasi Belanja Daerah	293
3. Pembiayaan daerah	297
 BAB IV : PENUTUP	 301
LAMPIRAN	
1. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 2024 Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Kabupaten Yahukimo	
2. Perjanjian Kinerja Bupati	
3. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD Kabupaten Yahukimo	

DAFTAR TABEL & GRAFIK

	HALAMAN
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Yahukimo Menurut Distrik	8
Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Yahukimo	9
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Yahukimo, Tahun 2020 - 2025	13
Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Persentase Penduduk Menurut Distrik di Kabupaten Yahukimo	13
Tabel 1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen-nya tahun 2016-2024 Kabupaten Yahukimo	18
Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Yahukimo (persen), 2020–2024	19
Grafik 1.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Yahukimo, 2019–2023	21
Grafik 1.2 Laju Inflasi Deflator Kabupaten Yahukimo Tahun 2015-2019	21
Tabel 1.6 Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Yahukimo (Miliar Rupiah), 2020–2024	22
Grafik 1.3 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Yahukimo Tahun 2017-2024	23
Grafik 1.4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Yahukimo Tahun 2018-2024	24
Tabel 1.7 Penyelenggaraan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Berdasarkan Perangkat Daerah Pelaksana di Kabupaten Yahukimo	25
Tabel 1.8 Jumlah PNS Menurut Jabatan di Kabupaten Yahukimo, Tahun 2024	31
Tabel 2.1 Perumusan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 Secara Teknokratik	50
Tabel 2.2 Perumusan Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Yahukimo 2021 – 2026	52
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah	56
Tabel 2.4 Arah Kebijakan Strategis Pembangunan Kabupaten Yahukimo Menurut Bidang	64
Tabel 2.5 Arah Kebijakan Strategis Pembangunan Jangka Menengah	65
Tabel 2.6 Program Kegiatan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2024	71
Tabel 2.7 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 – 2026	86
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024	100
Tabel 2.9 Ringkasan Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024	107
Tabel 2.10 Perubahan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024	108
Tabel 2.11 Perubahan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024	109
Tabel. 3.1 Skala Ordinal	112
Tabel. 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif	112
Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Kabupaten Yahukimo Tahun 2024	113
Tabel 3.4 Rasio Tempat Peribadatan dengan Jumlah Penduduk berdasarkan Agama Kabupaten Yahukimo tahun 2024	122

	HALAMAN
Tabel 3.5	Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional dan Provinsi Papua Tahun 2018 - 2023 142
Tabel 3.6	Pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Yahukimo tahun 2021 - 2026 160
Tabel 3.7	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 Berdasarkan Pengelolaan Pendapatan Daerah 291
Tabel 3.8	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 293
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Daerah Menurut Distrik Tahun Anggaran 2024 294
Tabel 3.10	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2024 296
Tabel 3.11	Laporan Realisasi APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2024 298

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan Legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Fungsi pemerintahan tersebut akan dapat terselenggara dengan baik apabila terwujudnya Good Governance.

Salah satu pilar good governance adalah akuntabilitas sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang telah di rencanakan secara periodik. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan reuiu dan evaluasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Kabupaten Yahukimo disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKJ tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

pada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah (LKJ) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

2. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 ini berisikan pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo berikut indikator kerjanya, penjelasan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, serta memuat perbandingan pencapaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengacu pada Dasar-dasar Hukum yang di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 15) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Bupati Yahukimo nomor 27 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Yahukimo;
- 19) Peraturan daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan kabupaten Yahukimo
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2024
- 22) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2024
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2024

24) Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2023.

25) Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Yahukimo Tahun 2021 – 2026.

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk mengkomunikasikan dan menjawab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Disamping itu, LKJ dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKJ Tahun 2024 ini adalah:

- 1) Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2024 kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- 2) Laporan kemajuan (Progress Report) secara nyata, jelas, dan transparan atas pelaksanaan program kerja/kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Yahukimo berdasarkan tolok ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 3) Bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan program kerja guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

4. Gambaran Umum Kabupaten Yahukimo

Gambaran umum daerah Kabupaten Yahukimo disajikan berdasarkan kondisi geografis, Kondisi demografis, Jumlah Pegawai Negeri Sipil, kondisi ekonomi, dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut;

4.1 Kondisi Geografi Daerah

Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu kabupaten di bagian timur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Papua. Kabupaten yang pusat pemerintahannya di Distrik Dekai ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 dan diresmikan pada tanggal 11 Desember 2002.

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak daerah dengan aksesibilitas yang terbatas, maka pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang menjadi

penghambat utama dalam pengembangan potensi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal ini diperparah dengan domisili penduduk Yahukimo yang menyebar di berbagai titik wilayah, dimana sebagian besar penduduknya tinggal di daerah dataran tinggi yang tentu saja membutuhkan biaya yang relatif sangat besar agar pembangunan dapat menjangkaunya. Keanekaragaman wilayah dengan variasi letak dataran hunian dan topografi serta variasi budaya dan sub rumpun bahasa dari suku-suku yang menetap harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam membangun.

Untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih matang, gambaran tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Yahukimo harus dianalisis secara relevan dimana secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek fisik (secara geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Selanjutnya, gambaran umum inilah yang akan menjadi pijakan awal pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui pemetaan yang objektif.

4.1.1. Letak dan Luas Daerah

Secara morfologi Kabupaten Yahukimo merupakan dataran rendah, dataran tinggi, daerah bergunung dan perbukitan. Luas daerah dengan kemiringan 0-1 persen adalah 1.621.900 meter persegi; tingkat kemiringan 15-40 persen adalah 96.875 meter persegi, sedangkan tingkat kemiringan di atas 40 persen adalah yang terbesar yaitu 3.572.825 meter persegi dari total luas Kabupaten Yahukimo. Wilayah Kabupaten Yahukimo terletak 138045' - 140014' bujur timur dan 3039' - 5002 lintang selatan serta terletak pada ketinggian 100 – 3.000 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Yahukimo merupakan bagian kawasan pegunungan tengah seperti 7 kabupaten lainnya, yaitu Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Tolikara, Jayawijaya, dan Pegunungan Bintang. Kawasan pegunungan yang rawan longsor dan kawasan dataran yang rawan banjir perlu ditangani secara komprehensif dengan meneliti, mengembangkan, serta mengendalikan sumber daya air yang ada.

Kabupaten Yahukimo berbatasan langsung dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya, yaitu:

- Utara : berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, Yalimo, Keerom.
- Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Asmat dan Boven Digu.
- Timur : berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Barat : berbatasan dengan Kabupaten Nduga

Kabupaten Yahukimo memiliki luas wilayah 17.152 km². Ibu Kota Kabupaten Yahukimo adalah Sumohai, Distrik Dekai. Distrik Kurima merupakan daerah terluas, yaitu 605 km² atau 3,53 dari luas wilayah Kabupaten Yahukimo. Sedangkan Distrik Duram merupakan distrik dengan wilayah terkecil, yakni 100 km² atau 0,58 persen dari Kabupaten Yahukimo. Sedangkan jarak terjauh yang harus ditempuh dari ibu kota kecamatan ke ibu kota Kabupaten Yahukimo yaitu Kota Dekai adalah Distrik Talambo (230 km).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Kabupaten Yahukimo ditetapkan sebagai daerah Otonomi baru dengan ibukota Kabupaten yang berada di Sumohai. Namun karena kondisi infrastruktur dan fasilitas fisik Distrik Sumohai belum memungkinkan, maka pusat pemerintahan untuk sementara dipindahkan ke Distrik Dekai yang di rencanakan memiliki luas 8 km x 7 km

Secara Administratif Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo nomor 05 Tahun 2006, Kabupaten Yahukimo terbagi dalam 51 Distrik yaitu Distrik Dekai, Obio, Suru-suru, Wusama, Amuma, Musaik, Pas ema, Hogio, Mugi, Soba, Werima, Tangma, Ukha, Penggema, Kosarek, Nipsan, Ubahak, Pronggoli, Walma, Yahuliambut, Hereapini, Ubahili, Talambo, Puldama, Endomen, Holuon, Lolat, Soloikma, Sela, Korupun, Langda, Bomela, Suntamon, Seradala, Sobaham, Kabianggama, Kwelamdua, Kwikma, Sumo, Silimo, Samenage, Kurima, Anggruk, Nalca, Ninia, Yogosem, Kayo, Hilipuk, Duram, Kono dan Dirwemna serta 1 (satu) Kelurahan dan 518 kampung.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Yahukimo Menurut Distrik
Tahun 2024



Sumber : Yahukimo dalam Angka 2023

Distrik Kurima merupakan distrik terluas (3,53 persen dari Luas Kabupaten Yahukimo) dari 51 distrik di Kabupaten Yahukimo yaitu sekitar 605 km². Sedangkan Distrik Duram merupakan Distrik dengan wilayah terkecil (0,58 persen dari Luas Kabupaten Yahukimo) yakni sekitar 100 km². Sedangkan jarak terjauh yang harus tempuh dari ibukota kecamatan ke ibukota Kabupaten Yahukimo (Kota Dekai) yakni sekitar 230 km (Distrik Talambo).

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Yahukimo

No.	Distrik/Kecamatan	Ibukota Distrik	Jumlah Desa	Luas (Km2)	Persentase Luas (%)
1	Kurima	Obalma	22	605	3,53
2	Anggruk	Yahulikma	12	440	2,57
3	Ninia	Ninia	10	390	2,27
4	Dekai	Dikai	12	520	3,03
5	Obio	Munu	13	470	2,74
6	Suru-suru	Suru-Suru	13	431	2,51
7	Wusama	Apdagma	11	360	2,10
8	Amuma	Amuma	13	376	2,19
9	Musaik	Usaregeik	10	452	2,64
10	Pasema	Pasema	7	320	1,87
11	Hogio	Paima	8	374	2,18
12	Mugi	Kosihun	20	311	1,81
13	Soba	Soba	6	162	0,94
14	Werima	Lokon	14	360	2,10
15	Tangma	Tangma	10	340	1,98
16	Ukha	Ukha	11	360	2,10
17	Panggema	Pontenikma	13	530	3,09
18	Kosarek	Kosarek	11	350	2,04
19	Nipsan	Nipsan	8	341	1,99
20	Ubahak	Ubahak	17	432	2,52
21	Pronggoli	Siwikma	8	330	1,92
22	Walma	Walma	8	341	1,99
23	Yahuliambut	Sobundalek	5	340	1,98
24	Hereapini	Hereapini	11	361	2,10
25	Ubalih	Wanam	11	340	1,98
26	Talambo	Lelambo	9	342	1,99
27	Puldama	Puldama	8	272	1,59
28	Endomen	Endomen	8	343	2,00
29	Kona	Kona	5	126	0,73
30	Dirwemna	Dirwemna	5	170	0,99
31	Holuwon	Holuwen	7	190	1,11
32	Lolat	Wamin	8	341	1,99
33	Soloikma	Weaven	8	344	2,01
34	Sela	Sela	16	354	2,06
35	Korupun	Korupun	12	230	1,34
36	Langda	Alirji	9	341	1,99
37	Bomela	Bolema	6	350	2,04
38	Suntamon	Sutamon	8	331	1,93
39	Seradala	Seradala	9	340	1,98
40	Sobaham	Yalisomon	13	331	1,93
41	Kabianggama	Kabianggama	7	329	1,92
42	Kwelamdua	Debula	10	331	1,93
43	Kwikma	Silakma	10	351	2,05

No.	Distrik/Kecamatan	Ibukota Distrik	Jumlah Desa	Luas (Km2)	Persentase Luas (%)
44	Hilipuk	Hilapuk	7	180	1,05
45	Duram	Duram	6	100	0,58
46	Yogosem	Yogomen	7	150	0,87
47	Kayo	Kayo	7	198	1,15
48	Sumo	Sumo	11	350	2,04
49	Silimo	Silimo	20	536	3,13
50	Samenage	Samenage	9	361	2,10
51	Nalca	Nalma	9	225	1,31
KABUPATEN YAHUKIMO			518	17.152	100,00

Sumber : Yahukimo dalam Angka 2025

4.1.2. Topografi Daerah

Sebagai satu kesatuan dari Pulau Papua, Kabupaten Yahukimo memiliki karakteristik topografi yang cukup bervariasi. Berdasarkan kelerengan atau kemiringan lahan dan ketinggian tempat, karakteristik topografi Kabupaten Yahukimo didominasi oleh lahan-lahan dengan tingkat kemiringan lebih dari 40 persen dan memiliki ketinggian antara 50-3.000 mdpl.

Kabupaten Yahukimo mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi dari mulai bergelombang (2-18 persen), berbukit (18-45 persen), hingga bergunung-gunung (>45 persen). Wilayah yang cocok digunakan sebagai tempat hunian adalah dataran, dimana kabupaten ini hanya memiliki wilayah dataran seluas 2,146 persen dari seluruh luasan kabupaten. Jika dilihat secara rinci, luas lahan berdasarkan tingkat kemiringan dapat dilihat sebagai berikut:

- Tingkat kemiringan 0-8 persen: 22,35%
- Tingkat kemiringan 8-15 persen: 7,60%
- Tingkat kemiringan 15-25 persen: 14,96%
- Tingkat kemiringan 25-40 persen: 24,84%
- Tingkat kemiringan >40 persen: 30,26%

Kabupaten Yahukimo terdiri dari 2 bagian yang sangat berbeda karakteristiknya yaitu:

- Daerah pegunungan yang terjal dengan ketinggian antara 3000– 4500 m di atas permukaan laut.

- Daerah dataran, yang terdiri dari daerah rawa dan bergambut dengan ketinggian hanya mencapai 200 m di atas permukaan laut.

Kabupaten dengan luas wilayah $\pm 17,152 \text{ Km}^2$ ini memiliki topografi wilayah yang cukup bervariasi antara 100 meter sampai dengan 3.000 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayahnya terdiri dari pengunungan (dataran tinggi) yang dilalui beberapa aliran sungai dan anak sungai yang berasal dari bukit dan gunung yang ada di sekitarnya. Dataran rendah yang ada di Kabupaten Yahukimo berupa hutan dan rawa berair yang meliputi distrik Dekai, Seradala, Sumo, Obio, dan Suru-suru.

Kawasan ibukota kabupaten berada di Dekai yang terletak di dataran rendah Sumohai sehingga relatif datar dengan kelerengan antara 2-8 persen. Titik terendahnya terdapat pada bagian barat daya kota di km 6 dengan ketinggian $\pm 50 \text{ m}$ di atas permukaan laut. Sedangkan titik tertinggi ($> 70 \text{ m}$ di atas permukaan laut) terdapat di 1,5 km arah barat laut dari km 8 poros jalan Seradala.

4.1.2. Geologi Daerah

Sebagian besar wilayah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, terdiri dari alluvial, litosol, podsolik dan batu karang metaforfik sebagai bagian dari lempengan Pasifik yang terdesak tanggul-tanggul Baltik. Penyebaran dari jenis-jenis tanah adalah sebagai berikut:

- Di daerah lembah terdapat jenis tanah alluvial, jenis tanah ini ditandai dengan kadar zat organik yang rendah, kejenuhan basa sedang sampai tinggi dengan daya absorbs, permeabilitas rendah sedang kepekaan tanah terhadap tingkat erosi sangat kecil;
- Di daerah perbukitan terdapat tanah litosol, jenis tanah ini ditandai dengan sifat keasaman, kandungan zat organik, kejenuhan basa, daya absorbs, permeabilitas dan kandungan zat unsure hanya sangat bervariasi, serta kepekaan terhadap erosi besar;
- Di daerah dataran tinggi umumnya terdapat jenis podsolit coklat. Jenis tanah ini ditandai oleh tingkat keasaman bervariasi antara asam di bagian atas dan semakin ke bawah semakin basa. Bahan organiknya rendah, kejenuhan basa tinggi, serta kepekaan terhadap erosi tinggi. Penggunaan tanah ini umumnya untuk hutan atau kayu-kayuan.

4.1.3. Hidrologi Daerah

Kondisi hidrologi Kabupaten Yahukimo terbagi dalam dua jenis berdasarkan letaknya yaitu air permukaan dan air bawah permukaan. Air permukaan berupa air sungai, danau, dan rawa-rawa. Dilihat dari sistem Daerah Aliran Sungai (DAS), diketahui bahwa Kabupaten Yahukimo memiliki DAS Eilandenlorenz yang dibagi menjadi ke dalam 4 sub DAS yaitu Sub DAS Brazza, Sub DAS Lorenz, Sub DAS Vriendchaps, dan Sub DAS Eilanden Hulu. Ibukota kabupaten terletak di sebelah Timur Sungai Brazza dan anak-anak sungainya (antara lain Sungai Bonto). Sungai Brazza mengalir dari arah timur laut menuju ke arah barat daya dari kota ini. Sungai Brazza dan anak-anak sungainya ini merupakan sumber daya air yang perlu dikembangkan dan dikelola guna memenuhi hajat hidup masyarakat sekitar. Meskipun begitu, lokasi Sungai Brazza yang merupakan sungai perennial dapat meluap sehingga mudah menyebabkan banjir, erosi, maupun sedimentasi di Kota Logpon.

4.1.4. Klimatologi

Rata-rata curah hujan per tahun di Dekai adalah 1.800-6.500 mm/tahun dengan 3-12 bulan basah dan 0-1 bulan kering. Sedangkan suhu udara rata-rata mencapai 20-33°C.

4.1.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Yahukimo yang paling dominan adalah belukar dan hutan, sedangkan yang paling sedikit adalah kolam dan rawa. Distribusi penggunaan lahan di kabupaten ini adalah sebagai berikut:

- Kampung dan halaman;
- Padang rumput;
- Ladang huma;
- Rawa seluas;
- Lahan sementara;
- Hutan rakyat;
- Lain-lain merupakan hutan belukar.

Penggunaan lahan di Kabupaten Yahukimo sebagian besar masih berupa kawasan hutan, kawasan hutan ini terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, hutan perlindungan dan pelestarian, serta areal penggunaan lainnya. Penggunaan lahan fisik seperti permukiman dan sarana prasarana

di wilayah ini masih sedikit sekali proporsinya terhadap luas total keseluruhan.

4.2 Kondisi Demografi Daerah

Sebagai bagian dari Papua, Kabupaten Yahukimo memiliki karakteristik kependudukan yang cukup unik dimana hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pencapaian pembangunan daerah.

4.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu daerah memcerminkan kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Pelayanan tersebut dapat meliputi beberapa aspek, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan lainnya, Oleh karena itu data demografi dan pertumbuhannya memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan suatu Daerah, pelayanan dan pembangunan masyarakatnya untuk beberapa tahun ke depan. Sebagai Gambaran pertumbuhan penduduk Kabupaten Yahukimo berikut merupakan Hasil Proyeksi Laju pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua 2020-2025 untuk Kabupaten Yahukimo;

Tabel 1.2
Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Yahukimo,
Tahun 2020 - 2025

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (Ribu Jiwa)	PERUBAHAN (Ribu Jiwa)
1	2	3	5
1	2020	350,14	0
2	2021	356,03	5,89
3	2022	361,65	5,62
4	2023	367,11	5,46
5	2024	372,40	5,29
6	2025	377,49	5,09

Sumber; Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Papua 2020-2035, Hasil Sensus proyeksi Penduduk 2020

Sedangkan Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo tahun 2024, total penduduk di Kabupaten Yahukimo mencapai 356.021 jiwa, terdiri atas 192.939 laki-laki dan 163.082 perempuan. Dengan demikian, rasio jenis kelamin di wilayah ini sebesar 118,31, yang berarti terdapat sekitar 118 hingga 119 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Selengkapnya berikut disajikan Gambaran singkat demografi kabupaten Menurut Distrik di Kabupaten Yahukimo di tahun 2024:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Persentase Penduduk, dan
Kepadatan Menurut Distrik di Kabupaten Yahukimo,
Tahun 2024

NO.	DISTRIK/KECAMATAN	JUMLAH (RIBU)	RASIO JENIS KELAMIN	PERSENTASE PENDUDUK	KEPADATAN per KM
1	Kurima	16.478	112,78	4,63%	27,24
2	Musaik	6.745	123,34	1,89%	14,92
3	Dekai	17.694	123,13	4,97%	34,03
4	Obio	6.249	131,96	1,76%	13,3
5	Pasema	5.275	129,05	1,48%	16,48
6	Amuma	13.409	123,60	3,77%	35,66
7	Suru-Suru	4.221	135,42	1,19%	9,79
8	Wusama	7.369	119,12	2,07%	28,34
9	Silimo	14.045	121,32	3,95%	26,2
10	Ninia	7.298	114,84	2,05%	18,71
11	Holuwon	5.365	109,57	1,51%	28,24
12	Lolat	6.749	117,15	1,90%	19,79
13	Langda	7.151	112,07	2,01%	20,97
14	Bomela	5.709	118,15	1,60%	16,31
15	Suntamon	4.543	113,69	1,28%	13,73
16	Sobaham	7.346	122,47	2,06%	22,19
17	Korupun	10.439	112,13	2,93%	45,39
18	Sela	13.431	116,84	3,77%	37,94
19	Kwelamdua	7.785	120,16	2,19%	23,52
20	Anggruk	5.256	115,06	1,48%	11,95
21	Panggema	7.028	115,12	1,97%	13,26
22	Walma	4.382	108,07	1,23%	12,85
23	Kosarek	6.559	120,47	1,84%	18,74
24	Ubahak	12.172	118,96	3,42%	28,18
25	Nalca	7.187	120,87	2,02%	31,94
26	Puldama	5.928	107,93	1,67%	21,79
27	Nipsan	3.668	129,82	1,03%	10,76
28	Samenage	6.120	118,03	1,72%	16,95
29	Tangma	5.681	115,27	1,60%	16,71
30	Soba	4.732	125,12	1,33%	29,21
31	Mugi	7.865	113,26	2,21%	25,29
32	Yogosem	4.295	123,23	1,21%	28,63
33	Kayo	4.467	125,15	1,25%	22,56
34	Sumohai	6.632	129,40	1,86%	18,95
35	Hogio	6.447	121,32	1,81%	17,24

NO.	DISTRIK/KECAMATAN	JUMLAH (RIBU)	RASIO JENIS KELAMIN	PERSENTASE PENDUDUK	KEPADATAN per KM
36	Ukha	5.825	114,94	1,64%	16,18
37	Werima	7.408	115,16	2,08%	20,58
38	Soloikma	6.409	119,19	1,80%	18,63
39	Seradala	5.084	131,20	1,43%	14,95
40	Kabianggama	5.555	117,84	1,56%	16,88
41	Kwikma	5.738	113,15	1,61%	16,35
42	Hilipuk	7.242	107,51	2,03%	40,23
43	Yahuliambut	4.942	122,41	1,39%	14,54
44	Hereapini	7.098	103,50	1,99%	19,66
45	Ubalih	7.638	120,50	2,15%	22,46
46	Talambo	3.734	137,68	1,05%	10,92
47	Pronggoli	6.454	101,12	1,81%	19,56
48	Endomen	5.457	126,24	1,53%	15,91
49	Kona	3.048	128,49	0,86%	24,19
50	Duram	5.264	118,88	1,48%	52,64
51	Dirwemna	3.405	106,87	0,96%	20,03
	YAHUKIMO	356.021	118,33	100%	20,76

Sumber : Yahukimo dalam angka 2025

Berdasarkan Tabel 1.3, penduduk paling banyak terkonsentrasi di Kecamatan Kurima 16.478 jiwa, Kecamatan Dekai 17.694 jiwa, dan Kecamatan Silimo yaitu sebanyak 14.045 jiwa. Sedangkan Kecamatan Kona merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu hanya sebesar 3.048 jiwa.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin ini sangat penting artinya untuk melihat keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan akan mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga serta keberlangsungan reproduksi.

Pada tahun 2024 rasio jenis kelamin di Kabupaten Yahukimo menunjukkan angka di atas 100 yaitu 118,31. Artinya jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Yahukimo 18,31 persen lebih banyak dari penduduk wanita, dengan kata lain untuk setiap 100 penduduk wanita terdapat 118 penduduk laki-laki. Dilihat sebarannya per-distrik, terlihat bahwa distrik yang mempunyai sex ratio paling tinggi adalah Distrik Talambo yaitu sebesar 137,68, sedangkan Distrik Pronggoli merupakan distrik terendah nilai sex rasionya, yaitu sebesar 101,12.

4.2.2. Kondisi Pembangunan Demografis Kabupaten Yahukimo tahun 2024

Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Yahukimo tercermin pada angka IPM yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya, Sebagai indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM Yahukimo mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2021–2024, dengan rata-rata perkembangan sebesar 0,61 poin. Peningkatan IPM terbesar terjadi selama kurun waktu 2021–2024 yakni mengalami peningkatan 1,04 poin pada tahun 2022, dan terendah Sebesar 0,11 poin pada tahun 2021. Dengan nilai IPM sebesar 51,97 pada tahun 2024, maka status IPM Kabupaten Yahukimo meningkat 0,78 poin jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Usia Harapan Hidup (UHH)

UHH adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikasi ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Semakin tinggi Usia Harapan Hidup, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

Ditinjau secara komparatif waktu Usia Harapan Hidup Kabupaten Yahukimo dalam 4 tahun terakhir terus meningkat dari tahun 2020–2024. Pada tahun 2020 Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Yahukimo adalah 65,93 tahun, meningkat sebanyak 0,12 tahun pada tahun 2021, meningkat lagi sebanyak 0,26 tahun pada tahun 2022, dan pada tahun 2022 angka ini terus meningkat hingga mencapai 66,51 pada tahun 2024. Artinya secara rata-rata penduduk di Kabupaten Yahukimo mampu bertahan hidup sampai 66 tahun. Angka ini relatif tinggi untuk sebuah kabupaten pemekaran. Bila dilihat secara kompetitif sesama wilayah pemekaran, Usia Harapan Hidup Kabupaten Yahukimo

relative tinggi, karena sudah berada diatas rata-rata angka Provinsi Papua yang sebesar 66,23 tahun.

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Rata-rata lama sekolah merupakan lamanya Pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang. Sebagai gambaran, seseorang yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SD maka ia telah

memiliki lama sekolah sebanyak 6 tahun. Rata-rata lama sekolah dapat juga digunakan untuk monitoring pelaksanaan Program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang dicanangkan. Artinya untuk melewati target program tersebut maka rata-rata lama sekolah harus sudah mencapai 9 tahun.

perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Yahukimo selama kurun waktu lima tahun. Selama kurun waktu tersebut, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Yahukimo mengalami peningkatan. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 sebesar 4,35 tahun, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,34 pada tahun 2023. Dengan kata lain penduduk di Kabupaten Yahukimo rata-rata usia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan sampai kelas 4 SD. Kenaikan angka rata-rata lama sekolah tersebut mengalami perlambatan bila dibandingkan selama tahun 2020 hingga 2024 yang meningkat sebesar 0,09. Angka ini masih jauh dari target program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Hal ini masih terkait dengan pendidikan yang belum dinikmati dengan baik. Hal yang sama juga dialami oleh daerah-daerah di sekitar Kabupaten Yahukimo.

d. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun

ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam Pada 2020-2024, harapan lama sekolah di Kabupaten Yahukimo selalu meningkat dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 0,1075 tahun. Pada tahun 2020 harapan lama sekolah Kabupaten Yahukimo sebesar 7,61 tahun yang mengindikasikan bahwa seorang anak diharapkan akan menempuh pendidikan selama 7 tahun (kelas 1 SMP). Kondisi ini terus meningkat meskipun tidak begitu besar hingga pada Tahun 2023 angka harapan lama sekolah menunjukkan 8,05 yang berarti seorang anak diharapkan dapat menempuh Pendidikan hingga kelas 2 SMP.

e. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Sebagai indeks komposit, IPM mengandung beberapa komponen yang merepresentasikan kondisi aspek yang terkait. Komponen ekonomi direpresentasikan melalui aspek pengeluaran. Besarnya pengeluaran yang berbeda-beda di setiap distrik, desa bahkan setiap orang, maka angka pengeluaran diwujudkan dalam nilai rata-rata Kabupaten. Berbeda dengan komponen Kesehatan dan pendidikan, komponen pengeluaran ini sangat sensitif terhadap waktu maupun kebijakan berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. pengeluaran suatu rumah tangga diukur melalui survei terhadap pengeluaran rumah tangga dan individu selama seminggu, sebulan dan setahun yang lalu. Walaupun dalam kenyataannya pengeluaran yang meningkat tidak bisa serta merta dimaknai dengan meningkatnya kesejahteraan secara empirik, hal itu dikarenakan adanya unsur inflasi/kenaikan harga yang juga cenderung naik dari waktu ke waktu. Namun demikian setidaknya dari besarnya rata-rata pengeluaran riil ini sedikit banyak memenuhi syarat realibilitas sebagai komponen ekonomi. Secara umum pada periode 2020 - 2024 pengeluaran per kapita Kabupaten Yahukimo mengalami peningkatan dari Rp 5.351.000,00 pada tahun 2023 menjadi Rp 5.747.000,00 pada tahun 2024.

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Yahukimo beserta komponennya pada tahun 2016-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen-nya tahun 2016-2024
Kabupaten Yahukimo

NO	TAHUN	UHH	HLS	RLS	PENGELUARAN PERKAPITA (Ribu/Orang/Tahun)	IPM	PERTUMBUHAN IPM
1	2016	65,19	7,54	3,99	4.248	47,13	-
2	2017	65,32	7,55	4,00	4.554	47,95	0,82
3	2018	65,52	7,59	4,01	4.737	48,51	0,56
4	2019	65,80	7,60	4,02	5.030	49,25	0,74
5	2020	65,93	7,61	4,26	4.875	49,37	0,12
6	2021	66,05	7,62	4,27	4.895	49,48	0,11
7	2022	66,31	7,80	4,28	5.101	50,52	1,04
8	2023	66,42	8,04	4,34	5.351	51,19	0,67
9	2024	66,51	8,05	4,35	5.747	51,97	0,78
Keterangan							
UHH = Usia Harapan Hidup							
HLS = Harapan Lama Sekolah							
RLS = Rata-rata Lama Sekolah							

5. Kondisi Ekonomi Kabupaten Yahukimo

5.1 Pertumbuhan Ekonomi

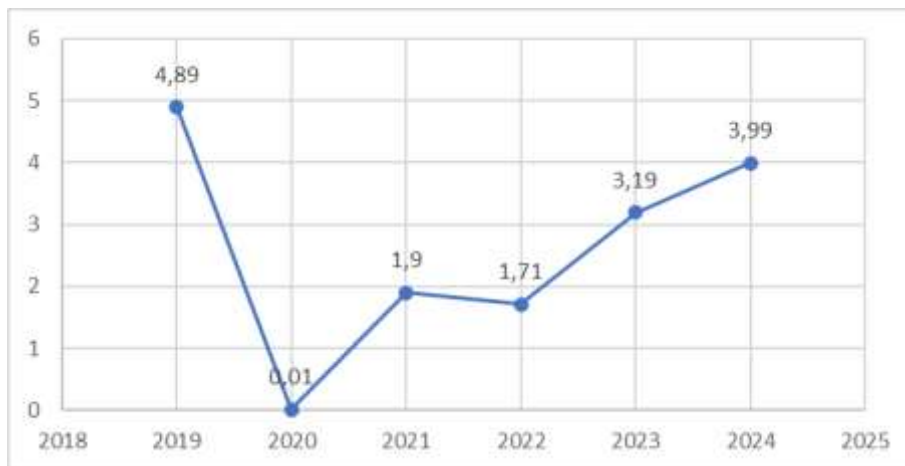
Salah satu indikator ekonomi dalam menganalisis perkembangan dan pembangunan ekonomi adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dimana perekonomian di Kabupaten Yahukimo pertumbuhan ekonomi yang cenderung berfluktuatif dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Melalui pertumbuhan ekonomi dapat dilihat perkembangan suatu perekonomian akibat penambahan kuantitas yang diproduksi dan bukan karena perubahan harga. Dalam pengertian makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan nilai PDRB yang ditunjukkan oleh perubahan nilai total PDRB tahun sebelumnya.

Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Yahukimo (persen), 2020–2024

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,18	-1,1	1,88	2,17	2,64	1,5

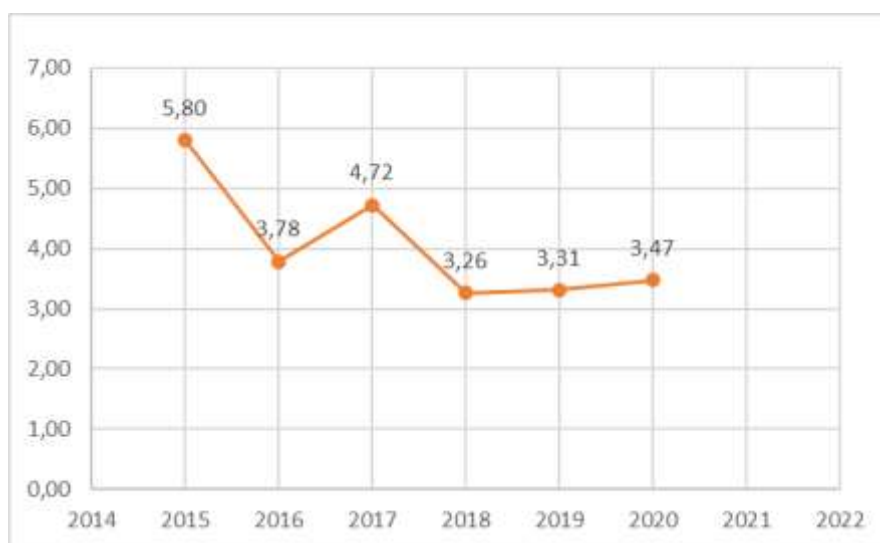
No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9
2	Pertambangan dan Penggalian	6,72	9,28	5,9	0,5	7,76	6,08
3	Industri Pengolahan	1,82	2,51	3,45	4,23	-0,61	1,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,69	0,41	2,4	-2,1	7,98	-1,1
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	6,47	1,12	3,37	1,67	2,06	3,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3	2,31	4,84	1,52	6,11	6,06
8	Transportasi dan Pengudangan	5,71	-10,9	3,67	9,07	7,6	1,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,05	0,93	2,09	0,7	1,74	3,34
10	Informasi dan Komunikasi	11,8	7,24	8.006	0,66	3,24	4,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,56	-2,38	4,76	1,18	11,7	3,62
12	Real Estat	4,32	1,84	3,19	1,2	2,15	2,66
13	Jasa Perusahaan	5,68	2,36	5,50	2,28	-0,44	1,17
14	Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,81	-0,4	-1,32	0,55	2,77	6,35
15	Jasa Pendidikan	6,42	-0,95	0,93	1,67	2,77	1,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,94	10,24	8,79	0,66	5,69	7,05
17	Jasa Lainnya	7,45	3,75	4,82	1,54	7,09	3,35
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,98	0,01	1,9	1,71	3,19	3,99

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Yahukimo Tahun 2019-2024 cenderung fluktuatif dengan penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh Pandemi COVID 19, dan peningkatan yang stabil terjadi dari tahun 2022 - 2024. Berdasarkan harga konstan 2010, perekonomian Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,99 persen, mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 3,19 persen. Pertumbuhan sektor ekonomi tertinggi pada tahun 2024 dicapai oleh sector Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan angka pertumbuhan 7,05%. Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Yahukimo berdasarkan laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan 2010 menurut lapangan usaha;

Grafik.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Yahukimo
Tahun 2019-2024

5.2 Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 82 (delapan puluh dua) kota di Indonesia yang mencakup 225-462 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH).

Grafik 1.2 Laju Inflasi Deflator Kabupaten Yahukimo
Tahun 2015-2020

Laju Inflasi Kabupaten Yahukimo secara kumulatif sudah terkendali selama periode lima tahun terakhir. Selama tahun 2015-2020, titik tertinggi sebesar 5,80 persen pada tahun 2015, dan menurun di tahun 2016 menjadi 3,78 persen. Namun di tahun 2017 terlihat meningkat kembali menjadi 4,72 persen dan kemudian mengalami penurunan kembali hingga tahun 2018 menjadi 3,26 persen, dan meningkat stabil 2 tahun berikutnya mencapai 3,47 persen pada tahun 2020.

5.3 PDRB

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Berikut Gambaran PDRB Kabupaten Yahukimo Menurut Lapangan Usaha;

Tabel 1.6
Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Yahukimo (Miliar Rupiah), 2020–2024

NO	Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
		Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1	2020	2.504,26	3,39%	1.527,28	0,02%
2	2021	2.620,74	4,65%	1.555,78	1,87%
3	2022	2.694,33	2,81%	1.582,38	1,71%
4	2023	2.900,32	7,65%	1.632,79	3,19%
5	2024	3.157,26	8,86%	1.697,99	3,99%

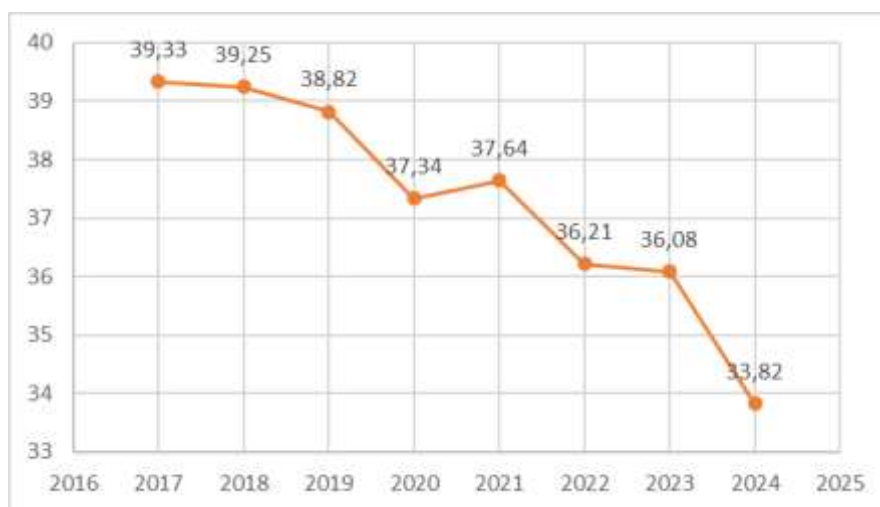
5.4 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan terhadap pemenuhan hak-hak dasar serta perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kesejahteraan di Kabupaten Yahukimo masih belum optimal dalam pencapaiannya, terlebih dalam pemerataannya. Sulitnya geografis wilayah yang dijangkau dengan infrastruktur perhubungan menjadikan permasalahan ini menjadi lebih kompleks.

Adapun pertumbuhan penduduk miskin di Kabupaten Yahukimo disajikan pada gambar dibawah ini;

Grafik 1.3
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Yahukimo Tahun 2017-2024



Di Kabupaten Yahukimo, peningkatan persentase penduduk di atas garis kemiskinan memang terjadi di setiap tahunnya, namun angka yang dicatat selama tahun 2017 sampai tahun 2024 terlihat kenaikan signifikan hanya terjadi pada tahun 2020 – 2021, hal ini disebabkan COVID 19 yang terjadi pada tahun 2020.

Selanjutnya jika dilihat dari grafik di atas jumlah penduduk miskin di Kabupaten Yahukimo selama tahun 2017-2024 terlihat mengalami trend penurunan yang mumpuni, khususnya pada tahun 2022 persentase kemiskinan menurun

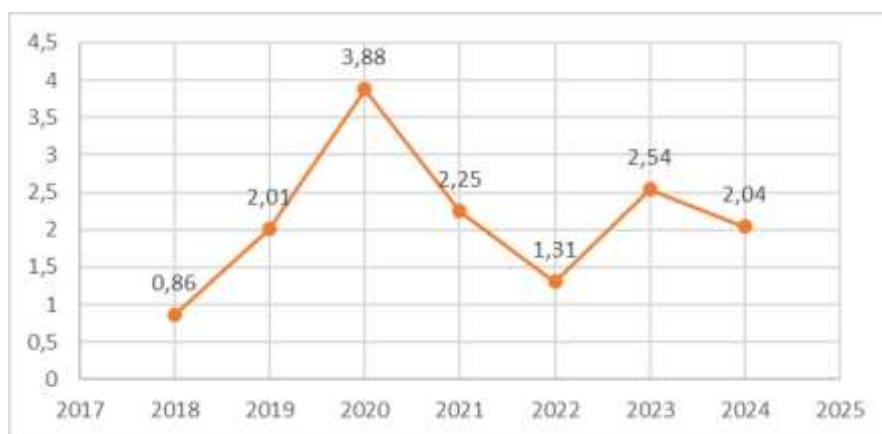
signifikan ke angka 36,21% dari tahun sebelumnya dan trend tersebut berlanjut dimana pada tahun 2024 persentase kemiskinan Kabupaten Yahukimo menurun ke titik paling rendah dalam kurun waktu 10 tahun ini ke angka 33,82%.

5.5 Pengangguran

Salah satu komponen penggerak ekonomi yang paling berpengaruh adalah tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Yahukimo dari tahun 2019-2023 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

Grafik 1.4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Yahukimo Tahun 2018-2024



Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Yahukimo sejak tahun 2018-2024 terlihat mengalami peningkatan. Jika dilihat pada gambar di atas, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Yahukimo tertinggi ada pada tahun 2020 dengan angka 3,88% dikarenakan pengaruh Pandemi COVID dan tingkat terendah terjadi pada tahun 2022 mencapai 1,31%. Pada tahun 2024 TPT Kabupaten Yahukimo ada pada angka 2,04% menurun jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada angka 2,54% pada tahun 2023.

6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan, yaitu urusan pemerintahan

absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo didukung oleh 32 Perangkat Daerah dan 51 Distrik/Kecamatan terdiri dari (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, (3) Urusan Pemerintahan Pilihan, (4) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, (5) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.7
Penyelenggaraan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Berdasarkan
Perangkat Daerah Pelaksana di Kabupaten Yahukimo

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	KODE OPD	NAMA OPD
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	Pendidikan	1.01.01.	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	1.02.01	Dinas Kesehatan
3	Kesehatan	1.02.02	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.01	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
6.	Kesatuan Bangsa dan Politik	1.06.01	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.06.02.	Satuan Polisi Pamong Praja
8.	Sosial	1.07.01	Dinas Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
9.	Tenaga Kerja	2.01.01	Dinas Tenaga Kerja
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
11.	Ketahanan Pangan	2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan
12.	Lingkungan Hidup	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.06.01.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
14.	Pemberdayaan Masyarakat	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	KODE OPD	NAMA OPD
15.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
16	Perhubungan	2.09.01	Dinas Perhubungan
17.	Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
18.	Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.12.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Pemuda Dan Olah Raga	2.13.01	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
20.	Kebudayaan Dan Pariwisata	2.16.01	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
21.	Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	2.17.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
22.	Pertanian Dan Perikanan	3.03.01	Dinas Pertanian Dan Perikanan
23.	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM	3.04.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM
24	Kehutanan	3.05.01	Dinas Kehutanan
25.	Pertambangan dan Energi	3.06.01	Dinas Pertambangan dan Energi
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
26	Sekretariat Daerah	4.01.03	Sekretariat Daerah
27	Sekretariat DPRD	4.01.04	Sekretariat DPRD
28	Keuangan	4.01.05	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD)
29.	Keuangan	4.01.05	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)
30.	Inspektorat	4.01.06	Inspektorat Daerah
31.	Keuangan	4.01.07	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
32.	Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	4.01.08	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
33.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.01.09	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34.	Distrik/Kecamatan	4.01.10	Distrik Kurima
35.	Distrik/Kecamatan	4.01.11	Distrik Anggruk
36	Distrik/Kecamatan	4.01.12	Distrik Ninia
37	Distrik/Kecamatan	4.01.13	Distrik Nalca
38	Distrik/Kecamatan	4.01.14	Distrik Sumo
39	Distrik/Kecamatan	4.01.15	Distrik Silimo
40	Distrik/Kecamatan	4.01.16	Distrik Samenage
41	Distrik/Kecamatan	4.01.17	Distrik Dekai
42	Distrik/Kecamatan	4.01.18	Distrik Suru-Suru
43	Distrik/Kecamatan	4.01.19	Distrik Wusama
44	Distrik/Kecamatan	4.01.20	Distrik Pasema
45	Distrik/Kecamatan	4.01.21	Distrik Mugi

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	KODE OPD	NAMA OPD
46	Distrik/Kecamatan	4.01.22	Distrik Obio
47	Distrik/Kecamatan	4.01.23	Distrik Werima
48	Distrik/Kecamatan	4.01.24	Distrik Soba
49	Distrik/Kecamatan	4.01.25	Distrik Tangma
50	Distrik/Kecamatan	4.01.26	Distrik Musaik
51	Distrik/Kecamatan	4.01.27	Distrik Amuma
52	Distrik/Kecamatan	4.01.28	Distrik Panggema
53	Distrik/Kecamatan	4.01.29	Distrik Kosarek
54	Distrik/Kecamatan	4.01.30	Distrik Nipsan
55	Distrik/Kecamatan	4.01.31	Distrik Ubahak
56	Distrik/Kecamatan	4.01.32	Distrik Yahuliambut
57	Distrik/Kecamatan	4.01.33	Distrik Pronggoli
58	Distrik/Kecamatan	4.01.34	Distrik Puldama
59	Distrik/Kecamatan	4.01.35	Distrik Walma
60	Distrik/Kecamatan	4.01.36	Distrik Endomen
61	Distrik/Kecamatan	4.01.37	Distrik Holuwon
62	Distrik/Kecamatan	4.01.38	Distrik Lolat
63	Distrik/Kecamatan	4.01.39	Distrik Sela
64	Distrik/Kecamatan	4.01.40	Distrik Korupun
65	Distrik/Kecamatan	4.01.41	Distrik Langda
66	Distrik/Kecamatan	4.01.42	Distrik Bomela
67	Distrik/Kecamatan	4.01.43	Distrik Suntamon
68	Distrik/Kecamatan	4.01.44	Distrik Seradala
69	Distrik/Kecamatan	4.01.45	Distrik Kabianggama
70	Distrik/Kecamatan	4.01.46	Distrik Kwelamdua
71	Distrik/Kecamatan	4.01.47	Distrik Sobaham
72	Distrik/Kecamatan	4.01.48	Distrik Hogio
73	Distrik/Kecamatan	4.01.49	Distrik Hereapini
74	Distrik/Kecamatan	4.01.50	Distrik Ukha
75	Distrik/Kecamatan	4.01.51	Distrik Ubalihi
76	Distrik/Kecamatan	4.01.52	Distrik Talambo
77	Distrik/Kecamatan	4.01.53	Distrik Soloikma
78	Distrik/Kecamatan	4.01.54	Distrik Kwikma
79	Distrik/Kecamatan	4.01.55	Distrik Hilipuk
80	Distrik/Kecamatan	4.01.56	Distrik Yogosem
81	Distrik/Kecamatan	4.01.57	Distrik Duram
82	Distrik/Kecamatan	4.01.58	Distrik Kayo
83	Distrik/Kecamatan	4.01.59	Distrik Kono
84	Distrik/Kecamatan	4.01.60.	Distrik Dirwemna
85	Perencanaan	4.02.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7. Susunan Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan organisasi atau Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Yahukimo sebanyak 32 perangkat daerah yang terdiri dari:

- a) Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo merupakan sekretariat Daerah Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo merupakan Sekretariat DPRD Tipe A mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Yahukimo serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c) Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo merupakan Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d) Badan Daerah Kabupaten Yahukimo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan;
 - 3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan;
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- e) Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang kebudayaan;

- 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 5) Dinas Pertanian, dan perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Pertanian dan perikanan;
- 6) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- 7) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
- 8) Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda, dan Olah Raga;
- 9) Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- 10) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 12) Dinas Sosial, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
- 13) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 14) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 15) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- 17) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan daerah;
- 18) Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang
- 19) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Satpol PP;
- 20) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
- 21) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan pariwisata
- 22) Dinas Pertambangan dan Energi tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertambangan dan Energi
- 23) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Susunan Pejabat Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 adalah:

1. Bupati Kepala Daerah : Didimus Yahuli, SH, MH
2. Wakil Bupati Kepala Daerah: Esau Miram, S.IP
3. Sekretaris Daerah : Redison Manurung, S.Pd.,M.si, CGCAE, CAPG, CIAPA
4. Pejabat PPKD : Mathius, S.Hut, M.Si
5. Plt Inspektorat Daerah : Musa Heseleo, S.IP., M.H
6. Ketua DPRD : Yosias Mirin, S.H

Bupati dan Wakil Bupati menjabat untuk masa bakti 2021 sampai dengan 2026 sedangkan ketua DPRD menjabat untuk masa bakti 2020 sampai dengan 2025.

Pada Tahun 2024 Roda pemerintahan Kabupaten Yahukimo dijalankan oleh 2.670 orang yang mayoritas di dominasi oleh laki-laki yaitu 1.922 orang, sedangkan sisanya sebanyak 748 orang adalah perempuan. Jika melihat tingkat Jabatannya, maka sebagian besar ASN di Kabupaten Yahukimo adalah Jabatan Pelaksana yaitu sebesar 41,65 persen dan Jabatan Fungsional yaitu 40,97 persen sedangkan sisanya terdiri dari asn dengan jabatan Struktural sebesar 17,38%.

Sedangkan Jumlah anggota Kepolisian Resor Yahukimo pada tahun 2024 sebanyak 183 anggota. Dari keseluruhan anggota tersebut, tersebar di dua lokasi

berbeda yakni di Kecamatan Kurima dan Kecamatan Dekai. Kecamatan Dekai sebanyak 172 anggota, dan Kecamatan Kurima sebanyak 11 anggota. Sedangkan untuk anggota TNI (Koramil), di Kabupaten Yahukimo terdapat 62 personil TNI. Dari keseluruhan anggota ini, juga tersebar di dua kecamatan, Kecamatan Dekai dan Kecamatan Kurima.

Berikut di sampaikan tabulasi jumlah PNS menurut Jabatan sebagai gambaran sumber daya ASN yang sedang menjalankan operasional pemerintah Daerah di Kabupaten Yahukimo;

Tabel 1.8
Jumlah dan rincian ASN Menurut Jabatan
Kabupaten Yahukimo, Tahun 2024

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
1	Dinas Pendidikan	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	18	14	59	91
	- Guru			589		589
2	Dinas Kesehatan	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	19	0	124	143
	- Tenaga Kesehatan			472		472
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	5	0	30	35
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	15	0	44	59
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	10	0	10	20
6	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	1	0	6	7
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	12	0	14	26
8	Dinas Sosial	Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	11	0	14	25
9	Dinas Tenaga Kerja	Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	10	0	9	19
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	8	0	12	20
11	Dinas Ketahanan Pangan	Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	12	0	9	21
12	Dinas Lingkungan Hidup	Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	10	0	25	35
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	13	0	14	27
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	14	0	27	41

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	9	0	8	17
16	Dinas Perhubungan	Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	11	0	18	29
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	7	0	11	18
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	9	0	10	19
19	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	8	0	8	16
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Pilihan	9	0	12	21
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	11	0	6	17
22	Dinas Pertanian Dan Perikanan	Pilihan	14	7	41	62
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM	Pilihan	15	0	24	39
24	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	53	0	106	159
25	Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	29	0	27	56
26	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	17	0	29	46
27	Inspektorat Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	6	12	21	39
28	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	13	0	18	31
29	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	8	0	31	39
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	10	0	16	26
31	Distrik Kurima	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	8	9
32	Distrik Anggruk	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	3	0	12	15
33	Distrik Ninia	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	7	8
34	Distrik Nalca	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	5	6
35	Distrik Sumo	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	0	8	8
36	Distrik Silimo	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	3	0	17	20
37	Distrik Samenage	Fungsi Penunjang	1	0	4	5

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
		Urusan Pemerintahan				
38	Distrik Dekai	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	5	0	17	22
39	Distrik Suru-Suru	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	0	9	9
40	Distrik Wusama	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	6	7
41	Distrik Pasema	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	10	11
42	Distrik Mugi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2	0	10	12
43	Distrik Obio	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	0	6	6
44	Distrik Werima	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	0	12	12
45	Distrik Soba	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	0	3	3
46	Distrik Tangma	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	2	3
47	Distrik Musaik	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	9	10
48	Distrik Amuma	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	6	7
49	Distrik Panggema	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	8	9
50	Distrik Kosarek	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	4	5
51	Distrik Nipsan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	5	6
52	Distrik Ubahak	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	3	4
53	Distrik Yahuliambut	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	0	5	5
54	Distrik Pronggoli	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2	0	6	8
55	Distrik Puldama	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	0	3	3
56	Distrik Walma	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2	0	6	8
57	Distrik Endomen	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	2	3
58	Distrik Holuwon	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	7	8
59	Distrik Lolat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2	0	2	4
60	Distrik Sela	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2	0	7	9

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
61	Distrik Korupun	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	0	6	6
62	Distrik Langda	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2	0	2	4
63	Distrik Bomela	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	2	3
64	Distrik Suntamon	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	7	8
65	Distrik Seradala	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	3	0	6	9
66	Distrik Kabianggama	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	4	5
67	Distrik Kwelamdua	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	10	11
68	Distrik Sobaham	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	0	11	11
69	Distrik Hogio	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	10	11
70	Distrik Hereapini	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	4	5
71	Distrik Ukha	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	3	4
72	Distrik Ubalih	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	4	5
73	Distrik Talambo	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	0	1
74	Distrik Soloikma	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2	0	9	11
75	Distrik Kwikma	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	4	5
76	Distrik Hilipuk	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	3	4
77	Distrik Yogosem	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2	0	7	9
78	Distrik Duram	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	4	5
79	Distrik Kayo	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	3	4
80	Distrik Kono	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	0	8	8
81	Distrik Dirwemna	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	0	5	6
82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	18	0	8	26
TOTAL ASN			464	1094	1112	2670

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Yahukimo (Data Olahan 2024)

8. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan salah satu titik tolak perumusan kebijakan pembangunan yang antara lain harus dapat memetakan permasalahan pembangunan daerah dengan tepat. Analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan memberi fokus yang baik dalam perumusan kebijakan pembangunan, khususnya dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Untuk itu, analisis isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Yahukimo tidak dapat dilepaskan dengan permasalahan dan prioritas pembangunan Provinsi Papua dan Nasional.

1) Isu Strategis dalam sudut Pandang RPJMD

Isu strategis pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 secara komprehensif mencakup 5 (lima) isu strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah;

Isu strategis ini didasarkan pada kondisi ketertinggalan yang dialami oleh hampir semua wilayah di Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan dan jaminan ketersediaan gizi yang memadai. Dalam bidang pendidikan, beberapa indikator menunjukkan bahwa daya saing pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas masih terkendala oleh berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan pokok misalnya adalah; cakupan sekolah pada daerah dengan aglomerasi rendah belum optimal, tenaga pendidik belum berkualitas dan merata, penerapan kurikulum sesuai dengan standar belum maksimal terutama di wilayah adat Lapago dan Mepago dan Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas masih relatif rendah.

Dalam bidang kesehatan, kondisinya hampir sama dengan bidang pendidikan, Akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas masih menjadi faktor krusial di hampir semua wilayah Papua yang ditandai dengan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) walaupun terlihat secara rerata mengalami peningkatan di Papua, Demikain juga terkait stunting (pendek) perlu mendapatkan perhatian di Papua karena capaiannya yang berada diatas rata-rata Indonesia. Fakta lainnya lagi adalah Angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini termasuk dalam kategori tinggi, dimana data terakhir tahun 2017 menunjukan terjadi kematian ibu sebesar 289 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan

cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Papua secara keseluruhan masih rendah, hanya 41,52% di tahun 2017, termasuk juga kunjungan K4 lengkap bagi ibu hamil sangat rendah hanya sebesar 40,90% pada tahun 2017. Sedangkan dari sumber daya kesehatan yang tersedia, terlihat bahwa sebaran puskesmas di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016 belum terdistribusi secara merata ke 29 kabupaten/kota. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah rasio dokter terhadap penduduk, dimana pada tahun 2016 hanya mencapai 24,13 dokter per 100.000 penduduk. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab juga belum maksimalnya penanganan penyakit malaria di Provinsi Papua, sehingga sampai tahun 2017 tercatat API Provinsi Papua paling tinggi di Indonesia yaitu 59 per 1.000 penduduk, yang cenderung meningkat bila dibandingkan tahun 2014. Dalam hal kasus HIV/AIDS terindikasi jumlah kasus kematian akibat virus mematikan tersebut terus mengalami kenaikan, hingga pada tahun 2017 tercatat ada 1.883 kematian akibat HIV/AIDS.

Dalam bidang gizi, Papua seringkali masih dibayangi oleh adanya ancaman kelaparan di beberapa wilayah yang disebabkan oleh kondisi alam ataupun masalah rantai distribusi pangan yang kurang lancar serta beberapa penyebab eksternal lain. Oleh sebab itu, Upaya penciptaan ketahanan pangan merupakan prasyarat untuk kedaulatan pangan. Kondisi Ketahanan pangan di Papua sampai dengan saat ini masih rendah. Untuk itu pengembangan dan peningkatan produksi komoditi pangan lokal dan membudayakan konsumsi pangan lokal perlu ditingkatkan di Papua untuk mencapai kedaulatan pangan dan menciptakan ketahanan pangan. Masalah pangan di Papua merupakan salah satu penyebab gizi buruk kondisi stunting di Papua.

- Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan;
Kondisi kurang stabilnya kemanan serta demokrasi lokal yang kurang kondusif seringkali mengganggu aktivitas pembangunan daerah di beberapa wilayah di Provinsi Papua. Beberapa rumusan permasalahan yang patut diperhatikan kedepan terkait dengan isu strategis Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan adalah;
 - a. Masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM
 - b. Tingkat kesadaran terhadap HAM masih rendah
 - c. Masih tingginya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum

- d. Masih tingginya konflik sosial
- e. Belum optimalnya pelayanan keagamaan antar umat
- f. Menurunnya toleransi kehidupan beragama
- g. Belum maksimalnya toleransi antar umat beragama
- h. Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah
- i. Belum optimalnya kehidupan berdemokrasi secara baik
- j. Masih banyaknya kasus money politic dalam berdemokrasi
- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik;
 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik menjadi satu isu krusial yang menjadi penyokong penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkualitas. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Disiplin ASN meningkat secara signifikan dan Pemerintah Provinsi Papua telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini memberikan indikasi bahwa upaya keras dalam memperbaiki tatakelola pemerintahan selama lima tahun terakhir, telah berada dalam arah yang benar. Meskipun demikian capaian selama periode sebelumnya masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Harus ada upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tatakelola pemerintahan ini. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Pada periode 2013-2018 telah dilakukan Reformasi Birokrasi, dilakukan dengan langkah-langkah peningkatan disiplin bagi ASN, peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan penerapan e-Government Provinsi Papua pada perencanaan dan penganggaran daerah, pendapatan daerah, investasi daerah, serta penerapan sistem Tunjangan Kinerja Daerah. Kesemuanya itu, diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik dan penanggulangan korupsi. Oleh karena itu langkah-langkah yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, demikian pula perubahan mind-set, culture-set dan pengembangan budaya kerja akan dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Demikian juga upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantas korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan

berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan akan dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Reformasi Birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara Pemerintah, Provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua secara murni dan konsekuen.

- Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan;

Pertumbuhan ekonomi menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan yang dilakukan oleh multistakeholder di Papua. Hal ini terkait dengan penciptaan kue pembangunan yang akan didistribusikan kepada seluruh masyarakat Papua. Patut dijadikan pelajaran bahwa proses pembangunan ekonomi pada masa lalu telah menciptakan pertumbuhan yang memadai namun belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh masyarakat. Penyebabnya antara lain, belum cukup inklusifnya pertumbuhan ekonomi yang tercipta yang diandai dengan rendahnya pelibatan tenaga kerja lokal serta tumpuan pertumbuhan yang berbasis sektor ekstraktif yang cenderung merusak lingkungan hidup.

Pada masa mendatang perlu dinisiasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan berbasis komoditas dan karakteristik lokal didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian perlu penguatan supra dan infrastruktur bagi percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada sektor-sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan perikanan dan kelautan, Disamping itu perhatian juga harus diarahkan pada pengembangan sektor-sektor non ekstraktif dan ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah berlipat seperti; sektor industri perdagangan dan pariwisata.

- Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan Dan Konektivitas Antar Wilayah Dan Kabupaten Serta Peningkatan Kualitas Ekosistem Dan Jasa Lingkungan;

Isu strategis pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah dan kabupaten serta peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan penting artinya dalam konteks pembangunan di Papua. Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten bisa jadi

disebabkan oleh tidak memadainya infrastruktur wilayah yang mengakibatkan mahalnya investasi bagi pengembangan wilayah disamping belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor. Disamping itu, pengelolaan potensi suatu wilayah seringkali berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, kedepan harus dicari terobosan pengembangan potensi wilayah yang selaras dengan peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.

2) Isu Strategis dalam sudut Pandang Daerah

Selain itu berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, hingga isu-isu strategis regional, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Yahukimo yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Yahukimo dijabarkan sebagai berikut:

- **Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Wilayah**

Infrastruktur memiliki peranan yang penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Komponen infrastruktur yang meliputi transportasi, komunikasi dan informatika, energi dan listrik, perumahan dan permukiman, dan air merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama pembangunan nasional, terutama dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Peran infrastruktur dalam bidang sosial budaya maupun lainnya berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu wilayah di Kabupaten Yahukimo. Sebagai wilayah yang berada di Pegunungan Tengah Papua, maka urgensi infrastruktur dasar menjadi titik vital keberhasilan pembangunan daerah. Sebagai contoh, infrastruktur transportasi berperan penting dalam pergerakan orang, barang, dan jasa dari satu lokasi ke lokasi lain di seluruh penjuru dunia, sementara peran jaringan komunikasi dan informatika memungkinkan pertukaran informasi secara cepat (real time). Peran keduanya sangat penting dan saling melengkapi baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi.

Agenda pembangunan nasional kelima yakni "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar" mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur daerah sangat penting untuk mengembangkan

perekonomian daerah. Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu wilayah yang memiliki wilayah terpencil, terluar, dan termiskin terutama di daerah pedalaman yang sangat jauh dari pusat pemerintahan maupun perkotaan. Oleh karena itu, fokus dalam peningkatan infrastruktur pembangunan menjadi hal urgent dalam membangun Kabupaten Yahukimo secara menyeluruh.

- **Perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs)**

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempunyai prinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kesusahan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan social.

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Yahukimo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada dasarnya ditujukan untuk pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini dan masa mendatang sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan masa depan.

Upaya pencapaian SDGs di Kabupaten Yahukimo memang memiliki tantangan yang berat. Selain dari kondisi geografis wilayah, berbagai permasalahan menyangkut potensi SDM juga masih belum mumpuni dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, program pembangunan yang harus "digenjot" akselerasinya adalah peningkatan kualitas pendidikan untuk menjadikan angkatan kerja Yahukimo berdaya saing dan mampu memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan daerahnya.

- **Peningkatan Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup**

Pembangunan daerah dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup sudah menjadi sorotan dunia dan bahkan menjadi isu strategis internasional dalam pencapaian SDG's. Kestinambungan lingkungan hidup akan memberikan dampak positif bagi kehidupan generasi mendatang karena efek negatif dari kerusakan alam sangat tinggi dan berkepanjangan Terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Yahukimo yang sudah memiliki "cacat" pada pengelolaan lingkungan hidupnya sehingga membawa implikasi pada meluasnya titik-titik rawan bencana alam.

Pengantisipasi perlu dilaksanakan untuk menjaga kontinuitas pembangunan berdasarkan ekonomi berkelanjutan agar kondisi lingkungan hidup dapat terjaga. Pemerintah Kabupaten Yahukimo harus memiliki program-program prioritas untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan mempertahankan kebaikan alam dengan cara seperti membatasi aktivitas pertambangan, membatasi penebangan pohon terutama yang ilegal logging, sosialisasi terkait pembukaan lahan kepada masyarakat, dan sebagainya.

Implementasi RTRW yang telah dirumuskan juga menjadi penting untuk diperhatikan konsistensinya. Upaya untuk pembangunan RTRW Yahukimo akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Namun jika sebaliknya, maka akan berakibat adanya degradasi lingkungan hidup yang berimplikasi pada kerugian masyarakat di masa yang akan datang.

- **Akselerasi Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat**

Rendahnya mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Yahukimo menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Dalam era globalisasi ini, persaingan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat mulai mengarah pada persaingan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat harus terus dipacu dengan berbagai terobosan dalam mengembangkan system pendidikan yang mampu pemeratakan dan meningkatkan kualitas Pendidikan penduduk di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo.

Masyarakat yang mandiri dan berdaya saing saja tidak cukup untuk melaksanakan pembangunan daerah secara optimal, melainkan daya dukung kesehatan masyarakatlah yang menjadi titik tolak dalam setiap efektivitas kegiatan. Kesehatan masyarakat merupakan faktor dominan untuk menuju efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah karena tingkat kesehatan akan menentukan produktivitas kinerja seseorang. Pemerintah Kabupaten Yahukimo akan selalu meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Kesehatan dengan menambah kuantitas maupun kualitas para tenaga kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Yahukimo dapat meningkat dari waktu ke waktu.

- **Tingginya Angka Kemiskinan**

Kabupaten Yahukimo tercatat sebagai kabupaten yang memiliki angka kemiskinan cukup besar hingga mencapai 38,82 persen pada tahun 2024. Kondisi kemiskinan

ini tersebar pada seluruh distrik di Kabupaten Yahukimo. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan melakukan terobosan-terobosan di setiap tahun anggaran agar target pencapaian pembangunan daerah tercapai. Ketertinggalan Kabupaten Yahukimo selain karena kemiskinan, juga memiliki faktor-faktor lain, seperti;

- Minimnya sumber daya pangan yang mengakibatkan beberapa kampung di Kabupaten Yahukimo mengalami krisis pangan (kelaparan) sehingga mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal akibat kelaparan;
 - Kondisi masyarakat daerah terpencil dimana lebih dari 80 persen tinggal di pegunungan yang minim sarana dan prasarana wilayah serta menghuni di sekitar lereng-lereng yang sulit diakses. Aksesibilitas daerah umumnya hanya dapat dijangkau dengan pesawat terbang jenis cesna dan Pilatus dimana hanya terdapat beberapa lapangan terbang rumput dengan Panjang landasan 350-500 meter di wilayah Kabupaten Yahukimo;
 - Masyarakat masih menganut sistem pertanian tradisional dan cenderung berpindah-pindah (nomaden), hidup dengan budaya peramu, serta kebutuhan hidup hanya dicukupi dengan mencari makanan yang disediakan oleh alam.
- **Optimalisasi Pergerakan Perekonomian Daerah**

Perekonomian merupakan penggerak sekaligus fokus utama dari tujuan pembangunan daerah sehingga pemerataan ekonomi masyarakat dapat menjadi pemicu utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun bagi Kabupaten Yahukimo, sampai saat ini perekonomian mikro (masyarakat) masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Papua. Potensi sumber daya alam yang begitu besar masih kurang dioptimalkan untuk mengangkat perekonomian masyarakat Kabupaten Yahukimo. Potensi alam berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, pertambangan, hingga pariwisata dapat menjadi sektor unggulan jika pemanfaatannya dilakukan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itulah, Pemerintah Kabupaten Yahukimo harus mulai menata kembali, menilik, serta merealisasikan perencanaan di bidang perekonomian agar ke depannya produktivitas masyarakat lebih optimal dalam mengolah sumber daya alam.

- **Perwujudan Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi**
Good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk

mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Dalam good governance mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Mewujudkan Good Governance (tata pemerintahan yang baik) secara menyeluruh memiliki cakupan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga/lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat yang mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun pemerintahan tersebut yaitu pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan.

Penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance secara universal diyakini sebagai prinsip dasar yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima kepada public menjadi suatu tujuan utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, peningkatan dan perbaikan tatanan birokrasi menjadi suatu hal mutlak yang harus diwujudkan.

Aparatur pemerintahan sebagai subyek dari pembangunan reformasi birokrasi harus menjadi titik tolak dalam program pencapaian good governance. Peningkatan sumber daya aparatur dari segi kualitas dan pembentukan struktur organisasi dengan tata laksana kelembagaan yang efektif dan efisien menjadi prioritas dalam mengembangkan kapasitas pemerintah serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil akhir yang diharapkan dari prinsip good governance and clean government adalah terciptanya pemerintahan yang baik (clean government) dan pelayanan publik yang semakin baik (good and clean public service). Bila semua itu terwujud, maka konflik kepentingan yang selama ini dikedepankan hingga menghambat perjalanan dan gerak Langkah pembangunan Kabupaten Yahukimo dapat diminimalisir.

9. Sistematika Penyusunan LKJ

Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pencapaian sasaran strategis organisasi yang berkaitan dengan Visi dan Misi organisasi melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Sistematika Laporan Kinerja Kabupaten Yahukimo tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2024 dan ringkasan dari masing-masing Bab adalah sebagai berikut;

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Visi dan Misi Kabupaten Yahukimo

Salah satu hal terpenting dalam perencanaan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang dengan berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan di tangani selama lima tahun kedepan. Dengan hal itu dalam perencanaan pembangunan dirumuskanlah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan daerah. Dengan adanya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran maka akan tergambarkan dengan jelas arah pembangunan daerah sehingga akan semakin di pahami bagaimana pembangunan yang akan dilakukan dalam lima tahun kedepan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam menjalankan amanat publik, yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki menuju apa yang ingin diwujudkan, Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Yahukimo, serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah di sampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, Namun demikian, visi RPJMD Kabupaten Yahukimo tahun 2021-2026 tidak dapat disusun terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2005-2025 pada periode ke 4. Dimana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam menjabarkan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Oleh karenanya, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026, mengacu pula pada visi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2005-2025, yaitu:

~~"Membangun"~~ *"Mewujudkan Yahukimo yang Sejahtera dan Berdaya Saing"*

Dimana upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Yahukimo tahun 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Memberdayakan Ekonomi Masyarakat;
2. Meningkatkan Daya Saing Masyarakat;
3. Mengembangkan Infrastruktur Dasar yang Memadai;
4. Melestarikan Lingkungan Dan Budaya Masyarakat Yang Selaras Dan Harmonis Dalam Suasana Multi Kultur.

Selain itu Visi RPJMD juga harus melihat dinamika pembangunan di Kabupaten Yahukimo yang direpresentasikan melalui permasalahan daerah dan isu-isu strategis pembangunan selama ini. Dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2005-2025, serta memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang teridentifikasi sebelumnya, maka visi pembangunan Kabupaten Yahukimo untuk periode 2021-2026 adalah:

~~"Membangun"~~ *"Mewujudkan Yahukimo Yang Baru,
Aman, Damai, Sehat, Cerdas, Dan Berintegritas"*

Visi ini menyiratkan ultimate goal pembangunan Yahukimo kepada pendirian yaitu:

- a. Kembalikan Kabupaten Yahukimo dalam kasih dan kedamaian;
- b. Membangun Yahukimo dengan kasih dan kedamaian;
- c. Yahukimo baru, yang damai sejahtera, beriman, bermartabat, terhormat, terintegritas, dan maju.

Terdapat beberapa kata kunci terkait dengan visi RPJMD Kabupaten Yahukimo 2021-2026 yaitu membangun dengan hati, yang baru, aman, damai, sehat, cerdas dan berintegritas. Lebih jauh makna yang terkandung dalam visi tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Membangun Dengan Hati.** Merupakan kegiatan pembangunan dengan menyertakan dan mengimplementasikan unsur-unsur didalamnya yang memuliakan cinta kasih, penamaan nilai-nilai sosial, norma-norma Susila dan sopan santun, rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab, menghargai kearifan lokal, serta ada kepekaan terhadap suara kecil, lemah, tersisih dan terpinggirkan sebagai perwujudan dari the option for

the poor yang harus dijadikan sebagai kunci interpretasi atas situasi masyarakat dan juga menjadi perpektif untuk menilai keadilan.

- Yahukimo Yang Baru. Dalam terminologi bahasa Indonesia, kata baru dapat menunjukkan belum pernah ada sebelumnya atau belum pernah dilihat. Kedua arti ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu perwujudan yang tidak sama dengan sebelumnya karena mengalami perubahan. Dengan demikian, dalam konteks Yahukimo Baru dapat dimaknai sebagai perwujudan Yahukimo yang telah berubah, yang sudah tentu perubahannya ke arah yang lebih sejahtera, lebih inovatif dan lebih revolusioner atau menyeluruh.
- Yahukimo Yang Aman. Aman mempunyai arti bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung, tidak meragukan, tidak mengandung risiko, dan terhindar dari rasa takut. Dengan mengadopsi konsep aman tersebut dan argumentasi rasa aman dari Abraham Maslow (1970) maka Yahukimo Aman dapat bermakna sebagai perwujudan dari masyarakat Yahukimo yang secara fisik terlindungi dan bebas dari segala daya yang mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan seperti kriminalitas, kejahatan, perang, terorisme, penyakit, kerusakan dan bencana alam. Serta terlindungi secara psikis dari kondisi yang berpotensi mengganggu kejiwaan seperti dihina, direndahkan, difitnah, mengalami stres dan konflik.
- Yahukimo Yang Damai. Damai memiliki banyak arti, dan arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Konsep damai yang dimiliki setiap orang juga berbeda-beda menyesuaikan dengan lingkungan serta budayanya. Orang yang memiliki budaya berbeda terkadang juga tidak setuju dengan arti dari kata tersebut. Oleh karenanya kata damai sifatnya kontekstual, sesuai dengan penempatannya. Disini, Yahukimo Damai adalah perwujudan yang identik dengan suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, rukun, saling menghargai dan relasi yang setara antar individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkup tertentu.
- Yahukimo Yang Sehat. Kata sehat merujuk pada 2 (dua) keadaan yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Secara sederhana arti sehat jasmani, yaitu kesehatan yang berhubungan dengan badan atau tubuh seseorang. Atau bisa juga disebut orang yang bebas dari segala macam dan jenis penyakit dan kecacatan. Dalam arti orang yang tidak sakit dan cacat sesuai ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. Sedangkan, definisi sehat rohani, yaitu berhubungan dengan hati dan jiwa seseorang. Orang yang sehat secara rohani berarti tidak sakit hati atau memiliki perasaan bahagia, dan jiwa dalam

keadaan yang sehat. Sementara WHO mendefinisikan sehat adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi sehat itu bukan hanya sekedar kondisi dalam keadaan segar bugar, tetapi juga pikiran, sosial, ekonomi, serta religius. Dalam konteks Yahukimo Sehat lebih dimaknai sebagai suatu perwujudan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Akan tetapi, karena kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal, makanan, iklim, udara dan air bersih, orang disekitar termasuk keluarga, rekan kerja, pasangan, maka pandangan Yahukimo Sehat juga mengacu pada sehat sosial dan lingkungan.

- **Yahukimo Yang Cerdas.** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) salah satu arti kata cerdas adalah tajam berpikir. Orang cerdas tidak terpaku pada teori namun lebih terhadap pemahaman konsep. Bagi orang cerdas, mereka lebih mengutamakan logika dan pengetahuan yang didapat, dan teori digunakannya sebagai pendukung. Kemudian Howard Gardner (1983) mengatakan ada delapan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yaitu (1) kecerdasan linguistik; (2) kecerdasan matematik atau logika; (3) kecerdasan spasial, (4) kecerdasan kinetik dan jasmani, (5) kecerdasan musikal, (6) kecerdasan interpersonal, (7) kecerdasan intrapersonal, dan (8) kecerdasan naturalis. Kedelapan kecerdasan ini akan menghasilkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing tinggi, itulah yang dimaksud dengan Yahukimo Yang Cerdas. Dimana untuk melindungi kecerdasan masyarakat tidak menyimpang, maka harus didahulukan dengan perwujudan masyarakat Yahukimo yang memiliki kecerdasan religius, emosional, spritual dan budaya.
- **Yahukimo Yang Berintegritas.** Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Berdasarkan kamus kompetensi perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai agama, nilai moral, nilai masyarakat dan nilai kode etik di tempat dia bekerja). Berpedoman pada konsep-konsep pemikiran ini, Yahukimo Berintegritas adalah perwujudan dari suatu kondisi ketika seluruh aparatur pemerintah dan komponen masyarakat lainnya melakukan tindakan sesuai dengan nilai, aturan, budaya dan tugas yang diemban melalui keselarasan dan pengendalian untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk

mencapai kondisi tersebut, pembangunan integritas daerah ditempuh melalui pembangunan integritas individu, integritas organisasi, integritas pilar dan daerah.

Misi merupakan rumusan umum tentang program kerja yang akan dilakukan sebagai implementasi dari Visi yang telah direncanakan. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata, tetapi juga sebagai problem solving dalam pembangunan daerah Kabupaten Yahukimo selama periode 2021-2026 mendatang.

Sejalan dengan Misi yang menjadi janji politik Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yahukimo, maka sebagaimana visi yang telah ditetapkan dengan mensinergikan platform politik dan teknokratik, berikut perumusan rancangan teknokratik Misi RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 yang mengacu pada rumusan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 yang diselaraskan dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2005-2025 sebagai perwujudan pelaksanaan tahap keempat atau tahap terakhir dari RPJPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2005-2025 serta evaluasi RPJMD Kabupaten Yahukimo 2021-2026.

Tabel 2.1 Perumusan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 Secara Teknokratik

Misi RPJPD Kabupaten Yahukimo 2005-2025	Misi Politik Bupati/Wakil Bupati Terplih Periode 2021-2026	Misi Teknokratik Bupati/Wakil Bupati Terplih Periode 2021-2026
Misi 1: Memberdayakan Ekonomi Masyarakat	Misi 4: Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis Kecamatan dan Kampung Misi 7: Meningkatkan iklim-iklim usaha yang sehat dan membuka peluang untuk investor berinvestasi	Misi 3: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri, berkelanjutan dan inklusif berbasis potensi lokal
Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Masyarakat	Misi 2: Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, mengurangi angka kematian, meningkatkan sumber daya tenaga medis, mendidik masyarakat untuk hidup sehat dan bersih serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk menurunkan angka kematian Misi 3: Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas infrastruktur pada	Misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya Misi 6: Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas

Misi RPJPD Kabupaten Yahukimo 2005-2025	Misi Politik Bupati/Wakil Bupati Terplih Periode 2021-2026	Misi Teknokratik Bupati/Wakil Bupati Terplih Periode 2021-2026
	setiap jenjang pendidikan	
Misi 3: Mengembangkan Infrastruktur Dasar yang Memadai		Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Misi 4: Melestarikan Lingkungan Dan Budaya Masyarakat Yang Selaras Dan Harmonis Dalam Suasana Multi Kultur	Misi 1: Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Misi 5: Meningkatkan kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Misi 6: Membina dan meningkatkan kesadaran politik dan sosial kemasyarakatan	Misi 1: Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Misi 4: Meningkatkan Kesadaran Hukum, Politik, Sosial dan HAM Pada Masyarakat

Mengacu pada hasil rumusan teknokratik di atas, maka Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Yahukimo selama periode 2021- 2026 dapat disebutkan dengan penjelasannya masing-masing sebagai berikut;

- Misi 1 : Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
- Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya.
- Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal.
- Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran Hukum, Politik, Sosial dan HAM.
- Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.
- Misi 6 : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Yahukimo

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten yahukimo ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin di capai di masa datang.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dalam RPJMD adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, yang dirumuskan secara teknokratik melalui penelaahan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2005-2025, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional maupun Provinsi Papua dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Yahukimo yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Yahukimo sampai dengan Tahun 2026. Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan di atas, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Yahukimo selama periode 2021-2026 sebagai berikut;

Tabel 2.2 Perumusan Tujuan Dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Yahukimo 2021 – 2026

NO	MISI	NO	TUJUAN	NO	SASARAN
1	Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa	1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Yang Agamis Dan Rukun	1	Meningkatnya budaya religius
				2	Meningkatnya kerukunan umat beragama
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya	1	Meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan dan Kesehatan	1	Meratanya Akses Pendidikan

NO	MISI	NO	TUJUAN	NO	SASARAN
				2	Meningkatnya Derajat Kesehatan
		2	Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	1	Optimalnya pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				2	Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan
		3	Meningkatkan kualitas Kebudayaan dan Nilai Adat Istiadat dalam kehidupan	1	Meningkatnya efektifitas pengembangan dan pendidikan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat
				2	Meningkatnya pelestarian budaya asli Papua
			Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana
				2	Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)
3	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal	1	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	1	Meningkatnya Efektifitas Penyerapan Tenaga Kerja
				2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga kerja
		2	Meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal	1	Meningkatnya Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan
				2	Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian
				3	Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal
				4	Meningkatnya Koperasi Yang Berdaya saing
				5	Berkembangnya Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		3	Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah Secara Optimal	1	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan penduduk
				2	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi

NO	MISI	NO	TUJUAN	NO	SASARAN
		4	Meningkatkan Daya Saing Investasi Regional	1	Meningkatkan Daya Saing Daerah
				2	Berkembangnya Potensi-Potensi Investasi Berbasis Sumber Daya Ekonomi Lokal
		5	Menurunkan Ketimpangan Pendapatan	1	Meningkatnya Pendapatan Penduduk Golongan Menengah Kebawah Dalam Distribusi Pendapatan
				2	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Regional Antarkampung dan Distrik
4	Meningkatkan Kesadaran Hukum, Sosial, Politik dan HAM	1	Meningkatkan Kepedulian Terhadap Pemenuhan HAM	1	Meningkatnya Pemenuhan HAM
				2	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak
		2	Meningkatkan Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Umum	1	Menurunnya Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat
				2	Menurunnya Kriminalitas, Kejahatan dan Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat
		3	Mengoptimalkan Pelayanan Sosial Masyarakat	1	Optimalnya Pelayanan Terhadap PMKS
				2	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemberdayaan KAT
				3	Optimalnya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia
		4	Meningkatkan Kehidupan Berdemokrasi Dan Politik	1	Meningkatnya Kebebasan Hak Sipil
				2	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Politik
				3	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi
5	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	1	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat	1	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas penduduk antardistrik dan kampung
				2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas
				3	Meningkatnya tata Kelola pertanahan
				4	Optimalnya penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang
		2	Memaksimalkan Pembangunan Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya Kualitas Dan Baku Mutu Air
				2	Meningkatnya Kualitas

NO	MISI	NO	TUJUAN	NO	SASARAN
					Udara
				3	Meningkatnya Tutupan Lahan
6	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas	1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik
				2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
		2	Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan
				2	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		3	Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Pendataan Pembangunan Daerah	3	Meningkatnya Dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai Fungsinya
				1	Meningkatnya ketersediaan data makro dan mikro statistik pembangunan daerah
				2	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi daerah secara optimal
				3	Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepustakaan dan Arsip Daerah Yang Berkualitas
				4	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan
				5	Optimalnya Pengelolaan E government

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selain itu, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga telah diarahkan bahwa setiap tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan harus memuat indikator-indikator yang sederhana, terukur, reliabel dan tersedia, sebagai tolok ukur pengukuran kinerja pemerintahan daerah.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Yahukimo

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah- langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Rumusan **strategi** akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: (1) Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolakbelakang; (2) Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan; (3) Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan (4) Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Berikut ini disampaikan strategi-strategi pembangunan yang dikaitkan dengan masing-masing misi pembangunan, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Yang Agamis Dan Rukun	Meningkatnya budaya religius	Meningkatkan pembangunan rumah ibadah secara merata dan proposional

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Meningkatkan aktifitas peribadahan pada tempat-tempat ibadah
			Menumbuhkembangkan budaya religius dalam pendidikan keluarga dan sekolah
			Meningkatkan aktifitas-aktifitas keagamaan yang berkualitas
		Meningkatnya kerukunan umat beragama	Meningkatkan toleransi antara umat beragama
			Meningkatkan kesetaraan dalam kehidupan beragama
			Meningkatkan peranan dan kerjasama lembaga-lembaga keagamaan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya	Meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan dan Kesehatan	Meratanya Akses Pendidikan	Meningkatkan kesadaran keluarga untuk menyertakan anaknya dalam jenjang pendidikan formal
			Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh jenjang pendidikan secara merata
			Meningkatkan Budaya Baca, Tulis dan Berhitung Pada Masyarakat
		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatan kesadaran keluarga dalam kesehatan ibu dan anak, balita, dan pemenuhan gizi keluarga
			Mengoptimalkan gerakan 1000 hari pertama kehidupan
			Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah secara merata
	Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalnya pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatkan pembinaan bibit-bibit olahragawan yang berorientasi nasional
			Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional
			Menyelenggarakan even-even olahraga secara rutin dan terjadwal
		Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatkan kualitas Kebudayaan dan Nilai Adat Istiadat dalam kehidupan	Meningkatnya efektifitas pengembangan dan pendidikan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	Menumbuhkembangkan kelembagaan pemuda
			Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda pembangunan
			Menyelenggarakan pendidikan kebudayaan lokal pada semua jenjang pendidikan
			Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya pelestarian budaya asli Papua	Mengoptimalkan pelestarian dan pengembangan warisan dan nilai budaya, sejarah dan bahasa, seni dan tradisi lokal
			Meningkatkan ketahanan dan jati diri budaya masyarakat lokal
			Pemuliaan identitas budaya lokal dalam konsep globalisasi
	Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Merevitalisasi peran penting Keluarga Berencana dalam kehidupan masyarakat
			Mengembangkan sistem penyediaan pelayanan KB yang adil dan berkualitas
		Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
			Mengoptimalkan peranan kampung sebagai basis penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga
	Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar Menyediakan kebutuhan dasar yang berkualitas dan merata bagi masyarakat miskin dan rentan miskin

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan Miskin	Meningkatkan pelatihan kerja, pembinaan dan pendampingan usaha mandiri bagi masyarakat miskin dan rentan miskin
			Meningkatkan bantuan usaha mikro bagi masyarakat miskin dan rentan miskin
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Efektifitas Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatkan integrasi kurikulum pendidikan formal dan nonformal dengan kebutuhan lapangan kerja
			Mengembangkan pendidikan dan pelatihan siap kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
			Meningkatkan akses lulusan pendidikan formal dan nonformal dalam lapangan kerja
			Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman pada setiap lapangan usaha
			Meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal
			Mengoptimalkan implementasi upah minimum regional pada seluruh lapangan usaha secara terukur
	Meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal	Meningkatnya Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan produktifitas regional sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan rakyat
			Meningkatkan produktifitas regional sektor peternakan rakyat
			Meningkatkan produktifitas regional sektor perikanan rakyat
			Meningkatkan produktifitas regional sektor kehutanan rakyat
		Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	Menyediakan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal berbasis pertanian

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Meningkatkan pembinaan dan pendampingan usaha/industri mikro dan kecil yang mandiri dan berdaya saing
		Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal	Menumbuhkembangkan aktifitas perdagangan besar dan eceran guna menjaga kestabilan pasar kebutuhan masyarakat
			Mengoptimalkan potensi perdagangan besar dan eceran dalam menyerap produk- produk lokal
		Meningkatnya Koperasi Yang Berdaya saing	Merevitalisasi peranan koperasi sebagai soko guru/tulang punggung perekonomian rakyat
			Meningkatkan produktifitas nilai tambah koperasi
		Berkembangnya Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan daya saing pariwisata lokal
			Meningkatkan produktifitas nilai tambah pariwisata
	Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah Secara Optimal	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan penduduk	Meningkatkan kapasitas ketahanan pangan keluarga secara mandiri
			Mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal
		Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi	Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkualitas dan memadai
			Menjaga kestabilan harga-harga komoditi pangan yang terjangkau
	Meningkatkan Daya Saing Investasi Regional	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatkan efisiensi pasar hulu dan hilir
			Menciptakan berbagai inovasi produk yang memiliki potensi pasar
		Berkembangnya Potensi-Potensi Investasi Berbasis Sumber Daya Ekonomi Lokal	Menurunkan biaya transaksi investasi
			Meningkatkan upaya fasilitasi penanaman modal

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Menurunkan Ketimpangan Pendapatan	Meningkatnya Pendapatan Penduduk Golongan Menengah Kebawah Dalam Distribusi Pendapatan	Meningkatkan daya dukung sosial, politik dan keamanan dalam berinvestasi
			Meningkatkan redistribusi pendapatan yang berpihak pada golongan pendapatan menengah kebawah
			Meningkatkan pemerataan dalam kesempatan berusaha secara proporsional dan terukur
		Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Regional Antarkampung dan Distrik	Mendorong upaya penanggulangan ketimpangan antarwilayah yang lebih afirmatif, inovatif dan komprehensif
Meningkatkan Kesadaran Hukum, Sosial, Politik dan HAM	Meningkatkan Kepedulian Terhadap Pemenuhan HAM	Meningkatnya Pemenuhan HAM	Mengembangkan advokasi kebijakan HAM yang progresif dan massive
			Mengoptimalkan penanganan dan penanggulangan masalah masalah HAM
		Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam seluruh aspek pembangunan
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap anak
	Meningkatkan Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatkan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan bagi masyarakat
		Menurunnya Kriminalitas, Kejahatan dan Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat	-
	Mengoptimalkan Pelayanan Sosial Masyarakat	Optimalnya Pelayanan Terhadap PMKS	Meningkatkan pendampingan dan perlindungan sosial terhadap fakir miskin, anak jalanan, penyandang disabilitas, korban tindak kekerasan, dan ketunaan sosial
		Meningkatnya Pembinaan Dan Pemberdayaan KAT	Meningkatkan pembinaan KAT yang terpadu dan kontekstual Mengoptimalkan pemberdayaan KAT yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatkan Kehidupan Berdemokrasi Dan Politik	Optimalnya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia	Mengoptimalkan pembinaan dan perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia
		Meningkatnya Kebebasan Hak Sipil	Meningkatkan pemahaman politik dan demokrasi pada masyarakat
		Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Politik	
		Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi	
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas penduduk antardistrik dan kampung	Meningkatkan pembangunan jaringan transportasi di daerah- daerah terisolir
			Mengoptimalkan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana transportasi
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas	Meningkatkan ketersediaan sumber-sumber energi baru terbarukan
			Meningkatkan ketersediaan perumahan layak huni
			Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air dan irigasi
			Meningkatkan pembangunan jaringan komunikasi dan informasi yang terjangkau
			Mengembangkan infrastruktur kawasan sosial ekonomi
	Memaksimalkan Pembangunan Lingkungan Hidup	Meningkatnya tata Kelola pertanahan	Meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan
		Optimalnya penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang	Meningkatkan kualitas pengaturan dan pembinaan pemukiman dan tata ruang
		Meningkatnya Kualitas Dan Baku Mutu Air	Meningkatkan pengelolaan limbah terpusat dan setempat
		Meningkatnya Kualitas Udara	Mengendalikan pembangunan yang berpotensi mencemarkan udara

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Meningkatnya Tutupan Lahan	Mengoptimalkan tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik	Meningkatkan penerapan standar pelayanan publik pada setiap Unit Pelayanan Publik
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan
			Meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik
	Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
			Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran
		Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Meningkatnya Dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai Fungsinya	Meningkatkan kinerja aparatur seketariat dewan
	Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Pendataan Pembangunan Daerah	Meningkatnya ketersediaan data makro dan mikro statistik pembangunan daerah	Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pendataan makro mikro sektoral dan spasial
			Mengembangkan fasilitas pendataan digital
		Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi daerah secara optimal	Meningkatkan sarana dan prasarana persandian pemerintahan daerah
		Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepustakaan dan Arsip Daerah Yang	Meningkatkan kapasitas tenaga kepubstakaan dan arsip daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Berkualitas	
			Mengembangkan fasilitas perpustakaan dan pengarsipan secara digital
		Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendataan penduduk Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pendataan penduduk
		Optimalnya Pengelolaan E government	Meningkatkan pengembangan infrastruktur, kelembagaan, aplikasi, perencanaan dan kebijakan EGovernment

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah Kebijakan harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario- skenario selama periode 5 (lima) tahun. Kebijakan terdiri dari tema- tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah pembangunan untuk tiap tahunnya.

Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: (1) Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu; (2) Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat; (3) Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan (4) Mengarahkan pemilihan strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Rumusan prioritas strategi pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Yahukimo tahun 2021-2026, meliputi:

Tabel 2.4
Arah Kebijakan Strategis Pembangunan Kabupaten Yahukimo
Menurut Bidang

NO	BIDANG	ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS
----	--------	--------------------------

NO	BIDANG	ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS
1	Pembinaan Mental Spritual	Peningkatkan kualitas kehidupan beragama
2	Kesehatan	Peningkatkan derajat, akses dan sumber daya kesehatan
3	Pendidikan	Peningkatkan mutu, akses dan tata kelola pendidikan
4	Ekonomi	Peningkatkan ekonomi kerakyatan
5	Hukum Dan HAM	Penegakan supermasi hukum dan HAM
6	Sosial Politik	Peningkatkan kehidupan berdemokrasi
7	Pemerintahan	Peningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam memberi pelayanan yang prima
8	Investasi Dan Penanaman Modal	Peningkatkan iklim yang kondusif dan berkelanjutan dalam berinvestasi yang memanfaatkan potensi unggulan lokal
9	Pariwisata	Pengembangkan pariwisata yang berorientasi pasar
10	Pendapatan Asli Daerah	Peningkatkan kapasitas Pendapatan Asli Daerah
11	Kehutanan	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Hutan
12	Pertambangan Dan Energi	Peningkatkan produktifitas regional sektor pertambangan dan penggalian
13	Infrastruktur Dasar Dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Peningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur sosial ekonomi yang berkelanjutan

Adapun arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD Kabupaten Yahukimo dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut;

Tabel 2.5
Arah Kebijakan Strategis Pembangunan Jangka Menengah

NO	Bidang	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatkan kualitas kehidupan beragama	x	x	x	x	x
2	Peningkatkan derajat, akses dan sumber daya kesehatan	x	x	x	x	x
3	Peningkatkan mutu, akses dan tata kelola pendidikan	x	x	x	x	x
4	Peningkatkan ekonomi kerakyatan	x	x	x	x	x
5	Penegakan supermasi hukum dan HAM	x	x	x	x	x
6	Peningkatkan kehidupan berdemokrasi	x	x	x	x	x
7	Peningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam memberi pelayanan yang prima		x	x	x	x
8	Peningkatkan iklim yang kondusif dan berkelanjutan dalam berinvestasi yang memanfaatkan potensi unggulan lokal		x	x	x	x
9	Pengembangkan pariwisata yang berorientasi pasar			x	x	x

NO	Bidang	2022	2023	2024	2025	2026
10	Peningkatkan kapasitas Pendapatan Asli Daerah			x	x	x
11	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Hutan			x	x	x
12	Peningkatkan produktifitas regional sektor pertambangan dan penggalian				x	x
13	Peningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur sosial ekonomi yang berkelanjutan				x	x

Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah di Kabupaten Yahukimo maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan untuk lima tahun kedepan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah maka ditetapkan melalui Kawasan strategis Kabupaten Yahukimo.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kabupaten Yahukimo adalah : (1) Distrik Seradala, Mugi, Ninia, Soba, Anggruk dan Panggema sebagai kawasan strategis pertambangan; (2) Distrik Suru-Suru sebagai kawasan strategis pertanian lahan basah; (3) Distrik Ninia, Distrik Silimo, Distrik Anggruk, Distrik Samenage dan Distrik Nalca sebagai kawasan strategis dalam perikanan; dan (4) Distrik Dekai pembangunan dermaga di Logpon sebagai kawasan strategis dalam sarana prasarana penunjang perekonomian wilayah kabupaten, selain itu Distrik Dekai direncanakan sebagai Ibukota Kabupaten Yahukimo dan juga sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa. Sedangkan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup terdapat di Distrik Kurima, Mugi, dan Anggruk.

Kebijakan pengelolaan kawasan strategi di Kabupaten Yahukimo mencakup pengelolaan Kawasan Perkotaan, Pengelolaan Kawasan Pertanian, Pengelolaan Kawasan Pelabuhan, Pengelolaan Kawasan Perikanan, Pengelolaan Kawasan Pertambangan, dan Pengelolaan Kawasan Hutan. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Di Kota Dekai Pengelolaan Kawasan Perkotaan Dekai
2. Pengelolaan Kawasan Pertanian Pengelolaan Kawasan Pertanian Tanaman Lahan Basah (KPTLB) di Distrik Suru- Suru
3. Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Pengelolaan kawasan dermaga di Logpon Distrik Dekai
4. Pengelolaan Kawasan Perikanan di Distrik Ninia, Distrik Silimo, Distrik Anggruk, Distrik Samenage dan Distrik Nalca

5. Pengelolaan Kawasan Pertambangan di Distrik Ninia, Distrik Silimo, Distrik Anggruk, Distrik Samenage dan Distrik Nalca
 6. Pengelolaan Kawasan Hutan di sebelah utara Namrole
 7. Kerjasama Antar Wilayah di Pegunungan Tengah untuk mewujudkan pengembangan pelayaran sungai. Ketersedian transportasi sungai dapat menjadi alternatif untuk pergerakan masyarakat dan ekonomi. Dalam jangka panjang dapat memicu perkembangan di Yahukimo, khususnya dan Pegunungan Tengah pada umumnya.
4. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo

Program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab Program Unggulan Kepala Daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Program pembangunan daerah merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mendukung program strategis nasional, provinsi, dan daerah;
2. Mendukung pencapaian target standar pelayanan minimal;
3. Menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.

Selain sebagai upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga diarahkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kabupaten Yahukimo sebagai berikut;

1. Urusan Pendidikan
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pengembangan Kurikulum
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
2. Urusan Kesehatan

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Program Pengembangan Permukiman
 - Program Penataan Bangunan Gedung
 - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - Program Penyelenggaraan Jalan
 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Program Pengembangan Perumahan
 - Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh
 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - Program Penanggulangan Bencana
 - Program Penanggulangan Kebakaran
6. Urusan Sosial
- Program Pemberdayaan Sosial
 - Program Rehabilitasi Sosial
 - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - Program Penanganan Bencana

Program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab Program Unggulan Kepala Daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun target capaian Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati Yahukimo sebagai berikut;

A. Program Pembangunan Kabupaten Yahukimo Periode 2021-2026

1. Bidang Pembinaan Mental Spritual
 - Mengalokasikan dana sepuluh persen (10%) untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, yang secara teknis diatur melalui peraturan pemerintah sesuai dengan Denominasi Gereja yang ada di Kabupaten Yahukimo;
 - Membangun kemitraan yang baik dengan lembaga keagamaan yang ada di Kabupaten Yahukimo;
 - Memelihara toleransi umat beragama
2. Bidang Kesehatan
 - Meningkatkan pola hidup sehat bagi seluruh masyarakat Yahukimo;
 - Meningkatkan Gizi masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya nutrisi bagi anak dan orang dewasa;
 - Menempatkan tenaga medis pada setiap PUSKESMAS dan PUSTU dan pada beberapa Kecamatan strategis serta tenaga dokter;
 - Membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah hukum Kabupaten Yahukimo (Rumah Sakit, PUSKESMAS, PUSTU, Poli Klinik, dan Rumah Para Tenaga Medis).
3. Bidang Pendidikan
 - Membangun Pendidikan Usia Dini (PAUD) di seluruh distrik Kabupaten Yahukimo;
 - Meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan mencanangkan seluruh anak Yahukimo harus bisa membaca;
 - Meningkatkan operasional tunjangan tenaga pengajar dari tingkat PAUD sampai SLTA, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah terjauh, terluar, dan terpencil, tentunya secara berkala sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
4. Bidang Ekonomi
 - Sektor Pertanian;
 - Sektor Perkebunan;
 - Sektor Perikanan;
 - Sektor Perdagangan;
 - Sektor Kehutanan.
5. Bidang Hukum Dan HAM
 - Menegakkan supermasi hukum kepada seluruh masyarakat Yahukimo;

- Memberikan kepastian keamanan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif kepada pihak swasta untuk berusaha di wilayah Kabupaten Yahukimo.

6. Bidang Sosial Politik

- Menciptakan kerukunan antara umat beragama;
- Membangunan kemitraan yang baik dengan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Yahukimo;
- Membina dan menjalin hubungan kemitraan dengan Lembaga agama/gereja, Misionaris, LSM Nasional dan Internasional.

7. Bidang Pemerintahan

- Meningkatkan tata layanan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih (Good Government and Clean Government);
- Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, dengan meningkatkan insentif Pegawai Negeri Sipil.

8. Bidang Investasi Dan Penanaman Modal

- Memberikan ruang kepada pihak swasta lokal, Nasional, dan Internasional untuk berinvestasi di Kabupaten Yahukimo;
- Memberikan kemudahan pada sektor pajak yang memberatkan pihak swasta untuk berinvestasi di Kabupaten Yahukimo (Memberikan tanah untuk kurun waktu tertentu).

9. Bidang Pariwisata

- Mempromosikan potensi daerah Kabupaten Yahukimo pada sektor kebudayaan, seni, dan tari, panorama alam, pameran noken, koteka, tarian cenderawasih, dan lain- lain sesuai dengan asset budaya Kabupaten Yahukimo.

10. Bidang Pendapatan Asli Daerah

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui beberapa sector primadona yaitu pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan kependudukan serta retribusi dan pajak.

11. Bidang Kehutanan

- Menjadikan hutan Kabupaten Yahukimo sebagai paru- paru dunia;
- Membina dan menciptakan lapangan kerja bagi petani kayu; Proteksi penebangan liar di Kabupaten Yahukimo.

12. Bidang Pertambangan Dan Energi

- Memberikan ijin bagi investor lokal dan Nasional untuk turut mengelola hasil tambang yang ada di wilayah hukum Kabupaten Yahukimo;
- Mengolah hasil tambang permukaan seperti pasir, batu, dan sejenisnya dengan baik dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

13. Bidang Infrastruktur Dasar Dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

- Proteksi fasilitas perhubungan darat, laut, dan udara antara lain; jalan Nasional antara Kabupaten Yahukimo ke Kabupaten Nduga, Wamena, Pegunungan Bintang, Asmat, Boven Digoel, dan pembukaan akses jalan isolasi Dekai ke daerah pegunungan Ninia, Lolat, Holuwon, Selavaley, korupun, Langda, Bomela, Sumo, Silimo, Pasema Kurima sampai Wamena
- Bidang Pembinaan Mental Spritual.

B. Program Kebijakan Umum (Crash Program)

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan menjadi kuat dan mandiri serta pemberian insentif kepada kepala suku, ketua kerukunan ikatan, dan tua adat bagi setiap suku yang ada di Yahukimo;
2. Membangun kerja sama dengan kemitraan yang baik dengan Kepolisian dan TNI demi memberikan perlindungan keamanan kepada seluruh masyarakat Yahukimo.

C. Program Kebijakan Khusus (Afirmatif Program)

1. Proteksi dan penyediaan modal usaha serta pendampingan pada mamamama asli Papua;
2. Pemberdayaan pengusaha asli Papua;
3. Pembebasan biaya pendidikan bagi siswa orang asli Papua dari SD sampai SLTA, baik sekolah Negeri maupun Swasta dengan menerbitkan kartu Yahukimo cerdas.

D. Program Gebrakan 100 Hari Kerja

1. Pencanangan "YAHUKIMO BERIMAN" menggerakkan semua komponen masyarakat dan pemerintah serta pihak swasta untuk ikut aktif dalam melaksanakan kebersihan Kota Yahukimo menuju Yahukimo yang Bersih, Rindang, Indah, dan Nyaman (BERIMAN)
2. Proteksi dan pemberdayaan asrama mahasiswa bagi semua mahasiswa Kabupaten Yahukimo di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri Mencanangkan "YAHUKIMO BEBAS MIRAS DAN MILO" Sekaligus melantik "SATGAS ANTI MIRAS DAN MILO".

Dalam Periode ke-empat pelaksanaan RPJMD 2021 – 2026 ini, pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 115 program dan 308 kegiatan dengan jumlah anggaran belanja

sebesar Rp2.252.288.621.269,00 telah dialokasikan untuk membiayai program prioritas dan program penunjang pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Berikut merupakan Program dan Kegiatan yang telah di anggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024;

Tabel 2.6 Program Kegiatan Kabupaten Yahukimo
Tahun Anggaran 2024

NO	OPD	NO	URUSAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN		BIDANG PENDIDIKAN
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Pengelolaan Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
			Penyediaan Bantuan Fasilitas Dan Pembiayaan Bagi Pendidikan Di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota
		3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Dinas Kesehatan		BIDANG KESEHATAN
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penataan Organisasi
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp
			Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

NO	OPD	NO	URUSAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dekai		BIDANG KESEHATAN
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/Kota
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

NO	OPD	NO	URUSAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
			Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota
		4	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota
		5	Program Penataan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		6	Program Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Kawasan Permukiman Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		3	Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

NO	OPD	NO	URUSAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
7	Satuan Polisi Pamong Praja		BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
			Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8	Dinas Sosial		BIDANG SOSIAL
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		3	Program Rehabilitasi Sosial
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
9	Dinas Tenaga Kerja		BIDANG TENAGA KERJA
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
10	Dinas Pemberdayaan		BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	OPD	NO	URUSAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
	Perempuan dan Perlindungan Anak		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Perlindungan Perempuan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (Kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		4	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		5	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
11	Dinas Ketahanan Pangan		BIDANG KETAHANAN PANGAN
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
12	Dinas Lingkungan Hidup		BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

NO	OPD	NO	URUSAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
			Kabupaten/Kota
		3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		4	Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan
		3	Program Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
		3	Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat
		5	Program Pembangunan Kampung Dan Perkampungan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Perkampungan

NO	OPD	NO	URUSAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penataan Organisasi
		2	Program Pengendalian Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kb/Petugas Lapangan Kb (Pkb/Plkb) Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-Kb
		4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			BIDANG PERHUBUNGAN
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Pengelolaan Pelayaran Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
		3	Program Pengelolaan Penerbangan Pembangunan Bandar Udara Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi
		4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
16	Dinas Perhubungan	5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO	OPD	NO	URUSAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
17	Dinas Komunikasi dan Informatika		BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		BIDANG PENANAMAN MODAL
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		3	Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
19	Dinas Pemuda dan Olahraga		BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
		3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

NO	OPD	NO	URUSAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		BIDANG KEBUDAYAAN
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Pengembangan Kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		4	Program Pembinaan Sejarah Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		BIDANG PERPUSTAKAAN
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
22	Dinas Pertanian dan Perikanan		BIDANG PERTANIAN
		1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	OPD	NO	URUSAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Prasarana Pertanian
		4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		5	Program Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		BIDANG PERINDUSTRIAN
		1	Program Pengembangan Umkm Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
		2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
24	Sekretariat Daerah		SEKRETARIAT DAERAH
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	OPD	NO	URUSAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
			Penataan Organisasi
			Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
		2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			Administrasi Tata Pemerintahan
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
			Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah
		3	Program Perekonomian Dan Pembangunan
			Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
25	Sekretariat DPRD	1	SEKRETARIAT DPRD
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan Dprd
			Layanan Administrasi Dprd
		2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
			Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Dprd
			Pembahasan Kebijakan Anggaran
			Peningkatan Kapasitas Dprd
			Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
			Fasilitasi Tugas Dprd
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penataan Organisasi

NO	OPD	NO	URUSAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
		2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah
		3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
		4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		BIDANG KEUANGAN
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
		3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah
28	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		BIDANG KEUANGAN
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	OPD	NO	URUSAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
29	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		BIDANG KEPEGAWAIAN
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Kepegawaian Daerah
			Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn
			Mutasi Dan Promosi Asn
			Pengembangan Kompetensi Asn
30	Inspektorat Daerah		INSPEKTORAT DAERAH
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
			Pendampingan Dan Asistens
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		1	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
			Peningkatan Kapasitas Mha Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
		2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		3	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		4	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Pol
			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

NO	OPD	NO	URUSAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
			Kelembagaan Pemerintahan
		5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		6	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
		7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

5. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, oleh karena itu ditetapkan Peraturan Bupati No.1 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah Pelaksanaan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Yahukimo dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut;

Tabel 2.7
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA (2021 - 2026)					KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PELAKSANA
						2022	2023	2024	2025	2026		
		Indeks Kehidupan Beragama		Indeks		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
1	Meningkatnya budaya religius	Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah	Perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk	Per 1000 Penduduk		15.64	17.14	18.64	20.14	21.64	23.14	Sekretariat Daerah
		Persentase aktivitas keagamaan di lingkungan pemerintahan dan masyarakat	Jumlah kegiatan ibadah yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan dibandingkan jumlah ibadah sesuai ketentuan dikali 100 %	%		100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
2	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat beragama	Tingkat Kerukunan Umat Beragama berdasarkan data Kementerian Agama	Indeks	79	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5	79.5	Kantor Kesbangpol
		Indeks Pembangunan Manusia				50.542	51.204	51.866	52.528	53.19	53.19	
3	Meratanya Akses Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani	Tahun		4.04	4.05	4.06	4.07	4.08	4.08	Dinas Pendidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA (2021 - 2026)					KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PELAKSANA
						2022	2023	2024	2025	2026		
			pendidikan formal.									
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Kabupaten Yahukimo	Tahun		66.28	66.45	66.63	66.80	66.97	66.97	Dinas Kesehatan
		Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga		Indeks		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
5	Optimalnya pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet yang Berprestasi Nasional	Jumlah Atlet yang menerima penghargaan / dengan jumlah attet dalam pembinaan di kali 100%	Jumlah		1	1	1	1	1	1	Dinas Pemuda dan Olah Raga
6	Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Pemuda Yang Berperan Dalam Pembangunan	Jumlah pemuda yang aktif berperan dibagi dengan jumlah keseluruhan pemuda di kali 100%	%		100	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Indeks Pembangunan				46.3	46.35	46.4	46.45	46.5	46.5	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA (2021 - 2026)					KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PELAKSANA
						2022	2023	2024	2025	2026		
		Kebudayaan										
7	Meningkatnya efektifitas pengembangan dan pendidikan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Muatan Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan	Kegiatan dengan nilai muatan lokal dibandingkan keseluruhan kegiatan pendidikan di kali 100 %	%		100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
8	Meningkatnya pelestarian budaya asli Papua	Cakupan Budaya Benda dan tak Benda Yang Dilestarikan	Jumlah kegiatan pelestarian budaya benda dan tak benda	Jumlah		1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pertumbuhan Penduduk				0.96	0.97	0.98	0.99	1	1	
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Berencana Yang Aktif	Jumlah keluarga berencana yang aktif dibagi dengan jumlah keseluruhan keluarga berencana di kali 100%	%		30	31	32	33	34	34	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
10	Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Keluarga Sejahtera	Jumlah Keluarga yang termasuk klasifikasi Sejahtera	Jumlah		1472	1572	1672	1772	1872	1872	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Angka Kemiskinan		%		36.5	35.66	34.82	33.98	33.14	33.14	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA (2021 - 2026)					KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PELAKSANA
						2022	2023	2024	2025	2026		
11	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (IPM)	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.	Rupiah		4257.3	4405.9	4554.4	4702.9	4851.5	4851.5	Dinas Perindakop dan UKM
12	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan Miskin	Indek Kedalaman Kemiskinan	ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.	Indeks		Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Dinas Sosial
13	Meningkatnya Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP)	Persentase Kegiatan Yang Melibatkan OAP	Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang melibatkan Orang Asli Papua (OAP)	Persentase		100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Tingkat Kesempatan Kerja		%		99.55	99.65	99.75	99.85	99.90	99.90	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA (2021 - 2026)					KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PELAKSANA
						2022	2023	2024	2025	2026		
14	Meningkatnya Efektifitas Penyerapan Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja Yang Tersekap Sesuai Tingkat Pendidikan	Jumlah tenaga kerja yang tersekap dibandingkan seluruh tenaga kerja	%		82.31	82.46	82.61	82.76	82.91	83.06	Dinas Tenaga Kerja
15	Meningkatnya Produktivitas Tenaga kerja	Tingkat Produktifitas Regional	Tingkat Produksi di suatu sektor dibandingkan jumlah tenaga kerja di sektor yang sama	Rupiah	14.308	15.147	15.986	16.825	17.664	18.503	18.503	Dinas Tenaga Kerja
		Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Produktif Ekonomi Kerakyatan				5	5.5	6	6.5	7	7	
16	Meningkatnya Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	Rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	Nilai pendapatan sektor UMKM dibandingkn pendapatan total kabupaten	Rasio		0.5	0.51	0.52	0.53	0.54	0.54	Dinas Perindakop dan UKM
17	Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	Jumlah produksi industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	%		0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.56	Dinas Perindakop dan UKM
18	Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal	Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar dan Eceran	Jumlah kegiatan perdagangan besar dan eceran	%		7.12	7.27	7.42	7.57	7.72	7.72	Dinas Perindakop dan UKM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA (2021 - 2026)					KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PELAKSANA
						2022	2023	2024	2025	2026		
19	Meningkatnya Koperasi Yang Berdaya saing	Pertumbuhan Koperasi Aktif	Jumlah koperasi yang aktif	Jumlah		85	87	89	91	93	93	Dinas Perindakop dan UKM
20	Berkembangnya Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Dipasarkan	Jumlah destinasi wisata yang dipromosikan	Jumlah		1	2	3	4	5	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan penduduk	Indeks Ketahanan Pangan	Jumlah desa yang sudah ditangani	Indeks		34.84	34.89	34.94	34.99	35.04	35.04	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan		%		30	35	40	45	50	50	
22	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi	Pengeluaran Perkapita	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.	Rupiah		4257.3	4405.9	4554.4	4702.9	4851.5	4851.5	Dinas Perindakop dan UKM
		ICOR		Indeks		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
23	Meningkatkan Daya Saing	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks daya saing daerah	Indeks		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Dinas Penanaman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA (2021 - 2026)					KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PELAKSANA
						2022	2023	2024	2025	2026		
	Daerah		berdasarkan dat BRIN									Modal dan PTSP
24	Berkembangnya Potensi-Potensi Investasi Berbasis Sumber Daya Ekonomi Lokal	Tingkat Pertumbuhan Pengembangan Ekonomi Lokal	Pertumbuhan pendapatan sektor ekonomi lokal	%		5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Rasio Gini				0.2495	0.249	0.2485	0.248	0.2475	0.2475	
25	Meningkatnya Pendapatan Penduduk Golongan Menengah Kebawah Dalam Distribusi Pendapatan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%		5	10	15	20	25	25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Indeks Kinerja Peduli HAM				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
26	Meningkatnya Pemenuhan HAM	Persentase Pelaksanaan HAM	Jumlah pelanggaran HAM yang ditindak dibandingkan jumlah keseluruhan pelanggaran HAM	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol
27	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai Indeks Pemberdayaan Gender berdasarkan data Kementerian PPA	Indeks		50.80	50.0	60	60.1	60.2	60.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA (2021 - 2026)					KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PELAKSANA
						2022	2023	2024	2025	2026		
		Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Nilai Komposit Kesejahteraan Anak berdasarkan data Kementerian PPA	Indeks		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
		Indeks Keamanan				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
28	Menurunnya Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan ketertiban yang ditindak dibandingkan keseluruhan jumlah Jumlah pelanggaran dan ketertiban	%	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
29	Menurunnya Kriminalitas, Kejahatan dan Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Angka Kriminalitas	Jumlah Kriminalitas	Angka	10	9	8	7	6	5	5	Satuan Polisi Pamong Praja
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sosial				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
30	Optimalnya Pelayanan Terhadap PMKS	Persentase Pelayanan PMKS	Peserta PMKS yang dilayani dibandingkan jumlah seluruh peserta PMKS	%		30	31	32	33	34	34	Dinas Sosial
31	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemberdayaan KAT	Persentase Pemberdayaan KAT	Jumlah lokasi KAT yang diberdayakan dibandingkan seluruh jumlah	Keterangan		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA (2021 - 2026)					KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PELAKSANA
						2022	2023	2024	2025	2026		
			lokasi KAT									
32	Optimalnya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia	Cakupan Pelayanan Penduduk Lanjut Usia	Jumlah penduduk usia lanjut yang dilayani dibandingkan seluruh jumlah penduduk usia lanjut	%		30	31	32	33	34	34	Dinas Sosial
		Indeks Demokrasi				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
33	Meningkatnya Kebebasan Hak Sipil	Skor Aspek Kebebasan Hak Sipil	Nilai Indeks Demokrasi Kabupaten berdasarkan BPS	Angka		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Kantor Kesbangpol
34	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Politik	Skor Aspek Pemenuhan Hak-Hak Politik	Nilai Indeks Demokrasi Kabupaten berdasarkan BPS	Angka		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Kantor Kesbangpol
35	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi	Skor Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi	Nilai Indeks Demokrasi Kabupaten berdasarkan BPS	Angka		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Kantor Kesbangpol
		Indeks Pembangunan Infrastruktur				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
36	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas penduduk antardistrik dan	Pertumbuhan Tingkat Konektivitas Penduduk	Jumlah distrik yang sudah terkoneksi dengan sarana transportasi	%		25	30	35	40	45	45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA (2021 - 2026)					KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PELAKSANA
						2022	2023	2024	2025	2026		
	kampung											
37	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar	Jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan	%		15	20	25	30	35	35	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
38	Meningkatnya tata Kelola pertanahan	Proporsi Sertifikat Kepemilikan Tanah	Jumlah sertifikat tanah dibandingkan jumlah persil secara keseluruhan	Keterangan		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
39	Optimalnya penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang	Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Penggunaan Lahan Eksisting/Pola Ruang) x 100 %	%	50	55	60	65	70	75	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Indeks Lingkungan Hidup			Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
40	Meningkatnya Kualitas Dan Baku Mutu Air	Pencemaran Air	Indeks Kualitas Air	Keterangan	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Dinas Lingkungan Hidup
41	Meningkatnya Kualitas Udara	Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Keterangan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Dinas Lingkungan Hidup
42	Meningkatnya Tutupan Lahan	Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	Keterangan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA (2021 - 2026)					KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PELAKSANA
						2022	2023	2024	2025	2026		
		Indeks Risiko Bencana				132.3	131.8	131.3	130.8	130.3	130.3	
43	Menurunnya tingkat resiko bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung yang sudah ditetapkan sebagai kampung siaga bencana	Jumlah		1	2	3	4	5	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
44	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik	Skor Relatif Mutu Pelayanan	Nilai penilaian pelayanan public oleh masyarakat	Nilai		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Sekretariat Daerah
		Predikat Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik										
		Indeks reformasi Birokrasi				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
45	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	Opini Kualitas Pelayanan Publik	Predikat		C	C	C	B	B	B	Sekretariat Daerah
46	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan permendagri	Indeks		WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	BPKAD
47	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi	Jumlah ASN yang sudah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah seluruh	%	54	55	56	57	58	59	59	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA (2021 - 2026)					KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PELAKSANA
						2022	2023	2024	2025	2026		
			ASN									
48	Meningkatnya Dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai Fungsinya	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase kepuasan publik terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
49	Meningkatnya kualitas perencanaan	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	Dokumen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Cakupan Pemenuhan Data-Data Dasar Pembangunan			2	2	3	3	3	4	4	
50	Meningkatnya ketersediaan data makro dan mikro statistik pembangunan daerah	Cakupan Kelengkapan Data SPID	Data SPID eksisting dibandingkan jumlah data SIPD sesuai ketentuan.	Jumlah		1	1	2	2	3	3	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
51	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi daerah secara optimal	Persentase Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Kabupaten	Sarana prasarana persandian eksisting dibandingkan sarana prasarana persandian sesuai dengan ketentuan	%		30	31	32	33	34	34	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN KINERJA (2021 - 2026)					KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PELAKSANA
						2022	2023	2024	2025	2026		
52	Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepustakaan dan Arsip Daerah Yang Berkualitas	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kepustakaan Dan Arsip Daerah	Sarana prasarana arsip dan perpustakaan eksisting dibandingkan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan	%		30	31	32	33	34	34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
53	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan	Persentase Data Dasar Kependudukan Terpilah	Data dasar kependudukan yang terpilah dibandingkan data dasar kependudukan sesuai ketentuan	%		30	31	32	33	34	34	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
54	Optimalnya Pengelolaan E government	Indeks Egovernment	Kegiatan pemerintah daerah yang menerapkan prinsip egovernment dibandingkan seluruh kegiatan pemerintah daerah	Indeks	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian

6. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo

Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja, sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sebagai dasar melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja, serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa			Indeks Kehidupan Beragama	Indeks	Meningkat	
		1	Meningkatnya budaya religius	Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah	Per 1000 Penduduk	18.64	Sekretariat Daerah
				Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat	%	100	Sekretariat Daerah
		2	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat beragama	Indeks	79.3	Kesbangpol
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya			Indeks Pembangunan Manusia		51.866	
		3	Meratanya Akses Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	4.06	Dinas Pendidikan
		4	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.63	Dinas Kesehatan
				Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Indeks	Meningkat	
		5	Optimalnya pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet yang Berprestasi Nasional	Jumlah	1	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		6	Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Pemuda Yang Berperan Dalam Pembangunan	%	100	Dinas Pemuda dan Olah Raga
				Indeks Pembangunan Kebudayaan		46.4	
		7	Meningkatnya efektifitas pengembangan dan pendidikan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Muatan Nilai- Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan	%	100	Dinas Pendidikan

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	OPD
		8	Meningkatnya pelestarian budaya asli Papua	Cakupan Budaya Benda dan tak Benda Yang Dilestarikan	Jumlah	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pertumbuhan Penduduk		0.98	
		9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Berencana Yang Aktif	%	32	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		10	Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Keluarga Sejahtera	Jumlah	1672	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
				Angka Kemiskinan	%	34.82	
		11	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (IPM)	Rupiah	4554.4	Dinas Perindakop dan UKM
		12	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan Miskin	Indek Kedalaman Kemiskinan	Indeks	Menurun	Dinas Sosial
		13	Meningkatnya Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP)	Persentase Kegiatan Yang Melibatkan OAP	Persentase	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
3	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal			Tingkat Kesempatan Kerja	%	99.75	
		14	Meningkatnya Efektifitas Penyerapan Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja Yang Terserap Sesuai Tingkat Pendidikan	%	82.61	Dinas Tenaga Kerja
		15	Meningkatnya Produktivitas Tenaga kerja	Tingkat Produktifitas Regional	Rupiah	16.825	Dinas Tenaga Kerja
				Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Produktif Ekonomi Kerakyatan	%	6	

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	OPD
		16	Meningkatnya Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	Rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	Rasio	0.52	Dinas Perindakop dan UKM
		17	Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	%	0.54	Dinas Perindakop dan UKM
		18	Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal	Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar dan Eceran	%	7.42	Dinas Perindakop dan UKM
		19	Meningkatnya Koperasi Yang Berdaya saing	Pertumbuhan Koperasi Aktif	Jumlah	89	Dinas Perindakop dan UKM
		20	Berkembangnya Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Dipasarkan	Jumlah	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		21	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan penduduk	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	34.94	Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	40	
		22	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi	Pengeluaran Perkapita	Rupiah	4554.4	Dinas Perindakop dan UKM
				ICOR	Indeks	Meningkat	
		23	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	Meningkat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		24	Berkembangnya Potensi-Potensi Investasi Berbasis Sumber Daya Ekonomi Lokal	Tingkat Pertumbuhan Pengembangan Ekonomi Lokal	%	5.2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Rasio Gini		0.2485	

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	OPD
		25	Meningkatnya Pendapatan Penduduk Golongan Menengah Kebawah Dalam Distribusi Pendapatan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Meningkatkan Kesadaran Hukum, Sosial, Politik dan HAM			Indeks Kinerja Peduli HAM		Meningkat	
		26	Meningkatnya Pemenuhan HAM	Persentase Pelaksanaan HAM	%	100	Kesbangpol
		27	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	60	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
				Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Indeks	Meningkat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
				Indeks Keamanan		Meningkat	
		28	Menurunnya Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	%	0	Satuan Polisi Pamong Praja
		29	Menurunnya Kriminalitas, Kejahatan dan Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	7	Satuan Polisi Pamong Praja
				Indeks Kepuasan Pelayanan Sosial		Meningkat	
		30	Optimalnya Pelayanan Terhadap PMKS	Persentase Pelayanan PMKS	%	32	Dinas Sosial
		31	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemberdayaan KAT	Persentase Pemberdayaan KAT	Keterangan	Meningkat	Dinas Sosial
		32	Optimalnya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia	Cakupan Pelayanan Penduduk Lanjut Usia	%	32	Dinas Sosial
				Indeks Demokrasi		Meningkat	
		33	Meningkatnya Kebebasan Hak Sipil	Skor Aspek Kebebasan Hak Sipil	Angka	Meningkat	Kantor Kesbangpol
		34	Meningkatnya Pemenuhan	Skor Aspek Pemenuhan Hak-Hak	Angka	Meningkat	Kantor

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	OPD
			Hak-Hak Politik	Politik			Kesbangpol
		35	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi	Skor Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi	Angka	Meningkat	Kantor Kesbangpol
5	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan			Indeks Pembangunan Infrastruktur		Meningkat	
		36	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas penduduk antardistrik dan kampung	Pertumbuhan Tingkat Konektivitas Penduduk	%	35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		37	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar	%	25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		38	Meningkatnya tata Kelola pertanahan	Proporsi Sertifikat Kepemilikan Tanah	Keterangan	Meningkat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		39	Optimalnya penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang	Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang	%	65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Indeks Lingkungan Hidup		Meningkat	
		40	Meningkatnya Kualitas Dan Baku Mutu Air	Pencemaran Air	Keterangan	Tercemar Sedang	Dinas Lingkungan Hidup
		41	Meningkatnya Kualitas Udara	Kualitas Udara	Keterangan	Tercemar Ringan	Dinas Lingkungan Hidup
		42	Meningkatnya Tutupan Lahan	Tutupan Lahan	Keterangan	Meningkat	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Risiko Bencana		131.3	
		43	Menurunnya tingkat resiko bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana	Jumlah	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	OPD
6	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas			Indeks Kepuasan Masyarakat		Meningkat	
		44	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik	Skor Relatif Mutu Pelayanan	Nilai	Meningkat	Sekretariat Daerah
		45	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	Meningkat	Sekretariat Daerah
				Predikat Kinerja Pelayanan Publik		Meningkat	
				Indeks reformasi Birokrasi		C	
		46	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	WDP	BPKAD
		47	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi	%	57	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		48	Meningkatnya Dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai Fungsinya	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Seketariat DPRD	Indeks	100	Sekretariat DPRD
		49	Meningkatnya kualitas perencanaan	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Cakupan Pemenuhan Data-Data Dasar Pembangunan		3	
		50	Meningkatnya ketersediaan data makro dan mikro statistik pembangunan daerah	Cakupan Kelengkapan Data SPID	Jumlah	2	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		51	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Kabupaten	%	32	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	OPD
			daerah secara optimal				Persandian
		52	Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepustakaan dan Arsip Daerah Yang Berkualitas	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kepustakaan Dan Arsip Daerah	%	32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		53	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan	Persentase Data Dasar Kependudukan Terpilah	%	32	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		54	Optimalnya Pengelolaan E government	Indeks Egovernment	Indikator	Meningkat	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian

7. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama yang mendukung sasaran strategis perlu dikawal oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun anggaran agar dapat terlaksana dengan capaian dari target yang memuaskan, oleh karena itu perlu penguatan anggaran untuk OPD-OPD dalam rangka pelaksanaan perjanjian kinerja Kabupaten Yahukimo tahun 2024.

Sesuai Peraturan Bupati nomor 03 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Alokasi anggaran untuk membiayai prioritas sesuai sasaran strategis dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Yahukimo dari Tahun 2024 dirinci sebagai berikut;

Tabel 2.9
Ringkasan Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN ANGGARAN	%
1	PENDAPATAN DAERAH	Rp2.181.577.603.765	Rp2.203.941.280.753	Rp22.363.676.988	1,01%
2	BELANJA DAERAH	Rp2.177.896.691.808	Rp2.252.288.621.269	Rp74.391.929.461	3,30%
	• Belanja Operasi	Rp1.207.646.007.129	Rp1.305.551.998.594	Rp97.905.991.465	7,50%
	• Belanja Modal	Rp440.432.203.079	Rp428.763.321.075	-Rp11.668.882.004	-2,72%
	• Belanja Tidak Terduga	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	Rp0	0,00%
	• Belanja Transfer	Rp527.818.481.600	Rp515.973.301.600	-Rp11.845.180.000	-2,30%
3	PEMBIAYAAN DAERAH	-Rp88.802.230.000	Rp48.347.340.516	Rp137.149.570.516	283,68%
	• Penerimaan Pembiayaan	Rp11.197.770.000	Rp182.973.762.738	Rp171.775.992.738	93,88%
	• Pengeluaran Pembiayaan	Rp100.000.000.000	Rp134.626.422.222	Rp34.626.422.222	25,72%

1) Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD),

prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Selanjutnya Perubahan anggaran daerah merupakan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Perubahan anggaran dapat dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja satuan kerja. hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan anggaran daerah, antara lain;

- Pergeseran antar jenis belanja
- Penggunaan SilPA tahun sebelumnya
- Penambahan dan/atau pengurangan pendapatan daerah pada tahun berjalan
- Relevansi program/kegiatan kurang responsif dengan permasalahan dan/atau kurang relevan dengan perkembangan yang dihadapi
- Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif dan belum terurai sebagaimana mestinya

Beberapa contoh perubahan anggaran daerah, antara lain: Peningkatan belanja operasi, Penurunan belanja modal, Peningkatan belanja tidak terduga, Peningkatan belanja transfer, Penambahan anggaran belanja tidak terduga

Berikut merupakan beberapa perubahan anggaran Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo yang terjadi selama tahun 2024;

Tabel 2.10
Perubahan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo
Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN ANGGARAN	%
1	BELANJA OPERASI				
	• Belanja Pegawai	Rp388.410.537.852	Rp404.849.673.414	Rp16.439.135.562	4,06%
	• Belanja Barang dan Jasa	Rp500.672.647.351	Rp688.271.228.829	Rp187.598.581.478	27,26%
	• Belanja Bunga	Rp0	Rp6.649.753.912	Rp6.649.753.912	100,00%
	• Belanja Hibah	Rp317.062.821.926	Rp204.281.342.439	-Rp112.781.479.487	-55,21%
	• Belanja Bantuan Sosial	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp0	0,00%
2	BELANJA MODAL				
	• Belanja Modal Tanah	Rp3.125.256.000	Rp871.260.000	-Rp2.253.996.000	-258,71%
	• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp33.410.994.504	Rp32.812.373.239	-Rp598.621.265	-1,82%
	• Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp239.689.714.075	Rp231.265.525.812	-Rp8.424.188.263	-3,64%
	• Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp163.906.238.500	Rp162.040.751.600	-Rp1.865.486.900	-1,15%
	• Belanja Modal Aset Tetap	Rp200.000.000	Rp1.673.410.424	Rp1.473.410.424	88,05%

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN ANGGARAN	%
	Lainnya				
	• Belanja Modal Aset Lainnya	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0	0,00%
3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
	• Belanja Tidak Terduga	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	Rp0	0,00%
4	BELANJA TRANSFER				
	• Belanja Bantuan Keuangan	Rp527.818.481.600	Rp515.973.301.600	-Rp11.845.180.000	-2,30%
	TOTAL BELANJA DAERAH	Rp2.177.896.691.808	Rp2.252.288.621.269	Rp74.391.929.461	3,30%

Berdasarkan Tabel di atas terjadi Penambahan Anggaran belanja Daerah Kabupaten Yahukimo sebesar Rp.74.391.929.461,00 atau bertambah 3,30% dari angka anggaran belanja daerah sebelum perubahan tahun 2024.

2) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Berikut ini di rincikan Pembiayaan daerah dan Perubahan anggaran Kabupaten Yahukimo yang terjadi selama tahun anggaran 2024;

Tabel 2.11
Perubahan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo
Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN ANGGARAN	%
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp11.197.770.000,00	Rp182.973.762.738,00	Rp171.775.992.738,00	93,88%
	• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp11.197.770.000,00	Rp20.973.762.738,00	Rp9.775.992.738,00	46,61%
	• Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp0,00	Rp162.000.000.000,00	Rp162.000.000.000,00	100,00%
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp100.000.000.000,00	Rp134.626.422.222,00	Rp34.626.422.222,00	25,72%
	• Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp100.000.000.000,00	Rp134.626.422.222,00	Rp34.626.422.222,00	25,72%
	PEMBIAYAAN NETTO	-Rp88.802.230.000,00	Rp48.347.340.516,00	Rp137.149.570.516,00	283,68%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Pemerintah (LKJ) yang merupakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan. Media pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam tahun 2024 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

I. Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD;
4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.
5. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus;

$$\frac{\text{Efisiensi penggunaan Sumber Daya}}{\text{Output (\%Realisasi Kinerja)}} = \frac{\text{Input (\%Realisasi Anggaran)}}{\text{Output (\%Realisasi Kinerja)}} \times 100\%$$

Pemerintah Kabupaten Yahukimo melakukan Penilaian rata – rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan mengacu pada Tabel diatas. Skala Nilai peringkat Kerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;
- 2. Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal;
- 3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Skala Nilai Peringkat Kinerja akan dijabarkan sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \geq 90$	Tinggi
3	$65,01 \geq 75$	Sedang
5	$50,01 \geq 65$	Rendah
6	$0 \geq 50$	Sangat Rendah

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$\leq 99,99$	Tercapai
2	≥ 100	Tidak Tercapai

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2024 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan

standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Dalam RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 terdapat 6 (enam) Misi, 21 (dua puluh satu) Tujuan dan 54 (Lima Puluh Empat) sasaran, dengan 58 (lima puluh enam) indikator sasaran. Dari uraian diatas maka capaian sasaran dalam visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- 4. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja.
- 5. Misi II terdapat 5 tujuan, 11 sasaran dan 11 indikator kinerja.
- 6. Misi III terdapat 5 tujuan, 12 sasaran dan 12 indikator kinerja.
- 7. Misi IV terdapat 4 tujuan, 11 sasaran dan 11 indikator kinerja.
- 8. Misi V terdapat 2 tujuan, 8 sasaran dan 8 indikator kinerja.
- 9. Misi VI terdapat 4 tujuan, 11 sasaran dan 11 indikator kinerja.

II. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo

Laporan Kinerja Pemerintah (LKJ) Pemerintah Kabupaten Yahukimo merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Sejalan dengan perencanaan yang dipersamakan dengan perencanaan strategis, telah ditetapkan 54 sasaran strategis dengan menggunakan 58 indikator yang ingin dicapai selama tahun 2024. Untuk mencapai 54 sasaran strategis yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui 109 (Seratus Sembilan) program sasaran pembangunan yang dilaksanakan masing-masing SKPD sesuai Tupoksi nya. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Yahukimo tahun 2024 adalah sebagai berikut;

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Kabupaten Yahukimo Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			KRITERIA
					TARGET	REALISASI	% REALISASI	
			Indeks Kehidupan Beragama	Indeks	Meningkat	0	-	Tidak Tercapai

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			KRITERIA
					TARGET	REALISASI	% REALISASI	
1	Meningkatnya Budaya Religius	1	Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah	Per 1000 Penduduk	18,64	0,14	0,75%	Sangat Rendah
		2	Persentase Aktivitas tempat di lingkungan dan masyarakat	%	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan kerukunan Umat beragama	3	Indeks Kerukunan Umat beragama	Indeks	79,3	0	-	-
			Indeks Pembangunan Manusia		51,866	51,97	100,20%	Tercapai
3	Meningkatkan akses Pendidikan	4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	4,06	4,35	107,14%	Sangat Tinggi
4	Meningkatkan Derajat Kesehatan	5	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,63	66,51	99,82%	Sangat Tinggi
			Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Indeks	Meningkat	0	-	Tidak Tercapai
5	Optimalnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6	Cakupan Olahragawan Yang Berprestasi Nasional	Jumlah	1	0	-	-
6	Meningkatnya Prestasi Pemuda dalam pembangunan	7	Persentase Prestasi Pemuda dalam pembangunan	%	100	0	-	-
			Indeks Pembangunan Kebudayaan		46,4	0	-	Tidak Tercapai
7	Meningkatnya efektivitas pengembangan dan pendidikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat	8	Persentase Muatan nilai-nilai Budaya Lokal dalam jenjang pendidikan	%	100	37,50	37,50%	Sangat Rendah

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			KRITERIA
					TARGET	REALISASI	% REALISASI	
8	Meningkatnya pelestarian Budaya asli Papua	9	Cakupan budaya benda dan tak benda yang di lestarikan	Jumlah	1	5	500,00%	Sangat Tinggi
			Pertumbuhan Penduduk		0,98	1,47	150,00%	Tercapai
9	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	10	Persentase Keluarga Berencana yang aktif	%	32	9,67	30,22%	Sangat Rendah
10	Optimalnya Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Keluarga Sejahtera	11	Persentase Keluarga Sejahtera	Jumlah	1672	1533	91,69%	Sangat Tinggi
			Angka Kemiskinan	%	34,82	33,82	97,13%	Tercapai
11	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	12	Pengeluaran Perkapita (IPM)	Rupiah	4554,4	5747	126,19%	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan Miskin	13	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	Menurun	Menurun 0,36 poin indeks	100,00%	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP)	14	Persentase Kegiatan Yang Melibatkan OAP	%	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
			Tingkat Kesempatan Kerja	%	99,75	83,92	84,13%	Tercapai
14	Meningkatnya Efektivitas penyerapan tenaga kerja	15	Proporsi Tenaga Kerja yang terserap di semua tingkat pendidikan	%	82,61	85,67	103,70%	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	16	Tingkat Pertumbuhan produktivitas regional	Rupiah	16.825	12106,89	71,96%	Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			KRITERIA
					TARGET	REALISASI	% REALISASI	
			Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Produktif Ekonomi Kerakyatan		6	3,99	66,50%	Tercapai
16	Meningkatnya Produktivitas Regional sektor-sektor ekonomi kerakyatan	17	Rasio Produktivitas Regional sektor-sektor ekonomi kerakyatan	Rasio	0,52	0	0,00%	-
17	Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan kecil berbasis Pertanian	18	Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan kecil berbasis Pertanian	%	0,54	1,073	198,70%	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar dan eceran berbasis muatan Lokal	19	Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar dan eceran berbasis muatan Lokal	%	7,42	6,06	81,67%	Sangat Tinggi
19	Meningkatnya Koperasi yang berdaya saing	20	Perrtumbuhan Koperasi aktif	Jumlah	89	29	32,58%	Sangat Rendah
20	Berkembangnya Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	21	Cakupan Destinasi pariwisata yang di pasarkan	Jumlah	3	6	200,00%	Sangat Tinggi
21	Meningkatkan penanganan Kearawanan pangan penduduk	22	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	34,94	25,62	73,33%	Sedang
		23	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	40	25	62,50%	Rendah
22	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi	24	Pendapatan Perkapita	Rupiah	4554,4	5747	126,19%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			KRITERIA
					TARGET	REALISASI	% REALISASI	
			ICOR	Indeks	Meningkat	0	-	Tidak Tercapai
23	Meningkatkan daya saing Daerah	25	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	Meningkat	0	-	-
24	Berkembangnya Potensi-Potensi Investasi Berbasis Sumber Daya Ekonomi lokal	26	Tingkat Pertumbuhan pengembangan ekonomi lokal	%	5,2	0	0,00%	-
			Rasio Gini		0,2485	0,244	101,81%	Tercapai
25	Meningkatnya pendapatan penduduk golongan menengah kebawah	27	Persentase Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah	%	15	30,61	204,07%	Sangat Tinggi
			Indeks Kinerja Peduli HAM		Meningkat	0	-	Tidak Tercapai
26	Meningkatnya Pemenuhan HAM	28	Persentase Pemenuhan HAM	%	100	0	-	-
27	Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak-anak	29	Indeks Pemberdayaan gender	Indeks	60	0	-	-
		30	Indeks Komposit Kesejahteraan anak	Indeks	Meningkat	0	-	-
			Indeks Keamanan		Meningkat	0	-	Tidak Tercapai
28	Menurunnya Pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat	31	Persentase Pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat	%	1	37	-3500,00%	Sangat Rendah
29	Menurunnya Kriminalitas, kejahatan dan konflik dalam kehidupan masyarakat	32	Angka Kriminalitas	Angka	7	7	100,00%	Sangat Tinggi
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sosial		Meningkat	0	-	Tidak Tercapai

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			KRITERIA
					TARGET	REALISASI	% REALISASI	
30	Optimalnya pelayanan terhadap PMKS	33	Persentase pelayanan terhadap PMKS	%	32	12	37,50%	Sangat Rendah
31	Optimalnya pelayanan sosial bagi Lanjut usia	34	Cakupan pelayanan sosial bagi Lanjut usia	Keterangan	Meningkat	0	0,00%	-
32	Meningkatnya pembinaan dan Pemberdayaan KAT	35	Persentase pembinaan dan Pemberdayaan KAT	%	32	0	0,00%	-
			Indeks Demokrasi		Meningkat	0	-	Tidak Tercapai
33	Meningkatnya kebebasan hak Sipil	36	Skor Aspek kebebasan Sipil	Angka	Meningkat	0	-	-
34	Meningkatnya pemenuhan Hak-hak Politik	37	Skor Aspek pemenuhan Hak-hak Politik	Angka	Meningkat	0	-	-
35	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas kelembagaan Demokrasi	38	Skor Kualitas dan Kuantitas kelembagaan Demokrasi	Angka	Meningkat	0	-	-
			Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkat	Meningkat	0	-	Tidak Tercapai
36	Meningkatnya Aksesibilitas dan konektivitas penduduk antar Distrik dan Kampung	39	Pertumbuhan tingkat konektivitas penduduk	%	35	5,93	16,94%	Sangat Rendah
37	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas	40	Persentase pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	%	25	7,5	30,00%	Sangat Rendah
38	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	41	Proporsi sertifikasi Kepemilikan tanah	Keterangan	Meningkat	0	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			KRITERIA
					TARGET	REALISASI	% REALISASI	
39	Optimalnya penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang	42	Tingkat kepatuhan terhadap tata ruang	%	65	0	0,00%	-
			Indeks Lingkungan Hidup		Meningkat	0	-	Tidak Tercapai
40	Meningkatnya kualitas dan baku mutu air	43	Indeks pencemaran air	Keterangan	62,5	70	112,00%	Sangat Tinggi
41	Meningkatnya kualitas udara	44	Indeks Kualitas udara	Keterangan	60	99,52	165,87%	Sangat Tinggi
42	Meningkatnya tutupan lahan	45	Indeks Tutupan Lahan	Keterangan	60	98,63	164,38%	Sangat Tinggi
			Indeks Risiko Bencana		131,3	0	0,00%	Tidak Tercapai
43	Menurunnya tingkat resiko bencana	46	Jumlah Kampung Siaga Bencana	Jumlah	3	0	-	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Meningkat	0	-	Tidak Tercapai
		47	Skor Relatif Mutu Pelayanan	Nilai	Meningkat	Meningkat	100,00%	Sangat Tinggi
44	Meningkatnya mutu pelayanan publik	48	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	Meningkat	0	-	-
			Indeks reformasi Birokrasi		Meningkat	0	-	Tidak Tercapai
45	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	49	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	60,94	57,38	94,16%	Sangat Tinggi
46	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	50	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	WDP	<i>Proses Audit</i>	<i>Proses Audit</i>	<i>Proses Audit</i>
47	Meningkatnya pengembangan sumber daya aparatur	51	Persentase ASN yang sesuai standar kompetensi	%	57	23,22	40,74%	Sangat Tinggi
48	Meningkatnya dukungan sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	52	Indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	100	90,3	90,30%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			KRITERIA
					TARGET	REALISASI	% REALISASI	
49	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	53	Ketersediaan Dokumen perencanaan pembangunan	Dokumen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
			Cakupan Pemenuhan Data-Data Dasar Pembangunan		3	4	133,33%	Tercapai
50	Meningkatkan ketersediaan data makro dan mikro Statistik pembangunan daerah	54	Cakupan Kelengkapan Data SPID	Jumlah	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
51	Meningkatnya Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah secara optimal	55	Persentase Penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten	%	32	32	100,00%	Sangat Tinggi
52	Optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kepustakaan dan arsip daerah yang berkualitas	56	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kepustakaan dan arsip daerah	%	32	0	-	-
53	Meningkatnya ketersediaan data base kependudukan	57	Persentase Dasar kependudukan Terpilah	%	32	32	100,00%	Sangat Tinggi
54	Optimalnya pengelolaan E-Government	58	Indeks E-Government	Keterangan	Meningkat	0	-	-

Analisis Capaian Kinerja dari masing – masing sasaran beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

Misi	:	Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa
Tujuan	:	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Yang Agamis Dan Rukun

Indikator Tujuan Peningkatan Kualitas Kehidupan Yang Agamis Dan Rukun adalah Besaran angka Indeks Kehidupan Beragama yang terealisasi pada Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Indeks Kehidupan Beragama (IKUB), yang juga dikenal sebagai Religiosity Index, adalah alat ukur yang digunakan Kementerian Agama untuk mengukur sejauh mana kerukunan dan keberagaman di Indonesia, dengan fokus pada toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama. IKUB bertujuan untuk mengetahui perkembangan kerukunan dan keberagaman di Indonesia, serta menjadi parameter untuk mengukur sejauh mana kehidupan beragama berlangsung dalam harmoni. Survei IKUB dilakukan secara berkala oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Survei IKUB mengukur tiga indikator utama, yaitu:

1. Toleransi: Saling menerima dan menghargai perbedaan.
2. Kesetaraan: Kesempatan yang sama dalam pengamalan ajaran agama.
3. Kerjasama: Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan besaran Indeks Kehidupan Beragama untuk mengukur pertumbuhan Kehidupan keagamaan masyarakat di wilayah Kabupaten Yahukimo. Berikut di tampilkan target dan hasil realisasi Indeks Kehidupan Keagamaan masyarakat Kabupaten Yahukimo tahun 2024;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Yang Agamis Dan Rukun	Indeks Kehidupan Beragama	Meningkat	-	-	Tidak Tercapai

Indeks Kehidupan beragama Kabupaten Yahukimo belum terhitung oleh Kementrian keagamaan Indonesia sehingga tujuan peningkatan Kualitas kehidupan yang agamis dan rukun belum bise diukur realisasinya untuk tahun 2024. Walaupun begitu pelaksanaan tujuan tetap terlaksana oleh Pemerintah Daerah dimana, Penghitungan indeks di ukur dengan 2 sasaran strategis yaitu Meningkatnya Budaya Religius, dan Meningkatnya kerukunan Umat beragama. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan kedua sasaran startegis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya Budaya Religious

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Kinerja Sasaran peningkatan Budaya Religius di tunjukkan dengan seberapa besat Proporsi penduduk terhadap tempat Ibadah dan persentase aktivitas Keagamaan di lingkungan masyarakat dan Pemerintah.

4. Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah

Berikut rumus Rasio Penduduk terhadap tempat peribadatan;

$$\text{Proporsi Tempat Ibadah} = \frac{\text{Jumlah Tempat Ibadah}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Berdasarkan data kependudukan berdasarkan Agama dan jumlah tempat peribadatan di wilayah Kabupaten Yahukimo diketahui rincian Rasio bersangkutan sebagai berikut;

Tabel 3.4 Rasio Tempat Peribadatan dengan Jumlah Penduduk berdasarkan Agama Kabupaten Yahukimo tahun 2024

AGAMA	POPULASI PENDUDUK	%	JUMLAH RUMAH IBADAH	%	RASIO
Islam	3.240	0,91%	4	0,77%	1:810
Kristen Protestan	347.127	97,50%	498	96,32%	1:697
Kristen Katolik	5.624	1,58%	14	2,71%	1:402
Hindu	28	0,01%	1	0,19%	1:28
Budha	1	0,00%	0	-	-
Lainnya	1	0,00%	0	-	-
TOTAL 2024	356.021	100,00%	517	100,00%	1:688
TOTAL 2023	367.110	100,00%	517	100,00%	1:710

Jika dilihat dari keseluruhan jumlah Populasi penduduk dan jumlah tempat-tempat Ibadah yang telah didirikan di wilayah Kabupaten Yahukimo maka rasio yang terhitung pada tahun 2024 sebesar 1:688 atau 0,14% yang artinya setiap 1 tempat peribadatan yang di bangun akan digunakan oleh 688 orang dengan asumsi 100% penduduk akan menggunakan tempat peribadatan tersebut, atau satu tempat peribadatan yang digunakan hanya dapat memenuhi kebutuhan dari 0,14 persen Penduduk dalam satu waktu.

5. Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Bupati Yahukimo no.1 Tahun 2022 Indikator Kinerja Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat di hitung dengan rumus sebagai berikut;

$$\text{Persentase aktivitas keagamaan} = \frac{\text{Jumlah kegiatan ibadah yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah}}{\text{Jumlah Kegiatan ibadah sesuai ketentuan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase aktivitas keagamaan 2024} = \frac{1 \text{ Kegiatan}}{1 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan Penjabaran APBD tahun 2024 pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas kerukunan agama dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol melalui program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan keagamaan, pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan berjumlah satu di setiap tahunnya.

Oleh karena itu Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah terlaksana 100% capaian kinerja, berikut rinciannya;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya budaya religius	Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah	18,64	0,14	0,0076%	Sangat Rendah
		Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat	100	100	100	Sangat Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun ke 2023

Pada sasaran Meningkatkan budaya religius dengan Indikator Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah terjadi penurunan sebesar 6,67%. Sedangkan indikator Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat di nilai tetap pada pertumbuhannya karena tercapai realisasi 100% sama seperti tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah	17,14	0,15	0,88%	18,64	0,14	0,75%	-6,67%

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
2	Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat	100%	100%	100%	100	100%	100%	Tetap

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
- Target akhir Indikator Kinerja Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo ditetapkan sebesar 23,14 dengan capaian 0,032% dari target akhir RPJMD, sedangkan indikator Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat dikategorikan sangat berhasil karena telah mencapai 100% dari target akhir RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah	Per 1 Penduduk	18,64	0,14	0,75%	23,14	0,605%
2	Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat	%	100	100%	100%	100%	100%

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah

Rasio ketersediaan rumah ibadah terhadap satuan pemeluk agama di Kabupaten Yahukimo secara keseluruhan adalah 1:688, Agama dengan Populasi penduduk terbesar Kristen Protestan rasio proporsi tempat Ibadahnya sebesar 1:697 diikuti dengan Kristen Katolik dengan rasio sebesar 1:402 dan ketiga agama Islam dengan Rasio sebesar 1:810.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil rasio ini adalah sebagai berikut;

- Jumlah Total Populasi di tabel rasio proporsi di atas tidak mencerminkan jumlah total keseluruhan Penduduk Yahukimo
- Jumlah tempat peribadatan tetap dari 3 tahun terakhir, sedangkan setiap tahun jumlah penduduk semakin besar
- Berdasarkan rasio yang terhitung pendirian tempat peribadatan belum memenuhi kebutuhan jumlah penduduk secara keseluruhan sesuai standar nasional.

Solusi yang dapat di laksanakan untuk meningkatkan Proporsi tempat ibadah terhadap Jumlah Penduduk;

- Perlu diadakan survey terhadap kenyamanan masyarakat dalam kunjungan dan aktivitas di Tempat peribadatan atau survey tempat peribadatan dapat memenuhi kebutuhan keseluruhan penduduk dalam suatu lokasi.
- Pendirian Tempat peribadatan berdasarkan Kebutuhan penduduk dan Lokasinya
- Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat
Peningkatan Persentase aktivitas keagamaan di lingkungan pemerintah dan masyarakat melalui pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang merupakan program rutin setiap tahun dalam rangka Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024 melalui Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian untuk mencapai peningkatan Indikator Proporsi penduduk terhadap tempat Ibadah tidak melaksanakan program atau kegiatan sehingga penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya tidak dilakukan.

Sedangkan pencapaian Indikator kinerja Peningkatan Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat oleh Sekretariat Daerah dilaksanakan Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, terhitung besaran efisiensi capaian kinerja sebesar 122,6% yang dirinci sebagai berikut;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian			

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
			-	-	-
		(%) Total Realisasi Anggaran	-	-	-
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	18,64	0,14	0,75%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-
2	Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat	Sekretariat Daerah			
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
		Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	47.451.910.000	38.701.910.000	81,56%
		(%) Total Realisasi Anggaran	47.451.910.000	38.701.910.000	81,56%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	100%	100%	100,00%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			122,60%

2. Sasaran Meningkatnya kerukunan umat beragama

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Indeks kerukunan dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat beragama di Kabupaten Yahukimo belum dapat diukur karena belum adanya data terupdate mengenai Indeks Kerukunan Umat Beragama khusus untuk Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat beragama	79.3	Belum di indeks	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 tidak dapat dilakukan karena belum adanya data terupdate mengenai Indeks Kerukunan Umat Beragama khusus untuk Kabupaten Yahukimo pada tahun 2023 dan 2024;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kerukunan Umat beragama	79.2	Belum di indeks	-	79.3	Belum di indeks	-	

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah tidak dapat dilakukan karena Indeks KUB belum menyentuh Kabupaten Yahukimo;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Indeks	Indeks	79.3	Belum di	-	79,5	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
	Kerukunan Umat beragama			indeks			

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor-faktor yang menjadi penyebab belum adanya realisasi capaian Indeks Kerukukunan Umat Beragama (KUB) adalah sebagai berikut;

- Survey Indeks Kerukunan Umat beragama yang di laksanakan kementrian Agama atau perwakilannya masih belum menyentuh Kabupaten Yahukimo;

Solusi yang dapat dilakukan;

- Mengajukan permintaan kepada kementrian keagamaan atau perwakilan provinsinya dalam rangka pengukuran KUB untuk kabupaten Yahukimo.
- Study Konsultasi kepada kementrian keagamaan atau perwakilan provinsinya di Papua dalam rangka pengukuran KUB untuk kabupaten Yahukimo.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi tak dapat dilaksanakan karena persentase capaian kinerja tidak dapat di hitung namun berikut di rincikan jumlah anggaran dan realisasi dari kegiatan pencapaian kinerja peningkatan indeks kerukunan umat beragama kabupaten Yahukimo;

NO	Indikator Kinerja	No	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Indeks Kerukunan Umat beragama		Kantor Kesbangpol			
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	299.645.000	299.645.000	100,00%
			(%) Total Realisasi Anggaran	299.645.000	299.645.000	100,00%
			(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	-	-	-
			Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-

Misi	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya
Tujuan	:	Meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan dan Kesehatan

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro pembangunan daerah untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia, mencakup tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak, IPM penting untuk meningkatkan kesadaran para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai.

IPM terdiri dari tiga dimensi utama:

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat: Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir.
2. Pengetahuan: Diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun.
3. Standar Hidup Layak: Diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan

Indikator Tujuan, Peningkatan Kualitas Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan adalah Besaran angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terealisasi pada Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga menargetkan besaran IPM untuk mengukur pertumbuhan pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten Yahukimo. Berikut di tampilkan tabel target dan hasil realisasi IPM Kabupaten Yahukimo tahun 2024;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan dan Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	51,866	51,97	100,20%	Sangat Tinggi

Berdasarkan Laporan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 hasil pengukuran Indeks Pembangunan Manusia Yahukimo tahun 2024, diketahui telah mencapai target dengan kriteria sangat tinggi dengan angka 51,97 atau 100,20% capaian tujuan, dan jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya, Indeks Pembangunan manusia Yahukimo mengalami peningkatan sebesar 0,78 poin dari tahun 2023 yang angkanya mencapai sebesar 51,19 poin.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan peningkatan kualitas pembangunan Pendidikan dan Kesehatan untuk Masyarakat di wilayah Yahukimo, Pemerintah Daerah menetapkan 2 sasaran

strategis yaitu pemerataan akses Pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten yahukimo dan Peningkatan Derajat Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Yahukimo. selama tahun 2024 hasil pelaksanaan kedua sasaran startegis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Meratanya Akses Pendidikan

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan untuk masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan Laporan Indeks Pembangunan Manusia, RLS sebagai salah satu komponen IPM mencapai angka sebesar 4,35 tahun. Berikut Capaian kinerja RLS Kabupaten Yahukimo tahun 2024;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meratanya Akses Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	4.06	4,35	107,14	Sangat Tinggi

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Yahukimo tahun 2024 sebesar 4,35 tahun. Dengan kata lain penduduk di Kabupaten Yahukimo rata-rata usia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan sampai kelas 4 SD. Dari target yang direncanakan bahwa RLS tahun 2024 Kabupaten Yahukimo sebesar 4,06 tahun, maka capaian kinerja sasaran meratanya akses pendidikan sebesar 107,14% dan termasuk kategori capaian "sangat tinggi".

$$\begin{array}{l} \text{\%Realisasi Rata-} \\ \text{\%Rata Lama} \\ \text{\%Sekolah} \end{array} = \frac{4,35}{4,06} \times 100\% = \mathbf{107,14\%}$$

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada sasaran Meratanya Akses Pendidikan dengan indikator Rata-rata lama sekolah (RLS) mengalami peningkatan sebesar 0,01 dari realisasi 4,34 di tahun 2023 menjadi 4,35 tahun di tahun 2024 naik sebesar 0.23%;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Rata-Rata Lama Sekolah	4,05	4,34	107,16	4.06	4,35	107,14	0,23%

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Target akhir rata-rata lama sekolah sesuai RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar 4,08 (tahun) sedangkan capaian RLS pada tahun 2024 sebesar 4,35 (tahun). Hal ini menunjukkan capaian kinerja tahun 2024 telah mencapai 106,61% target akhir RPJMD yang di tetapkan Kabupaten Yahukimo;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	4.06	4,35	107,14	4,08	106,61%

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Capaian sasaran pemerataan akses Pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo di kategorikan "sangat tinggi" karena dukungan program dan kegiatan yang di laksanakan Dinas Pendidikan.

Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator sasaran Meningkatnya angka rata-rata Lama Sekolah adalah;

- Adanya dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemerintah Daerah
- Semakin Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung Pendidikan yang memadai
- Tersedianya SDM pelayanan dasar Pendidikan yang memadai
- Adanya Peningkatan upaya pemerataan Pendidikan di seluruh distrik di Kabupaten Yahukimo

Adapun permasalahan yang timbul dalam pencapaian sasaran ini adalah dengan melihat keadaan topografi dan sebaran penduduk di Kabupaten Yahukimo serta keadaan dimana masyarakat ada yang berada di daerah-daerah terpencil, maka fokus pemerataan dilaksanakan tidak hanya melalui program prioritas Pendidikan namun juga dengan bantuan sosial/hibah berupa BOS, hal ini dilakukan agar pemerataan akses Pendidikan terlaksana efektif dan mendorong masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka tanpa ketakutan akan beban biaya.

- e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) pada masyarakat Kabupaten Yahukimo di dukung melalui Dinas Pendidikan dengan anggaran sebesar

Rp.285.116.443.201,00 dengan total realisasi sebesar Rp.174.336.008.827,00 atau sebesar 61,16%.

Jika dibandingkan dengan persentase realisasi kinerja RLS sebesar 107,16% maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan efisiensi penggunaan sumber dayanya mencapai 175,20%;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan			
		Program Pengelolaan Pendidikan	266.316.443.201	155.566.036.827	58,41%
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	18.800.000.000	18.799.972.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	285.116.443.201	174.366.008.827	61,16%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	4,06	4,35	107,14%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			175,20%

2. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Derajat kesehatan adalah gambaran umum kondisi kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu negara atau daerah. Indikator derajat kesehatan Mortalitas (kematian), Morbiditas (kesakitan), Status gizi. Upaya meningkatkan derajat kesehatan adalah;

- Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
- Melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- Sanitasi lingkungan
- Epidemiologi
- Biostatistik
- Administrasi dan kebijakan kesehatan
- Kesehatan dan keselamatan kerja

Berdasarkan Laporan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Yahukimo tahun 2024 Capaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Yahukimo yang dipublikasikan oleh BPS dalam buku Kabupaten Yahukimo Dalam Angka tahun 2025 sebesar 66,51 tahun atau terealisasi 99,81% dari target yang telah ditetapkan;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	66.63	66,51	99,81	Sangat Tinggi

Angka Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Indikasi ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Semakin tinggi Usia Harapan Hidup, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

Ditinjau secara komparatif waktu Usia Harapan Hidup Kabupaten Yahukimo dalam 5 tahun terakhir mengalami trend peningkatan dari angka 65,93 pada tahun 2020 hingga pada tahun 2024 mencapai angka 66,51. Artinya secara rata-rata penduduk di Kabupaten Yahukimo mampu bertahan hidup hingga umur 66 tahun.

$$\begin{array}{l} \text{\%Realisasi} \\ \text{kinerja Usia} \\ \text{Harapan Hidup} \end{array} = \frac{66,51}{66.63} \times 100\% = \mathbf{99,81\%}$$

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 0,09 tahun atau naik 0,14% dari angka 66,42 di tahun 2023 menjadi 66,51 di tahun 2024;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Angka Harapan Hidup	66,45	66,42	99,95	66.63	66,51	99,81	0,14%

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir usia harapan hidup RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo ditetapkan sebesar 66,97 (umur) sehingga jika dibandingkan dengan capaian UHH pada tahun ini, dengan angka 66,42 maka capaian kinerja UHH dapat dikategorikan sangat berhasil karena telah mencapai 99,31% dari target akhir RPJMD.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Angka Harapan Hidup	Tahun (umur)	66.63	66,51	99,81	66.97	99,31%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Capaian sasaran peningkatan derajat kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo di kategorikan "sangat berhasil" karena dukungan program dan kegiatan yang di laksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Dekai.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, selaras dengan peningkatan capaian kinerja tahun 2024, peningkatan anggaran pada bidang Kesehatan terjadi karena kebutuhan pemerataan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat di Kawasan terpencil. Perlu di ketahui Kabupaten Yahukimo terdiri dari 51 Distrik dan Sebagian besar daerah masih belum tersentuh pembangunan dan khususnya dalam pelayanan Kesehatan mumpuni. Oleh karena itu focus pemerataan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat perlu di tingkatkan dan menjadi salah satu focus prioritas pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk tahun kedepannya. Solusi yang dapat di tarik dalam hal pemerataan ini adalah;

- Perlunya master plan mumpuni dalam peningkatan sarana prasarana Kesehatan yang tepat sasaran khususnya pada aspek pemerataan
- Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan Kesehatan secara keseluruhan di daerah Kabupaten Yahukimo
- Kebutuhan akan dokumentasi SIPD Kesehatan atau profil Kesehatan di daerah Kabupaten Yahukimo sebagai alat untuk peningkatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan Kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Yahukimo
- Perlu adanya koordinasi antar pemerintah daerah, Rumah sakit dengan kepala distrik dan kepala kampung dalam hal pelayanan Kesehatan bagi masing-masing masyarakat di distriknya masing-masing.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di hitung dengan membagi persentase hasil capaian kinerja sasaran strategis dengan persentase anggaran yang di keluarkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Pada tahun 2024 peningkatan derajat Kesehatan berdasarkan Indikator angka usia harapan hidup (UHH) masyarakat kabupaten Yahukimo mencapai sasaran kinerja sebesar 99,81% sedangkan anggaran yang dikeluarkan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut terealisasi sebesar 77,02% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian peningkatan derajat Kesehatan Kabupaten Yahukimo mencapai 129,19%. Berikut disajikan rincian perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bidang pelayanan Kesehatan Kabupaten Yahukimo;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran/Target	Realisasi	(%) Realisasi
1	Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	199.765.889.586	142.555.199.066	71,36%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.767.648.000	20.558.691.261	98,99%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.610.054.000	375.054.000	14,37%
		RSUD Dekai			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	39.292.098.650	35.889.151.346	91,34%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.700.241.624	12.537.350.523	98,72%
		Dinas Perhubungan			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.945.800.000	2.945.800.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	278.081.731.860	214.861.246.196	77,27%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	66,63	66,51	99,82%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			129,19%

Misi	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya
Tujuan	:	Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan

Indikator Tujuan Peningkatan Daya saing Kepemudaan dan Olahraga adalah Besaran nilai Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga yang terealisasi pada Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga (SDI) mengukur kemajuan pembangunan olahraga di Indonesia, dengan fokus pada partisipasi, prestasi, dan infrastruktur, serta memiliki dimensi ekonomi, literasi fisik, dan perkembangan personal. SDI mencakup berbagai aspek, termasuk partisipasi masyarakat dalam olahraga, prestasi atlet, dan ketersediaan infrastruktur olahraga.

DI membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pembangunan olahraga di Indonesia

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan besaran Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga dengan kriteria “Meningkat” untuk mengukur keberhasilan peningkatan prestasi Pemuda dan Olahragawan di wilayah Kabupaten Yahukimo di setiap tahunnya. Berikut di tampilkan target dan hasil realisasi Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga masyarakat Kabupaten Yahukimo tahun 2024;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Meningkat	-	-	Tidak Tercapai

Dilihat dari tabel di atas, penghitungan Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo, belum dapat di ukur besarnya dikarenakan tidak adanya komponen pengukuran indeks maupun data-data sensus kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Yahukimo selama tahun 2024. Meskipun demikian peningkatan daya saing pemuda tetap dilaksanakan oleh Kabupaten Yahukimo selama 4 tahun ini melalui 2 sasaran strategis yaitu upaya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dan Meningkatnya Prestasi Pemuda dalam pembangunan. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan kedua sasaran startegis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Optimalnya pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan memiliki peran penting dalam menciptakan atlet yang mampu berprestasi di tingkat nasional. Keberhasilan dalam bidang olahraga tidak hanya mengharumkan nama daerah tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan ekosistem olahraga yang kondusif, baik dari sisi pembinaan atlet, penyediaan sarana dan prasarana, maupun peningkatan kualitas pelatih dan kompetisi.

Namun, hingga saat ini, belum ada atlet dari Kabupaten Yahukimo yang memperoleh penghargaan nasional. Pembinaan yang dilakukan masih berfokus pada pemberian uang pembinaan kepada cabang olahraga sebagai langkah awal dalam meningkatkan kualitas atlet lokal. Capaian sasaran belum terjadi karena Indikator kinerja belum tercapai selama tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Optimalnya pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet yang Berprestasi Nasional	1	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 tidak dapat di laksanakan karena belum ada data atlet kabupaten Yahukimo yang berprestasi Nasional;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Jumlah Atlet yang Berprestasi Nasional	1	-	-	1	-	-	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah tidak dapat di laksanakan karena belum ada data atlet kabupaten Yahukimo yang berprestasi Nasional;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Jumlah Atlet yang Berprestasi Nasional	Jumlah	1	-	-	1	-

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor yang menyebabkan target belum tercapai antara lain;

- Keterbatasan fasilitas olahraga: Infrastruktur olahraga di Yahukimo masih dalam tahap pengembangan dan belum memadai untuk pembinaan atlet yang berorientasi pada kompetisi nasional;
- Kurangnya kompetisi di tingkat daerah dan provinsi: Atlet membutuhkan lebih banyak pengalaman bertanding agar dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka
- Minimnya pelatih dan pendamping berkualitas: Ketersediaan tenaga pelatih yang memiliki pengalaman di tingkat nasional masih terbatas
- Fokus masih pada tahap pembinaan awal: Saat ini, perhatian lebih banyak diberikan pada program pembinaan atlet melalui bantuan keuangan kepada cabang olahraga, bukan langsung pada pencapaian prestasi nasional

Untuk mengatasi kendala di atas, beberapa langkah telah dilakukan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan antara lain;

- Pemberian dana pembinaan kepada cabang olahraga untuk mendukung latihan dan peningkatan kapasitas atlet
- Meningkatkan kerja sama dengan KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua dalam pengembangan program pembinaan atlet
- Mengirimkan atlet untuk mengikuti pelatihan dan kompetisi di luar daerah, sehingga mereka mendapatkan pengalaman bertanding yang lebih luas
- Mendorong pembentukan akademi atau pusat latihan olahraga daerah sebagai wadah pembinaan atlet sejak usia dini

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut di sajikan rincian anggaran program keolahragaan yang terlaksana selama tahun anggaran 2024 oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Jumlah Atlet yang Berprestasi Nasional	Dinas Pemuda dan Olah Raga			
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.550.000.000	1.550.000.000	100%
		(%) Total Realisasi Anggaran	1.550.000.000	1.550.000.000	100%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	-	-	-
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-

2. Sasaran Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kepemimpinan. Oleh karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga berupaya untuk mendorong keterlibatan pemuda melalui berbagai program pembinaan. Namun, hingga saat ini belum terdapat data yang terukur mengenai jumlah pemuda yang berperan dalam pembangunan, sehingga pencapaian target 100% belum dapat dinyatakan sepenuhnya berhasil.

Meskipun demikian, Dinas Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan beberapa bentuk pembinaan kepada pemuda, antara lain;

- Pembinaan kepada Paskibraka Kabupaten
 - Memberikan uang pembinaan sebagai bentuk apresiasi kepada anggota Paskibraka yang telah berkontribusi dalam peringatan Hari Kemerdekaan
 - Fasilitasi sarana dan prasarana dalam persiapan 17 Agustus, termasuk pelatihan, perlengkapan, konsumsi, dan pendampingan dari pelatih
- Pembinaan kepada KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)
 - Memberikan uang pembinaan kepada KNPI untuk mendukung program kepemudaan.
 - Fasilitasi berbagai kegiatan kepemudaan, seperti pelatihan kepemimpinan dan kegiatan sosial yang melibatkan pemuda dalam pembangunan daerah

Pengukuran indikator kinerja persentase pemuda yang berperan dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Bupati no.01 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022-2026 di hitung dengan rumus;

$$\% \text{ Pemuda Yang Berperan Dalam Pembangunan} = \frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif Bekerja (Masy umur 15 – 30 thn)}}{\text{Jumlah keseluruhan pemuda (Masy umur 15 – 30 thn)}} \times 100$$

Dikarenakan belum adanya 2 komponen rumus di atas maka pengukuran Indikator kinerja ini belum dapat terlaksana.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Pemuda Yang Berperan Dalam Pembangunan	100	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Belum ada sensus masyarakat kategori umur 16 – 30 tahun yang aktif bekerja atau memiliki pekerjaan di wilayah Kabupaten Yahukimo pada tahun 2023 dan 2024,

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Pemuda Yang Berperan Dalam Pembangunan	100	-	-	100	-	-	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Belum ada sensus masyarakat kategori umur 16 – 30 tahun yang aktif bekerja dan jumlah keseluruhannya di wilayah Kabupaten Yahukimo pada tahun 2023 dan 2024;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Persentase Pemuda Yang Berperan Dalam Pembangunan	Persentase	100%	-	-	100%	-

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Penyebab belum terukurnya persentase pemuda yang berperan dalam pembangunan dikarenakan Belum ada data jumlah masyarakat kategori umur 16 – 30 tahun yang aktif bekerja dan jumlah total Populasi masyarakat dengan rentang umur 16 – 30 tahun di wilayah Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024.

Solusi yang bisa dilaksanakan untuk tahun-tahun ke depannya adalah dengan menambahkan sensus masyarakat kategori Pemuda (15 – 30 tahun) dan sensus tenaga kerja dengan kategori Pemuda (15 – 30 tahun) di wilayah Kabupaten Yahukimo.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis tersebut efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat di ukur karena tidak adanya realisasi capaian kinerja pembangunan pemuda di tahun 2024, namun didukung dengan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Persentase Pemuda Yang Berperan Dalam Pembangunan	Dinas Pemuda dan Olah Raga			
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.230.000.000	3.229.000.000	99,97%
		(%) Total Realisasi Anggaran	3.230.000.000	3.229.000.000	99,97%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	-	-	-
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-

Misi	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya
Tujuan	:	Meningkatkan kualitas Kebudayaan dan Nilai Adat Istiadat dalam kehidupan

Indikator Tujuan Peningkatan kualitas Kebudayaan dan Nilai Adat Istiadat dalam kehidupan bermasyarakat adalah Besaran nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan yang terealisasi pada Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Menurut Kementrian Kebudayaan Indonesia, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.

Konsep Dimensi IPK meliputi Ekonomi budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, ekspresi budaya, Budaya Literasi, dan Gender.

Kabupaten Yahukimo sebagai bagian dari Provinsi Papua dan pemilik bagian yang membentuk "Budaya Tanah Papua" menggunakan capaian kinerja IPK dari Provinsi Papua, Berikut indeks pembangunan Kebudayaan Provinsi Papua dan perbandingannya dengan Nasional;

Tabel 3.5 Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional dan Provinsi papua
Tahun 2018 - 2023

TAHUN	NASIONAL	PAPUA
2018	53.74	46.25
2019	55.91	47.49
2020	54.65	46.26
2021	51.90	41.87
2022	55.13	44.62
2023	57.13	48.52

Sumber: IPK Provinsi <https://ipk.kemenbud.go.id/provinsi/94>

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan besaran Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 46.4% untuk mengukur seberapa besar peningkatan Kualitas Kebudayaan dan Nilai Adat Istiadat dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Kabupaten Yahukimo di setiap tahunnya. Capaian Tujuan Kebudayaan belum bisa diukur karena Nilai IPK tahun 2024 belum di rilis oleh Kementrian Kebudayaan. Berikut di tampilkan target dan hasil realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan masyarakat Kabupaten Yahukimo tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Meningkatkan kualitas Kebudayaan dan Nilai Adat Istiadat dalam kehidupan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	46.4	-	-	Tidak Tercapai

Dilihat dari tabel di atas, penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Yahukimo, belum dapat di ukur besarnya dikarenakan tidak adanya komponen pengukuran indeks di Kabupaten Yahukimo selama tahun 2024. Tujuan indeks di capai dengan pelaksanaan 2 sasaran strategis yaitu Peningkatan efektivitas pengembangan dan pendidikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat, dan Meningkatkan pelestarian Budaya asli Papua melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Yahukimo. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan kedua sasaran startegis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran meningkatnya efektifitas pengembangan dan Pendidikan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Berdasarkan Penetapan IKU 2022-2026 Kabupaten Yahukimo, Capaian Sasaran Meningkatnya efektifitas pengembangan dan Pendidikan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, dilihat dari Persentase Muatan Nilai- Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan yaitu Kegiatan dengan nilai muatan lokal dibandingkan keseluruhan kegiatan pendidikan di kali 100. Pengukuran Persentase Muatan Nilai - Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan dilakukan dengan rumus sebagai berikut;

$$\% \text{Muatan Nilai budaya} = \frac{\text{Kegiatan dengan nilai muatan lokal}}{\text{keseluruhan kegiatan pendidikan}} \times 100$$

Selama tahun anggaran 2024 seluruh kegiatan bidang Pendidikan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo melalui 2 program dengan total 8 Kegiatan.

Sedangkan Kegiatan dalam bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui 2 program dan 3 kegiatan, berdasarkan penjelasan di atas maka pengukuran persentase muatan nilai budaya terhitung sebagai berikut;

$$\% \text{Muatan Nilai budaya local tahun 2024} = \frac{3 \text{ Kegiatan}}{8 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 37,50\%$$

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya efektifitas pengembangan dan pendidikan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Muatan Nilai- Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan	100	37,50%	37,50%	Sangat Rendah

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Selanjutnya pada tahun anggaran 2023 seluruh kegiatan bidang Pendidikan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo melalui 3 program dengan total 10 Kegiatan. Sedangkan Kegiatan dalam bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui 2 program dan 5 kegiatan, berdasarkan penjelasan tersebut maka besaran Persentase Muatan Nilai- Nilai Budaya Lokal terhitung sebagai berikut;

$$\text{\%Muatan nilai budaya lokal tahun 2023} = \frac{5 \text{ Kegiatan}}{10 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 50,00\%$$

Hasil perbandingan realisasi kinerja Persentase Muatan Nilai- Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan terlihat hasil persentase capaian kinerja tahun 2024 menurun sebesar 25% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Muatan Nilai- Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan	100	50,00%	0,50%	100	37,50%	0,38%	-25,00%

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir angka harapan hidup RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo ditetapkan sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan sangat berhasil karena telah mencapai 37,50% dari target akhir RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	% Realisasi		
1	Persentase Muatan Nilai- Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan	%	100	37,50	37,50	100	37,50

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor penyebab rendahnya Capaian Sasaran Meningkatnya efektifitas pengembangan dan Pendidikan kebudayaan dalam jenjang pendidikan selama tahun 2024 adalah sebagai Berikut;

- Terbatasnya alokasi anggaran bidang kebudayaan sehingga pelaksanaan kebijakan dari Pemerintah daerah terbatas
- Adanya keseimbangan antara penyediaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bagian-bagian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam peningkatan bidang Pendidikan Kebudayaan
- Kurangnya minat generasi muda, perubahan tren budaya dan kurangnya regenerasi dalam komunitas seni dan budaya daerah
- Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan seni rupa, sastra dan teater seperti galeri seni, panggung pertunjukan atau ruang kreatif

Solusi alternatif yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut;

- Menyelenggarakan festival budaya lokal yang melibatkan berbagai cabang seni, termasuk seni rupa, sastra, dan teater
- Menggunakan media sosial dan platform digital untuk memperkenalkan dan mempromosikan budaya daerah dan muatan lokal
- Peningkatan integrasi budaya berbasis muatan lokal dalam kurikulum sekolah untuk menumbuhkan minat anak-anak murid sejak dini

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam capaian sasaran strategis ini Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan program kegiatannya dengan 37,58% efisiensi penggunaan sumber daya;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Persentase Muatan Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
		Program Pembinaan Sejarah	111.600.000	111.350.000	99,78%
		(%) Total Realisasi Anggaran	111.600.000	111.350.000	99,78%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	100,00%	37,50%	37,50%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			37,58%

2. Sasaran Meningkatnya pelestarian budaya asli Papua

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Meningkatnya pelestarian budaya asli Papua, dilihat dari pelaksanaan Program kegiatan yang membantu organisasi atau Lembaga masyarakat yang bertugas melestarikan benda dan/atau objek budaya yang berada di wilayah Kabupaten Yahukimo. Tahun 2024 target pelestarian benda Budaya diantaranya adalah 5 pembangunan tugu Injil yakni di distrik Langda, Kabianggama, Ninia, Sobaham, Soba dan cagar budaya rumah pohon serta Reahabiitasi Tugu Injil di distrik Walma yang terpelihara

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya pelestarian budaya asli Papua	Cakupan Budaya Benda dan tak Benda Yang Dilestarikan	1	5	500%	

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada Indikator Kinerja sasaran Cakupan Budaya Benda dan tak Benda Yang Dilestarikan terjadi peningkatan sebesar 150% di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Cakupan Budaya Benda dan tak Benda Yang Dilestarikan	1	2	200%	1	5	500%	150%

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Target akhir peningkatan pelestarian budaya asli papua RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan dengan jumlah 1 cakupan sedangkan realisasi cakupan budaya benda dan tidak benda yang di lestarikan sebanyak 5 cakupan, sehingga dapat di simpulan capaian kinerja tahun 2024 terhitung sebesar 500% target capaian akhir RPJMD.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2023 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Cakupan Budaya Benda dan tak Benda Yang Dilestarikan	Jumlah	1	5	500%	1	500,00%

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Pencapaian hasil target kinerja ini tidak terlepas dari beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- Tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini;
- Usulan Distrik pada saat musrenbang tahun 2023 terkait pembangunan tugu injil di distrik tersebut.
- Dukungan kebijakan pemerintah daerah, termasuk regulasi yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya;
- Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat situs cagar budaya sebagai warisan berharga

Solusi; Sesuai program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis cakupan peningkatan cagar budaya yang terpelihara sebagaimana pada perjanjian kinerja, maka hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka mendukung keberhasilan sebagai berikut:

- Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kegiatan peningkatan cakupan peningkatan cagar budaya yang terpelihara.
- Membuat pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran biaya kegiatan untuk penunjang peningkatan cakupan peningkatan cagar budaya yang terpelihara.
- Melakukan evaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan
- Pembuatan laporan kegiatan dan menjalankan rekomendasi atas catatan-catatan evaluasi dari pimpinan.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam Pelaksanaan pencapaian sasaran ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah merealisasikan sebesar 99,83% program kegiatannya, oleh karena capaian Indikator kinerja sasaran mencapai 500% maka terhitung efisiensi penggunaan sumber daya atas sasaran strategis ini sebesar 500,87%;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Cakupan Budaya Benda dan tak Benda Yang Dilestarikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
		Program Pengembangan Kebudayaan	863.000.000	861.500.000	99,83%
		(%) Total Realisasi Anggaran	863.000.000	861.500.000	99,83%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	1	5	500%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			500,87%

Misi	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya
Tujuan	:	Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator Tujuan Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam Masyarakat di wilayah Kabupaten Yahukimo adalah Angka Pertumbuhan Penduduk yang terjadi di wilayah Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Pertumbuhan Penduduk sebesar 0.98% untuk mengukur naik turun pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Yahukimo di setiap tahunnya. Berikut di tampilkan target dan hasil Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Yahukimo di tahun 2024;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Pertumbuhan Penduduk	0,98	1,47	150,00%	Tercapai

Dilihat dari tabel di atas hasil penghitungan Pertumbuhan Penduduk Yahukimo tahun 2024, diketahui sebesar 1,47 (Yahukimo dalam angka 2025) atau 150% capaian target pertumbuhan penduduk dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Yahukimo menurun sebesar 0,04 dari angka 1,51 di tahun 2023.

Pencapaian tujuan di laksanakan dengan 2 sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana, dan mengoptimalkan Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Keluarga Sejahtera. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan kedua sasaran startegis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Pelayanan Keluarga Berencana (KB), bertujuan untuk membantu masyarakat mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui berbagai metode kontrasepsi dan pelayanan kesehatan reproduksi

Berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana, dilihat dari persentase keluarga berencana yang aktif dibagi dengan total keseluruhan keluarga berencana atau total Populasi pasangan Subur (PUS) pada tahun 2024. Dari rumus

tersebut di ketahui persentase keluarga Berencana yang aktif pada tahun 2024 adalah sebesar 9,67%, sehingga realisasi kinerja sasaran ini diketahui sebagai berikut;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Berencana Yang Aktif	32	9,67%	30,22%	Sangat Rendah

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada Indikator Kinerja Persentase Keluarga Berencana Yang Aktif terjadi penurunan sebesar 20,33 atau 68% Keluarga Berencana Aktif pada masyarakat Kabupaten Yahukimo, dimana pada tahun 2024 hanya ada 9,67% Keluarga berencana aktif yang tercatat sedangkan pada tahun 2023 sebesar 30%.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Keluarga Berencana Yang Aktif	31%	30%	96,77%	32%	9,67%	30,22%	-68%

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir angka harapan hidup RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar 34% dari masyarakat Kabupaten Yahukimo yang aktif menggunakan alat KB, Pada tahun 2024 9,67% masyarakat masuk kategori keluarga Berencana aktif. Sehingga dapat disimpulkan pencapaian sasaran persentase Keluarga Berencana yang aktif pada tahun 2024 telah mencapai 0,28% keberhasilan RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Persentase Keluarga Berencana Yang Aktif	%	32	9,67%	30,22%	34	0,28%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Sampai saat ini jangkauan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB belum mencapai Pemerataan, Optimalnya Pelaksanaan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera serta belum meningkat Pembinaan Keluarga Berencana di Tingkat Kampung/Desa. Dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) serta Pelaksanaan Pelayanan maupun Pembinaan Ber-KB tidak berjalan maksimal, maka perlu mendapatkan Perhatian khusus. Berikut, Beberapa penyebab dari permasalahan tersebut diatas antara lain;

- Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Yahukimo belum semuanya bersinergi.
- Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program kegiatan pada setiap bidang di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Yahukimo.
- Keterbatasan tenaga pengelola program di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target sasaran
- maupun indikator kinerja pada beberapa seksi tidak optimal dan sangat kurang serta mempengaruhi tingkat capaian Indikator kinerja
- Peran serta semua elemen yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Yahukimo terhadap program dan kegiatan kesehatan masih belum optimal, termasuk di UPT Dinas (Puskesmas) yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- Serta kurangnya pendanaan untuk menjangkau masyarakat Yahukimo guna melakukan sosialisasi tentang Keluarga Berencana (KB)

Solusi Alternatif Yang Telah Dilakukan Untuk Mencapai Target;

- Dilakukan koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Dilakukan pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB
- Dilakukan penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)
- Dilakukan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

Solusi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya antara lain adalah:

- Sinergitas dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di tingkat Kabupaten, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB maupun Puskesmas, harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki terutama sinergitas antar pengelola program Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

- Penyiapan anggaran terhadap program kegiatan disetiap bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Yahukimo.
- Penyusunan program dan kegiatan yang lebih sensitive, aplikatif, tepat dan memiliki daya ungkit yang signifikan serta saling bersinergi antar program/ kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator kinerja sasaran peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana terhitung 30,22%, sedangkan persentase total realisasi anggaran program kegiatannya sebesar 99,99% sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pencapaian sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB mencapai 30,22% efisiensi penggunaan sumber daya;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Persentase Keluarga Berencana Yang Aktif	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			
		Program Pengendalian Penduduk	1.086.000.000	1.086.000.000	100,00%
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	4.435.182.000	4.434.485.000	99,98%
		(%) Total Realisasi Anggaran	5.521.182.000	5.520.485.000	99,99%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	32%	9,67%	30,22%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			30,22%

2. Sasaran Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS) adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, terutama keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera, melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sosial, dan psikologis mereka, serta meningkatkan ketahanan keluarga.

Capaian Sasaran Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS), dilihat dari jumlah keluarga kategori sejahtera yang berada di wilayah kabupaten Yahukimo. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Pada

tahun 2024 jumlah keluarga dengan kategori sejahtera adalah 1533 Keluarga atau tercapai 91,69% capaian target kinerja berikut selengkapnya;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Keluarga Sejahtera	1672	1533	91,69%	Sangat Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya diketahui mengalami peningkatan sebesar 197% dari jumlah keluarga sejahtera tahun 2023 sebanyak 517 keluarga dengan menjadi 1533 keluarga sejahtera di tahun 2024;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Jumlah Keluarga Sejahtera	1572	517	32,89%	1672	1533	91,69%	197%

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir angka harapan hidup RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar 1872 Jumlah keluarga Sejahtera yahukimo, Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1533 masyarakat masuk kategori keluarga Sejahtera. Sehingga dapat disimpulkan pencapaian sasaran persentase Keluarga Berencana yang aktif pada tahun 2024 mencapai 81,89% keberhasilan RPJMD;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Jumlah Keluarga Sejahtera	%	1672	1533	91,69%	1872	81,89%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Berikut, Beberapa penyebab dari permasalahan tersebut diatas antara lain;

- Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Yahukimo belum semuanya bersinergi.
- Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Yahukimo.
- Keterbatasan tenaga pengelola program di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tidak optimal dan sangat kurang serta mempengaruhi tingkat capaian Indikator kinerja
- Peran serta semua elemen yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Yahukimo terhadap program dan kegiatan kesehatan masih belum optimal, termasuk di UPT Dinas (Puskesmas) yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- Kurangnya pendanaan untuk menjangkau pelayanan KB kepada masyarakat kampung yang jauh
- Sulitnya melaksanakan upaya sosialisasi dan penyuluhan tentang Keluarga Berencana (KB)

Solusi Alternatif Yang Telah Dilakukan Untuk Mencapai Target adalah sebagai berikut;

- Dilakukan koordinasi dan evaluasi pelaporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
- Sinergitas dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di tingkat Kabupaten, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB maupun Puskesmas, harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki terutama sinergitas antar pengelola program Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
- Penyusunan program dan kegiatan yang lebih sensitive, aplikatif, tepat dan memiliki daya ungkit yang signifikan serta saling bersinergi antar program/ kegiatan dalam rangka pencapaian pemerataan pelayanan KB ke masyarakat

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi capaian kinerja sasaran peningkatan keluarga sejahtera kabupaten Yahukimo adalah sebesar 93,26% jika dibandingkan dengan 98,31% realisasi anggaran program kegiatannya maka efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran ini sebesar 93,26%;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Jumlah Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	3.979.200.000	3.911.950.000	98,31%
		(%) Total Realisasi Anggaran	3.979.200.000	3.911.950.000	98,31%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	1672	1533	91,69%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			93,26%

Misi	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya
Tujuan	:	Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Indikator Tujuan Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Masyarakat di wilayah Kabupaten Yahukimo adalah mengukur naik/turunnya Angka Kemiskinan Penduduk yang terjadi di wilayah Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Angka Kemiskinan Masyarakatnya pada angka sebesar 34,82% di tahun 2024, Berdasarkan Laporan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024 angka kemiskinan yang terjadi pada tahun 2024 mencapai 33,82% dari jumlah seluruh Penduduk Kabupaten Yahukimo, seperti di tampilkan dalam tabel sebagai berikut;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	34.82%	33,82%	102,87%	Tercapai

Dilihat dari tabel di atas hasil penghitungan Angka Kemiskinan Kabupaten Yahukimo tahun 2024, diketahui sebesar 33,82% atau 102,87% capaian tujuan, oleh karena indikator kinerja ini termasuk kinerja regresif maka peningkatan kinerja di nilai dari rendahnya besaran kinerja dan besaran persentase realisasi kinerja di hitung dengan rumus sebagai berikut

$$\% \text{Realisasi 2024} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} = \frac{(2 \times 34,82\%) - 33,82\%}{34,82\%} = \mathbf{102,87\%}$$

Capaian target angka kemiskinan jika dibandingkan dengan tahun 2023 angka kemiskinan menurun sebesar 2,26% dari angka 36,08% di tahun 2023, Tentunya hal tersebut sejalan dengan program dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Tahun 2024. Salah satunya dengan meningkatkan penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pencapaian tujuan di laksanakan dengan 3 sasaran strategis yaitu Meningkatnya Daya Beli Masyarakat, Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan Miskin dan Meningkatnya Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP). Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan ketiga sasaran startegis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat, dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan yang terjadi, Angka Pengeluaran Perkapita (APP) merupakan angka pengeluaran rata-rata yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan. baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan Indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan Pelaporan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024 angka tersebut terhitung sebesar Rp.5,747,000.00. Jika dilihat dari target yang telah ditetapkan maka sasaran upaya peningkatan daya beli masyarakat dapat di kategorikan sangat tinggi karena mencapai 126,19% capaian kinerja;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (IPM)	4554.4	5747.0	126,19	Sangat Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pengeluaran Perkapita masyarakat Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 7,40% persen jika dibandingkan dengan angka pengeluaran perkapita tahun 2023 yang mencapai Rp.5.351.000,00, Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat yang didorong oleh meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Yahukimo;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Pengeluaran Perkapita (IPM)	4405.9	5351	121,45	4554.4	5747.0	126,19	7,40%

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Target akhir pengeluaran perkapita RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar Rp.4.851.500,00. Sehingga dapat disimpulkan pencapaian sasaran peningkatan daya beli masyarakat pada tahun 2024 telah mencapai 118,46% keberhasilan target RPJMD.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Pengeluaran Perkapita (IPM)	(000 Rupiah)	4554.4	5747.0	126,19	4851.5	118,46%

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Peningkatan yang terjadi pada rata-rata Pengeluaran perkapita di Kabupaten Yahukimo tidak lepas dari faktor-faktor sebagai berikut;

- Peningkatan Pengeluaran perkapita selaras dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Yahukimo di tahun 2024
- Upaya Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam pemberdayaan dan pemberian bantuan sosial yang progresif bagi Masyarakat Yahukimo melalui program kegiatan
- Peningkatan fasilitas sarana prasarana UMKM untuk menjalankan roda perekonomian yang lebih merata di antara Distrik-distrik

Solusi yang bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk peningkatan Pengeluaran Perkapita yang berkelanjutan diantaranya;

- Upaya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia beserta komponennya dilaksanakan berdasarkan pemerataan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Yahukimo khususnya terhadap Orang Asli Papua (OAP) melalui pemberdayaan terstruktur dan membangun
- Menyediakan sarana prasarana perekonomian di sektor UMKM sesuai potensi daerah di setiap Distrik
- Pelaksanaan Penelitian dan evaluasi pertumbuhan dan potensi perekonomian di setiap Distrik

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian peningkatan daya beli masyarakat terlaksana melalui program pengembangan UMKM oleh Disperindagkop Kabupaten Yahukimo terhitung mencapai 126,19% efisiensi penggunaan sumber daya, berikut perinciannya;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Pengeluaran Perkapita (IPM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
		Program Pengembangan Umkm	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	4554,4	5747	126,19%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			126,19%

2. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan Miskin

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Kemiskinan masyarakat diukur menggunakan indikator Angka Kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS. Perhitungan angka kemiskinan menurut BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut BPS penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan Miskin, dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Yahukimo, Pada tahun 2024 Indeks kedalaman kemiskinan Yahukimo tercatat sebesar 4,67 yang merupakan titik terendah indeks dalam 7 tahun. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Yahukimo mengalami penurunan sebesar 0,36 dari angka indeks 5,03. Hal ini berarti pencapaian sasaran penurunan indeks kedalaman kemiskinan kabupaten Yahukimo dikategorikan Tercapai seperti yang di tampilkan pada tabel berikut;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan Miskin	Indek Kedalaman Kemiskinan	Menurun	Menurun	100%	Tercapai

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Indek Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2023 menggunakan satuan “menurun” dalam pengukuran kinerjanya walaupun terdapat perbedaan dalam angka jika pencapaian sasaran tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi kinerja tetap dianggap sebesar 100% karena telah mencapai target yang di tentukan, berikut Indeks Kedalaman Kemiskinan Yahukimo dari tahun 2021 – 2024;

Tabel 3.6 Pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Yahukimo tahun 2021 - 2026

TAHUN	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN	NAIK/TURUN	KETERANGAN
2021	7,38	-	
2022	7,27	-0,11	Menurun
2023	5,03	-2,24	Menurun
2024	4,67	-0,36	Menurun

Perlu di ketahui penurunan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Yahukimo tahun 2024 lebih kecil jika dibandingkan penurunan yang terjadi pada tahun 2023, walaupun begitu penurunan yang konsisten dalam hal persentase penduduk miskin ini menunjukkan indikasi positif pemulihan kondisi ekonomi dan semakin membaiknya kualitas hidup masyarakat. Hal ini terlihat selaras dengan perbaikan indikator kinerja lainnya yang terkait seperti naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta turunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibandingkan tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indek Kedalaman Kemiskinan	Menurun	Menurun	100%	Menurun	Menurun	100%	tetap

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir Indeks Kedalaman Kemiskinan RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan Indikator “menurun” sehingga jika dilihat dari realisasi tahun 2024, maka capaian target akhir RPJMD di 100% tercapai;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Indek Kedalaman Kemiskinan	Keterangan	Menurun	Menurun	100%	Menurun	100%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Berbagai intervensi dilakukan melalui perangkat daerah terkait dalam upaya mengurangi beban penduduk miskin dan rentan, serta meningkatkan pemberdayaan untuk menaikkan produktivitasnya. Peran berbagai paket bantuan dari pemerintah berupa Bansos sangat signifikan dalam mengurangi beban bagi penduduk miskin.

Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator sasaran ini adalah;

- Dukungan kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, baik pemerintah daerah maupun nasional
- Adanya perangkat-perangkat daerah yang ikut berperan dan bersinergi dalam upaya penurunan angka kemiskinan
- Kondisi perekonomian yang sudah membaik pasca pandemi.

Adapun faktor penghambat pencapaian indikator sasaran ini adalah;

- Kurangnya keberdayaan ekonomi masyarakat,
- Menurunnya daya beli masyarakat akibat inflasi,
- Kurang terserapnya angkatan kerja,
- Angka pengangguran yang relatif tinggi
- Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana ekonomi

Solusi dari permasalahan tersebut diantaranya adalah;

- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui upaya perluasan lapangan kerja, pengembangan UMKM dan peningkatan peran koperasi
- Mengurangi beban masyarakat miskin melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin

- Peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, peternakan dan perikanan
- Peningkatan sinergisitas kinerja antar perangkat daerah terkait agar kelompok penerima manfaat lebih terfokus dalam penurunan angka kemiskinan.
- Mengupayakan perluasan lapangan kerja, baik di semua sektor ekonomi;

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya indikator kinerja Indeks Kedalaman Kemiskinan oleh Dinas Sosial, melalui anggaran program/kegiatannya adalah sebagai berikut;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Indek Kedalaman Kemiskinan	Dinas Sosial			
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.000.000.000	5.994.000.000	99,90%
		(%) Total Realisasi Anggaran	6.000.000.000	5.994.000.000	99,90%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	Menurun	Menurun	100%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			100,10%

3. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP)

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian, kapasitas, dan kesejahteraan mereka melalui berbagai program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal mereka. Tujuannya adalah:

- Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup OAP.
- Membangun kemandirian dan kemampuan OAP untuk mengelola sumber daya dan potensi lokal.
- Meningkatkan partisipasi OAP dalam pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.
- Memperkuat identitas dan budaya OAP.

Bidang Pemberdayaan yang dapat di terapkan kepada masyarakat OAP:

- Pendidikan: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk OAP.

- **Ekonomi:** Memberikan pelatihan kewirausahaan, akses modal, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- **Kesehatan:** Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta promosi kesehatan.
- **Sosial:** Membangun kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan pembangunan.
- **Lingkungan:** Memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Strategi Penting yang dilaksanakan oleh Kabupaten Yahukimo dalam memberdayakan masyarakatnya adalah:

- **Pendekatan Partisipatif:** Melibatkan OAP dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
- **Pendekatan Berbasis Potensi Lokal:** Mengembangkan program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal OAP.
- **Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan:** Melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pihak swasta dalam pemberdayaan OAP.
- **Penguatan Kapasitas:** Memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses informasi kepada OAP.
- **Perlindungan Sosial:** Memberikan jaminan sosial dan bantuan sosial kepada OAP yang membutuhkan.

Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), dilihat dari Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang melibatkan Orang Asli Papua (OAP), dan realisasi pelaksanaan program kegiatan tersebut. Berikut program-program yang dilaksanakan dengan focus pemberdayaan masyarakat Yahukimo selama tahun 2024;

NO	Program	Pelaksanaan	OPD Pelaksana
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung

NO	Program	Pelaksanaan	OPD Pelaksana
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
6	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
7	Program Pembangunan Kampung Dan Perkampungan	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%	Sekretariat Daerah

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran kinerja peningkatan Pemberdayaan OAP dikategorikan sebagai sangat berhasil karena telah mencapai 100% pelaksanaan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP)	Persentase Kegiatan Yang Melibatkan OAP	100	100	100	Sangat Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2024 indikator kinerja Persentase Kegiatan Yang Melibatkan OAP terlaksana dan terealisasi sebesar 100%, sama seperti tahun 2023;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Kegiatan Yang Melibatkan OAP	100	100%	100	100	100%	100	Tetap

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir Persentase Kegiatan Yang Melibatkan OAP RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan pencapaian sasaran Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) pada tahun 2023 mencapai 100% keberhasilan RPJMD.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Persentase Kegiatan Yang Melibatkan OAP	%	100	100%	100	100%	100%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja peningkatan pemberdayaan OAP di tahun 2024 adalah;

- Secara keseluruhan Kondisi wilayah Kabupaten Yahukimo yang luas dan masih banyak yang belum tersentuh pembangunan dan sarana transportasi sehingga pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan peran masyarakat merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan
- Pembangunan kualitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan merupakan prioritas program pembangunan kabupaten Yahukimo

Alternatif Solusi yang dapat dilaksanakan adalah;

- Peningkatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Yahukimo dari tahun ke tahun di segala bidang.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selanjutnya pada tahun 2023 capaian kinerja Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) tercatat 100% capaian kinerja, selain itu realisasi pelaksanaan program kegiatannya mencapai 84,38% sehingga dapat dikatakan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran ini mencapai 84,38%;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Persentase Kegiatan Yang Melibatkan OAP	Dinas Kesehatan			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.610.054.000	375.054.000	14,37%
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	32.150.000	32.150.000	100,00%
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua	4.400.000.000	4.400.000.000	100,00%
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung			
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1.208.160.000	1.205.440.000	99,77%
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.380.065.000	1.380.058.000	100,00%
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00%
		Program Pembangunan Kampung Dan Perkampungan	500.000.000	500.000.000	100,00%
		Sekretariat Daerah			
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	14.330.429.000	12.092.702.000	84,38%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	100	100%	100
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			84,38%

Misi	:	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal
Tujuan	:	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

Indikator Tujuan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten Yahukimo adalah mengukur Tingkat Kesempatan Kerja yang ada di wilayah Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Tingkat Kesempatan Kerja dengan angka sebesar 99,75% di tahun 2024. Berikut di tampilkan target dan hasil Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Yahukimo di tahun 2024;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	99,75	83,92	84,13%	Sangat Tinggi

Tingkat kesempatan kerja (TKK) adalah ukuran persentase penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja. Semakin tinggi TKK, maka kesempatan kerja semakin tinggi, TKK dihitung dengan membagi jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja, kemudian dikalikan 100, Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun.

Rumus perhitungan TKK;

$$\text{TKK} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

NO	KOMPONEN RUMUS	2023	2024	Sumber Data
1	Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja	238.079	260.782	YDA 2023 dan 2024
2	Jumlah angkatan kerja	309.293	310.739	Olahan YDA

$$\text{TKK} = \frac{260.782}{310.739} \times 100 = 83,92\%$$

2024 310.739

$$\text{TKK}_{2023} = \frac{238.079}{309.293} \times 100 = 76,98\%$$

Dilihat dari tabel di atas hasil penghitungan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Yahukimo tahun 2024, diketahui sebesar 83,92% atau 84,13% capaian target, dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 Tingkat Kesempatan Kerja di wilayah Kabupaten Yahukimo menurun sebesar 6,95% dari angka 76,98% di tahun 2023. Pencapaian tujuan di laksanakan dengan dua sasaran strategis yaitu Meningkatkan Efektivitas penyerapan tenaga kerja dan Meningkatkan Produktivitas tenaga kerja. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan kedua sasaran strategis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya Efektifitas Penyerapan Tenaga Kerja

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Penyerapan Tenaga Kerja, diukur dengan seberapa besar proporsi populasi yang berkerja terhadap populasi angkatan kerja aktif di wilayah kabupaten yahukimo atau yang biasa di sebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan Laporan Yahukimo dalam angka 2024 TPAK Kabupaten Yahukimo mencapai 85,67%, yang artinya sasaran meningkatkan efektifitas penyerapan tenaga kerja di Yahukimo dikategorikan sebagai sasaran yang "sangat tinggi" berikut hasil perhitungan capaian kinerja penyerapan tenaga kerja Kabupaten Yahukimo tahun 2024;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Efektifitas Penyerapan Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja Yang Terserap Sesuai Tingkat Pendidikan	82,61	85,67	103,70%	Sangat Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada "Indikator Proporsi Tenaga Kerja Yang Terserap" tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 8,47% proporsi tenaga kerja yang terserap, dari tahun 2023 dimana persentase penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 97,46%.

No	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	%
----	-----------	------------	------------	---

	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Naik/Turun
1	Proporsi Tenaga Kerja Yang Terserap Sesuai Tingkat Pendidikan	82.46	97,46	118,19	82.61	85,67	103,70%	8,47%

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Target akhir Meningkatnya Efektifitas Penyerapan Tenaga Kerja RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo, ditetapkan sebesar 82.91% dari Angkatan kerja yang tersedia. Karena itu dapat disimpulkan capaian sasaran ini mencapai 103,33% keberhasilan target akhir RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Proporsi Tenaga Kerja Yang Terserap Sesuai Tingkat Pendidikan	Persentase	82.46%	85,67	103,70%	82.91	103,33%

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Capaian Peningkatan Proporsi Tenaga Kerja Yang Terserap Sesuai Tingkat Pendidikan dikategorikan sebagai Capaian sasaran yang sangat tinggi, dikarenakan wilayah Kabupaten Yahukimo merupakan wilayah yang masih muda dalam hal pembangunan sehingga potensi kesempatan kerja yang ada sangat luas dan variative. Hal ini merupakan salah satu kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menumbuhkembangkan kualitas SDM masyarakatnya.

Faktor pendorong peningkatan capaian indikator sasaran TPAK adalah;

- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat khususnya terhadap Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan yang di laksanakan Kabupaten Yahukimo berjalan selaras dengan peningkatan TPAK;
- Pertumbuhan Kondisi Ekonomi di setiap Distrik membuka kesempatan Kerja bagi Masyarakat Yahukimo;

- Peningkatan sarana prasarana ekonomi berbasis kerakyatan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Yahukimo
- Pertumbuhan UMKM dan Koperasi di antara masyarakat

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak tenaga kerja yang terserap adalah sebagai berikut;

- Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk mempermudah pencari kerja untuk terserap di dunia kerja
- Penguatan Bursa Kerja Khusus dalam penempatan tenaga kerja lulusan SMK
- Penguatan hubungan industrial dalam upaya menjaga kondusifitas hubungan kerja untuk mengurangi perselisihan yang berdampak PHK

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian sasaran peningkatan TPAK pada tahun anggaran 2024 tidak di dukung program kegiatan seperti tahun sebelumnya dikarenakan terbatas nya alokasi anggaran, namun pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya masih memberikan efek dalam peningkatan ketenagakerjaan Kabupaten Yahukimo

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Proporsi Tenaga Kerja Yang Terserap Sesuai Tingkat Pendidikan	Dinas Tenaga Kerja			
		(%) Total Realisasi Anggaran			
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	82,61	85,67	103,70%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			

2. Sasaran Meningkatnya Produktivitas Tenaga kerja

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Meningkatnya Produktivitas Tenaga kerja, diukur dengan menggunakan 2 variabel yaitu PDRB atas dasar harga konstan sebagai output dan Jumlah Seluruh tenaga kerja yang berada pada wilayah Kabupaten yang bersangkutan sebagai input.

Berikut Rumusnya;

$$\text{Tingkat Produktifitas Regional} = \frac{\text{PDRB Tahun } n}{\text{Jumlah seluruh Tenaga Kerja Yahukimo Tahun } n} \times 100$$

$$\text{Tingkat Produktifitas Regional 2024} = \frac{3.157.260.000.000,00}{260.782} \times 100 = 12.106.893,88$$

Nilai Total PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2024 adalah sebesar Rp.3.157.260.000.000,00, sedangkan sesuai dokumentasi Yahukimo dalam angka tahun 2024 Jumlah tenaga kerja aktif yang berada di wilayah Kabupaten Yahukimo sebesar 260.782 orang, dari 2 komponen di atas dapat di Tarik kesimpulan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Yahukimo adalah sebesar Rp.12.106.893,88

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Produktivitas Tenaga kerja	Tingkat Produktifitas Regional (ribuan rupiah)	16.825	12.106,89	71,96%	Sedang

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Berdasarkan rumus perhitungan Tingkat Produktifitas Regional, tahun 2023 tingkat produktivitas regional terhitung sebagai berikut;

$$\text{Tingkat Produktifitas Regional 2023} = \frac{2.900.320.000.000,00}{238.079} \times 100 = 12.182.174,82$$

Jika dilakukan analisis perbandingan, tingkat produktivitas regional tahun 2024 dengan tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 0,62%, selengkapnya sebagai berikut;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Tingkat Produktifitas Regional (ribuan rupiah)	15.986	12.182,17	76,21%	16.825	12.106,89	71,96%	-0,62%

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Target akhir angka harapan hidup RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar Rp.18.503,00 Tingkat Produktifitas Regional, jika di bandingkan dengan capaian tingkat produktivitas regional tahun 2024 sebesar Rp.12.106.893,88 maka dapat disimpulkan pencapaian Tingkat Produktifitas Regional pada tahun 2024 mencapai 65,43% capaian target RPJMD 2021 – 2026.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Tingkat Produktifitas Regional	Ribu Rupiah	16.825	12.106,89	71,96%	18.503	65,43%

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Tingkat produktivitas regional Kabupaten Yahukimo di ukur dengan membagi nilai total PDRB atas harga konstan dengan jumlah tenaga kerja Kabupaten Yahukimo pada tahun bersangkutan. Tahun 2024 capaian kinerja ini terhitung sebesar 71,96% dari target yang telah di tetapkan, berikut faktor-faktor yang penyebab capaian ini;

- Peningkatan nilai PDRB pada tahun 2024 tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja d kabupaten Yahukimo
- Penurunan Jumlah Tenaga kerja aktif di Kabupaten Yahukimo
- Kapasitas tenaga kerja Masih belum memadai dan potensi tenaga kerja wilayah Kabupaten Yahukimo masih belum di dayagunakan secara maksimal
- Pemberdayaan Masyarakat OAP (Orang Asli Papua) sebagai potensi Tenaga Kerja mumpuni secara keseluruhan dan merata kurang memadai.
- Masih adanya potensi konflik sosial, keamanan dan ketertiban dalam upaya pemanfaatan tenaga kerja dan Pembangunan Kabupaten yang merata

Solusi yang bisa diambil oleh Kabupaten yahukimo adalah peningkatan kapasitas tenaga kerja di wilayah Kabupaten Yahukimo adalah;

- Bimbingan teknis atau pembinaan usaha mandiri bagi masyarakat dibarengi penciptaan kesempatan kerja dan usaha melalui pembantuan dan monitoring dalam rangka efektivitas;
- Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya bagi Masyarakat OAP dalam rangka pembangunan merata di setiap Distrik.
- Peningkatan Keamanan dan ketertiban khususnya daerah pemukiman dan Lokasi pembangunan Infrastruktur melalui bantuan Provinsi dan Pusat.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis tersebut, pada tahun 2024 didukung melalui Dinas Tenaga Kerja dengan capaian realisasi program sebesar 100% jika dibandingkan persentase capaian kinerja sebesar 71,96%, maka dihasilkan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 71,96%, berikut rinciannya;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Tingkat Produktifitas Regional	Dinas Tenaga Kerja			
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.550.000.000	1.550.000.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	1.550.000.000	1.550.000.000	100,00%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	16.825	12.106,89	71,96%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			71,96%

Misi	:	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal
Tujuan	:	Meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal

Indikator Tujuan Peningkatan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal di wilayah Kabupaten Yahukimo adalah

mengukur Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Produktif Ekonomi Kerakyatan di wilayah Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi kerakyatan adalah upaya pembangunan ekonomi yang melibatkan seluruh masyarakat dalam berbagai bidang, seperti produksi, konsumsi, dan pengawasan distribusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial, Sasaran ekonomi kerakyatan: Tersedianya lapangan kerja yang layak, Kepemilikan modal yang merata, Terjaminnya jaminan sosial, Terjaminnya pendidikan nasional yang gratis, Terjaminnya kebebasan untuk membentuk serikat ekonomi.

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Peningkatan Ekonomi Sektor-Sektor Produktif Ekonomi Kerakyatan sebesar di 6% pada pertumbuhan PDRBnya di tahun 2024 dibandingkan Tahun sebelumnya. Berikut di tampilkan target dan hasil Pertumbuhan sector-sektor ekonomi kerakyatan Kabupaten Yahukimo di tahun 2024;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal	Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Produktif Ekonomi Kerakyatan	6	3,99	66,50%	Sedang

Dilihat dari tabel di atas hasil penghitungan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Produktif Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Yahukimo tahun 2024, diketahui sebesar 3,99% atau 66,50% capaian target, dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Produktif Ekonomi Kerakyatan Yahukimo menurun sebesar 0,8% dari angka 3,19% di tahun sebelumnya. Pencapaian tujuan di laksanakan dengan Tujuh sasaran strategis yaitu Meningkatnya Produktivitas Regional sektor-sektor ekonomi kerakyatan, Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan kecil berbasis Pertanian, Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar dan eceran berbasis muatan Lokal, Meningkatnya Koperasi yang berdaya saing, Berkembangnya Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif, Meningkatkan penanganan Kearawanan pangan penduduk, dan Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan ketujuh sasaran startegis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Meningkatnya/rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan di ukur melalui angka pendapatan Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan (UMKM) di bagi dengan Jumlah total Pendapatan Kabupaten atau dengan Rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Produktifitas} = \frac{\text{Nilai Total Pendapatan Sektor UMKM}}{\text{Nilai Total Pendapatan kabupaten}} \times 100$$

Sektor ekonomi UMKM mencakup berbagai sektor PDRB, termasuk pertanian, perdagangan, manufaktur, jasa, dan bahkan kuliner, fashion, kerajinan, dan teknologi digital. Lebih rinci, UMKM berkontribusi dalam PDRB di sektor-sektor berikut;

- Pertanian: UMKM seringkali memanfaatkan sumber daya dari pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- Perdagangan: UMKM memainkan peran penting dalam jaringan distribusi dan ritel.
- Manufaktur: Banyak UMKM yang terlibat dalam produksi barang, mulai dari kerajinan tangan hingga produk industri skala kecil.
- Jasa: UMKM juga menyumbang signifikan pada sektor jasa, seperti transportasi, akomodasi, dan layanan keuangan.
- Sektor lain yang berkembang: Kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024, Perlu diketahui bahwa nilai pendapatan Total Daerah yang dihasilkan Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.2.092.259.257.780,00

Dikarenakan Sulitnya memantau dan menghitung nilai total pendapatan UMKM Kabupaten Yahukimo maka pengukuran Rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan belum dapat dilaksanakan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	Rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	0.52	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023;

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya tidak bisa dilakukan karena belum terhitungnya Rasio Produktivitas regional sector ekonomi kerakyatan dan tidak adanya data pendapatan UMKM Kabupaten Yahukimo;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	0.51	-	-	0.52	-	-	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Analisis perbandingan realisasi kinerja peningkatan produktifitas regional tahun 2024 terhadap target akhir realisasi kinerja berdasara RPJMD 2021 – 2026 belum bisa dilakukan;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	Rasio	0,52	-	-	0,54	-

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan belum dapat di ukur karena belum adanya data akurat mengenai kondisi dan jenis sector-sektor ekonomi kerakyatan yang ada di wilayah Kabupaten Yahukimo. Namun alternatif Solusi yang telah di lakukan Kabupaten Yahukimo dalam meningkatkan produktifitas regional Sektor-sektor Ekonomi Kerakyatan diantaranya adalah:

- Pembangunan Infrastruktur yang Meningkatkan Aksesibilitas: Kabupaten Yahukimo telah berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat ekonomi.

- Program Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan UMKM: Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan berbagai program untuk pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan, pemberian bantuan modal, serta dukungan pemasaran untuk produk-produk lokal.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan: Kabupaten Yahukimo telah melakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat pada sektor pertanian dan kerajinan tangan. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau bekerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan keterampilan SDM.
- Melaksanakan Pelaporan pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan setiap aspek keekonomian yang termasuk di dalamnya.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut Rincian realisasi anggaran program dan kegiatan pencapaian sasaran kinerja peningkatan produktivitas Regional ekonomi kerakyatan;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	549.068.000	549.068.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	549.068.000	549.068.000	100,00%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	-	-	-
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-

2. Sasaran Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Industri mikro dan kecil (IMK) yang berbasis pertanian adalah usaha yang memproses bahan baku dari pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perikanan. Usaha-usaha ini mencakup proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi produk pertanian. IMK ini sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Contoh-contoh IMK Berbasis Pertanian:

- Pengolahan Pangan: Kering pisang, keripik singkong, sambal, kerupuk, dodol, makanan ringan, dan produk makanan olahan lainnya.
- Produk Pertanian: Bibit tanaman, pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian.
- Perikanan: Pukat, jaring, ikan asin, acar ikan, dan berbagai produk olahan lainnya.
- Produksi Lainnya: Pembuatan anyaman dari bahan rumput, bambu, dan lain sebagainya.

Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian, diukur dengan membandingkan hasil produksi Industri mikro dan kecil berbasis pertanian dari tahun ke tahun atau melalui rumus;

$$\text{Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian} = \frac{\text{Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian Tahun N}}{\text{Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian Tahun N-1}}$$

Berdasarkan nilai Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada PDRB atas harga berlaku di tahun 2024 dan tahun 2023, maka Pertumbuhan Produksi IMK berbasis pertanian terhitung sebagai berikut;

$$\text{Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian tahun 2024 (Miliar Rupiah)} = \frac{610,42}{568,85} = 1,0730$$

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
----	---------	-------------------------	--------	-----------	---	----------

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	0,54	1,0730	198,72%	Sangat Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023;

Selanjutnya untuk tahun 2023 maka pengukuran Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian terhitung sebagai berikut;

$$\text{Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian tahun 2023 (Miliar Rupiah)} = \frac{568,85}{520,97} = \mathbf{1,0919}$$

Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar -0,01882 atau -1,72%

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	0,53	1,0919	206,02%	0,54	1,0730	198,72%	-1,72%

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Target akhir RPJMD terhadap Indikator kinerja Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian adalah sebesar 0,56, sedangkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 mencapai 1,07 sehingga dapat dikatakan capaian tahun ini telah melampaui target Akhir RPJMD sebesar 191,61%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	%	0,53	1,0730	198,72%	0,56	191,61%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor Penyebab penurunan kinerja Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian pada tahun 2024 dengan tahun sebelumnya antara lain;

- Akses sumber air untuk Pertanian di beberapa lokasi kurang memadai
- Produktivitas tanah rendah, pH tanah rendah, kekurangan unsur hara, keracunan
- Kurang memadainya pengendalian hama penyakit dan varietas
- Industri Mikro dan kecil belum efektif operasionalnya karena kurangnya sarana prasarana
- Terbatasnya upaya intervensi Pemerintah Daerah pada tahun 2024 karena keterbatasan alokasi anggaran
- Kurangnya Gambaran kondisi industry Mikro dan kecil sehingga sulit melaksanakan evaluasi dan perencanaan yang strategis

Alternatif Solusi yang telah di lakukan Kabupaten Yahukimo adalah;

- Perekrutan Kelompok Tani yang handal
- Pelaksanaan Penyuluhan dan bimbingan teknis pertanian bagi masyarakat
- Pembangunan Jaringan Irigasi di Persawahan yang strategis terarah berdasarkan Potensi
- Pembangunan Perumahan bagi petani
- Pembangunan Jalan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan sarana Pengairan
- Mengalokasikan anggaran dalam APBD Ta.2024 sebesar Rp 4.097.415.000 guna meningkatkan pertumbuhan produksi industry mikro dan kecil berbasi pertanian, dengan melaksanakan pelatihan teknis produksi (sertifikasi TKDN-IK), pelatihan manajemen mutu dan pengelolaan sentra IKM, pembangunan sentra IKM serta menyusun dokumen layanan proses bisnis sentra IKM dan analisaan kelayakan sentra IKM.

- Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pertanian. Misalnya, pada tahun sebelumnya di tahun 2022, dilakukan penanaman padi varietas unggul di lahan seluas 26 hektar dengan prediksi hasil panen minimal 50 ton. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian yang dapat berdampak positif pada industri mikro dan kecil berbasis pertanian.
- Melaksanakan pelaporan pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian yang ada di wilayah Yahukimo per tahunnya

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian terhitung sebesar 83,44%, sebagaimana di jelaskan pada table efisiensi anggaran dibawah berikut ini;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.957.415.000	3.954.865.000	99,94%
		Dinas Pertanian dan Perikanan			
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	500.000.000	500.000.000	100,00%
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.298.740.000	9.267.750.000	99,67%
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	500.000.000	500.000.000	100,00%
		Program Penyuluhan Pertanian	1.165.916.500	1.165.916.500	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	15.422.071.500	15.388.531.500	99,78%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	0,53	1,073	198,72%

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			83,44%

3. Sasaran Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Pada tahun 2024, Kabupaten Yahukimo memiliki sebanyak 117 sarana perdagangan, yang Sebagian besar berupa pasar dengan jumlah 98 pasar. Selain itu, terdapat 9 toko dan 10 warung sementara jumlah kios tidak tersedia dalam data yang ada.

Berdasarkan Yahukimo dalam Angka tahun 2025 Capaian Sasaran peningkatan Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal, pada tahun 2024 adalah sebesar 6,06, angka ini di peroleh dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha pada sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda. Pada tahun 2024 sektor Perdagangan menghasilkan Rp.96,980,000,000,00 dan berkontribusi sebesar 7,94% dari keseluruhan hasil PDRB Kabupaten Yahukimo. berdasarkan data di atas, dapat di simpulkan capaian realisasi kinerja Produksi perdagangan besar dan eceran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal	Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar dan Eceran	7.42	6,06	81,67%	Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023;

Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,06%, jika di bandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,11, terjadi penurunan sebesar 0,82%

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal	7.27	6,11	84,04%	7.42	6,06	81,67%	-0,82%

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Target akhir RPJMD terhadap Indikator kinerja Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal adalah sebesar 7,72, sedangkan realisasi capaian kinerja sasaran ini di tahun 2024 mencapai 6,11 sehingga dapat dikatakan capaian tahun 2024 ini telah mencapai sebesar 78,50% target Akhir RPJMD 2021 - 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal	%	7.42	6,06	81,67%	7.72	78,50%

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Sasaran Peningkatan Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal di Kabupaten Yahukimo mencapai 81,67% targetnya namun besaran capaian ini menurun 2,82% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja ini tidak lepas dari faktor-faktor sebagai berikut;

- Kurangnya intervensi Pemerintah Daerah dibanding tahun sebelumnya karena keterbatasan alokasi anggaran
- Kurangnya intervensi Pemerintah Daerah juga di dukung dengan kurang memadainya evaluasi kondisi perekonomian, perdagangan, dan potensi perdagangan di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo sehingga menghambat perencanaan dan pelaksanaan yang efektif dan terarah

- Pertumbuhan Perdagangan di wilayah Kabupaten Yahukimo mengalami peningkatan namun tidak dalam pemerataan
- Masih kurang memadainya pendayagunaan dan partisipasi masyarakat OAP dalam sector perdagangan sehingga menghambat pertumbuhannya dalam aspek pemerataan
- Masih Kurang efektifnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan sektor perdagangan
- Faktor Keamanan juga menghambat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan perdagangan

Selanjutnya Solusi yang bisa di terapkan dalam rangka peningkatan sector perdagangan besar Kabupaten Yahukimo sebagai berikut;

- Peningkatan Intervensi Pemerintah Daerah melalui perencanaan strategis dan terarah dengan bantuan pemerintah Provinsi dan Pusat
- Peningkatan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan Pelaporan oleh Pemerintah Daerah terhadap kondisi dan potensi ekonomi perdagangan di wilayah Yahukimo dengan data factual, akurat dan dapat di pertanggungjawabkan;
- Peningkatan pemerataan sector perdagangan melalui sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat OAP di masing-masing Distrik di Kabupaten Yahukimo
- Peningkatan kapasitas masyarakat OAP dalam hal perdagangan melalui Lembaga dan UMKM dan di sertai pengawasan yang mumpuni oleh pemerintah Daerah

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal terhitung sebesar 83,44%, besaran ini di hitung dari membagi persentase capaian kinerja dengan pelaksanaan program peningkatan sarana distribusi perdagangan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan realisasi anggaran sebesar 99,90%, berikut rinciannya;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar dan Eceran	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.000.000.000	2.997.000.000	99,90%

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
		(%) Total Realisasi Anggaran	3.000.000.000	2.997.000.000	99,90%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	7,27	6,06	83,36%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			83,44%

4. Sasaran Meningkatnya Koperasi Yang Berdaya saing

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang dijalankan secara sukarela oleh orang-orang atau badan hukum untuk memenuhi kebutuhan anggota, berdasarkan prinsip-prinsip seperti kerja sama, kemandirian, dan demokrasi. Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara ekonomi dan sosial, serta berperan serta dalam pembangunan ekonomi.

Capaian Sasaran Meningkatnya Koperasi Yang Berdaya saing, diukur dengan seberapa besar Jumlah koperasi aktif di kabupaten Yahukimo. selama periode 4 tahun dari tahun 2020 – 2024 berdasarkan dokumentasi Yahukimo dalam Angka Jumlah Koperasi aktif di wilayah Kabupaten Yahukimo tidak mengalami perubahan yaitu 29 Koperasi aktif;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Koperasi Yang Berdaya saing	Pertumbuhan Koperasi Aktif	89	29	32,58%	Sangat rendah

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Jumlah Pertumbuhan Koperasi Aktif di kabupaten Yahukimo tidak terjadi peningkatan atau penurunan selama tahun 2023 sampai 2024; namun dari aspek persentase realisasi kinerja terjadi penurunan sebesar 2,25%

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Pertumbuhan Koperasi Aktif	87	29	33,33%	89	29	32,58%	Tetap

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Target akhir angka harapan hidup RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo ditetapkan sebesar 93 jumlah koperasi yang aktif, Pada tahun 2023 baru 29 koperasi yang aktif di Kabupaten Yahukimo. Sehingga dapat disimpulkan pencapaian sasaran Pertumbuhan Koperasi Aktif pada tahun 2024 masih pada angka 31,18% target keberhasilan RPJMD;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Pertumbuhan Koperasi Aktif	Jumlah	87	29	32,58%	93	31,18%

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Analisis Penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini sebagai berikut;

- Sulitnya jangkauan transportasi yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dan monitoring
- Kurangnya koordinasi dengan pimpinan koperasi

- Jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Yahukimo berada di hampir semua distrik

Solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini ke depan adalah sebagai berikut;

- Memberikan dukungan dana atau barang kepada koperasi yang ada sehingga dapat menjalankan operasional koperasinya,
- Selain dukungan dana, membangun koordinasi yang baik dengan pimpinan koperasi juga harus lancar demi kelancaran informasi,
- Melakukan monitoring dan pengawasan sampai ke tingkat distrik
- Melakukan pembinaan terhadap koperasi yang aktif

- e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan sasaran Meningkatkan Koperasi Yang Berdaya saing diketahui efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai Kinerja tahun ini sebesar 32,59% berikut rinciannya;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Pertumbuhan Koperasi Aktif	Dinas Perindakop dan UKM			
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	232.588.000	232.568.000	99,99%
		(%) Total Realisasi Anggaran	232.588.000	232.568.000	99,99%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	89	29	32,58%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			32,59%

5. Sasaran Berkembangnya Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Pada Tahun 2023 Capaian Sasaran Berkembangnya Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dilaksanakan dengan menargetkan 3 cakupan destinasi pariwisata yang di pasarkan. target kinerja pada tahun 2024 Jumlah Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Dipasarkan adalah 6 Cakupan Destinasi Pariwisata yaitu rumah pohon di kampung keike, desa wisata di kampung massi, kolam penangkaran kura-kura moncong babi di keike, klai buatan di jalan gunung, DTW Kurima di depan kantor bupati, dan kali biru.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Berkembangnya Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Dipasarkan	3	6	200%	Sangat Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Berdasarkan data yang di diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata cakupan Destinasi Pariwisata Yang Dipasarkan pada tahun 2024 sebanyak 6 sedangkan pada tahun 2023 ada 5 objek wisata yang menjadi target pemasaran wisata, Jika dibandingkan persentase realisasi kinerja kedua tahun tersebut di ketahui terjadi peningkatan sebesar 20% capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut rinciannya;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Dipasarkan	2	5	250%	3	6	200%	20,00%

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Target akhir Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Dipasarkan RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan 5 cakupan destinasi pariwisata yang akan di pasarkan, yang artinya capaian kinerja cakupan destinasi pariwisata tahun 2024 telah mencapai 120% target akhir capaian RPJMD.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Dipasarkan	Jumlah	3	6	200%	5	120,00%

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Pencapaian hasil target kinerja ini tidak terlepas dari beberapa factor penyebab yang diantaranya sebagai berikut;

- Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan ini;
- Tersedianya aksesibilitas menuju ke objek kepariwisataan untuk mencapai Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Dipasarkan;
- Adanya peran serta pimpinan dan masyarakat untuk mendukung kegiatan Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Dipasarkan;
- Walaupun tercapai sasaran target, namun jumlah cakupan destinasi Pariwisata masih terbilang sedikit.

Solusi alternatif yang bisa di Tarik dan di rencanakan untuk tahun kedepannya adalah;

- Melakukan penyediaan anggaran untuk mendukung kegiatan ini
- Membuat pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran biaya kegiatan untuk penunjang kegiatan Cakupan jumlah objek wisata

- Melakukan evaluasi setiap kegiatan Cakupan jumlah objek wisata yang telah dilaksanakan

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024 realisasi Indikator kinerja sasaran cakupan destinasi pariwisata yang di pasarkan mencapai 200% sedangkan realisasi program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut mencapai angka 99,85% maka efisiensi penggunaan sumber daya terhitung sebesar 200,29%, berikut rinciannya;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Dipasarkan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	21.978.737.000	21.945.425.000	99,85%
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.818.004.000	1.816.429.000	99,91%
		(%) Total Realisasi Anggaran	23.796.741.000	23.761.854.000	99,85%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	3	6	200%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			200,29%

6. Sasaran Meningkatnya penanganan kerawanan pangan penduduk

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran yang menunjukkan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP dihitung berdasarkan beberapa indikator yang terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Manfaat IKP;

- Mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah
- Memberikan gambaran peringkat pencapaian ketahanan pangan wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya
- Membantu pemerintah dalam pemerataan pertumbuhan pembangunan melalui penurunan stunting, kemiskinan, dan kerentanan pangan

Menurut Badan Pangan Nasional Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Yahukimo pada tahun 2024 sebesar 25,62 dan berada pada peringkat ke 504 dari 514 Kabupaten.

Selanjutnya Indikator Persentase penanganan kerawanan pangan dilaksanakan oleh Kabupaten yahukimo melalui Dinas Ketahanan Pangan dan, Berdasarkan data OPD tersebut pada tahun 2024 persentase penanganan Kerawanan pangan atau Jumlah Desa yang sudah tertangani tercapai 25% dari target 40% atau mencapai 62,50% capaian kinerja.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan penduduk	Indeks Ketahanan Pangan	34,94	25,62	73,33%	Sedang
		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	40	25	62,50%	Rendah

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 tercatat angka IKP Kabupaten Yahukimo sebesar 21,95 dan berada pada peringkat ke 409 dari 416 Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi kinerja angka IKP tahun 2024 naik dengan besaran 16,72%. Sedangkan Realisasi capaian persentase penanganan kerawanan pangan tidak mengalami perubahan jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya namun pada aspek perubahan persentase capaian kinerjanya, pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 12,50% dari angka tahun sebelumnya, berikut rincian perhitungan perubahan persentase realisasi kinerja kedua Indikator tersebut;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Ketahanan Pangan	34,89	21,95	62,91%	34,94	25,62	73,33%	16,72%
2	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	35	25	71,43%	40	25	62,50%	Tetap

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Indeks Ketahanan pangan di tetapkan besaran 35,04 sebagai target akhir RPJMD Kabupaten Yahukimo, Hal ini menunjukan Capaian Kinerja IKP tahun 2024 telah tercapai sebesar 73,12% target akhir RPJMD.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten yahukimo menetapkan Penanganan Kerawanan pangan dengan target akhir RPJMD 50% sehingga dapat dikatakan realisasi capaian Indikator kinerja penanganan kerawanan pangan pada tahun ini mencapai 50% target akhir capaian RPJMD;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	34,94	25,62	73,33%	35,04	73,12%
2	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	40	25	62,50%	50	50,00%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Penyebab/Faktor belum maksimalnya penanganan Kerawanan Pangan:

- Program ketahanan pangan sering terkendala dana yang tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh daerah rawan pangan
- Belum optimalnya Perencanaan dan evaluasi penanganan rawan pangan
- Belum Adanya Penyusunan Peta daerah Kerentanan dan Kerawanan Pangan yang akurat
- Belum tersedianya Tenaga ahli pendamping Daerah rawan pangan
- Belum efektifnya penanganan kerawanan pangan karena medan yang sulit, kurangnya akses Transportasi dan keamanan sehingga menghambat Distribusi Pangan
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan belum berjalan

Upaya Alternatif yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja penanganan rawan pangan:

- Komitmen Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan: Pada 26 Januari 2024, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai, dalam kunjungan kerjanya ke Yahukimo,

menyatakan komitmen untuk mendukung Kabupaten Yahukimo sebagai sentra pangan bagi wilayah Papua Pegunungan

- **Tanggap Darurat Bencana Longsor:** Pada akhir Agustus 2023, Kabupaten Yahukimo mengalami bencana longsor akibat intensitas hujan yang tinggi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan bantuan pangan dan logistik kepada masyarakat terdampak
- **Dukungan TNI dalam Ketahanan Pangan:** Kodim 1715/Yahukimo memberikan pendampingan kepada kelompok tani sebagai bagian dari dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo
- Pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk membangun gudang cadangan pangan di Kabupaten Yahukimo terletak di Distrik Dekai guna mengatasi kerawanan pangan yang sering terjadi akibat bencana alam dan keterbatasan infrastruktur. Pembangunan gudang cadangan pangan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Yahukimo, khususnya dalam menghadapi bencana alam dan kondisi darurat lainnya
- Pemetaan Daerah Rawan Pangan disertai perencanaan penanganan yang strategis
- Melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemerintah dan desa/kampung tentang kondisi Kerawanan Pangan di setiap distrik untuk mendapatkan data daerah rawan pangan yang akurat.
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat di setiap Distrik dalam hal penanganan Rawan pangan baik dalam hal pemberian bantuan ke masyarakat atau pelaksanaan musyawarat antar Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis tersebut, pada tahun 2024 didukung dengan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dengan capaian realisasi program sebesar 99,07% jika dibandingkan persentase capaian kinerja sebesar 62,50%, maka didapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian peningkatan penanganan kerawanan pangan penduduk Yahukimo sebesar 63,08%;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan			

		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	5.050.000.000	5.003.200.000	99,07%
		(%) Total Realisasi Anggaran	5.050.000.000	5.003.200.000	99,07%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	40	25	62,50%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			63,08%

7. Sasaran Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi, dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita yang di sesuaikan yang terjadi, Angka Pengeluaran Perkapita (APP) merupakan angka pengeluaran rata-rata yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan. baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan Indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan Pelaporan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024 angka tersebut terhitung sebesar Rp.5,747,000.00. Jika dilihat dari target yang telah ditetapkan maka sasaran upaya peningkatan daya beli masyarakat dapat di kategorikan sangat tinggi karena mencapai 126,19% capaian kinerja;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (IPM)	4554.4	5747.0	126,19	Sangat Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pengeluaran Perkapita masyarakat Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 7,40% persen jika dibandingkan dengan angka pengeluaran perkapita tahun 2023 yang mencapai Rp.5.351.000,00, Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat yang didorong oleh meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Yahukimo;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Pengeluaran Perkapita (IPM)	4405.9	5351	121,45	4554.4	5747.0	126,19	7,40%

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Target akhir pengeluaran perkapita RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar Rp.4.851.500,00. Sehingga dapat disimpulkan pencapaian sasaran peningkatan daya beli masyarakat pada tahun 2024 telah mencapai 118,46% keberhasilan target RPJMD.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Pengeluaran Perkapita (IPM)	(000 Rupiah)	4554.4	5747.0	126,19	4851.5	118,46%

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Capaian Sasaran Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi pada Kabupaten Yahukimo dikategorikan "sangat tinggi" karena pencapaian sasaran telah melebihi target pada tahun 2024 dan target akhir RPJMD. Keberhasilan capaian sasaran ini tidak lepas dari upaya pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan dalam pemberdayaan sumber daya manusia dari tahun ke tahun.

Penyebab/Faktor-faktor peningkatan kinerja sasaran Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Yahukimo adalah:

- Mulai berkembangnya keadaan ekonomi di setiap Distrik Yahukimo
- Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap barang konsumsi pangan

- fluktuasi harga barang sering terjadi dan kebutuhan hidup penduduk semakin bertambah maka rata-rata pengeluaran penduduknya pun semakin meningkat karena belum efektifnya penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal.
- Dampak dari pertumbuhan ekonomi dengan tersedianya banyak pilihan hidup maka kesejahteraan pun semakin meningkat, seiring dengan itu pengeluaran juga bertambah.
- Mulai meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk memilih bahan konsumsi pangan yang telah siap dibandingkan mengolah sendiri

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja:

- Peningkatan Distribusi Pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Bantuan Sosial Pangan
- Pemerintah telah membangun gudang cadangan pangan di wilayah strategis (Distrik Dekai) yang dekat dengan masyarakat rentan pangan guna mengantisipasi kelangkaan pangan
- Alternatif ini dapat menjadi solusi dalam meningkatkan budidaya tanaman pangan lokal seperti sagu, ubi, dan jagung sebagai sumber karbohidrat dan memberikan pelatihan dan dukungan bagi petani dalam penggunaan teknologi pertanian sederhana yang cocok dengan kondisi Yahukimo serta mendorong masyarakat untuk mengembangkan kebun pangan keluarga agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- Pemerintah melakukan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga harga bahan pangan tetap terjangkau
- Subsidi harga bagi kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan daya beli mereka terhadap pangan pokok
- Peningkatan akses pasar bagi petani lokal, sehingga mereka bisa menjual hasil panennya dengan harga yang layak.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pemenuhan terpenuhinya akses masyarakat terhadap barang-barang konsumsi bahan pangan pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo belum didukung dengan program dan kegiatan serta anggaran

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Pengeluaran Perkapita	Dinas Ketahanan Pangan			
		-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
		(%) Total Realisasi Anggaran	-	-	-
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	-	-	-
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			

Misi	:	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal
Tujuan	:	Meningkatkan Daya Saing Investasi Regional

Indikator Tujuan Peningkatan Daya Saing Investasi Regional di wilayah Kabupaten Yahukimo adalah mengukur Indeks ICOR (Incremental Capital Output Ratio) di wilayah Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan. ICOR merupakan besaran yang menunjukkan besarnya tambahan Investasi baru yang di butuhkan untuk menaikkan/menambahkan satu unit output, Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Indeks ICOR “meningkat” di tahun 2024 dibandingkan Tahun sebelumnya. Berikut di tampilkan target dan hasil Indeks ICOR Kabupaten Yahukimo di tahun 2024;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Meningkatkan Daya Saing Investasi Regional	ICOR	Meningkat	-	-	Tidak tercapai

Belum ada informasi atau data dimana Kabupaten Yahukimo di hitung Indeks ICOR-nya pada tahun 2024. Namun Kabupaten Yahukimo tetap menjadikan sector investasi regional sebagai salah satu unsur pembangunan di setiap tahunnya. Pencapaian tujuan peningkatan daya saing investasi laksanakan dengan dua sasaran strategis yaitu Meningkatkan daya saing Daerah dan Berkembangnya Potensi-Potensi Investasi Berbasis Sumber Daya Ekonomi lokal. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan kedua sasaran strategis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatkan Daya Saing Daerah

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Capaian Sasaran Meningkatkan Daya Saing Daerah, dilihat skor Indeks daya Saing daerah yang di skor oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pada tahun 2024 Kabupaten yahukimo belum memiliki skor IDSD dikarenakan belum adanya beberapa komponen yang menjadi syarat perhitungan skor IDSD. Oleh karena itu capaian Indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Yahukimo belum bisa diukur realisasinya

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	meningkat	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023;

Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan karena Kabupaten Yahukimo belum di nilai IDSD-nya.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Daya Saing Daerah	meningkat	-	-	meningkat	-	-	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja IDSD Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah tidak dapat dilakukan karena Kabupaten Yahukimo belum di nilai IDSD-nya

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Indeks Daya Saing Daerah	Keterangan	meningkat.	-	-	meningkat	-

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak adanya nilai IDSD Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024 diantaranya adalah sebagai berikut;

- Kabupaten Yahukimo tidak memiliki Komponen "Lingkungan Pendukung" dan "Pasar" yang mumpuni untuk menghitung IDSD-nya
- Faktor tidak adanya "Lingkungan Pendukung" dapat di artikan kondisi sarana prasarana ekonomi di wilayah Kabupaten Yahukimo masih kurang memadai sehingga sulit menarik Investor.
- Faktor tidak adanya komponen "Lingkungan Pendukung" juga mengarah kepada Faktor keamanan daerah yang masih kurang kondusif untuk meningkatkan promosi Investasi Daerah
- Faktor "Pasar" mengarah kepada roda perekonomian di wilayah Kabupaten Yahukimo masih kalah saing dengan daerah lainnya dalam aspek keragaman produk ekonomi dan Kebutuhan Ekonomi di antara masyarakat Yahukimo

Alternative solusi yang dapat dilaksanakan dalam rangka pengukuran IDSD untuk Kabupaten Yahukimo adalah;

- Peningkatan dan pemerataan dalam aspek sarana dan prasarana dapat di laksanakan untuk mengembangkan lingkungan investasi di wilayah yang berpotensi.
- Kerja sama dengan TNI dan kepolisian dalam rangka pengamanan daerah
- Percepatan roda perekonomian daerah Yahukimo melalui peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui intervensi Pemerintah daerah dan/atau Bantuan Pemerintah Provinsi dan Pusat
- Peningkatan Promosi Investasi Daerah melalui berbagai media dan internet

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja ini belum dapat di lakukan karena tidak adanya realisasi indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Yahukimo, Namun Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP tetap melaksanakan Program Pencapaian sasaranya sebagai berikut;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Indeks Daya Saing Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			

		Program Pelayanan Penanaman Modal	25.500.000	25.500.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	25.500.000	25.500.000	100,00%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	-	-	-
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-

2. Sasaran Berkembangnya Potensi-Potensi Investasi Berbasis Sumber Daya Ekonomi Lokal

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Sasaran Berkembangnya Potensi-Potensi Investasi Berbasis Sumber Daya Ekonomi Lokal, belum dapat di ukur capaian kinerjanya di karenakan belum adanya dokumentasi situasi investasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Yahukimo khususnya pada aspek ekonomi local.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Berkembangnya Potensi-Potensi Investasi Berbasis Sumber Daya Ekonomi Lokal	Tingkat Pertumbuhan Pengembangan Ekonomi Lokal	5.2	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja pertumbuhan potensi investasi ekonomi local di tahun 2023 tidak dapat dilakukan karena ketiadaan data;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Tingkat Pertumbuhan Pengembangan Ekonomi Lokal	5,1	-	-	5.2	-	-	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir angka harapan hidup RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar 5,5% Laju pengembangan ekonomi lokal, Namun tahun 2024 belum adanya data potensi investasi berdasarkan ekonomi local maka Analisa perbandingan ini belum dapat dilakukan.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Tingkat Pertumbuhan Pengembangan Ekonomi Lokal		5.2	-	-	5.5	-

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-Faktor yang menyebabkan tidak adanya realisasi capaian kinerja Berkembangnya Potensi-Potensi Investasi Berbasis Sumber Daya Ekonomi Lokal adalah;

- Belum adanya data/dokumen yang menggambarkan kondisi perkembangan investasi dan lingkungan Investasi di wilayah Kabupaten Yahukimo secara akurat
- Secara umum lingkungan investasi di daerah Yahukimo hampir semuanya terdiri dari Industri mikro dan UMKM serta perorangan sehingga sulit di ukur perkembangannya
- Dari sudut pandang Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Masih terdapat pelaku usaha yang tidak transparan dalam melaporkan perkembangan usahanya
- Belum adanya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Yahukimo yang berfungsi untuk mensinergikan dan pengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan

Solusi alternatif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Penanaman Modal yaitu;

- Melaksanakan Profiling kondisi dan pertumbuhan sector-sektor ekonomi local dan investasinya di wilayah Kabupaten Yahukimo oleh OPD Bersangkutan
- Melakukan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha.
- Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang masih bingung dalam pengisian LKPM ataupun dalam mendaftarkan usahanya melalui OSS RBA.

- Melaksanakan bimtek tata cara pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi pelaku usaha.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja ini belum dapat dilakukan. Namun berikut disajikan realisasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP selama tahun 2024;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Tingkat Pertumbuhan Pengembangan Ekonomi Lokal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
		Program Promosi Penanaman Modal	25.150.000	25.150.000	100,00%
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	97.550.000	97.550.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	122.700.000	122.700.000	100,00%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	-	-	-
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-

Misi	:	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal
Tujuan	:	Menurunkan Ketimpangan Pendapatan

Indikator Tujuan Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Yahukimo adalah mengukur Rasio Gini (Indeks Ketimpangan Pendapatan) Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1, atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Rasio Gini sebesar 0,2485 di tahun 2024. Berikut di tampilkan target dan hasil Rasio Gini Kabupaten Yahukimo di tahun 2024;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Menurunkan Ketimpangan Pendapatan	Rasio Gini	0,2485	0,244	98,19%	Tercapai

Dilihat dari tabel di atas hasil pengukuran Rasio Gini Kabupaten Yahukimo tahun 2024, diketahui sebesar 0,244 atau 98,19% Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator tujuan penurunan ketimpangan pendapatan Kabupaten Yahukimo tercapai, dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi penurunan rasio gini sebesar 0,104 dari angka 0,348.

Pencapaian tujuan di laksanakan dengan sasaran strategis Peningkatan pendapatan penduduk golongan menengah kebawah dalam rangka menurunkan angka rasio gini dari tahun-

tahun sebelumnya. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan sasaran strategis tersebut selengkapnya di jelaskan sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Penduduk Golongan Menengah Kebawah Dalam Distribusi Pendapatan

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Pada tahun 2024 Kabupaten Yahukimo memiliki garis kemiskinan sebesar Rp.718.084,00 perkapita perbulan dengan persentase penduduk miskin sebesar 34 persen. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 36 persen dengan garis kemiskinan yang lebih rendah sebesar Rp.549.772,00 perkapita perbulan, sebagai gambaran berikut di rinci besaran Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Yahukimo tahun 2024;

Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Yahukimo, 2024

No	Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (rupiah)	Persentase Penduduk
1	< 150.000	-
2	150.000–199.999	-
3	200.000–299.999	-
4	300.000–499.999	0,38
5	500.000–749.999	27,66
6	750.000–999.999	36,14
7	1.000.000-1.499.999	21,90
8	> 1.500.000	13,93
	TOTAL	100,00

Sumber: Yahukimo dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen) Maret/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey March

Berdasarkan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Iku) Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022-2026 Capaian Sasaran Peningkatan Pendapatan penduduk golongan menengah diukur dengan Menghitung Persentase penduduk Miskin di wilayah Kabupaten Yahukimo.

Selanjutnya Berdasarkan Komponen Garis Kemiskinan Yahukimo pada tahun 2024, maka Peningkatan Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Ke bawah Masyarakat Yahukimo dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$\text{Peningkatan \%Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah} = \frac{(\text{Garis Kemiskinan Tahun 2024} - \text{Garis Kemiskinan Tahun 2023})}{\text{Garis Kemiskinan Tahun 2023}}$$

$$\text{Peningkatan \%Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah 2024} = \frac{(\text{Rp.718.084,00} - \text{Rp.549.772,00})}{\text{Rp.549.772,00}} = \mathbf{30,61\%}$$

Tahun 2024 terjadi Peningkatan Pendapatan Penduduk Golongan Menengah Kebawah sebesar 30,61%, sehingga dapat dikatakan capaian kinerja Meningkatnya Pendapatan Penduduk Golongan Menengah Kebawah Dalam Distribusi Pendapatan berada pada kategori sangat tinggi karena telah terealisasi sebesar 204,10%, berikut selengkapnya;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Pendapatan Penduduk Golongan Menengah Kebawah Dalam Distribusi Pendapatan	Persentase Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah	15%	30,61%	204,10%	Sangat tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Selanjutnya pada tahun 2022 nilai garis kemiskinan Kabupaten Yahukimo diketahui sebesar Rp.496.222,00, dari angka tersebut maka peningkatan Distribusi Pendapatan golongan menengah ke bawah untuk tahun 2023 terhitung sebagai berikut;

$$\text{Peningkatan \%Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah 2023} = \frac{(\text{Rp.549.772,00} - \text{Rp.496.222,00})}{\text{Rp.496.222,00}} = \mathbf{10,79\%}$$

Dilihat dari pertumbuhan distribusi pendapatan tahun 2023 maka pada tahun 2024 pertumbuhan persentase Distribusi Pendapatan mengalami peningkatan sebesar 19,82 atau meningkat sebesar 183,69% dari pertumbuhan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Berikut di Rincikan Perbandingan Persentase Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah tahun 2024 dan tahun 2023;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah	10%	10,79%	107,92%	15%	30,61%	204,10%	183,69%

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Target akhir Persentase Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan 25%, Oleh karena itu Capaian kinerja Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah tahun 2024 telah mencapai 122,46% target akhir capaian RPJMD;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Persentase Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah	Persentase	15%	30,61%	204,10%	25%	122,46%

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor penyebab peningkatan Persentase Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah;

- Penurunan angka Kemiskinan Kabupaten Yahukimo selaras dengan Peningkatan persentase pendapatan pada golongan menengah ke bawah
- Semakin membaiknya kondisi perekonomian distrik – distrik di Kabupaten Yahukimo

- Adanya intervensi Pemerintah Daerah melalui program perencanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya masyarakat Yahukimo.
- Meningkatnya Distribusi Barang dan Jasa di wilayah Kabupaten Yahukimo
- Adanya Intervensi Pemerintah Daerah melalui program bantuan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Solusi Alternatif yang telah dilakukan dalam peningkatan Persentase Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah;

- Peningkatan Bantuan Sosial bagi masyarakat
- Memperbanyak Pelaksanaan pembangunan daerah melalui pemberdayaan Masyarakat khususnya masyarakat OAP (Orang Asli Papua)
- Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan strategis dengan fokus pemerataan dan sector unggulan daerah
- Meningkatkan pemerataan sarana prasarana pendukung perekonomian pada distrik-distrik dengan focus potensi
- Peningkatan sumber daya masyarakat melalui penyuluhan dan pengawasan

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan realisasi program dan kegiatan dan realisasi Indikator kinerja di atas Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran ini mencapai 204,20%;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Persentase Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.067.488.000	4.065.488.000	99,95%
		(%) Total Realisasi Anggaran	4.067.488.000	4.065.488.000	99,95%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	15%	30,61%	204,10%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			204,20%

Misi	:	Meningkatkan Kesadaran Hukum, Sosial, Politik dan HAM
Tujuan	:	Meningkatkan Kepedulian Terhadap Pemenuhan HAM

Indikator Tujuan Meningkatkan Kepedulian Terhadap Pemenuhan HAM Kabupaten Yahukimo adalah mengukur Indeks Kinerja Peduli HAM Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Indeks Kinerja Peduli HAM dengan ukuran meningkat di tahun 2024. Berikut di tampilkan target dan hasil Indeks Kinerja Peduli HAM Kabupaten Yahukimo di tahun 2024;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Meningkatkan Kepedulian Terhadap Pemenuhan HAM	Indeks Kinerja Peduli HAM	Meningkat	-	-	Tidak Tercapai

Selama tahun 2024 belum ada data atau dokumen Indeks Kinerja Peduli HAM pada kabupaten Yahukimo. Pencapaian tujuan di laksanakan dengan dua sasaran strategis, yaitu Peningkatan Pemenuhan HAM dan Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak-anak. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan kedua sasaran strategis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan HAM

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Meningkatnya Pemenuhan HAM, dilihat dari terlaksananya persentase pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan bidang HAM. Pada tahun 2024 tidak adanya program kegiatan yang mencakup bidang HAM.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Pemenuhan HAM	Persentase Pelaksanaan HAM	100%	-	-	-

b) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Capaian Meningkatnya Pemenuhan HAM pada Kabupaten Yahukimo belum dilakukan karena tidak adanya program dan kegiatan cakupan HAM yang terlaksana.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Pelaksanaan HAM	100%	-	-	100%	-	-	-

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya hasil capaian kinerja pelaksanaan HAM;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Persentase Pelaksanaan HAM	Persentase	100%	-	-	100%	-

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor yang menyebabkan Kabupaten Yahukimo belum terhitung Indeks Kinerja Peduli HAM diantaranya adalah;

- Peningkatan pemenuhan HAM belum menjadi prioritas pada tahun 2024

Solusi alternatif yang telah dilaksanakan;

- Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antar Pemerintah daerah dengan Pemerintah Provinsi atau Kementrian mengenai Indeks Kinerja Peduli HAM

- e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan Sumber daya tidak dapat dilakukan karena belum ada program kegiatan yang terlaksana dalam rangka pencapaian Kinerja Peduli HAM;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Persentase Pelaksanaan HAM	Kantor Kesbangpol			
			-	-	-

		(%) Total Realisasi Anggaran	-	-	-
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	-	-	-
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-

2. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang mengevaluasi perbedaan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPG menunjukkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, dan nilainya berkisar antara 0-100 persen.

Indeks Komposit Kesejahteraan anak oleh Kementerian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak di ganti menjadi Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak Anak. PA terdiri dari 27 indikator yang mewakili 5 klaster hak anak, yaitu: Hak sipil dan kebebasan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, Perlindungan khusus. IPA merupakan ukuran baku untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia

Capaian Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak, dilihat dari Indikator Indeks pembangunan gender dan indeks kesejahteraan anak Kabupaten yahukimo.

Namun sampai pada saat ini skoring Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Perlindungan Anak belum menyentuh Kabupaten Yahukimo, sehingga pengukuran realisasi capaian kinerja tidak dapat dilakukan untuk sasaran Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	60	-	-	-
		Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Meningkat	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja pemenuhan hak-hak perempuan dan anak belum dapat dilakukan karena belum updatenya data.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Pemberdayaan Gender	50	-		60	-	-	-
	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Meningkat	-		Meningkat	-	-	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir skor Indeks Pemberdayaan Gender pada RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar 60,2. Namun belum updatenya data indeks untuk tahun 2024 menyebabkan analisis ini belum dilakukan.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	60	-	-	60,20	-
2	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Indeks	Meningkat	-	-	Meningkat	-

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak adanya skoring untuk indeks Pembangunan Gender dan Indeks Perlindungan anak adalah sebagai berikut;

- Tidak terhitungnya Indeks suatu daerah oleh Pemerintah Pusat dan Kementrian adalah ketiadaan salah satu komponen pengukuran dalam rumus Indeks yang telah ditetapkan;

- Pemerintah Daerah belum bisa memberikan data akurat dari komponen pengukuran Indeks yang bersangkutan
- Dalam aspek IPG dan IPA Masih kurang memadainya pembangunan Gender dan Peningkatan perlindungan anak dalam suatu Daerah

Solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk tahun-tahun ke depan adalah;

- Pemerintah Daerah melaksanakan upaya memenuhi absennya komponen pengukur Indeks yang bersangkutan dengan menerbitkan data statistical atau dokumen profil pembangunan Gender dan Perlindungan anak melalui Badan Pusat Statistik perwakilan
- Dilaksanakannya pelaporan atau dokumen profil pembangunan gender dan perlindungan anak dengan data yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan
- Peningkatan Pembangunan gender dan kesejahteraan anak melalui program prioritas yang mumpuni serta pengawasannya

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak tahun 2024 belum bisa terlaksana karna tidak adanya realisasi kinerja IPG dan IPA;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Program Perlindungan Perempuan	500.000.000	500.000.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	500.000.000	500.000.000	100,00%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	-	-	-
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-
2	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	500.000.000	500.000.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	500.000.000	500.000.000	100,00%

		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	-	-	-
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-

Misi	:	Meningkatkan Kesadaran Hukum, Sosial, Politik dan HAM
Tujuan	:	Meningkatkan Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Umum

Indikator Tujuan Peningkatan Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Yahukimo adalah mengukur Indeks Keamanan Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat adalah indikator yang mengukur kinerja institusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Indeks Keamanan dengan ukuran “meningkat” di tahun 2024. Berikut di tampilkan target dan hasil Indeks Keamanan Kabupaten Yahukimo di tahun 2024;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Umum	Indeks Keamanan	Meningkat	-	-	Tidak Tercapai

Selama tahun 2024 belum ada data atau dokumen terhitungnya Indeks Kemananan pada kabupaten Yahukimo, Meskipun demikian Pencapaian tujuan tetap di laksanakan melalui dua sasaran strategis, yaitu Upaya Penurunan Pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penurunan Kriminalitas, kejahatan dan konflik dalam kehidupan masyarakat. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan kedua sasaran strategis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Menurunnya Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah kondisi dinamis masyarakat yang merupakan prasyarat terselenggaranya pembangunan. Oleh karena itu Sasaran Menurunnya Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat, dilihat dari Persentase Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Pada tahun 2024, berdasarkan data yang di peroleh dari Kantor SatPol PP jumlah kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Yahukimo sebanyak 37 kasus. Dari jumlah tersebut, 21 kasus ditangani langsung oleh instansi terkait, 7 kasus ditangani oleh Polres. capaian sasaran kinerja ini termasuk capaian regresif yang artinya, Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, Berikut rumus yang di gunakan untuk menghitung Persentase Realisasi kinerja kamtibmas;

$$\% \text{ Realisasi Kinerja Regresif} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

$$\begin{array}{l} \% \text{ Realisasi Pelanggaran} \\ \text{Ketertiban dan Ketentraman} \\ \text{Masyarakat} \end{array} = \frac{(2 \times 1) - 37}{1} = -3500,00\%$$

Karena penghitungan rumus menggunakan angka nol tidak mendapatkan hasil maka Target di rubah dari 0 menjadi 1, Hasilnya Persentase Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat diketahui "Tidak tercapai" karena persentase Pelanggaran mencapai angka minus 3500% Berikut rincian hasil capaian sasaran Penurunan Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Yahukimo;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Menurunnya Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	1	37	-3500,00%	Tidak tercapai

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023;

Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat tahun 2024 tercatat 37 kasus, Meningkat 12 atau 52,17% Kasus jika dibandingkan dengan 25 kasus yang terjadi di tahun 2023, berikut Rinciannya;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Pelanggaran Ketertiban	1	25	-2300,00%	1	37	-3500,00%	52%

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	dan Ketentraman Masyarakat							

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Target akhir RPJMD untuk Indikator Persentase Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat adalah 1, berdasarkan persentase realisasi capaian dengan angka minus 3500% dapat di simpulkan realisasi kinerja tahun 2024 telah mencapai minus 3500% target RPJMD;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Persentase Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	%	1	37	-3600,00%	1	-3500,00%

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Kinerja tidak tercapainya target penurunan Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat pada Kabupaten Yahukimo terlaksana oleh Faktor-faktor sebagai berikut;

- Kabupaten Yahukimo masih berstatus Zona Merah oleh Pihak berwajib dan Pemerintah Pusat, hal Ini di sebabkan masih adanya ancaman Kelompok kriminal Bersenjata (KKB)
- Wilayah Kabupaten Yahukimo yang sangat luas di dukung Kawasan hutan menyebabkan sulit dilakukannya Patroli dan Pengawasan dari pihak Berwajib
- Jaminan Keamanan masih belum merata ke seluruh pelosok Distrik

Solusi terbaik adalah Pemerintah Kabupaten Yahukimo harus memperbaiki kerja sama antar OPD dan penyediaan data dokumentasinya.

Selain itu, Guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, maka alternatif solusi yang harus dicapai adalah:

- Peningkatan peran pemerintah, TNI dan pihak berwajib dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penyelesaian ancaman KKB
- Penguatan kelembagaan sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan manusia yang damai dan religious dengan Fokus Kamtibmas.
- Peningkatan pelaporan dan penataan capaian kinerja oleh OPD bersangkutan
- Peningkatan keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam proses penyelesaian konflik sosial dan gangguan ketertiban.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berikut rincian realisasi anggaran pencapaian sasaran Menurunnya Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat tahun 2024 dan jika melihat hasil capaian kinerja sasaran berikut efisiensi penggunaan sumber dayanya;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Persentase Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Kantor Kesbangpol			
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	8.843.000.000	8.700.650.000	98,39%
		(%) Total Realisasi Anggaran	8.843.000.000	8.700.650.000	98,39%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	1	37	-3500,00%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-3557,26%

2. Sasaran Menurunnya Kriminalitas, Kejahatan dan Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Menurunnya Kriminalitas, Kejahatan dan Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat, dilihat dari seberapa besar angka kriminalitas yang terjadi di wilayah

kabupaten Yahukimo. Kabupaten Yahukimo menargetkan 7 kasus angka kriminalitas untuk mencapai sasaran kinerja ini, Berdasarkan Data Kantor Satpol PP dari 37 kasus keamanan dan ketertiban selama tahun 2024 ada 7 kasus yang di tangani Kepolisian, dilihat dari informasi tersebut 7 kasus tersebut termasuk kasus kriminalitas;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Menurunnya Kriminalitas, Kejahatan dan Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Angka Kriminalitas	7	7	100%	Tercapai

Dikarenakan capaian kinerja ini termasuk capaian kinerja regresif maka persentase kinerja terhitung sebagai berikut;

% Realisasi Pelanggaran
Ketertiban dan Ketentraman
Masyarakat

=

(2 x 7)-7

7

=

100%

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023;
- Perbandingan realisasi kinerja tidak dapat dilakukan karena tidak adanya data angka kriminalitas pada tahun 2023 untuk mengukur sasaran kinerja ini;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Angka Kriminalitas	8	-	-	7	7	100	-

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
- Target penurunan Angka Kriminalitas sesuai RPJMD adalah sebesar 5, sehingga dapat disimpulkan sasaran Menurunnya Kriminalitas, Kejahatan dan Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat pada tahun 2024 telah mecapai 60% target akhir RPJMD.

NO	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Capaian s/d 2024
----	-----------	--------	--------------------	--------	------------------

	Kinerja		Target	Realisasi 2024	%	Akhir RPJMD	terhadap target Akhir RPJMD
1	Angka Kriminalitas	Angka	7	7	100	5	60%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Capaian Menurunnya Kriminalitas, Kejahatan dan Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat pada Kabupaten Yahukimo di pengaruhi beberapa faktor;

- Adanya koordinasi dan kerja sama antara Satpol PP dengan Kepolisian daerah Kabupaten Yahukimo

Solusi alternatif yang bisa dilakukan adalah;

- Dilaksanakannya koordinasi tentang angka kriminalitas antara Satpol PP dengan Kepolisian Daerah mengenai angka kriminalitas tahun-tahun sebelumnya dalam rangka penyajian data kinerja yang akurat.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berikut rincian realisasi anggaran pencapaian sasaran Menurunnya Angka Kriminalitas tahun 2024;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Angka Kriminalitas	Satuan Polisi Pamong Praja			
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	718.950.000	718.950.000	100,00%
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	31.072.500	31.072.500	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	750.022.500	750.022.500	100,00%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	7	7	100%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			100%

Misi	:	Meningkatkan Kesadaran Hukum, Sosial, Politik dan HAM
Tujuan	:	Mengoptimalkan Pelayanan Sosial Masyarakat

Indikator Tujuan Mengoptimalkan Pelayanan Sosial Masyarakat di wilayah Kabupaten Yahukimo adalah mengukur Indeks Kepuasan Pelayanan Sosial Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Indeks Kepuasan Pelayanan Sosial / atau secara umum disebut sebagai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan sosial adalah pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang dilakukan dengan mengukur persepsi dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima dan dalam hal ini pelayanan Sosial. IKM bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh layanan yang diberikan telah memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, dan menjadi dasar untuk perbaikan dan inovasi

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Indeks Kepuasan Pelayanan Sosial dengan ukuran “meningkat” di tahun 2024. Berikut di tampilkan target dan hasil Indeks Kepuasan Pelayanan Sosial Kabupaten Yahukimo di tahun 2024;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Mengoptimalkan Pelayanan Sosial Masyarakat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sosial	Meningkat	-	-	-

Belum ada data atau dokumen mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sosial Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024 dari Dinas Sosial. Namun Begitu pelayanan sosial kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan di laksanakan dengan tiga sasaran strategis, yaitu Optimalnya pelayanan terhadap PMKS, Optimalnya pelayanan sosial bagi Lanjut usia, dan Meningkatnya pembinaan dan Pemberdayaan KAT. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan ketiga sasaran strategis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Optimalnya Pelayanan Terhadap PMKS

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

PMKS adalah individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, sedangkan Persentase pelayanan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang tertangani adalah perbandingan antara jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan dengan total PMKS yang ada.

Capaian Sasaran Optimalnya Pelayanan Terhadap PMKS, dilihat dari besaran Persentase Pelayanan PMKS yaitu Jumlah PMKS yang menerima pelayanan di bagi dengan Jumlah Total PMKS yang ada di wilayah Kabupaten Yahukimo.

Pada tahun 2024 berdasarkan data dari realisasi kinerja Dinas sosial Kabupaten Yahukimo persentase pelayanan PMKS pada tahun 2024 sebesar 12%.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Optimalnya Pelayanan Terhadap PMKS	Persentase Pelayanan PMKS	32	12	37,50%	Sangat Rendah

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja persentase pelayanan PMKS tahun 2024 dengan tahun 2023 diketahui tidak mengalami perubahan, namun jika dilihat dari persentase kinerja persentase pelayanan PMKS tahun 2024 menurun 3,13% disbanding tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Pelayanan PMKS	31	12	38,71%	32	12	37,50%	Tetap

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir Persentase Pelayanan PMKS pada RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar 34% sehingga capaian kinerja pelayanan PMKS telah mencapai 35,29% target akhir capaian RPJMD.

NO	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Capaian s/d
----	-----------	--------	--------------------	--------	-------------

	Kinerja		Target	Realisasi 2024	%	Akhir RPJMD	2024 terhadap target Akhir RPJMD
1	Persentase Pelayanan PMKS	Indeks	32	12	37,50%	34	35,29%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Capaian Optimalnya Pelayanan Terhadap PMKS pada Kabupaten Yahukimo belum di ketahui besaran persentase pelayanan PMKSnya pada tahun 2024, hal ini di sebabkan

- Dalam Penyusunan LKJ, Dinas Sosial tidak menyajikan komponen data rumus dalam penghitungan realisasi kinerjanya.
- Dari sudut pandang Dinas Sosial adanya masalah kevaliditasan Data DTKS yang digunakan sebagai dasar untuk menangani PMKS sesuai dengan penemuan Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II atau IHPS 2019 yang dipublikasikan oleh BPK RI bahwa Data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh KEMENESOS masih kurang akurat jika dijadikan dasar penyaluran bansos

Solusi yang bisa di Tarik adalah;

- Dinas sosial hendaknya memperbaiki perhitungan rumus realisasi kinerjanya dengan menampilkan nilai-nilai komponen yang menghasilkan angka suatu kinerja.
- Memberikan kesempatan kepada seluruh desa untuk memperoleh "USER" yang dapat digunakan oleh Operator SIKS-NG desa untuk memperbaiki data/updating data penerima bantuan sosial (meninggal dunia, pindah alamat, NIK tidak padan) secara online melalui aplikasi SIKS-NG

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa atas efisiensi penggunaam sumber daya dalam rangka pencapaian pelayanan PMKS yang optimal belum dapat dilakukan karena belum terhitungnya realisasi kinerja sasaran bersangkutan;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Persentase Pelayanan PMKS	Dinas Sosial			
		Program Rehabilitasi Sosial	200.000.000	200.000.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	200.000.000	200.000.000	100,00%

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	32	12	37,50%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			37,50%

2. Sasaran Optimalnya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Optimalnya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia, dilihat dari Cakupan atau persentase pelayanan penduduk Lanjut Usia yang terlaksana pada tahun 2024. Besaran Indikator Kinerja ini di peroleh dengan membagi jumlah/populasi penduduk lanjut usia yang telah menerima pelayanan sosial di tahun 2024 dengan jumlah Total populasi penduduk lanjut usia yang berada di wilayah Kabupaten Yahukimo pada tahun bersangkutan.

Pada Tahun 2024 Dinas Sosial belum mengupdate data/dokumentasi kedua unsur tersebut sehingga pengukuran capaian kinerja optimalnya pelayanan social belum dapat dilaksanakan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Optimalnya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia	Cakupan Pelayanan Penduduk Lanjut Usia	Meningkat	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja persentase pelayanan penduduk lanjut usia pada tahun 2023 dengan tahun 2022 belum dilakukan, karena Dinas Sosial belum mengupdate data penduduk lanjut usia untuk tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Cakupan Pelayanan Penduduk Lanjut Usia	Meningkat	-	-	Meningkat	-	-	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator kinerja persentase pelayanan penduduk lanjut usia Yahukimo ditargetkan sebesar meningkat pada akhir periode RPJMD ini, sama seperti diatas, analisis perbandingan realisasi terhadap target RPJMD belum bisa dilakukan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Cakupan Pelayanan Penduduk Lanjut Usia	Pertumbuhan	Meningkat	-		Meningkat	-

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Capaian Optimalnya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia pada Kabupaten Yahukimo belum dapat dilakukan pengukuran capaiannya karena tidak tersedianya data pelaporan pelayanan sosial lansia pada tahun 2024. hal ini di sebabkan belum adanya program pelayanan sosial untuk Lanjut usia.

Solusinya adalah Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan sosial bagi Lansia atas dasar kebutuhan yang ada, peningkatan dokumentasi dan rincian pelaporan capaian kinerja pelayanan sosial lansia sesuai ketentuan agar memudahkan pelaporan dan evaluasi.

- e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisa atas efisiensi penggunaam sumber daya dalam rangka pencapaian Optimalnya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia belum dapat dilakukan karena tidak adanya program kegiatan yang berkaitan dengan indicator kinerja tersebut;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Cakupan Pelayanan Penduduk Lanjut Usia	Dinas Sosial			
		(%) Total Realisasi Anggaran			
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja			
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			

3. Sasaran Meningkatnya Pembinaan Dan Pemberdayaan KAT

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Meningkatnya Pembinaan Dan Pemberdayaan KAT (Komunitas Adat Terpencil), dilihat dari persentase pemberdayaan KAT, Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah populasi KAT yang mengikuti pembinaan atau pemberdayaan dengan jumlah total populasi KAT yang ada di wilayah Kabupaten Yahukimo. Pada tahun 2024 belum diupdatenya data populasi KAT (Komunitas Adat Terpencil) dan data penerima pembinaan KAT oleh dinas sosial Kabupaten Yahukimo sehingga pengukuran persentase pemberdayaan KAT belum dapat dilakukan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemberdayaan KAT	Persentase Pemberdayaan KAT	32	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja persentase pemberdayaan KAT pada tahun 2024 dengan tahun 2023 belum dilakukan, karena Dinas Sosial belum mengupdate data KAT untuk tahun 2024;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Pemberdayaan KAT	31	-	-	32	-	-	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator kinerja persentase Pemberdayaan KAT Yahukimo ditargetkan sebesar 34% pada akhir periode RPJMD ini, sama seperti diatas, analisis perbandingan realisasi terhadap target RPJMD belum bisa dilakukan;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Persentase Pemberdayaan KAT	Pertumbuhan	32	-	-	34	-

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Capaian peningkatan Pembinaan Dan Pemberdayaan KAT pada Kabupaten Yahukimo belum di ketahui besaran persentase pemberdayaan KAT pada tahun 2024, hal ini di sebabkan Dinas Sosial tahun 2024 belum secara rinci menyajikan dan menata pelaporan kinerja yang berkaitan dengan pemberdayaan KAT.

Solusi yang bisa di Tarik adalah Dinas sosial segera melakukan update data KAT dan dokumentasi pemberdayaan KAT untuk tahun 2024 dan merevisi Laporan kinerjanya sesuai ketentuan.

- e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian pemberdayaan KAT yang optimal belum dapat dilakukan karena belum terhitungnya realisasi kinerja sasaran bersangkutan dan tidak adanya program kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja tersebut.

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Persentase Pemberdayaan KAT	Dinas Sosial			
		(%) Total Realisasi Anggaran			
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja			
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			

Misi	:	Meningkatkan Kesadaran Hukum, Sosial, Politik dan HAM
Tujuan	:	Meningkatkan Kehidupan Berdemokrasi Dan Politik

Indikator Tujuan Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi Dan Politik di wilayah Kabupaten Yahukimo adalah mengukur Indeks Demokrasi Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Indeks Demokrasi adalah sebuah indeks yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU), dengan tujuan untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara atau dalam hal ini pada suatu daerah. Pertama kali dipublikasikan pada tahun 2006, saat ini indeks didasarkan pada 60 indikator pertanyaan yang dikelompokkan ke dalam lima kategori berbeda.

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Indeks Demokrasi dengan ukuran “meningkat” di tahun 2024. Berikut di tampilkan target dan hasil Indeks Demokrasi Kabupaten Yahukimo di tahun 2024;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Meningkatkan Kehidupan Berdemokrasi Dan Politik	Indeks Demokrasi	Meningkat	-	-	Tidak tercapai

Berdasarkan data yang di ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) secara umum Provinsi Papua Pegunungan dan secara khusus Kabupaten Yahukimo belum terhitung Indeks Demokrasinya. Walaupun begitu Kabupaten Yahukimo tetap melaksanakan tujuan peningkatan kehidupan berdemokrasi dan berpolitik melalui Kantor Kesbangpol, dimana pencapaian tujuan di laksanakan

dengan tiga sasaran strategis, yaitu Meningkatnya kebebasan hak Sipil, Meningkatnya pemenuhan Hak-hak Politik, dan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas kelembagaan Demokrasi. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan ketiga sasaran strategis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya Kebebasan Hak Sipil

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Aspek kebebasan hak sipil mencakup hak-hak dasar individu dan kebebasan seperti kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, berkumpul, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi, yang esensial bagi demokrasi.

Berikut adalah elaborasi lebih rinci tentang aspek kebebasan hak sipil:

- Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi: Hak untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan informasi secara bebas tanpa takut akan sanksi atau penindasan.
- Kebebasan Berserikat dan Berkumpul: Hak untuk membentuk kelompok, organisasi, atau asosiasi, serta berkumpul secara damai untuk mengejar tujuan bersama.
- Kebebasan Berkeyakinan: Hak untuk memeluk dan menjalankan keyakinan agama atau kepercayaan tanpa paksaan atau diskriminasi.
- Kebebasan dari Diskriminasi: Hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan masyarakat, tanpa adanya perlakuan berbeda atau diskriminatif berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau karakteristik lain.
- Hak Atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi: Hak untuk tidak diintervensi secara sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan penyiksaan.
- Hak Atas Kebebasan Bergerak dan Berpindah: Hak untuk berpindah tempat dan menetap di mana saja, serta hak untuk keluar dan masuk wilayah negara.
- Hak Atas Pengakuan dan Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum: Hak untuk diakui sebagai subjek hukum dan diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.

Skor IDI terdiri dari 3 komponen yang salah satunya merupakan Indikator kinerja yang telah ditetapkan Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024. Salah satu komponennya adalah skor aspek Kebebasan Hak sipil. Namun skor Indeks Demokrasi Indonesia hanya mencakup provinsi dan tidak ke Kabupaten sehingga pengukuran capaian sasaran kebebasan hak sipil Yahukimo belum dapat dilakukan;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
----	---------	-------------------------	--------	-----------	---	----------

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Kebebasan Hak Sipil	Skor Aspek Kebebasan Hak Sipil	Meningkat	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan capaian sasaran peningkatan kebebasan hak sipil tidak dapat dilakukan karena belum ada skor Aspek Kebebasan Hak Sipil yang di berikan kepada Kabupaten Yahukimo;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Skor Aspek Kebebasan Hak Sipil	Meningkat	-	-	Meningkat	-	-	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator kinerja peningkatan kebebasan hak sipil Yahukimo ditargetkan "Meningkat" pada akhir periode RPJMD ini, sama seperti diatas, analisis perbandingan realisasi terhadap target RPJMD belum bisa dilakukan;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Skor Aspek Kebebasan Hak Sipil	Angka	Meningkat	-	-	Meningkat	-

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Capaian Meningkatnya Kebebasan Hak Sipil pada Kabupaten Yahukimo tidak dapat diukur sarasannya dikarenakan factor sebagai berikut;

- IDI dan komponen aspek kebebasan hak sipil hanya diukur pada tingkat provinsi.
- Solusi yang bisa dilaksanakan adalah
- koordinasi dengan KPU setempat untuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Yahukimo dalam rangka pengukuran Indeks untuk Kabupaten Yahukimo.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian peningkatan kebebasan hak sipil belum dapat dilakukan karena belum terhitungnya indikator kinerja sasaran bersangkutan;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Skor Aspek Kebebasan Hak Sipil	Kantor Kesbangpol			
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	8.450.400.000	8.447.400.000	99,96%
		(%) Total Realisasi Anggaran	8.450.400.000	8.447.400.000	99,96%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	-	-	-
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-

2. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Politik

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Politik, dilihat dari Skor Komponen Indeks Demokrasi Indonesia yaitu skor aspek pemenuhan hak-hak Politik. Namun perilsan Indeks Demokrasi Indonesia hanya mencakup provinsi dan tidak ke Kabupaten sehingga pengukuran capaian sasaran Pemenuhan hak-hak politik Yahukimo belum dapat dilakukan;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Politik	Skor Aspek Pemenuhan Hak-Hak Politik	Meningkat	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan capaian sasaran peningkatan Pemenuhan Hak-Hak Politik tidak dapat dilaksanakan karena belum ada skor Pemenuhan Hak-Hak Politik yang di berikan kepada Kabupaten Yahukimo.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	%
----	-------------------	------------	------------	---

	Utama	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Naik/Turun
1	Skor Aspek Pemenuhan Hak-Hak Politik	Meningkat	-	-	Meningkat	-	-	-

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Capaian Indikator kinerja peningkatan Pemenuhan Hak-Hak Politik Yahukimo ditargetkan "Meningkat" pada akhir periode RPJMD ini, sama seperti diatas, analisis perbandingan realisasi terhadap target RPJMD belum bisa dilakukan;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Skor Aspek Pemenuhan Hak-Hak Politik	Angka	Meningkat	-	-	Meningkat	-

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor penyebab yaitu;

- Skor IDI dan komponen Skor Aspek Pemenuhan Hak-Hak Politik hanya diukur pada tingkat provinsi

Solusi alternative yang dapat dilaksanakan yaitu;

- koordinasi dengan KPU setempat untuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Yahukimo dalam rangka pengukuran Indeks untuk Kabupaten Yahukimo

- e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisa atas efisiensi penggunaam sumber daya dalam rangka pencapaian peningkatan Pemenuhan Hak-Hak Politik belum dapat dilakukan karena belum terhitungnya indikator kinerja sasaran bersangkutan;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Skor Aspek Pemenuhan Hak-	Kantor Kesbangpol			

	Hak Politik				
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Pol	111.080.500.000	89.880.500.000	80,91%
		(%) Total Realisasi Anggaran	111.080.500.000	89.880.500.000	80,91%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja			
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			

3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi, dilihat dari Skor salah satu Komponen Indeks Demokrasi Indonesia yaitu Skor Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi. Namun pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hanya mencakup provinsi dan tidak ke Kabupaten sehingga pengukuran capaian sasaran Kualitas Dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi Yahukimo belum dapat dilakukan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi	Skor Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi	Meningkat	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan capaian sasaran peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi tidak dapat dilaksanakan karena belum ada skor Pemenuhan Hak-Hak Politik yang di berikan kepada Kabupaten Yahukimo.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Skor Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi	Meningkat	-	-	Meningkat	-	-	-

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Capaian Indikator kinerja peningkatan peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi Yahukimo ditargetkan "Meningkat" pada akhir periode RPJMD ini, sama seperti diatas, analisis perbandingan realisasi terhadap target RPJMD belum bisa dilakukan;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Skor Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi	Angka	Meningkat	-	-	Meningkat	-

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya skor Kualitas Dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi adalah sebagai berikut;

- Skor IDI dan komponen Skor Aspek Pemenuhan Hak-Hak Politik hanya diukur pada tingkat provinsi

Solusi alternative yang bisa dilaksanakan adalah koordinasi dengan KPU setempat untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Yahukimo dalam rangka pengukuran Indeks Demokrasi untuk Kabupaten Yahukimo.

- e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisa atas efisiensi penggunaam sumber daya dalam rangka pencapaian peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi belum dapat dilakukan karena belum terhitungnya indikator kinerja sasaran bersangkutan;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
----	-------------------	---------	----------	-----------	---------------

1	Skor Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi	Kantor Kesbangpol			
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	91.475.000	91.475.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	91.475.000	91.475.000	100,00%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	-	-	-
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-

Misi	:	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
Tujuan	:	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat

Indikator Tujuan Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Yahukimo adalah mengukur Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) adalah alat ukur yang menilai kinerja pembangunan infrastruktur di suatu wilayah, dengan mengukur akses rumah tangga terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan telepon. Semakin tinggi IPI, semakin baik tingkat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Komponen Indeks Infrastruktur;

- Akses Air Bersih: Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke air bersih.
- Akses Sanitasi: Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi.
- Akses Listrik: Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke listrik.
- Akses Telepon: Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke telepon

Fungsi Indeks Infrastruktur:

- Menilai kinerja pembangunan infrastruktur di suatu wilayah.
- Menunjukkan tingkat akses masyarakat terhadap fasilitas dasar.
- Digunakan sebagai salah satu komponen City Development Index (CDI).

Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) Yahukimo, sebagai bagian dari Indeks Pembangunan Daerah (IPD), dinilai berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, listrik, dan lain-lain. Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Indeks Pembangunan Infrastruktur dengan ukuran kinerja “meningkat” di tahun 2024. Berikut di tampilkan target dan hasil Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Yahukimo di tahun 2024;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkat	-	-	Tidak Tercapai

Pada tahun 2024 Kabupaten Yahukimo belum terhitung indeks pembangunannya, hal ini disebabkan belum terpenuhinya 2 komponen dari 4 komponen indeks infrastruktur, yaitu belum meratanya akses listrik dan akses telepon ke keseluruhan wilayah Yahukimo dan mengingat factor-faktor yang menghambat pembangunan 2 komponen tersebut pemerintah Kabupaten Yahukimo secara konsisten mengupayakan pembangunan atas dasar prioritas dan dengan arah pembangunan masyarakatnya terlebih dahulu.

Pencapaian tujuan di laksanakan dengan empat sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Aksesibilitas dan konektivitas penduduk antar Distrik dan Kampung, Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas, Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan, dan Optimalnya penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan keempat sasaran strategis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas penduduk antardistrik dan kampung

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas penduduk antardistrik dan kampung, dilihat dari Pertumbuhan Panjang jalan yang telah di bangun sebagai sarana konektivitas antar Distrik/Kampung. Pada akhir Tahun 2024 diperoleh Panjang jalan dalam

kondisi mantap menjadi 104,44 km dari total Panjang jalan kabupaten adalah 1.758,66 km, sehingga diperoleh persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap adalah 5,93 %.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas penduduk antardistrik dan kampung	Pertumbuhan Tingkat Konektivitas Penduduk	35	5,93	16,94%	Sangat Rendah

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Pertumbuhan Tingkat Konektivitas Penduduk pada tahun 2024 mencapai angka sebesar 5,39%, turun 26,07% dari capaian pertumbuhan yang terjadi pada tahun sebelumnya yaitu 32%

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Pertumbuhan Tingkat Konektivitas Penduduk	30	32	106,67%	35	5,93	16,94%	-81,47%

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir Pertumbuhan Tingkat Konektivitas Penduduk RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar 45% pertumbuhan konektivitas, dimana pada tahun 2024 realisasi kinerja tercapai hanya 5,93% pertumbuhan pembangunan Jalan di wilayah Kabupaten yahukimo. berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, sasaran pertumbuhan konektivitas tahun 2024 terealisasi 13,18% target akhir RPJMD Kabupaten Yahukimo.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Pertumbuhan Tingkat Konektivitas Penduduk	%	35	5,93	16,94%	45	13,18%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Rincian layanan infrastruktur Dinas PUPR pada tahun 2023 merupakan Persentase jalan dalam kondisi mantap, dengan capaian kinerja 32,00%.

Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab penurunan realisasi kinerja pertumbuhan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Dari sudut Pandang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikarenakan adanya perubahan panjang ruas jalan kabupaten yang di update secara berkala setiap 5 tahun sehingga sangat mempengaruhi indeks kinerja jalan.
- Faktor keamanan Kabupaten Yahukimo menyebabkan sulitnya pelaksanaan perencanaan, Pemeliharaan dan pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan.
- Terbatasnya alokasi anggaran Pekerjaan Umum untuk tahun 2024

Upaya alternatif yang telah dilakukan Pemerintah Daerah diantaranya adalah;

- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan Aplim Apom Panjang 2.82 km yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan
- Pembangunan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Massi – Kabita 3 km melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perdesaaan.
- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan Korowai panjang 2.17 km yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan
- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan Momuna panjang 1.94 km yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan
- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan M. Yamin panjang 3.5 km yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan
- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan Wemin panjang 1.24 km yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan
- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan Yali panjang 0.90 km yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan
- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan Atzobne panjang 2 km yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan
- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan Yahuli panjang 2.35 km yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan

- Pembangunan Baru Ruas Jalan Tangma-Ukha Panjang 3.44 km yang dialokasikan melalui Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
- Rehabilitasi Jalan dalam kota melalui Dana Alokasi Umum (DAU Ditentukan)
- Penimbunan Jalan dan Halaman Gereja Moruku
- Pembangunan Talud Jalan Sudirman
- Pembangunan Trotoar Dalam Kota Dekai
- Pembangunan Jembatan Gantung Aliriyi Distrik Suntamon (Otsus)
- Pembangunan Jembatan Gantung Endomen Distrik Endomen (Otsus)
- Pembangunan Jembatan Gantung Fuluhaik Desa Simbuk Distrik Holuon (Otsus)
- Pembangunan Jembatan Gantung Kali Dab (Kono-Nipsan) (Otsus)
- Pembangunan Jembatan Gantung Kali Heluk Desa Sia Distrik Holuon (Otsus)
- Pembangunan Jembatan Gantung Kali Heluk Desa Sohondipmu Hilipuk (Otsus)
- Pembangunan Jembatan Gantung Kali Mugi Desa Wusagasem Mugi (Otsus)
- Pembangunan Jembatan Gantung Desa Dagi Distrik Korupun (Otsus)
- Pembangunan Jembatan Gantung Kali Mugi Distrik Wusama (Otsus)
- Pembangunan Jembatan Gantung Kali Nalca Distrik Nalca (Otsus)
- Pembangunan Jembatan Gantung Kali Seng Distrik Kabianggama (Otsus)
- Pembangunan Jembatan Gantung Kali Seng Distrik Lolat (Otsus)
- Pembangunan Jembatan Gantung Kali Solo Desa Banga Soloikma (Otsus)
- Pembangunan Jembatan Gantung Kali UN Distrik Kwelamdua (Otsus)

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis tersebut, pada tahun 2024 didukung dengan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan dengan capaian realisasi program sebesar 95,29% jika dibandingkan persentase capaian kinerja sasaran sebesar 16,94%, maka didapat efisiensi sumber daya sebesar 17,78%;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas penduduk antardistrik dan kampung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	14.400.000.000	14.371.832.700	99,80%
		Program Penyelenggaraan Jalan	138.353.824.600	135.999.577.600	98,30%
		Dinas Perhubungan			
		Program Pengelolaan Pelayaran	24.240.226.000	16.905.420.000	69,74%
		Program Pengelolaan Penerbangan	32.722.000.000	32.544.794.000	99,46%
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	282.000.000	279.500.000	99,11%
		(%) Total Realisasi Anggaran	209.998.050.600	200.101.124.300	95,29%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	35	5,93	16,94%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			17,78%

2. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi, Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat Hal tersebut dikarenakan infrastruktur dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan system ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Capaian Sasaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas” pada tahun 2024 untuk indikator “persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum” masuk dalam kategori “Rendah” dengan target 25.00 % dan terealisasi 7,5 %. Angka capaian tersebut diperoleh

dengan cara menghitung [jumlah penduduk perkotaan yang mengakses air minum dibagi total seluruh KK perkotaan] dikali 100%, sedangkan untuk indikator kedua "persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak" masuk dalam kategori "Sangat Rendah" dengan target 25.00 % dan terealisasi 0.00 %. Angka capaian tersebut diperoleh dengan cara menghitung diperoleh dengan cara menghitung [jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi yang layak dibagi total seluruh KK perkotaan] di kali 100%.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar	25	7,5	30,00%	Sangat Rendah

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada tahun 2024 berada di angka 7,5%, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 3,9 atau menurun sekitar 34,21% dari realisasi kinerja tahun 2023. Berikut rinciannya;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar	20	11,4	57,00%	25	7,5	30,00%	-34,21%

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar 35% pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. Pada tahun 2024 telah terealisasi 7,5% Pemenuhan Kebutuhan, Sehingga dapat disimpulkan pencapaian sasaran persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas pada tahun 2024 hanya mencapai 21,43% keberhasilan target RPJMD;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar	%	25	7,5	30,00%	35	21,43%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor penghambat pencapaian target Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar uraikan sebagai berikut:

- Terbatasnya alokasi dana merupakan faktor utama mengingat selama ini program pelaksanaan kegiatan bidang Air Minum dan Sanitasi hanya berharap pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dan alokasi dana pada Dinas Perumahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu).
- Belum terbentuknya administrasi dan kelembagaan (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Yahukimo yang sesuai amanat peraturan seharusnya wajib di laksanakan selama penyelenggaraan SPAM. Kelembagaan ini yang nantinya akan melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan SPAM di Kabupaten yang melekat pada Dinas PUPR Bidang Cipta Karya.
- Belum lengkapnya dokumen Perencanaan /Detail Engineering Design (DED) SPAM di Kabupaten yang menjadi salah satu syarat dalam pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga untuk tahun berikutnya pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dapat mengakomodir semua usulan kegiatan dari daerah.
- Mengingat kondisi Kabupaten Yahukimo yang sebagian besar adalah daerah rawa, hal ini juga yang menjadi masalah dalam menentukan ketersediaan air bersih.
- Untuk Sanitasi ada beberapa permasalahan dasar yang terkait dengan system pengelolaan sanitasi yaitu: akses dan kualitas pengelolaan yang rendah, kelembagaan yang belum efektif serta terbatasnya alternatif pendanaan pembangunan serta rendahnya kesadaran/peran masyarakat.

Adapun solusi dari faktor kegagalan diatas dapat kami sampaikan sebagai berikut;

- Perlunya alternatif pendanaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan pendanaan pembangunan di Bidang Air Minum dan Sanitasi, sehingga tidak hanya bergantung pada satu sumber dana.
- Pemerintah Daerah segera membentuk Kelembagaan (UPTD) bidang SPAM sebagaimana format usulan yang telah kami sampaikan sebelumnya.
- Mengalokasikan biaya perencanaan untuk Penyusunan DED Sistem Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan.
- Mereview Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK)
- Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat terkait Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah untuk meningkatkan peran serta kesadaran masyarakat untuk mengakses sanitasi yang layak.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis tersebut, pada tahun 2024 yang ditangani oleh Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman dengan realisasi anggaran program sebesar 99,59% jika dibandingkan persentase capaian kinerja sebesar 7,5%, maka didapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja sebesar 30,12%;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1.491.034.000	1.490.500.000	99,96%
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	9.600.000.000	9.555.503.500	99,54%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.926.974.000	3.911.009.000	99,59%

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
		(%) Total Realisasi Anggaran	15.018.008.000	14.957.012.500	99,59%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	25	7,5	30,00%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			30,12%

3. Sasaran Meningkatnya tata Kelola pertanahan

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Meningkatnya tata Kelola pertanahan, dilihat dari "Proporsi Sertifikat Kepemilikan Tanah". Karena sasaran ini belum menjadi prioritas pada tahun 2024 maka pengukuran capaian sasaran belum dapat dilakukan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya tata Kelola pertanahan	Proporsi Sertifikat Kepemilikan Tanah	Meningkat	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023;

Perbandingan tata Kelola pertanahan tidak dapat dilakukan karena tidak terealisasi program dan kegiatannya

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Proporsi Sertifikat Kepemilikan Tanah	Meningkat	-	-	Meningkat	-	-	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Analisis target RPJMD tata Kelola pertanahan tidak dapat dilakukan karena tidak terealisasi program dan Kegiatannya

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Proporsi Sertifikat Kepemilikan Tanah	Keterangan	Meningkat	-	-	Meningkat	

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor penyebab belum adanya realisasi kinerja peningkatan tata Kelola pertanahan karena capaian ini belum menjadi prioritas Kabupaten Yahukimo di tahun 2024

- e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Capaian sasaran ini belum di dukung oleh Program kegiatan di tahun anggaran 2024;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Proporsi Sertifikat Kepemilikan Tanah				
			-	-	-
		(%) Total Realisasi Anggaran	-	-	-
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	-	-	-
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-

4. Sasaran Optimalnya penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang

- a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Tingkat kepatuhan terhadap tata ruang mengacu pada seberapa besar individu, komunitas, dan pemerintah mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, yang bertujuan untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan ruang secara terencana dan berkelanjutan. Tata ruang bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Kepatuhan terhadap tata ruang sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, mencegah konflik penggunaan lahan, dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Contoh kepatuhan terhadap tata ruang meliputi penggunaan lahan yang sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan, pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang, dan penanganan limbah yang bertanggung jawab.

Indikator kinerja "Tingkat kepatuhan terhadap tata ruang" pada tahun 2024 masuk dalam kategori tidak tercapai dengan target 65.00 % dan terealisasi sebesar 0.00 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Optimalnya penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang	Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang	65	0	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023;

Penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang pada tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan karena tidak terealisasinya capaian kinerja sasaran Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Optimalnya penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang	60	-	-	65	-	-	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar 75% pada Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang. Namun karena tidak adanya realisasi kinerja tersebut maka Persentase Capaian kinerja target akhir RPJMD ini tidak dapat diukur.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Optimalnya penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang	%	65	-	-	75%	-

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Adapun faktor kegagalan yang mempengaruhi hasil pencapaian indikator tersebut sebagai berikut :

- Dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan selama beberapa tahun terakhir ini, sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Yahukimo tidak melakukan kegiatan terkait legalisasi aset tanah permukiman pada tahun 2024.
- Tidak terlaksananya Penyelesaian Fasilitas Legalisasi Aset Tanah Permukiman.
- Kurangnya Pemahaman terkait legalisasi aset tanah permukiman.

Adapun Solusi yang akan dilakukan ke depannya antara lain:

- Pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang dengan dasar prioritas dan kebutuhan.
- Pelaksanaan Program Penyelesaian Fasilitas Legalisasi Aset Tanah Permukiman jika dibutuhkan.
- Pelaksanaan sosialisasi Pemahaman terkait legalisasi aset tanah permukiman.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis tersebut oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan realisasi anggaran program sebesar 99,75%, Karena tidak adanya realisasi indikator kinerja, maka efisiensi penggunaan sumber daya capaian kinerja tidak dapat dilaksanakan, berikut rincian pelaksanaan anggarannya;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
		Program Kawasan Permukiman	2.615.812.500	2.615.812.500	100,00%
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
		Program Penataan Bangunan Gedung	2.000.000.000	1.988.400.000	99,42%
		(%) Total Realisasi Anggaran	4.615.812.500	4.604.212.500	99,75%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja			
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			

Misi	:	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
Tujuan	:	Memaksimalkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

Indikator Tujuan Memaksimalkan Pembangunan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Yahukimo adalah mengukur Indeks Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah alat ukur yang menggabungkan beberapa parameter lingkungan seperti kualitas air, udara, dan lahan, serta faktor sosial-ekonomi, untuk memberikan gambaran kualitas lingkungan di suatu wilayah. IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indeks ini bertujuan emberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Menilai keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

IKLH dihitung dengan rumus: $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$. Dengan Kalsifikasi skoring sebagai berikut;

- Sangat Baik: $90 \leq x \leq 100$
- Baik: $70 \leq x < 90$
- Sedang: $50 \leq x < 70$

Sedangkan Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat untuk menilai kemungkinan dampak bencana yang mungkin terjadi di suatu wilayah. Indeks ini digunakan untuk memberikan gambaran risiko bencana di suatu wilayah, baik untuk pemerintah maupun nonpemerintah. Indeks ini bertujuan Memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap wilayah, Membantu pemerintah dan nonpemerintah dalam menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana, dan embantu meningkatkan ketangguhan masyarakat. Data Indeks Risiko Bencana dapat diakses melalui Buku IRBI yang disusun oleh BNPB, Nilai yang tertera dalam Buku IRBI dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Indeks Lingkungan Hidup dengan ukuran kinerja “meningkat” dan Indeks Risiko Bencana dengan besaran 131.3 di tahun 2024. Berikut di tampilkan target dan hasil Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Yahukimo di tahun 2024;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Memaksimalkan Pembangunan Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup	Meningkat	-	-	Tidak Tercapai
		Indeks Risiko Bencana	131.3	-	-	Tidak Tercapai

Indikator Indeks Lingkungan hidup (IKLH) pada tahun 2024 tidak terealisasi karena tidak adanya data hasil skor indeks Lingkungan Hidup pada Kabupaten Yahukimo. Pencapaian Indikator tujuan Indeks Lingkungan Hidup di laksanakan dengan tiga sasaran strategis, yaitu Meningkatnya kualitas dan baku mutu air, Meningkatnya kualitas udara, dan Meningkatnya tutupan lahan.

Selanjutnya sama halnya dengan IKLH, realisasi Tujuan indeks resiko bencana juga tidak ada realisasinya karena belum dirilisnya Buku Resiko Bencana Indonesia pada tahun 2024 pada saat penyusunan LKJ ini. Pencapaian Indikator tujuan Indeks Resiko Bencana di laksanakan dengan sasaran strategis, Menurunnya tingkat resiko bencana. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan keempat sasaran strategis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Baku Mutu Air

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Presentase pencemaran air bersih kerap kali terjadi karena adanya sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Senyawa organik akan mencemari sumber air apabila sampah dibuang sembarangan. Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup Target Indeks Pencemaran air Yahukimo Tahun 2024 di targetkan sebesar 62,50% dengan realisasi capaian 70%,

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Kualitas Dan Baku Mutu Air	Indeks Pencemaran Air	62,5	70	112,00%	Sangat Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023;

Realisasi kinerja Peningkatan Kualitas Dan Baku Mutu Air pada tahun 2023 diketahui sebesar 70 dari target 61.55, sehingga dapat di simpulkan tidak ada perubahan yang terjadi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja. Namun jika di dasari dari aspek persentase realisasi kinerja terjadi penurunan kinerja pada tahun 2024 sebesar 1,52% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut Rinciannya;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Pencemaran Air	61,55	70	113,73%	62,5	70	112,00%	Tetap

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Target RPJMD yang ditetapkan untuk sasaran kinerja ini adalah 63,5, sehingga dapat di simpulkan realisasi kinerja indeks pencemaran air pada tahun 2024 telah mencapai 110,24% target capaian RPJMD Kabupaten Yahukimo;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Indeks Pencemaran Air	Keterangan	62,5	70	112,00%	63,5	110,24%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor yang menjadi penyebab peningkatan/penurunan capaian sasaran peningkatan Kualitas Dan Baku Mutu Air diantaranya adalah;

- Belum adanya pengelolaan data air dengan baik.
- Lemahnya koordinasi dan konsultasi dengan provinsi dalam pengelolaan kualitas air.
- Terbatasnya SDM aparatur yang memahami pengelolaan lingkungan.

Adapun solusi yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan Kualitas Dan Baku Mutu Air adalah sebagai berikut;

- Mengikuti Bintek pengelolaan kualitas air bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup.
- Membangun komitmen bersama dalam pengelolaan kualitas lingkungan baik Pemerintah maupun SKPD terkait.
- Melakukan koordinasi dengan Provinsi maupun Kementerian LHK di Jakarta dalam pengelolaan kualitas lingkungan.
- Pembenahan Pelaporan kinerja Indeks Pencemaran Air melalui penyampaian pengukuran dan rincian komponen.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian sasaran peningkatan Kualitas Dan Baku Mutu Air adalah 114,18%; besaran ini berasal dari angka capaian kinerja sasaran peningkatan Kualitas Dan Baku Mutu Air sebesar 114,18 yang dibagi dengan persentase realisasi anggaran program dan kegiatan sebesar 98,08 di tahun 2024. Berikut selengkapnya;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Pencemaran Air	Dinas Lingkungan Hidup			

		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2.096.000.000	2.056.005.000	98,09%
		(%) Total Realisasi Anggaran	2.096.000.000	2.056.005.000	98,09%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	62,5	70	112,00%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			114,18%

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara, dilihat dari kualitas Udara di wilayah Kabupaten Yahukimo. Pengukuran sasaran peningkatan kualitas udara belum dapat dilakukan karena belum di terimanya data kualitas udara di wilayah Kabupaten Yahukimo;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Kualitas Udara	Kualitas Udara	60	99,52	165,87%	Sangat Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023;

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tidak adanya data pencemaran udara yang di terbitkan untuk Kabupaten Yahukimo;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kualitas Udara	55	99,52	180,95%	60	99,52	165,87%	0,00%

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir RPJMD yang ditetapkan Kabupaten Yahukimo untuk sasaran ini adalah 60, diketahui bahwa realisasi kinerja peningkatan kualitas udara di tahun 2024 adalah sebesar 99,52; dilihat dari kedua komponen tersebut maka dapat diartikan capaian sasaran ini telah mencapai 165,87% Target akhir RPJMD Yahukimo.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Meningkatnya Kualitas Udara	Keterangan	60	99,52	165,87%	65	153,11%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Beberapa faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Belum adanya pengelolaan data kualitas udara dengan baik.
- Lemahnya koordinasi dan konsultasi dengan provinsi dalam pengelolaan kualitas udara.
- Terbatasnya SDM aparatur yang memahami pengelolaan lingkungan

Adapun solusi yang telah dilakukan dalam upaya pengelolaan lingkungan adalah sebagai berikut:

- Mengikuti Bintek pengelolaan kualitas udara bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup.
- Membangun komitmen bersama dalam pengelolaan kualitas lingkungan baik Pemerintah maupun SKPD terkait.
- Melakukan koordinasi dengan Provinsi maupun Kementerian LHK di Jakarta dalam pengelolaan kualitas lingkungan.
- Pembenahan Pelaporan kinerja peningkatan kualitas udara melalui penyampaian pengukuran dan rincian komponennya

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berikut di rincikan Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Peningkatan Kualitas Udara;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup			
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.045.050.000	3.034.000.000	99,64%
		(%) Total Realisasi Anggaran	3.045.050.000	3.034.000.000	99,64%

		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	60	99,52	165,87%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			166,47%

3. Sasaran Meningkatnya Tutupan Lahan

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Berdasar Data yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup, Capaian Sasaran Meningkatnya Tutupan Lahan, terlaksana dengan target indeks kualitas tutupan lahan dengan besaran 60% dan pada tahun 2024 terjadi realisasi sebesar 98,63 % atau 164% capaian kinerja sasaran, maka dikatakan apakah kondisi kualitas tutupan lahan di Dekai dalam keadaan baik, Berikut rinciannya;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Tutupan Lahan	Tutupan Lahan	60	98,63	164,38%	Sangat tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tidak adanya data Realisasi kinerja tutupan lahan tahun 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Tutupan Lahan	55	0		60	98,63	164,38%	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir RPJMD yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah 65 sehingga Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah menghasilkan capaian 151,74% Target akhir RPJMD Kabupaten Yahukimo;

NO	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Capaian s/d
----	-----------	--------	--------------------	--------	-------------

	Kinerja		Target	Realisasi 2024	%	Akhir RPJMD	2024 terhadap target Akhir RPJMD
1	Tutupan Lahan	Keterangan	60	98,63	164,38%	65	151,74%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Beberapa faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Belum adanya pengelolaan data kualitas tutupan dengan baik.
- Lemahnya koordinasi dan konsultasi dengan provinsi dalam pengelolaan kualitas tutupan lahan.
- Terbatasnya SDM aparatur yang memahami pengelolaan lingkungan

Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut;

- Peningkatan pengelolaan data kualitas tutupan dengan baik
- Peningkatan Kualitas SDM Aparatur melalui bimtek pengelolaan Lingkungan hidup
- Pembenahan Pelaporan kinerja tutupan lahan melalui penyampaian pengukuran dan rincian komponen.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut di rincikan Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Peningkatan tutupan Lahan;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup			
		Program Pengelolaan Persampahan	2.128.148.000	2.124.500.000	99,83%
		(%) Total Realisasi Anggaran	2.128.148.000	2.124.500.000	99,83%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	60	98,63	164,38%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			164,67%

4. Sasaran Menurunnya tingkat resiko bencana

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Menurunnya tingkat resiko bencana, dilihat dari Jumlah Kampung Siaga yang di bentuk pada tahun 2024. Pada tahun ini belum ada dokumentasi/data Jumlah kampung siaga di wilayah Kabupaten Yahukimo yang di terima;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Menurunnya tingkat resiko bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana	3	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tidak adanya data Jumlah Kampung Siaga Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Yahukimo;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Jumlah Kampung Siaga Bencana	2	-	-	3	-	-	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah;

Target RPJMD yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah 5 kampung siaga, namun Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target akhir Jangka Menengah untuk sasaran ini tidak dapat dilakukan;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Jumlah Kampung Siaga Bencana	Jumlah	3	-	-	5	-

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Capaian Sasaran Menurunnya tingkat resiko bencana pada Kabupaten belum dapat diukur capaian sasaran dan kinerjanya karena tidak adanya data jumlah kampung Siaga Bencana di tahun 2024. Faktor-faktor yang menghambat sehingga indikator kinerja utama ini tidak terlaksana secara baik adalah:

- Kurangnya pengetahuan SDM aparatur yang paham tentang Kampung siaga bencana.
- Lemahnya konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
- Pelaporan tidak tertib waktu

Adapun solusi yang dilakukan dalam peningkatan target kinerja ini sehingga dapat terlaksana dengan baik adalah:

- Peningkatan SDM aparatur melalui pelatihan-pelatihan dan BIMTEK
- Segera melakukan koordinasi dengan bidang terkait mengenai pembentukan Kampung siaga bencana
- Peningkatan dalam aspek Tertib jadwal Pelaporan dan aspek peningkatan Pelaporan kinerja OPD BPBD Kabupaten Yahukimo.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berikut di sajikan anggaran dan realisasi program yang di laksanakan dalam rangka pencapaian sasaran bersangkutan;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Jumlah Kampung Siaga Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Program Penanggulangan Bencana	134.820.000	134.820.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	134.820.000	134.820.000	100,00%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja			
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			

Misi	:	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdaya saing dan Berintegritas
Tujuan	:	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Indikator Tujuan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kabupaten Yahukimo adalah mengukur Skor Indeks Kepuasan masyarakat Yahukimo di tahun bersangkutan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM diukur secara kuantitatif dan kualitatif, Tujuan IKM Mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan, Mengetahui harapan dan kebutuhan masyarakat, Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayani, Menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public.

Cara Menghitung IKM;

- Membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat
- Menggunakan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi masyarakat
- Menghitung total dari nilai persepsi per unsur, kemudian mengalikannya dengan nilai penimbang

Cara Menyusun IKM;

- Melakukan survei kepuasan masyarakat
- Menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data
- Membentuk tim penyusunan IKM
- Bekerjasama dengan unit independen seperti BPS, perguruan tinggi, LSM, atau pelaku usaha.

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Skor Relatif Mutu Pelayanan dengan ukuran kinerja “meningkat” dan Indikator Predikat Kinerja Pelayanan Publik dengan ukuran kinerja “meningkat” di tahun 2024. Berikut di tampilkan target dan hasil kedua Indikator Tujuan Kabupaten Yahukimo sebagai berikut;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkat	-	-	-

Pada tahun 2024 Pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat pada Kabupaten Yahukimo belum terhitung sehingga tidak ada realisasi capaian Indikator tujuan Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.

Pencapaian tujuan di laksanakan dengan sasaran strategis Peningkatan mutu pelayanan publik. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan sasaran strategis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

- Skor Relatif Mutu Pelayanan

Target Skor Relatif Mutu Pelayanan adalah Meningkat atau 78,39, realisasinya adalah 80,79 dengan capaian 103,06%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2024 capaian berhasil. Capaian ini di peroleh oleh Pengolahan Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebagai berikut;

No	Unit Pelayanan	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
	Dinas Pendidikan	77,00	B	Baik
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86,98	B	Baik
	Puskesmas Dekai	78,39	B	Baik
	Kabupaten Yahukimo	80,79	B	Baik

- Dinas Pendidikan dengan nilai 77,00, Mutu Pelayanan B dan Kinerja Unit Pelayanan Baik, dilakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap jumlah responden 502 orang dengan pengolahan data dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan didapati Jumlah Nilai Unsur Pelayanan = 47.261, Nilai Rata-Rata Per Unsur = 24,83, NRR Tertimbang Per Unsur = 3,08.
- Berikut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 86,98, Mutu Pelayanan B dan Kinerja Unit Pelayanan Baik, dilakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap jumlah responden 35 orang dengan pengolahan data dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan
- Survey Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Dekai dengan nilai 78,39, Mutu Pelayanan B dan Kinerja Unit Pelayanan Baik, dilakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap jumlah responden 80 orang dengan rincian laki-laki 37 orang dan Perempuan 43 orang

- Predikat Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat daerah pada tahun 2024, target predikat kinerja pelayanan publik adalah B- dengan IPP 3,01, realisasinya adalah predikat/ kategori D atau dengan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten 1,88, Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Sekretariat Daerah pada Tahun 2024 belum terpenuhi. Penilaian tersebut berdasarkan pada Kegiatan Pemantauan Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 oleh KemenPAN-RB terhadap Dinas Sosial, RSUD Dekai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada unit lokus di Kabupaten Yahukimo telah ditetapkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, adalah sebagai berikut;

No.	Unit Lokus	Indeks	Kategori
1.	Dinas Sosial	1,96	D
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,56	D
3.	RSUD Dekai	2,12	C-
Indeks Pelayanan Publik Kab. Yahukimo		1,88	D

Berdasarkan kedua Indikator kinerja di atas maka capaian kinerja peningkatan mutu pelayanan di ketahui sebagai berikut;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik	Skor Relatif Mutu Pelayanan	Meningkat	Meningkat	100%	Tercapai
		Predikat Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Meningkat (B)	Tidak tercapai (D)	-	Tidak tercapai

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan kedua Indikator kinerja sasaran peningkatan mutu public pada tahun 2024 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;

- Skor Relatif Mutu Pelayanan

Dalam mencapai indikator “Skor Relatif Mutu Pelayanan”, adanya penambahan Unit Pelayanan yang telah melakukan melakukan survey kepuasan masyarakat, sehingga ada peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya dimana tahun 2024 skor yang terhitung sebesar 80,79 (B) sedangkan tahun 2023 mencapai 78,39 (B)

- Predikat Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat daerah dikarenakan pada tahun sebelumnya belum ada skoring Indeks Pelayanan Publik yang terlaksana maka realisasi target kinerja predikat pelayanan publik belum dapat diukur naik/turunnya.

Berdasarkan kedua Indikator kinerja di atas maka Perbandingan capaian kinerja peningkatan mutu pelayanan tahun 2024 dan 2023 di ketahui sebagai berikut;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	

1	Skor Relatif Mutu Pelayanan	Meningkat	Meningkat	100%	Meningkat	Meningkat	100%	Tercapai
	Predikat Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Meningkat	-	-	Meningkat	Tidak tercapai	-	Tidak tercapai

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Target akhir Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik RPJMD tahun 2021-2026 berdasarkan Skor Relatif Mutu Pelayanan telah mencapai 100% target akhir RPJMD Kabupaten, sedangkan Predikat Kinerja Pelayanan Publik belum terpenuhi capaian kinerjanya terhadap target akhir RPJMD mutu pelayanan.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Skor Relatif Mutu Pelayanan	Skor	Meningkat	Meningkat	100%	Meningkat	100%
2	Predikat Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Skor	Meningkat	Tidak tercapai	-	Meningkat	Tidak tercapai

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Beberapa faktor yang menjadi kegagalan dalam pencapaian target kinerja sasaran Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik yaitu sebagai berikut:

Skor Relatif Mutu Pelayanan,

- Adanya penambahan unit layanan dalam melakukan SKM diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Puskesmas Dekai
- Komitmen pimpinan unit dalam meningkatkan pelayanan
- Adanya intervensi Inspektorat dalam perbaikan pelayanan publik salah satunya pelaksanaan SKM guna mendukung penilaian MCP KPK

Predikat Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik,

- Unit Layanan Evaluasi (ULE) dalam segi kebijakan pelayanan belum melibatkan Masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan belum melaksanakan survei kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.
- ULE belum mengatur kebijakan profesionalisme SDM, dimana belum ada pengaturan tentang jam pelayanan (shifting), kode etik, system reward dan penerapan budaya pelayanan dengan menggunakan pakaian seragam, identitas nama serta pin atribut.
- Ketersediaan sarana prasarana belum memadai pada ULE
- Sistem Informasi Pelayanan Publik yang belum sepenuhnya dapat diaplikasikan dikarenakan jaringan internet yang terbatas.
- Sarana konsultasi dan pengaduan bagi masyarakat yang belum tersedia

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skor Relatif Mutu Pelayanan

- Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Bagian Organisasi telah melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.;

Predikat Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

- Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Bagian Organisasi telah melakukan evaluasi terhadap unit yang dinilai dengan mendampingi pengisian F-01 dan F-03 dan melakukan pengamatan lapangan dengan dibuktikan dengan berita acara hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penilaian pelayanan public pada Unit yang dinilai.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut di sajikan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan realisasi dan hasil capaian kinerja dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan mutu pelayanan publik;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Skor Relatif Mutu Pelayanan	Sekretariat Daerah			
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	50.484.190.513	50.452.025.513	99,94%
		(%) Total Realisasi Anggaran	50.484.190.513	50.452.025.513	99,94%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	Meningkat	Meningkat	100%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			100,06%

2	Predikat Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah			
		(%) Total Realisasi Anggaran	50.484.190.513	50.452.025.513	99,94%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	Meningkat (B)	Tidak Tercapai (D)	-
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-

Misi	:	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas
Tujuan	:	Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indikator Tujuan Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Yahukimo adalah mengukur Indeks reformasi Birokrasi Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan reformasi birokrasi di instansi pemerintah, dengan fokus pada aspek kelembagaan, tata kelola, dan SDM apparatus. IRB mengukur kemajuan dalam aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan sumber daya manusia apparatus. IRB bertujuan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi dan memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas.

Menurut KemenPANRB, indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi meliputi pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan public. Reformasi birokrasi mencakup 8 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sistem manajemen SDM aparatur, sistem pengawasan, dan akuntabilitas kerja.

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Indeks reformasi Birokrasi dengan ukuran kinerja “meningkat” di tahun 2024. Berikut di tampilkan target dan hasil kedua Indikator Tujuan Kabupaten Yahukimo sebagai berikut;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks reformasi Birokrasi	Meningkat	-	-	-

Pada tahun 2024 Kabupaten Yahukimo belum terhitung skor indeks reformasi birokrasinya sehingga tidak ada realisasi capaian Indikator tujuan Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pencapaian tujuan di laksanakan dengan lima sasaran strategis yang diantaranya adalah Meningkatnya kinerja pelayanan public, Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah, Meningkatnya pengembangan sumber daya aparatur, Meningkatnya dukungan sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya, dan Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan kelima sasaran strategis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan publik

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Dalam mencapai sasaran “meningkatnya kinerja pelayanan publik”, dengan indikator Predikat Kinerja Pelayanan Publik, Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi pada Tahun 2024 telah melakukan pendampingan/ fasilitasi pelayanan publik kepada unit lokus yang ditunjuk oleh Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor B/1500/PC.02/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 Perihal Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024).

Berdasarkan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 pada unit lokus di Kabupaten Yahukimo telah dikeluarkannya Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor R/3536/PC.02/XI/2024 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 sebagai berikut;

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui surat ini, disampaikan bahwa hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Yahukimo** menunjukkan hasil sebagai berikut:

Nilai : **57,38 (Zona Kuning)**
Kategori : **C (Kualitas Sedang)**

target predikat kinerja pelayanan publik adalah meningkat atau 60,94, realisasinya adalah predikat/ kategori C atau Opini Kualitas Sedang/ Zona Kuning, Nilai Akhir 57.38 dengan capaian 94,16%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa target pada Indikator ini belum terpenuhi. Berikut hasil Capaian Kinerja Peningkatan kinerja pelayanan Publik;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	60,94 (C)	57,38 (C)	94,16%	Sangat Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Berdasarkan data yang di peroleh Sekretariat Daerah Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tidak adanya data Predikat Kinerja Pelayanan Publik untuk tahun 2023.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	C	-	-	60,94 (C)	57,38 (C)	94,16%	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir Predikat Kinerja Pelayanan Publik RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan dengan predikat B atau rentang nilai 78 - 87,99. Berdasarkan realisasi predikat kinerja pelayanan public tahun 2024 maka dapat di simpulkan Sasaran peningkatan kinerja pelayanan public Kabupaten Yahukimo telah mencapai 73,56% target akhir sasaran RPJMD, Berikut rinciannya;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	60,94 (C)	57,38 (C)	94,16%	B (78)	73,56%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor yang menyebabkan capaian kinerja sasaran peningkatan kinerja pelayanan public Kabupaten Yahukimo tahun 2024 diantaranya adalah;

- Dari sudut pandang Sekretariat Daerah, Metode penilaian yang lebih sederhana dengan peninjauan langsung oleh Tim Ombudsman namun penyiapan dokumen dan kesiapan aparatur belum menjadi perhatian pimpinan unit yang dinilai;
- Permasalahan anggaran pada unit layanan sehingga ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai.
- SDM unit pelayanan yang kurang dapat berkerjasama dengan bagian organisasi, dikarenakan ruang konsultasi dan koordinasi semasa persiapan penilaian tidak dimanfaatkan

Alternatif Solusi yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut;

- Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Bagian Organisasi telah melakukan pendampingan dalam menyiapkan dokumen serta memfasilitasi kesiapan fisik alat penunjang pelayanan di beberapa Unit Pelayanan.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam pencapaian sasaran peningkatan kinerja pelayanan public sebesar 94,25%. Besaran ini diperoleh dengan membagi persentase hasil capaian Indikator kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang telah dikeluarkan, berikut selengkapnya;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah			
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.267.730.000	1.267.730.000	100,00%
		Inspektorat Daerah			

		Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.331.650.000	4.325.650.000	99,86%
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	634.730.000	634.730.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	6.234.110.000	6.228.110.000	99,90%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	60,94	57,38	94,16%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			94,25%

2. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan, dilihat dari predikat Opini yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Yahukimo untuk tahun anggaran 2024. Pada saat penyusunan LKJIP ini Laporan keuangan Perangkat Daerah tahun anggaran 2024 masih dalam proses audit, oleh karena itu pengukuran realisasi kinerja peningkatan pengelolaan keuangan Daerah belum bisa dilakukan. Namun mengingat prestasi yang telah di raih tahun sebelumnya dimana Kabupaten Yahukimo meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) perkiraan untuk tahun ini dipastikan mencapai predikat yang sama.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	WDP	Proses audit	-	Proses audit

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pengukuran indikator kinerja peningkatan pengelolaan keuangan Daerah melalui perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat terlaksana karena LKPD Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2024 masih dalam proses audit;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	

1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	WDP	WTP	100	WDP	Proses audit	-	-
---	------------------------------------	-----	-----	-----	-----	--------------	---	---

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Target akhir Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan dengan predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP), Namun oleh karena LKPD Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2024 masih dalam proses audit maka analisis perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir RPJMD kabupaten Yahukimo belum bisa dilakukan.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WDP	Proses diaudit	-	WTP	-

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Pada sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan dengan indikator opini pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2024 ditargetkan dengan predikat WTP dengan realisasi dalam tahapan penyusunan, dimana Pemerintah Kabupaten Yahukimo secara berturut-turut dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 telah meraih opini BPK dengan predikat WTP. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, penyajian yang diungkapkan dalam laporan keuangan dituangkan sesuai dengan ketentuan dan penilaian tersebut menjadi Indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan pelaporan dan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dikarenakan pencapaian WTP hasil dari audit LKPD Kabupaten yahukimo tahun sebelumnya maka Solusi yang tepat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Yahukimo adalah dengan selalu mempertahankan prestasi predikat untuk tahun-tahun ke depannya.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan belum terhitung dikarenakan LKPD Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2024 masih dalam proses audit. Berikut rincian alokasi dan realisasi anggaran yang terjadi dalam rangka pencapaian tersebut;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	537.519.813.512	81.576.208.924	15,18%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.884.961.600	2.884.777.600	99,99%
		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah			
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	945.684.000	944.506.900	99,88%
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	476.650.000	476.650.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	541.827.109.112	85.882.143.424	15,85%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja			
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			

3. Sasaran Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Aparatur

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

ASN (Aparatur Sipil Negara) yang sesuai dengan standar kompetensi adalah ASN yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk menjalankan

tugas jabatannya secara profesional, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Standar Kompetensi Jabatan ASN diantaranya adalah;

- Merupakan deskripsi dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan oleh ASN dalam menjalankan tugas jabatannya.
- Mencakup:
 - Kompetensi Teknis: Kemampuan yang spesifik terkait dengan tugas dan fungsi jabatan, seperti kemampuan teknis, operasional, dan keahlian khusus.
 - Kompetensi Manajerial: Kemampuan dalam mengelola, memimpin, dan mengarahkan, serta mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
 - Kompetensi Sosial Kultural: Kemampuan berinteraksi, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan berbagai latar belakang sosial dan budaya.

Dalam rangka peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur aspek ASN Yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi digunakan sebagai indikator kinerja oleh Kabupaten Yahukimo dalam RPJMDnya.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2024 Indikator Persentase ASN Yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi ditargetkan 57% dengan realisasi 23,22%. Hasil Indikator ini di hitung melalui rumus;

$$\begin{array}{l} \text{\% ASN} \\ \text{Kompetensi} \end{array} = \frac{\text{Jumlah ASN yang sudah mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah Seluruh ASN}} \times 100\% =$$

$$\begin{array}{l} \text{\% ASN} \\ \text{Kompetensi} \\ \text{2024} \end{array} = \frac{620}{2670} \times 100\% = \mathbf{23,22\%}$$

Dengan perincian:

- Jumlah target Pendidikan dan Pelatihan 2024: 500
- Jumlah peserta tugas belajar dan izin belajar sampai di Tahun 2024: 120

- o Jumlah peserta diklat sosialisasi Bimtek yang dilaksanakan OPD di Tahun 2024: 500 orang
- o Jumlah PNS keadaan per juni 2024: 2670

Dari target yang telah ditetapkan pada RPJMD untuk tahun 2024 maka capaian kinerja Persentase ASN Yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi terlaksana 40,74% realisasi dan terkategori “rendah”

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi	57%	23,22%	40,74%	Rendah

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja Persentase ASN Yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi telah terhitung sebesar 21.44%, yang artinya terjadi kenaikan sebesar 1,78% jika realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut di rinci perbandingan tersebut;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase ASN Yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi	56%	21,44%	38,29%	57%	23,22%	40,74%	8,31%

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir ASN RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar 59% dari ASN yang sesuai dengan standar kompetensi, dimana pada tahun 2024, Persentase ASN Yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi pemerintah kabupaten Yahukimo terhitung sebesar 23.22% yang artinya capaian sasaran ini mencapai 39,36% keberhasilan target akhir RPJMD.

NO	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Capaian s/d
----	-----------	--------	--------------------	--------	-------------

	Kinerja		Target	Realisasi 2024	%	Akhir RPJMD	2024 terhadap target Akhir RPJMD
1	Persentase ASN Yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi	Persentase	57%	23,22%	40,74%	59%	39,36%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Pada sasaran meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur dengan Indikator Persentase Penataan ASN sesuai formasi dan kebutuhan, dengan capaian 87.15%. Keberhasilan ini disebabkan :

- BKPP pada tahun 2024 telah memfasilitasi kegiatan pelantikan JPT, Administrator dan Pengawas yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- Pelantikan yang telah dilaksanakan telah melalui tahapan pertimbangan jabatan dan pangkat oleh Tim Baperjakat yang berpedoman pada rekomendasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- Formasi Jabatan Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang sebelumnya telah tersusun dalam Peta Jabatan OPD sebagai Lampiran pada SK Bupati tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan menjadi dasar BKPP dalam penataan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- Formasi dan kebutuhan ASN dalam jangka waktu tertentu selalu di Update dalam aplikasi E-formasi yang dikelola oleh BKPP dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Alternatif Solusi Yang dapat dilakukan untuk Tahun kedepannya;

- BKPP sesuai Tupoksinya meningkatkan kualitas penataan pelaporan kondisi kepegawaian atau update jumlah ASN Kabupaten Yahukimo dari tahun ke tahun sesuai ketentuan dan kebutuhan pelaporan

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis tersebut, pada tahun 2024 didukung dengan anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian realisasi program sebesar 100% jika dibandingkan persentase capaian kinerja sebesar 40,74%, maka efisiensi penggunaan sumber daya terhitung sebesar 40,74%;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%)
----	-------------------	---------	----------	-----------	-----

					Realisasi
1	Persentase ASN Yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan			
		Program Kepegawaian Daerah	3.076.223.000	3.076.223.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	3.076.223.000	3.076.223.000	100,00%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	57%	23,22%	40,74%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			40,74%

4. Sasaran Meningkatnya Dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai Fungsinya

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada masyarakat, dan dapat diukur melalui survei kepuasan masyarakat. ndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Capaian Sasaran Meningkatnya Dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai Fungsinya, dilihat dari Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Seketariat DPRD, dimana sesuai data yang diperoleh Kantor Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Seketariat DPRD sebesar 90,30%.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai Fungsinya	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Seketariat DPRD	100	90,3	90,30%	Sangat Tinggi

Indikator ini dinilai dengan menggunakan angket yang disebarakan kepada Pimpinan dan Anggota DRD Kabupaten Yahukimo. Angket yang di berikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sebanyak 20 angket yang dapat mewakili 35 responden (Pimpinan dan Anggota DPRD). Pemberian Angket kepada Responden untuk mengetahui sejauhmana

kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Hasil Angket yang disebarakan kepada 20 responden dapat dilihat pada tabel berikut ini;

No	Responden	Pertanyaan										Total
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
1	R1	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	36
2	R2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	38
3	R3	2	4	3	4	4	3	4	4	4	3	35
4	R4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	38
5	R5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
6	R6	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	38
7	R7	4	2	3	3	4	3	4	3	4	3	33
8	R8	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	37
9	R9	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	36
10	R10	3	4	2	3	4	3	3	4	4	2	32
11	R11	4	3	4	3	3	3	4	4	2	3	33
12	R12	4	3	4	4	3	4	4	4	2	3	35
13	R13	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	37
14	R14	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	37
15	R15	4	2	4	4	4	3	3	4	3	4	35
16	R16	2	4	4	3	4	3	4	4	4	4	36
17	R17	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	37
18	R18	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	37
19	R19	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38
20	R20	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	36
21	R21	4	4	4	3	4	2	3	3	4	4	35
22	R22	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	35
23	R23	3	4	4	4	4	2	3	4	4	4	36
24	R4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	38
25	R25	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	36
Jumlah		73	86	88	92	94	94	85	91	91	94	88
Total Skor												1000
Rata-rata % Capaian												90,30%
Capaian Kinerja												103,79%

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi Capaian Kinerja pada indikator Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, naik sebesar 1,05 atau naik sebesar 8,31%; dimana realisasi kinerja Indeks Kepuasan di tahun 2023 tercatat sebesar 89,25%. Berikut rincian perbandingannya;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100	89,25	89,25%	100	90,3	90,30%	8,31%

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Target akhir angka harapan hidup RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar 100% Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD, selanjutnya Pada tahun 2024 realisasi indeks tersebut tercapai skor 90,30. Berdasarkan 2 komponen tersebut maka dapat disimpulkan pencapaian sasaran persentase Keluarga Berencana yang aktif pada tahun 2024 mencapai 90,30% target akhir RPJMD sasaran Meningkatnya Dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai Fungsinya.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	100	90,3	90,30%	100	90,30%

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;
- Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target ini tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- Adanya komitmen Pegawai Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksi masing-masing;
- Sinergitas yang baik antara DPRD Kabupaten Yahukimo dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Yahukimo dalam memfasilitasi seluruh pelaksanaan tugas.

Selanjutnya alternatif Solusi yang bisa dilakukan untuk tahun kedepannya adalah;

- Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan pencapaian sasaran oleh Sekretariat DPRD harus terlaksana dengan konsisten

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut pada tahun 2024, didukung dengan program kegiatan Sekretariat DPRD dengan capaian realisasi sebesar 97,32% jika dibandingkan persentase capaian kinerja sebesar 90,30%, maka didapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 92,79%.

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD			
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	42.389.080.000	41.251.700.000	97,32%
		(%) Total Realisasi Anggaran	42.389.080.000	41.251.700.000	97,32%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	100	90,3	90,30%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			92,79%

5. Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan Kabupaten Yahukimo, dilihat dari Ketersediaan Dokumen Perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bisa diakses melalui website BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yahukimo).

Dokumen Perencanaan Pembangunan Utama:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD): Dokumen ini menetapkan visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka panjang (20-25 tahun).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Merupakan rencana strategis yang menguraikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 5 tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Dokumen tahunan yang berisi rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW): Merupakan dokumen perencanaan spasial yang mengatur tata ruang kota
- Rencana Induk (Master Plan): Merupakan rencana induk untuk sektor-sektor tertentu, seperti transportasi, pariwisata, dll.

Berdasarkan data dari Bappeda capaian kinerja ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan terealisasi sebesar 100% berikut rinciannya;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100	100	100	Sangat Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pengukuran indikator kinerja kualitas perencanaan melalui perbandingan tahun 2024 dengan tahun sebelumnya terlaksana dengan capaian realisasi yang sama yaitu 100 karena pencapaian sasaran ini telah di laksanakan dengan baik oleh Bappeda dari awal periode RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100	100	100	100	100	100	Tetap

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir Meningkatkan kualitas perencanaan pada RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan 100% oleh karena realisasi pada tahun 2024

juga tercatat 100% maka dapat disimpulkan realisasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Yahukimo tahun 2024 mencapai 100% Target akhir RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor Penyebab tercapainya Kinerja Peningkatan kualitas perencanaan Kabupaten Yahukimo adalah;

- Ketersediaan Dokumen perencanaan Pembangunan merupakan bagian dari Tupoksi Bappeda

Alternatif Solusi yang dapat di lakukan ke depannya adalah:

- Peningkatan setiap kinerja yang terjadi, harus di laksanakan dengan konsistensi dan berfokus pada peningkatan untuk tahun ke depannya

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berikut di sajikan anggaran dan realisasi program yang di laksanakan dalam rangka pencapaian sasaran bersangkutan;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6.304.610.000	6.304.250.000	99,99%
		(%) Total Realisasi Anggaran	6.304.610.000	6.304.250.000	99,99%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	100	100	100
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			100

Misi	:	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdaya saing dan Berintegritas
Tujuan	:	Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Pendataan Pembangunan Daerah

Indikator Tujuan Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Pendataan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo adalah Jumlah Cakupan Pemenuhan Data-Data Dasar Pembangunan Kabupaten Yahukimo di tahun bersangkutan.

Pemenuhan data dasar pembangunan sangat krusial, karena data yang akurat dan terpadu menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang efektif. Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 untuk mewujudkan tata kelola data yang baik. Data dasar pembangunan, seperti yang dikumpulkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), sangat penting untuk perencanaan dan implementasi pembangunan yang efektif, mencakup data demografi, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Data-Data Dasar Pembangunan yang Penting yang di rilis oleh dan/atau untuk Kabupaten Yahukimo Pada Tahun 2024:

NO	Jenis Data Dasar Pembangunan	Ketersediaan	Sumber Dokumen Statistik Kabupaten Yahukimo	Keterangan
1	Data Demografi:	Ada	Yahukimo dalam Angka 2025	Hal.52 - 58
			Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Yahukimo	Hal.9 - 16
			Statistik Kesejahteraan Yahukimo	Hal.9 - 16
2	Data Ekonomi:	Ada	Yahukimo dalam Angka 2025	Hal.285 - 331
			Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Yahukimo	Hal.29
3	Data Sosial:	Ada	Yahukimo dalam Angka 2025	Hal.78 - 130
			Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Yahukimo	Hal.52 - 70
			Statistik Kesejahteraan Yahukimo	Hal.27 - 63
			Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Yahukimo	Hal.29 - 45
4	Data Lingkungan:	Tidak ada	-	-
5	Data Desa	Ada	Yahukimo dalam Angka 2025	Hal 285

Sesuai RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menargetkan Cakupan Pemenuhan Data-Data Dasar Pembangunan dengan jumlah 3 di tahun 2024. Berdasarkan Tabel di atas Jumlah Cakupan pemenuhan data-data dasar pembangunan untuk tahun 2024 berjumlah 4.

Berikut di tampilkan target dan hasil Indikator Tujuan Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Pendataan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo sebagai berikut;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Pendataan Pembangunan Daerah	Cakupan Pemenuhan Data-Data Dasar Pembangunan	3	4	133,33	Tercapai

Dilihat dari tabel di atas hasil Cakupan Pemenuhan Data-Data Dasar Pembangunan Kabupaten Yahukimo tahun 2024, diketahui sebanyak 4 jenis data atau meraih 133,33% capaian tujuan.

Pencapaian indicator tujuan tersebut di laksanakan dengan lima sasaran strategis yang diantaranya adalah Meningkatkan ketersediaan data makro dan mikro Statistik pembangunan daerah, Meningkatnya Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah secara optimal, Optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kepustakaan dan arsip daerah yang berkualitas, Meningkatnya ketersediaan data base kependudukan, dan Optimalnya pengelolaan E-Goverment. Selama tahun 2024 hasil pelaksanaan kelima sasaran strategis tersebut di jelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Sasaran Meningkatnya ketersediaan data makro dan mikro statistik pembangunan daerah

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Pelaksanaan capaian sasaran Meningkatnya ketersediaan data makro dan mikro statistik pembangunan daerah ditangani oleh Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian berdasarkan pada Indikator Cakupan kelengkapan Data SIPD.

Data SPID, atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah. SIPD bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Yahukimo, pada tahun 2024 cakupan kelengkapan SPID terealisasi 2, berikut rinciannya;

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya ketersediaan data makro dan mikro statistik pembangunan daerah	Cakupan Kelengkapan Data SPID	2	2	100%	Sangat Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pengukuran indikator kinerja kualitas perencanaan melalui perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat terlaksana karena berdasarkan data Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Pada tahun 2023 Cakupan Kelengkapan Data SPID tidak terealisasi.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Cakupan Kelengkapan Data SPID	1	-	-	2	2	100	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir ketersediaan data makro dan mikro statistik pembangunan daerah pada RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan dengan besaran 3, sedangkan realisasi cakupan kelengkapan SPID pada tahun 2024 berjumlah 2. Sehingga dapat diketahui indikator Kinerja ini telah mencapai 66,67% target akhir RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Cakupan Kelengkapan Data SPID	Jumlah	2	2	100	3	66,67%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor Penyebab tercapainya Kinerja Cakupan Kelengkapan Data SPID Kabupaten Yahukimo adalah;

- Adanya Pembenahan dalam penyusunan/perilisan data-data SPID
- Adanya dukungan dari BPS Perwakilan Kabupaten Yahukimo

Alternatif Solusi yang dapat di lakukan ke depannya adalah:

- Dalam Uraian dan penghitungan Realisasi kinerja Cakupan Kelengkapan Data SPID pada LKJ Dinas Kominfo, hendaknya dilengkapi dengan sumber data-data yang jelas dan rumus perhitungan serta komponen rumus yang menjelaskan besaran yang di hitung.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran Cakupan Kelengkapan Data SPID tidak dapat dihitung karena tidak adanya program kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada tahun 2024.

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Cakupan Kelengkapan Data SPID	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian			
		(%) Total Realisasi Anggaran	-	-	-
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	2	2	100
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-

2. Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi daerah secara optimal

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah di Kabupaten Yahukimo, penting untuk melindungi data dan informasi penting pemerintah daerah dari akses yang tidak sah, melalui penerapan konsep, teori, dan seni kriptografi secara sistematis dan konsisten.

Persandian adalah kegiatan pengamanan data/informasi yang menerapkan konsep, teori, seni, dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten, serta terkait pada etika profesi sandi.

Tujuan Penyelenggaraan Persandian:

- Mencegah kebocoran informasi yang bersifat rahasia.
- Memastikan integritas data dan informasi, yaitu menjamin keakuratan dan keutuhan informasi.
- Memastikan ketersediaan informasi bagi pihak yang berwenang

Pencapaian sasaran peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi daerah secara optimal diukur dengan menggunakan Indikator Persentase Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Kominfo, pada tahun 2024 Realisasi Persentase Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Kabupaten sebesar 32%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi daerah secara optimal	Persentase Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Kabupaten	32	32	100	Sangat Tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi pada tahun 2024 sebesar 32%, jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan 1% atau naik sekitar 8,31% berikut rinciannya;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi daerah secara optimal	31	31	100	32	32	100	8,31%

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi daerah secara optimal pada RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar 34%, Sedangkan realisasi kinerja meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi pada tahun 2024 terhitung

32% maka dapat disimpulkan realisasi tahun 2024 telah mencapai 94,12% target akhir capaian RPJMD;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi daerah secara optimal	Jumlah	32	32	100	34	94,12%

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor Penyebab tercapainya Kinerja Peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi daerah Kabupaten Yahukimo adalah;

- Adanya Program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran

Alternatif Solusi yang dapat di lakukan ke depannya adalah:

Dalam Penjelasan dan penghitungan Realisasi kinerja penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi daerah pada LKJ Dinas Kominfo, hendaknya dilengkapi dengan sumber data-data yang jelas dan rumus perhitungan serta komponen rumus yang menjelaskan besaran yang di hitung.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran Peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi daerah terhitung sebesar 100%;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Persentase Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Kabupaten	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian			
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	536.347.401	536.347.401	100,00%

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
		(%) Total Realisasi Anggaran	536.347.401	536.347.401	100,00%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	32	32	100,00%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			100,00%

3. Sasaran Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepustakaan dan Arsip Daerah Yang Berkualitas

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan dan arsip daerah yang berkualitas sangat penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, riset, dan pengelolaan informasi yang efisien. Perpustakaan dan arsip harus memenuhi standar nasional yang berlaku, termasuk standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan

Sarana dan Prasarana Perpustakaan:

- Ruang Baca: Ruang yang nyaman dan memadai untuk membaca, belajar, dan riset, dengan pencahayaan dan ventilasi yang baik.
- Koleksi Buku: Koleksi yang lengkap, relevan, dan terawat, serta akses ke sumber-sumber informasi digital.
- Perabot: Meja, kursi, rak buku, lemari katalog, dan peralatan penunjang lainnya yang memadai dan berkualitas.
- Fasilitas Pendukung: Akses internet, komputer, printer, scanner, dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
- Perlengkapan: Buku pedoman perpustakaan, buku klasifikasi, kartu katalog, buku induk, kantong buku, lembar tanggal kembali, label, cap inventaris, cap perpustakaan, dll

Sedangkan Sarana dan Prasarana Arsip:

- Ruang Arsip: Ruangan yang aman, terkontrol iklimnya, dan teratur untuk menyimpan arsip dengan baik.
- Lemari Arsip: Lemari yang kuat, tahan lama, dan dirancang untuk menyimpan berbagai jenis arsip.
- Peralatan Pengolahan Arsip: Peralatan untuk menyortir, mengklasifikasikan, dan mendeskripsikan arsip.

- Fasilitas Pendukung: Akses internet, komputer, printer, scanner, dan fasilitas untuk penyandang disabilitas

Capaian Sasaran Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepustakaan dan Arsip Daerah Yang Berkualitas, dilihat dari Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kepustakaan Dan Arsip Daerah, Karena OPD belum memberikan data update register sarana dan prasarana kepustakaan dan arsip daerah baik tahun 2024 atau tahun 2023 maka realisasi indikator ini belum dapat di hitung besarnya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepustakaan dan Arsip Daerah Yang Berkualitas	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kepustakaan Dan Arsip Daerah	32	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023;

Pengukuran indikator Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepustakaan dan Arsip Daerah Yang Berkualitas melalui perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat terlaksana karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum mengupdate pelaporan Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kepustakaan Dan Arsip Daerah Pemerintah Kabupaten yang disusun selama tahun anggaran 2023;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepustakaan dan Arsip Daerah Yang Berkualitas	31	-	-	32	-	-	-

c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target akhir Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepustakaan dan Arsip Daerah Yang Berkualitas pada RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan sebesar 34%, Namun oleh karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum mengupdate pelaporan Persentase Penyelenggaraan Persandian Pemerintah

Kabupaten yang disusun selama tahun anggaran 2023. Maka pengukuran Indikator terhadap Target RPJMD belum dapat dilakukan.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepustakaan dan Arsip Daerah Yang Berkualitas	Jumlah	32	-	-	34	-

d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terealisasinya indikator kinerja ini adalah sebagai berikut;

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah belum memberikan data/register sarana dan prasarana kepustakaan dan arsip daerah.
- IKU OPD belum sepenuhnya selaras dengan IKU dari RPJMD

Solusi alternatif yang akan dilakukan;

- Dinas Perpustakaan menyesuaikan IKUnya dengan IKU dari RPJMD dan menyiapkan data atau dokumen yang berkaitan dengan IKU yang telah ditetapkan melalui RPJMD 2022 - 2026.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berikut di sajikan anggaran dan realisasi program yang di laksanakan dalam rangka pencapaian sasaran bersangkutan;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kepustakaan Dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Program Pembinaan Perpustakaan	12.550.000.000	12.246.750.000	97,58%

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	33.000.000	33.000.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	12.583.000.000	12.279.750.000	97,59%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	-	-	-
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			-

4. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Data dasar kependudukan terpilah adalah data kependudukan yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dan kelompok umur, serta dapat mencakup aspek lain seperti agama, pendidikan, dan pekerjaan, Data terpilah dapat berupa data kuantitatif (angka) atau data kualitatif (deskriptif).

Pentingnya Data Terpilah:

- Memudahkan pemahaman tentang karakteristik penduduk.
- Mempermudah perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik yang relevan.
- Memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan perhatian yang adil.
- Data kependudukan terpilah digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam pemilu
- Data kependudukan terpilah digunakan untuk merencanakan program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Capaian Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan, dilihat dari Persentase Data Dasar Kependudukan Terpilah. Berdasarkan data yang di peroleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Indikator Persentase data dasar kependudukan terpilah tercapai sangat tinggi, berikut rinciannya

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan	Persentase Data Dasar Kependudukan Terpilah	32	32	100	Sangat tinggi

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Persentase Data Dasar Kependudukan Terpilah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,23% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana dirinci sebagai berikut;

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Data Dasar Kependudukan Terpilah	31	31	100	32	32	100	3,23%

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Target akhir Persentase Data Dasar Kependudukan Terpilah RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo ditetapkan 34%. Sehingga dapat disimpulkan pencapaian sasaran ini pada tahun 2024 mencapai 94,12% keberhasilan target RPJMD;

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Persentase Data Dasar Kependudukan Terpilah	%	32	32	100	34	94,12%

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Sesuai program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis cakupan data dasar kependudukan terpilah sebagaimana pada perjanjian kinerja, maka hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka mendukung keberhasilan sebagai berikut:

- Memberikan dukungan Anggaran untuk dalam membuat data dasar kependudukan yang terpilah serta akurat sesuai dengan data yang ada;
- Membuat laporan data penduduk sesuai dengan kebutuhan data yang terpilah
- Pengukuran persentase data kependudukan terpilah tidak disertai komponen-komponen data yang lengkap oleh OPD.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja dengan skor meningkat yaitu:

- Melakukan perbaikan atas catatan-catatan dari hasil evaluasi tahun – tahun sebelumnya;
- Peningkatan kapasitas SDM aparatur;
- Memperbaiki pengukuran kinerja dengan menyertakan perhitungan rumus dan komponen rumus yang lengkap dalam penyampaian LKJ OPD bersangkutan.

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis tersebut, pada tahun 2024 dilaksanakan dengan anggaran Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dengan capaian realisasi program sebesar 100% jika dibandingkan persentase capaian kinerja sebesar 100%, maka didapat efisiensi penggunaan sumber daya terhitung sebesar 100,00%;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Persentase Data Dasar Kependudukan Terpilah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	250.000.000	250.000.000	100,00%
		Program Pencatatan Sipil	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	250.000.000	250.000.000	100,00%
		(%) Total Realisasi Anggaran	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00%
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja	32	32	100%
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			100%

5. Sasaran Optimalnya Pengelolaan E government

a) Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Pengelolaan E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, aplikasi, dan data. E-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

secara optimal, Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

E-Government sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan, E-Government juga bertujuan untuk menciptakan layanan publik yang lebih nyaman, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan pengelolaan e-government yang baik, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Contoh Penerapan E-Government:

- Layanan Publik Online: Pembayaran pajak, pendaftaran dan pengurusan dokumen, pengaduan masyarakat, dan layanan publik lainnya yang dapat diakses secara online.
- Sistem Informasi Manajemen: Sistem yang mengintegrasikan data dan proses kerja di berbagai unit pemerintahan.
- E-Budgeting, E-Procurement, E-Audit: Penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan audit keuangan.
- E-Health: Penerapan teknologi informasi dalam layanan kesehatan, seperti e-resep dan e-konsultasi.

Capaian Sasaran Pengelolaan E government, tidak dapat diukur karena Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian tidak mengukur Indikator kinerja ini pada LKJnya dan belum menyediakan dokumentasi atau data penyelenggaraan dan pelaksanaan e-Government, sehingga pengukuran capaian kinerja ini belum bisa dilaksanakan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Optimalnya Pengelolaan E government	Indeks Egovernment	Meningkat	-	-	-

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pengukuran indikator Indeks Egovernment melalui perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat terlaksana karena Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian belum mengupdate pelaporan Pengelolaan E-government Pemerintah Kabupaten yang disusun selama tahun anggaran 2024.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			% Naik/Turun
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Egovernment	Meningkat	-	-	Meningkat	-	-	-

- c) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Target akhir Pengelolaan E government pada RPJMD tahun 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten yahukimo ditetapkan "Meningkat", Namun oleh karena Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian belum mengupdate pelaporan Pengelolaan E government Pemerintah Kabupaten yang disusun selama tahun anggaran 2023. Maka pengukuran Indikator terhadap Target RPJMD belum dapat dilakukan.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi 2024	%		
1	Indeks Egovernment	Indikator	Meningkat	-	-	Meningkat	-

- d) Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Faktor-faktor Penyebab terjadi nya realisasi kinerja Indeks Egovernment adalah:

- Masih banyaknya pembenahan dari segi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Yahukimo sehingga pengembangan E-Government dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum memadai
- Dari sudut pandang Dinas Kominfo pada tahun 2024 terbatas nya alokasi anggaran dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatannya
- Sumber daya manusia TIK yang terbatas belum mencakup ke berbagai OPD
- Belum memiliki rencana Induk dan kebijakan yang mengarah pada pengembangan TIK
- Ancaman keamanan data dan privasi masyarakat

Solusi yang bisa dilakukan untuk tahun-tahun ke depan adalah;

- Meningkatkan akses internet, meningkatkan literasi digital, dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

- Mengembangkan sistem keamanan data yang kuat dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya privasi data.
- Adanya alokasi anggaran untuk meningkatkan system E government

e) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran Optimalnya Pengelolaan E government tidak dapat dihitung karena tidak adanya program kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada tahun 2024;

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
1	Indeks Egovernment	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian			
			-	-	-
		(%) Total Realisasi Anggaran			
		(%) Realisasi Capaian Indikator Kinerja			
		Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			

III. Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Yahukimo

Akuntabilitas Kinerja keuangan meliputi evaluasi dan analisis pengalokasian anggaran berikut sumbernya serta realisasinya dalam rangka pembiayaan program dan kegiatan. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntabilitas keuangan Kabupaten Yahukimo dapat digambarkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2024, Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2024 sebesar Rp.2.092.259.257.780,00 atau 94,93% dari Anggarannya sebesar Rp.2.203.941.280.753,00 dan Realisasi belanja daerah sebesar Rp. Rp.2.102.162.688.597,00 atau 93,33% dari Anggaran sebesar Rp.2.252.288.621.269,00, Oleh Karena itu APBD Kabupaten Yahukimo mengalami defisit sebesar Rp.9.903.430.817,00.

Selanjutnya Realisasi pembiayaan daerah dari sisi penerimaan daerah pada tahun 2024 sebesar Rp.89.524.444.444,00 yang merupakan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan Realisasi pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran daerah sebesar Rp.62.150.866.666,00 yang berasal dari pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo pada tahun anggaran 2024 Berikut diuraikan rincian masing-masing pos keuangan yang menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Kabupaten Yahukimo;

1. Realisasi Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 3.7
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Yahukimo Tahun 2024
Berdasarkan Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)		SISA ANGGARAN	%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	48.427.442.988,00	18.002.110.393,00	30.425.332.595,00	37,17%
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	13.099.043.171,00	9.208.569.054,00	3.890.474.117,00	70,30%
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.971.942.988,00	789.426.670,00	11.182.516.318,00	6,59%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.983.812.272,00	1.117.677.904,00	1.866.134.368,00	37,46%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	20.372.644.557,00	6.886.436.765,00	13.486.207.792,00	33,80%
4.2	Pendapatan Transfer	2.150.677.837.765,00	2.071.786.589.932,00	78.891.247.833,00	96,33%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.122.721.695.356,00	2.049.850.877.520,00	72.870.817.836,00	96,57%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.956.142.409,00	21.935.712.412,00	6.020.429.997,00	78,46%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.836.000.000,00	2.470.557.455,00	2.365.442.545,00	51,09%
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.836.000.000,00	2.470.557.455,00	2.365.442.545,00	51,09%

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)		SISA ANGGARAN	%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
JUMLAH PENDAPATAN		2.203.941.280.753,00	2.092.259.257.780,00	111.682.022.973,00	94,93%

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan berikut ini;

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.18.002.110.393,00 atau 37,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.48.427.442.988,00

Pendapatan tersebut terdiri dari Penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Selama tahun anggaran 2024 hanya pos realisasi Hasil Pajak Daerah yang telah meraih capaian realisasi di atas 70% anggaran.

- b) Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp.2.071.786.589.932,00 atau 96,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.2.150.677.837.765,00.

Pos Pendapatan Transfer, terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- c) Lain-lain Pendapatan yang Sah telah terealisasi sebesar Rp. 2.470.557.455,00 atau 51,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.4.836.000.000,00

Pada tahun anggaran 2024 pos Lain-lain pendapatan daerah hanya terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sementara itu, apabila diperhatikan berdasarkan proporsi dari realisasi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total realisasi pendapatan daerah maka diketahui sebagai berikut :

- PAD proporsinya sebesar 0,86%;
- Pendapatan Transfer proporsinya sebesar 99,02%; dan
- Lain-lain Pendapatan yang Sah proporsinya sebesar 0,12%.

Berdasarkan hasil penelitian dari Kementerian Dalam Negeri bahwa rata-rata kontribusi PAD Kabupaten/Kota di Indonesia yang hanya sekitar 8%, hal tersebut menunjukkan komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo masih berada jauh dibawah rata-rata kontribusi PAD Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia.

2. Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah pada suatu periode anggaran. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran;
- Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan
- Analisis proyeksi belanja daerah.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar 93,33%, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.2.252.288.621.269,00 atau terealisasi sebesar Rp.2.102.162.688.597,00 sebagaimana rincian yang ditunjukkan pada Tabel dibawah sebagai berikut;

Tabel 3.8
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Yahukimo Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)		SISA ANGGARAN	%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				
5,1	BELANJA OPERASI	Rp1.305.551.998.594,00	Rp1.180.405.489.422,00	Rp125.146.509.172,00	90,41%
5.1.1	Belanja pegawai	Rp404.849.673.414,00	Rp389.562.409.613,00	Rp15.287.263.801,00	96,22%
5.1.2	Belanja Barang	Rp688.271.228.829,00	Rp609.174.335.384,00	Rp79.096.893.445,00	88,51%

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)		SISA ANGGARAN	%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
	dan Jasa				
5.1.3	Belanja Bunga	Rp6.649.753.912,00	Rp6.649.753.912,00	Rp0,00	100,00%
5.1.4	Belanja subsidi	-	-	-	-
5.1.5	Belanja hibah	Rp204.281.342.439,00	Rp173.518.990.513,00	Rp30.762.351.926,00	84,94%
5.1.6	Belanja bantuan sosial	Rp1.500.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	Rp0,00	100,00%
5,2	BELANJA MODAL	Rp428.763.321.075,00	Rp403.783.897.575,00	Rp24.979.423.500,00	94,17%
5.2.1	Belanja Tanah	Rp871.260.000,00	Rp871.260.000,00	Rp0,00	100,00%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp32.812.373.239,00	Rp31.593.827.820,00	Rp1.218.545.419,00	96,29%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp231.265.525.812,00	Rp211.468.436.955,00	Rp19.797.088.857,00	91,44%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp162.040.751.600,00	Rp159.651.922.800,00	Rp2.388.828.800,00	98,53%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.673.410.424,00	Rp198.450.000,00	Rp1.474.960.424,00	11,86%
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	0,00%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp2.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	100,00%
5.3.1	Belanja tidak terduga	Rp2.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	100,00%
5,4	BELANJA TRANSFER	Rp515.973.301.600,00	Rp515.973.301.600,00	Rp0,00	100,00%
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	Rp515.973.301.600,00	Rp515.973.301.600,00	Rp0,00	100,00%
JUMLAH BELANJA		Rp2.252.288.621.269,00	Rp2.102.162.688.597,00	Rp150.125.932.672,00	93,33%
SURPLUS / (DEFISIT)		-Rp48.347.340.516,00	-Rp9.903.430.817,00	-Rp38.443.909.699,00	20,48%

Selanjutnya Capaian realisasi belanja menurut Distrik/Kecamatan dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Daerah Menurut Distrik
Tahun Anggaran 2024

No	DISTRIK/KECAMATAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Efisiensi	Capaian
----	-------------------	----------------------------	----------------------------	-----------	-----------	---------

No	DISTRIK/KECAMATAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Efisiensi	Capaian
1	Kurima	Rp3.127.999.400,00	Rp2.749.620.800,00	Rp2.746.675.576,00	Rp2.945.224,00	99,89%
2	Anggruk	Rp2.600.644.800,00	Rp2.687.649.100,00	Rp2.685.229.189,00	Rp2.419.911,00	99,91%
3	Ninia	Rp1.791.400.800,00	Rp1.838.613.860,00	Rp1.836.643.685,00	Rp1.970.175,00	99,89%
4	Dekai	Rp2.516.802.800,00	Rp2.881.578.780,00	Rp2.879.004.396,00	Rp2.574.384,00	99,91%
5	Obio	Rp1.835.433.600,00	Rp1.638.747.084,00	Rp1.636.571.053,00	Rp2.176.031,00	99,87%
6	Suru-suru	Rp1.448.790.600,00	Rp1.425.746.306,00	Rp1.423.576.981,00	Rp2.169.325,00	99,85%
7	Wusama	Rp1.384.403.200,00	Rp1.350.742.940,00	Rp1.348.706.668,00	Rp2.036.272,00	99,85%
8	Amuma	Rp1.824.529.400,00	Rp1.776.700.900,00	Rp1.774.506.449,00	Rp2.194.451,00	99,88%
9	Musaik	Rp1.472.495.000,00	Rp1.564.827.720,00	Rp1.554.146.922,00	Rp10.680.798,00	99,32%
10	Pasema	Rp1.504.154.000,00	Rp1.312.337.230,00	Rp1.302.997.469,00	Rp9.339.761,00	99,29%
11	Hogio	Rp1.305.214.400,00	Rp1.313.550.760,00	Rp1.311.503.203,00	Rp2.047.557,00	99,84%
12	Mugi	Rp2.467.755.000,00	Rp1.911.338.960,00	Rp1.900.051.169,00	Rp11.287.791,00	99,41%
13	Soba	Rp1.480.469.400,00	Rp1.465.230.780,00	Rp1.458.561.335,00	Rp6.669.445,00	99,54%
14	Werima	Rp2.475.363.600,00	Rp2.167.263.480,00	Rp2.165.075.831,00	Rp2.187.649,00	99,90%
15	Tangma	Rp1.549.250.000,00	Rp1.427.952.390,00	Rp1.407.799.160,00	Rp20.153.230,00	98,59%
16	Ukha	Rp1.923.080.600,00	Rp1.601.474.680,00	Rp1.590.241.647,00	Rp11.233.033,00	99,30%
17	Panggema	Rp1.685.599.000,00	Rp1.441.649.774,00	Rp1.433.492.115,00	Rp8.157.659,00	99,43%
18	Kosarek	Rp1.469.904.400,00	Rp1.416.552.948,00	Rp1.408.395.977,00	Rp8.156.971,00	99,42%
19	Nipsan	Rp1.559.926.000,00	Rp1.558.737.600,00	Rp1.556.574.968,00	Rp2.162.632,00	99,86%
20	Ubahak	Rp2.075.455.800,00	Rp2.126.728.380,00	Rp2.124.535.252,00	Rp2.193.128,00	99,90%
21	Pronggoli	Rp1.548.614.000,00	Rp1.555.602.200,00	Rp1.552.101.056,00	Rp3.501.144,00	99,77%
22	Walma	Rp1.416.432.400,00	Rp1.332.841.152,00	Rp1.330.782.469,00	Rp2.058.683,00	99,85%
23	Yahuliambut	Rp1.400.685.200,00	Rp1.250.382.016,00	Rp1.248.295.753,00	Rp2.086.263,00	99,83%
24	Hereapini	Rp1.484.786.000,00	Rp1.431.597.740,00	Rp1.429.369.910,00	Rp2.227.830,00	99,84%
25	Ubalih	Rp1.537.984.200,00	Rp1.567.991.066,00	Rp1.544.829.821,00	Rp23.161.245,00	98,52%
26	Talambo	Rp1.088.765.000,00	Rp1.035.973.982,00	Rp1.034.105.797,00	Rp1.868.185,00	99,82%
27	Puldama	Rp1.063.244.400,00	Rp990.538.128,00	Rp984.872.566,00	Rp5.665.562,00	99,43%
28	Endomen	Rp1.180.000.200,00	Rp1.154.785.886,00	Rp1.152.680.440,00	Rp2.105.446,00	99,82%
29	Kono	Rp1.027.902.200,00	Rp977.768.484,00	Rp975.931.255,00	Rp1.837.229,00	99,81%
30	Dirwemna	Rp1.063.276.000,00	Rp1.074.133.146,00	Rp1.071.942.098,00	Rp2.191.048,00	99,80%
31	Holuwon	Rp1.339.135.000,00	Rp1.388.787.634,00	Rp1.386.619.320,00	Rp2.168.314,00	99,84%
32	Lolat	Rp1.346.507.400,00	Rp1.360.408.806,00	Rp1.358.219.492,00	Rp2.189.314,00	99,84%
33	Soloikma	Rp1.195.361.000,00	Rp1.070.087.880,00	Rp1.068.152.460,00	Rp1.935.420,00	99,82%
34	Sela	Rp1.312.666.600,00	Rp1.284.299.894,00	Rp1.282.189.188,00	Rp2.110.706,00	99,84%
35	Korupun	Rp1.521.143.200,00	Rp1.543.676.820,00	Rp1.541.507.556,00	Rp2.169.264,00	99,86%
36	Langda	Rp1.285.245.800,00	Rp1.258.973.980,00	Rp1.233.144.081,00	Rp25.829.899,00	97,95%
37	Bomela	Rp1.199.230.200,00	Rp1.139.376.456,00	Rp1.141.661.580,00	-Rp2.285.124,00	100,20%
38	Suntamon	Rp1.140.948.000,00	Rp1.122.179.052,00	Rp1.120.221.318,00	Rp1.957.734,00	99,83%
39	Seradala	Rp1.846.219.600,00	Rp1.925.957.680,00	Rp1.893.644.769,00	Rp32.312.911,00	98,32%
40	Sobaham	Rp1.598.466.200,00	Rp1.644.004.420,00	Rp1.641.887.634,00	Rp2.116.786,00	99,87%
41	Kabianggama	Rp1.249.243.800,00	Rp1.267.966.195,00	Rp1.265.944.404,00	Rp2.021.791,00	99,84%
42	Kwelamdua	Rp1.530.358.400,00	Rp1.556.936.500,00	Rp1.554.805.960,00	Rp2.130.540,00	99,86%
43	Kwikma	Rp1.327.986.800,00	Rp1.292.453.782,00	Rp1.290.397.044,00	Rp2.056.738,00	99,84%

No	DISTRIK/KECAMATAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Efisiensi	Capaian
44	Hilipuk	Rp1.138.927.000,00	Rp1.143.384.112,00	Rp1.141.443.725,00	Rp1.940.387,00	99,83%
45	Duram	Rp1.292.799.200,00	Rp1.256.029.176,00	Rp1.254.044.353,00	Rp1.984.823,00	99,84%
46	Yogosem	Rp1.775.348.600,00	Rp1.616.122.220,00	Rp1.613.822.702,00	Rp2.299.518,00	99,86%
47	Kayo	Rp1.304.514.400,00	Rp1.275.641.800,00	Rp1.273.476.713,00	Rp2.165.087,00	99,83%
48	Sumohai	Rp1.879.034.800,00	Rp1.968.540.300,00	Rp1.966.349.923,00	Rp2.190.377,00	99,89%
49	Silimo	Rp2.633.842.000,00	Rp2.551.465.060,00	Rp2.549.044.021,00	Rp2.421.039,00	99,91%
50	Samenage	Rp1.671.155.000,00	Rp1.626.373.960,00	Rp1.623.821.065,00	Rp2.552.895,00	99,84%
51	Nalca	Rp1.212.948.800,00	Rp1.126.720.320,00	Rp1.120.935.874,00	Rp5.784.446,00	99,49%
JUMLAH		Rp81.111.443.200,00	Rp78.448.044.319,00	Rp78.190.533.392,00	Rp257.510.927,00	99,67%

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman.

Berikut Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Yahukimo yang terjadi selama tahun anggaran 2024;

1. Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pada Pos Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 telah dianggarkan sebesar Rp.182.973.762.738,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.89.524.444.444,00 yang berupa Penerimaan Pinjaman Daerah.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan telah terealisasi sebesar 46,17% atau Rp.62.150.866.666,00 dari anggaran sebesar Rp.134.626.422.222,00.

Tabel 3.10
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Yahukimo
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)		SISA ANGGARAN	%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp182.973.762.738,00	Rp89.524.444.444,00	Rp93.449.318.294,00	48,93%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp20.973.762.738,00	Rp0,00	Rp20.973.762.738,00	0,00%
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp162.000.000.000,00	Rp89.524.444.444,00	Rp72.475.555.556,00	55,26%
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp134.626.422.222,00	Rp62.150.866.666,00	Rp72.475.555.556,00	46,17%
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp134.626.422.222,00	Rp62.150.866.666,00	Rp72.475.555.556,00	46,17%
JUMLAH PEMBIAYAAN		Rp48.347.340.516,00	Rp27.373.577.778,00	Rp20.973.762.738,00	57%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		Rp0,00	Rp17.470.146.961,00	-Rp17.470.146.961,00	-

Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut;

Tabel 3.11
Laporan Realisasi APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)		SISA ANGGARAN	%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	Pendapatan Asli Daerah	48.427.442.988,00	18.002.110.393,00	30.425.332.595,00	37,17%
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	13.099.043.171,00	9.208.569.054,00	3.890.474.117,00	70,30%
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.971.942.988,00	789.426.670,00	11.182.516.318,00	6,59%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.983.812.272,00	1.117.677.904,00	1.866.134.368,00	37,46%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	20.372.644.557,00	6.886.436.765,00	13.486.207.792,00	33,80%

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)		SISA ANGGARAN	%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.2	Pendapatan Transfer	2.150.677.837.765,00	2.071.786.589.932,00	78.891.247.833,00	96,33%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.122.721.695.356,00	2.049.850.877.520,00	72.870.817.836,00	96,57%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.956.142.409,00	21.935.712.412,00	6.020.429.997,00	78,46%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.836.000.000,00	2.470.557.455,00	2.365.442.545,00	51,09%
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.836.000.000,00	2.470.557.455,00	2.365.442.545,00	51,09%
4.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	-	-
4.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-
4.3.6	Pendapatan Lain-Lain Yang Sah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		2.203.941.280.753,00	2.092.259.257.780,00	111.682.022.973,00	94,93%
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.305.551.998.594,00	Rp1.180.405.489.422,00	Rp125.146.509.172,00	90,41%
5.1.1	Belanja pegawai	Rp404.849.673.414,00	Rp389.562.409.613,00	Rp15.287.263.801,00	96,22%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp688.271.228.829,00	Rp609.174.335.384,00	Rp79.096.893.445,00	88,51%
5.1.3	Belanja Bunga	Rp6.649.753.912,00	Rp6.649.753.912,00	Rp0,00	100,00%
5.1.4	Belanja subsidi	-	-	-	-
5.1.5	Belanja hibah	Rp204.281.342.439,00	Rp173.518.990.513,00	Rp30.762.351.926,00	84,94%
5.1.6	Belanja bantuan sosial	Rp1.500.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	Rp0,00	100,00%
5.2	BELANJA MODAL	Rp428.763.321.075,00	Rp403.783.897.575,00	Rp24.979.423.500,00	94,17%
5.2.1	Belanja Tanah	Rp871.260.000,00	Rp871.260.000,00	Rp0,00	100,00%
5.2.2	Belanja Modal	Rp32.812.373.239,00	Rp31.593.827.820,00	Rp1.218.545.419,00	96,29%

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)		SISA ANGGARAN	%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
	Peralatan dan Mesin				
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp231.265.525.812,00	Rp211.468.436.955,00	Rp19.797.088.857,00	91,44%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp162.040.751.600,00	Rp159.651.922.800,00	Rp2.388.828.800,00	98,53%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.673.410.424,00	Rp198.450.000,00	Rp1.474.960.424,00	11,86%
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	0,00%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp2.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	100,00%
5.3.1	Belanja tidak terduga	Rp2.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	100,00%
5,4	BELANJA TRANSFER	Rp515.973.301.600,00	Rp515.973.301.600,00	Rp0,00	100,00%
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	Rp515.973.301.600,00	Rp515.973.301.600,00	Rp0,00	100,00%
JUMLAH BELANJA		Rp2.252.288.621.269,00	Rp2.102.162.688.597,00	Rp150.125.932.672,00	93,33%
SURPLUS / (DEFISIT)		-Rp48.347.340.516,00	-Rp9.903.430.817,00	-Rp38.443.909.699,00	20,48%
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp182.973.762.738,00	Rp89.524.444.444,00	Rp93.449.318.294,00	48,93%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp20.973.762.738,00	Rp0,00	Rp20.973.762.738,00	0,00%
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp162.000.000.000,00	Rp89.524.444.444,00	Rp72.475.555.556,00	55,26%
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp134.626.422.222,00	Rp62.150.866.666,00	Rp72.475.555.556,00	46,17%
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp134.626.422.222,00	Rp62.150.866.666,00	Rp72.475.555.556,00	46,17%
JUMLAH PEMBIAYAAN		Rp48.347.340.516,00	Rp27.373.577.778,00	Rp20.973.762.738,00	57%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		Rp0,00	Rp17.470.146.961,00	-Rp17.470.146.961,00	-

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan secara otonomi di Kabupaten Yahukimo serta dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022-2026.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Berikut adalah faktor-faktor yang masih harus di perhatikan Pemerintah kabupaten Yahukimo dalam pencapaian visi-misinya dan berpengaruh dalam menentukan kesejahteraan masyarakat sebagai titik fokus isu/permasalahan yang harus dijadikan rujukan penting perumusan kebijakan pembangunan daerah:

1. Masih perlu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih baik dari tahun ke tahun

Salah satu penyebab rendahnya pembangunan sumber daya manusia adalah minimnya pencapaian dalam bidang pendidikan sebagai pondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hal ini dilihat dari rata-rata lama sekolah masyarakat kabupaten Yahukimo setiap tahun mengalami peningkatan yang positif namun dengan angka yang masih terlalu kecil. Lebih lanjut pembangunan manusia dilihat dari aspek kesehatan masih terlihat disparitas status kesehatan antar wilayah distrik-distrik di Kabupaten Yahukimo, khususnya di wilayah pedalaman dan terisolir terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, hal ini dilihat dari angka kematian bayi yang merupakan cerminan kualitas kesehatan penduduk yang masih relatif tinggi.

Faktor kesehatan ini merupakan salah satu permasalahan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas masyarakat yahukimo sebagai sumber daya manusia.

Berikut merupakan akar permasalahan yang diidentifikasi Pemerintah Kabupaten Yahukimo sebagai pedoman penentuan arah kebijakan pembangunan khususnya pembangunan masyarakat Yahukimo;

- Perlu pengembangan secara terus menerus kualitas dan kuantitas pengajar di setiap jenjang pendidikan baik di distrik maupun di kampung-kampung dan penyebarannya
- Kurang meratanya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di setiap distrik/Kampung
- Kurangnya optimalnya manajemen pendidikan
- Kurang meratanya kuantitas dan kualitas sarana kesehatan di setiap distrik
- Kurang maksimalnya jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
- Kurang meratanya pelayanan dan sosialisasi Kesehatan ibu hamil/melahirkan dan Kesehatan bayi
- Kurang tersedianya fasilitas kesehatan yang layak di setiap distrik dan kampung-kampung
- Kurangnya penyebaran tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang merata di setiap distrik
- Belum meratanya kesempatan kerja
- kualitas penduduk dalam persaingan pasar kerja masih belum bersaing
- ketrampilan dan pemanfaatan teknologi oleh masyarakat masih tersentralisasi.
- Belum adanya profil Kesehatan dan Pendidikan Kabupaten Yahukimo

2. Belum terwujudnya kemandirian ekonomi daerah

Secara umum pemerintah mengalami kendala dalam menggalakkan pengembangan kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian. Hal ini dikarenakan SDM yang ada di Kabupaten Yahukimo belum memiliki potensi atau kemampuan yang cukup dalam mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas tidak hanya di sektor pertanian namun juga di sektor ekonomi lain.

Adapun rumusan permasalahan yang berkaitan dengan kemandirian ekonomi daerah adalah sebagai berikut;

- Belum optimalnya pengembangan iklim investasi daerah

- Pusat perekonomian belum tersebar merata sehingga pembangunan hanya terpusat ke beberapa wilayah.
- Ekonomi kerakyatan kewilayahan masih perlu di tingkatkan
- Pengembangan dan sosialisasi Koperasi dan UKM kurang efektif dan merata
- Belum maksimal dan meratanya subsidi kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan
- Pemerataan infrastruktur dasar masyarakat masih perlu di tingkatkan
- Pendampingan Usaha dan bantuan sosial yang merata ke masyarakat belum berdampak kontinu atau efektif

3. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintah

Kabupaten Yahukimo terbagi menjadi 51 distrik dan tersebar merata hingga ke wilayah terpencil atau terisolir. Implikasi dari penyebaran distrik tersebut mengakibatkan ketimpangan dalam pendistribusian aparatur pemerintah.

Tuntutan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kualitas kinerja public serta taat pada hukum merupakan syarat mutlak untuk di terapkan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan yang di hadapi periode pemerintahan terdahulu meliputi belum terbangunnya komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur aparatur pemerintah dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, kurangnya upaya peningkatan kesejahteraan PNS, belum terlaksananya penataan sistem kelembagaan pemerintahan, kurangnya keterampilan aparatur pemerintahan dan belum terjalinnya sinergi antar aparatur dan antar SKPD dalam wilayah Kabupaten Yahukimo.

Dilihat dari tantangan tersebut maka di rumuskan akar permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Kabupaten Yahukimo;

- Masih kurang efektifnya pelaporan dan dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan daerah sesuai RPJMD 2022 – 2026
- Belum efektifnya pelaksanaan Penjadwalan penyusunan SAKIP oleh OPD-OPD
- Pengukuran Kinerja yang telah di tetapkan masih kurang Akurat dan terincikan oleh OPD-OPD
- Belum efektifnya penerapan dan pelaksanaan sasaran startegis yang sebelumnya di tetapkan melalui RPJMD 2022 – 2026 dan Perjanjian Kinerja oleh OPD-OPD dan dari segi pelaporan dan dokumentasinya

- Kerja sama antar perangkat kerja di pemerintahan terhadap pelaporan dan Dokumentasi dalam lingkup Kabupaten dan penerapan sasaran strategis RPJMD masih belum optimal dan belum tepat waktu
 - Belum optimalnya penerapan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Yahukimo
 - Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berpredikat baik harus terus di pertahankan
 - Sosialisasi dan penerapan e-government oleh semua perangkat kerja masih perlu di tingkatkan lagi
 - Sumber daya aparatur yang berkualitas dan bertanggung jawab perlu di tingkatkan.
4. Belum memadai kondisi terciptanya lingkungan yang aman dan damai di antara masyarakat Kabupaten yahukimo
- Stabilitas keamanan di kabupaten Yahukimo saat ini cukup kondusif namun jika dilihat dari sifat kondisi keamanan suatu daerah masih dinamis dan masih terjadinya ancaman bersenjata dari KKB, beberapa kasus kriminalitas, baik itu bersifat individu maupun kasus kelompok yang bahkan dapat memicu konflik Politik dan SARA sehingga dirasa cukup menjadi potensi mengganggu pertumbuhan pembangunan dan ekonomi di wilayah Yahukimo.
- Adapun rumusan permasalahan yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan kedamaian di kabupaten Yahukimo dapat dilihat sebagai berikut;
- Masih ada ancaman keamanan dari KKB yang belum tuntas
 - Belum optimalnya metode pencegahan tindak kriminal masyarakat utamanya yang terkait isu Sosial, Politik dan SARA.
 - Belum ada dokumentasi yang memadai dalam upaya pengamanan
 - Kurangn efektifnya koordinasi keamanan setiap lini pemerintah daerah dengan berbagai kelompok dan komunitas daerah.
5. Belum memadainya ketersediaan Infrastruktur Dasar
- Fokus utama pada permasalahan infrastruktur dasar adalah pemerataan layanan infrastruktur kepada masyarakat Kabupaten yahukimo. Menurunkan tingkat kesenjangan pembangunan perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas ketahanan daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat. Permasalahan utama terkait pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat adalah;

- Belum optimalnya konektivitas antar kawasan industri dan pusat perekonomian daerah dan Distrik dan Kampung-kampung yang terpencil
- Belum adanya Dokumentasi pertumbuhan Infrastruktur Dasar Kabupaten Yahukimo
- Belum optimalnya capaian pembangunan infrastruktur perhubungan
- Masih rendahnya pemerataan perumahan layak huni bagi masyarakat
- Belum meratanya ketersediaan jaringan listrik di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo

6. Masih tingginya resiko penurunan kualitas lingkungan hidup

Ketergantungan yang tinggi terhadap pertanian dan hasil alam lainnya membuat masyarakat sulit dipisahkan dari kehidupan alam sekitar. Walaupun pengelolaan hasil alam dilakukan secara tradisional namun tingginya kecintaan masyarakat terhadap alam dan lingkungan hidup menjadikan kondisi lingkungan Kabupaten Yahukimo mulai mengalami degradasi. Rumusan permasalahan yang berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat sebagai berikut:

- Masih lemahnya koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait
- Belum adanya regulasi yang terkait lingkungan hidup
- Belum optimalnya perencanaan prioritas ke Lingkungan Hidup
- Belum adanya Penelitian kondisi Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten Yahukimo
- Belum adanya profil Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo dalam menjawab tetapan sasaran pada RPJMD

Selain adanya permasalahan yang diidentifikasi dan di tetapkan strategi-strategi penanggulangannya oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo, permasalahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Yahukimo tahun 2024 ini juga perlu untuk di ketahui dan ditanggulangi demi penyampaian Laporan Kinerja yang akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan.

Karena seperti yang dilihat LKJ pada tahun ini masih jauh untuk dikategorikan sebagai penyampaian laporan akuntabilitas pemerintah daerah yang sempurna, hal ini di sebabkan oleh sulitnya mengumpulkan data-data pendukung pelaporan dan masih belum adanya sinergis antara aparatur pemerintah untuk bekerja sama di setiap SKPD dalam mendukung pelaporan LKJ yang maksimal. Laporan Kinerja merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dimana setiap unsur pelaporan dan data-data pendukungnya harus dilampirkan dengan detil dan seksama. Jika dibandingkan antara pemerintahan yang lama dengan yang baru pengumpulan data lebih

sulit sehingga menyebabkan penyampaian pelaporan Laporan Kinerja pada tahun ini tidak memenuhi standar jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dengan pengharapan sinergi antar aparatur pemerintah pada tahun depan menjadi lebih baik dari tahun ini, diharapkan segala unsur dan aparatur pemerintah Kabupaten Yahukimo dapat bekerja sama demi kemajuan Kabupaten Yahukimo dan tercapainya semua sasaran startegi yang ditetapkan demi kelancaran pelaporan dan fungsi pemerintahan untuk mencapai “good governance”.

Hal ini ditekankan tidak hanya demi penyampaian Laporan Kinerja untuk tahun kedepannya, tapi juga bentuk laporan lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Yahukimo kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari. Dengan disusunnya LKJ diharapkan dapat memacu untuk terciptanya sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan menjadi bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik bersih dan berproduktivitas.

Sumohai, 27 Maret 2025
BUPATI YAHUKIMO



DIDIMUS YAHULI, SH, MH

LAMPIRAN I ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN 2024 DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN YAHUKIMO

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Indeks Kehidupan Beragama	Meningkat	0		Tidak Tercapai						
1	Meningkatnya Budaya Religius	1	Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah	18,64	0,14	0,75%	Sangat Rendah						
		2	Persentase Aktivitas tempat di lingkungan dan masyarakat	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	1	Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp47.451.910.000	Rp38.701.910.000	81,56%	Sekretariat Daerah
2	Meningkatkan kerukunan Umat beragama	3	Indeks Kerukunan Umat beragama	79,3	0	0,00%	-	2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp299.645.000	Rp299.645.000	100,00%	Kantor Kesbangpol
			Indeks Pembangunan Manusia	51,866	51,97	100,20%	Sangat Tinggi						
3	Meningkatkan akses Pendidikan	4	Rata-rata Lama Sekolah	4,06	4,35	107,14%	Sangat Tinggi	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp266.316.443.201	Rp155.566.036.827	58,41%	Dinas Pendidikan
								2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp18.800.000.000	Rp18.799.972.000	100,00%	
4	Meningkatkan Derajat Kesehatan	5	Angka Harapan Hidup	66,63	66,51	99,82%	Sangat Tinggi	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp199.765.889.586	Rp142.555.199.066	71,36%	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
								4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp20.767.648.000	Rp20.558.691.261	98,99%	
								5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp2.610.054.000	Rp375.054.000	14,37%	
								6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp39.292.098.650	Rp35.889.151.346	91,34%	RSUD Dekai
								7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp12.700.241.624	Rp12.537.350.523	98,72%	
								8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp2.945.800.000	Rp2.945.800.000	100,00%	Dinas Perhubungan
			Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Meningkat	0		Tidak Tercapai						
5	Optimalnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6	Cakupan Olahragawan Yang Berprestasi Nasional	1	0	0,00%	-	1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp1.550.000.000	Rp1.550.000.000	100,00%	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
6	Meningkatnya Prestasi Pemuda dalam pembangunan	7	Persentase Prestasi Pemuda dalam pembangunan	100	0	0,00%	-	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp3.230.000.000	Rp3.229.000.000	99,97%	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	46,4	0	0,00%	-						
7	Meningkatnya efektivitas pengembangan dan pendidikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat	8	Persentase Muatan nilai-nilai Budaya Lokal dalam jenjang pendidikan	100	37,5	37,50%	Sangat Rendah	1	Program Pembinaan Sejarah	Rp111.600.000	Rp111.350.000	99,78%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Meningkatnya pelestarian Budaya asli Papua	9	Cakupan budaya benda dan tak benda yang di lestarikan	1	5	500,00%	Sangat Tinggi	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp863.000.000	Rp861.500.000	99,83%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Pertumbuhan Penduduk	0,98	1,47	150,00%	Tercapai						
9	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	10	Persentase Keluarga Berencana yang aktif	32	9,67	30,22%	Sangat Rendah	1	Program Pengendalian Penduduk	Rp1.086.000.000	Rp1.086.000.000	100,00%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
								2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp4.435.182.000	Rp4.434.485.000	99,98%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
10	Optimalnya Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Keluarga Sejahtera	11	Persentase Keluarga Sejahtera	1672	1533	91,69%	Sangat Tinggi	1	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp3.979.200.000	Rp3.911.950.000	98,31%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Angka Kemiskinan	34,82	33,82	97,13%	Sangat Tinggi						
11	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	12	Pengeluaran Perkapita (IPM)	4554,4	5747	126,19%	Sangat Tinggi	1	Program Pengembangan Umkm	Rp2.500.000.000	Rp2.500.000.000	100,00%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
12	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan Miskin	13	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Menurun	Menurun 0,36 poin indeks	100,00%	Sangat Tinggi	2	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp6.000.000.000	Rp5.994.000.000	99,90%	Dinas Sosial
13	Meningkatnya Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP)	14	Persentase Kegiatan Yang Melibatkan OAP	100	0	0,00%		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp2.610.054.000	Rp375.054.000	14,37%	Dinas Kesehatan
								4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp32.150.000	Rp32.150.000	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
								5	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua	Rp4.400.000.000	Rp4.400.000.000	100,00%	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
								6	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp1.208.160.000	Rp1.205.440.000	99,77%	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Kampung
								7	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp1.380.065.000	Rp1.380.058.000	100,00%	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Kampung
								8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp1.200.000.000	Rp1.200.000.000	100,00%	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Kampung
								9	Program Pembangunan Kampung Dan Perkampungan	Rp500.000.000	Rp500.000.000	100,00%	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Kampung
								10	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp3.000.000.000	Rp3.000.000.000	100,00%	Sekretariat Daerah
			Tingkat Kesempatan	99,75	83,92	84,13%	Sangat Tinggi						

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Kerja										
14	Meningkatnya Efektivitas penyerapan tenaga kerja	15	Proporsi Tenaga Kerja yang terserap di semua tingkat pendidikan	82,61	85,67	103,70%	Sangat Tinggi						
15	Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	16	Tingkat Pertumbuhan produktivitas regional	16825	12106,89	71,96%	Tinggi	1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp1.550.000.000	Rp1.550.000.000	100,00%	Dinas Tenaga Kerja
			Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Produktif Ekonomi Kerakyatan	6	3,99	66,50%	Sedang						
16	Meningkatnya Produktivitas Regional sektor-sektor ekonomi kerakyatan	17	Rasio Produktivitas Regional sektor-sektor ekonomi kerakyatan	0,52	0	0,00%	-	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Rp549.068.000	Rp549.068.000	100,00%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
17	Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan kecil berbasis Pertanian	18	Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan kecil berbasis Pertanian	0,54	1,073	198,70%	Sangat Tinggi	2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp3.957.415.000	Rp3.954.865.000	99,94%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
								3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp500.000.000	Rp500.000.000	100,00%	Dinas Pertanian dan Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
								4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp9.298.740.000	Rp9.267.750.000	99,67%	Dinas Pertanian dan Perikanan
								5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp500.000.000	Rp500.000.000	100,00%	Dinas Pertanian dan Perikanan
								6	Program Penyuluhan Pertanian	Rp1.165.916.500	Rp1.165.916.500	100,00%	Dinas Pertanian dan Perikanan
18	Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar dan eceran berbasis muatan Lokal	19	Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar dan eceran berbasis muatan Lokal	7,42	6,06	81,67%	Sangat Tinggi	7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp3.000.000.000	Rp2.997.000.000	99,90%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
19	Meningkatnya Koperasi yang berdaya saing	20	Pertumbuhan Koperasi aktif	89	29	32,58%	Sangat Rendah	8	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp232.588.000	Rp232.568.000	99,99%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20	Berkembangnya Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	21	Cakupan Destinasi pariwisata yang di pasarkan	3	6	200,00%	Sangat Tinggi	9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp21.978.737.000	Rp21.945.425.000	99,85%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
								10	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp1.818.004.000	Rp1.816.429.000	99,91%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
21	Meningkatkan penanganan keawanan pangan penduduk	22	Indeks Ketahanan Pangan	34,94	25,62	73,33%	Sedang	11	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp5.050.000.000	Rp5.003.200.000	99,07%	Dinas Ketahanan Pangan
		23	Persentase penanganan kerawanan pangan	40	25	62,50%	Rendah						
22	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi	24	Pendapatan Perkapita	4554,4	5747	126,19%	Sangat Tinggi						
			ICOR	Meningkat	0		Tidak Tercapai						
23	Meningkatkan daya saing Daerah	25	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkat	0	-	-	1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp25.500.000	Rp25.500.000	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
24	Berkembangnya Potensi-Potensi Investasi Berbasis Sumber Daya Ekonomi lokal	26	Tingkat Pertumbuhan pengembangan ekonomi lokal	5,2	0	0,00%	-	2	Program Promosi Penanaman Modal	Rp25.150.000	Rp25.150.000	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
								3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp97.550.000	Rp97.550.000	100,00%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Rasio Gini	0,2485	0,244	101,81%	Tercapai						
25	Meningkatnya pendapatan penduduk golongan menengah kebawah	27	Persentase Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah	15	30,61	204,07%	Sangat Tinggi	1	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp4.067.488.000	Rp4.065.488.000	99,95%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Indeks Kinerja Peduli HAM	Meningkat	0		Tercapai						
26	Meningkatnya Pemenuhan HAM	28	Persentase Pemenuhan HAM	100	0	0,00%							
27	Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak-anak	29	Indeks Pemberdayaan gender	60	0	0,00%	-	1	Program Perlindungan Perempuan	Rp500.000.000	Rp500.000.000	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		30	Indeks Komposit Kesejahteraan anak	Meningkat	0	-	-	2	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp500.000.000	Rp500.000.000	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Keamanan	Meningkat	0		Tidak Tercapai						
28	Menurunnya Pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat	31	Persentase Pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat	1	37	- 3500,00%	Tidak Tercapai	1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan	Rp8.843.000.000	Rp8.700.650.000	98,39%	Kantor Kesbangpol

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
									Konflik Sosial				
29	Menurunnya Kriminalitas, kejahatan dan konflik dalam kehidupan masyarakat	32	Angka Kriminalitas	7	7	100,00%	Sangat Tinggi	2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp718.950.000	Rp718.950.000	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
								3	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp31.072.500	Rp31.072.500	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sosial	Meningkat	0		Tidak Tercapai						
30	Optimalnya pelayanan terhadap PMKS	33	Persentase pelayanan terhadap PMKS	32	12	37,50%	Sangat Rendah	1	Program Rehabilitasi Sosial	Rp200.000.000	Rp200.000.000	100,00%	Dinas Sosial
31	Optimalnya pelayanan sosial bagi Lanjut usia	34	Cakupan pelayanan sosial bagi Lanjut usia	Meningkat	0	0,00%	Tidak Tercapai						
32	Meningkatnya pembinaan dan Pemberdayaan KAT	35	Persentase pembinaan dan Pemberdayaan KAT	32	0	0,00%							
			Indeks Demokrasi	Meningkat	0		Tidak Tercapai						

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
33	Meningkatnya kebebasan hak Sipil	36	Skor Aspek kebebasan Sipil	Meningkat	0		Tidak Tercapai	1	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Rp8.450.400.000	Rp8.447.400.000	99,96%	Kantor Kesbangpol
34	Meningkatnya pemenuhan Hak-hak Politik	37	Skor Aspek pemenuhan Hak-hak Politik	Meningkat	0		Tidak Tercapai	2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Pol	Rp111.080.500.000	Rp89.880.500.000	80,91%	Kantor Kesbangpol
35	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas kelembagaan Demokrasi	38	Skor Kualitas dan Kuantitas kelembagaan Demokrasi	Meningkat	0		Tidak Tercapai	3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp91.475.000	Rp91.475.000	100,00%	Kantor Kesbangpol
			Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkat	0		Tidak Tercapai						
36	Meningkatnya Aksesibilitas dan konektivitas penduduk antar Distrik dan Kampung	39	Pertumbuhan tingkat konektivitas penduduk	35	5,93	16,94%	Sangat Rendah	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rp14.400.000.000	Rp14.371.832.700	99,80%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
								2	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp138.353.824.600	Rp135.999.577.600	98,30%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp24.240.226.000	Rp16.905.420.000	69,74%	Dinas Perhubungan
								4	Program Pengelolaan Penerbangan	Rp32.722.000.000	Rp32.544.794.000	99,46%	Dinas Perhubungan
								5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rp282.000.000	Rp279.500.000	99,11%	Dinas Perhubungan
37	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas	40	Persentase pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	25	7,5	30,00%	Sangat Rendah	6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp1.491.034.000	Rp1.490.500.000	99,96%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
								7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp9.600.000.000	Rp9.555.503.500	99,54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp3.926.974.000	Rp3.911.009.000	99,59%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	41	Proporsi sertifikasi Kepemilikan tanah	Meningkat	0	-	Tidak Tercapai	9					

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
39	Optimalnya penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang	42	Tingkat kepatuhan terhadap tata ruang	65	0	0,00%	Tidak Tercapai	10	Program Kawasan Permukiman	Rp2.615.812.500	Rp2.615.812.500	100,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
								11	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp2.000.000.000	Rp1.988.400.000	99,42%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Indeks Lingkungan Hidup	Meningkat	0	-	Tidak Tercapai						
40	Meningkatnya kualitas dan baku mutu air	43	Indeks pencemaran air	62,5	70	112,00%	Sangat Tinggi	1	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp2.096.000.000	Rp2.056.005.000	98,09%	Dinas Lingkungan Hidup
41	Meningkatnya kualitas udara	44	Indeks Kualitas udara	60	99,52	165,87%	Sangat Tinggi	2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp3.045.050.000	Rp3.034.000.000	99,64%	Dinas Lingkungan Hidup
42	Meningkatnya tutupan lahan	45	Indeks Tutupan Lahan	60	98,63	164,38%	Sangat Tinggi	3	Program Pengelolaan Persampahan	Rp2.128.148.000	Rp2.124.500.000	99,83%	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Risiko Bencana	131,3	0	0,00%	Tidak Tercapai						
43	Menurunnya tingkat resiko bencana	46	Jumlah Kampung Siaga Bencana	3	0	0,00%	Tidak Tercapai	1	Program Penanggulangan Bencana	Rp134.820.000	Rp134.820.000	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkat	0		Tidak Tercapai						
		47	Skor Relatif Mutu Pelayanan	Meningkat	Meningkat	100,00%	Sangat Tinggi	1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp50.484.190.513	Rp50.452.025.513	99,94%	Sekretariat Daerah
44	Meningkatnya mutu pelayanan publik	48	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	Meningkat	0		Tidak Tercapai						
			Indeks reformasi Birokrasi	Meningkat	0		Tidak Tercapai						
45	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	49	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	60,94	57,38	94,16%	Sangat Tinggi	1	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp1.267.730.000	Rp1.267.730.000	100,00%	Sekretariat Daerah
								2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp4.331.650.000	Rp4.325.650.000	99,86%	Inspektorat Daerah
								3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp634.730.000	Rp634.730.000	100,00%	Inspektorat Daerah
46	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	50	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	WDP	Proses Audit		Proses Audit	4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp537.519.813.512	Rp81.576.208.924	15,18%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
								5	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp2.884.961.600	Rp2.884.777.600	99,99%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
								6	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp945.684.000	Rp944.506.900	99,88%	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
								7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp476.650.000	Rp476.650.000	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
47	Meningkatnya pengembangan sumber daya aparatur	51	Persentase ASN yang sesuai standar kompetensi	57	23,22	40,74%	Sangat Tinggi	8	Program Kepegawaian Daerah	Rp3.076.223.000	Rp3.076.223.000	100,00%	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
48	Meningkatnya dukungan sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	52	Indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100	90,3	90,30%	Sangat Tinggi	9	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Rp42.389.080.000	Rp41.251.700.000	97,32%	Sekretariat DPRD
49	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	53	Ketersediaan Dokumen perencanaan pembangunan	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	10	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp6.304.610.000	Rp6.304.250.000	99,99%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Cakupan Pemenuhan Data-Data Dasar Pembangunan	3	4	133,33%	Sangat Tinggi						

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
50	Meningkatkan ketersediaan data makro dan mikro Statistik pembangunan daerah	54	Cakupan Kelengkapan Data SPID	2	2	100,00%	Sangat Tinggi						
51	Meningkatnya Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah secara optimal	55	Persentase Penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten	32	32	100,00%	Sangat Tinggi	1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp536.347.401	Rp536.347.401	100,00%	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
52	Optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana keputakaan dan arsip daerah yang berkualitas	56	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana keputakaan dan arsip daerah	32	0	0,00%		2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp12.550.000.000	Rp12.246.750.000	97,58%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
								3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp33.000.000	Rp33.000.000	100,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
53	Meningkatnya ketersediaan data base kependudukan	57	Persentase Dasar kependudukan Terpilah	32	0	0,00%		4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp250.000.000	Rp250.000.000	100,00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
								5	Program Pencatatan Sipil	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	100,00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2024				NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024			OPD PELAKSANA
				TARGET	REALISASI	% REALISASI	KRITERIA			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
								6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp250.000.000	Rp250.000.000		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
54	Optimalnya pengelolaan E-Government	58	Indeks E-Government	32	0		Tidak Tercapai		-	-	-	-	-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DIDIMUS YAHULI, SH**

Jabatan : **BUPATI YAHUKIMO**

Pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumohai, 26 Februari 2024

BUPATI YAHUKIMO

DIDIMUS YAHULI, SH

PERJANJIAN KINERJA (PK)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2024

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA 2023	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa			Indeks Kehidupan Beragama	Indeks	Meningkat	
		1	Meningkatnya budaya religius	Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah	Per 1000 Penduduk	18,64	Sekretariat Daerah
				Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat	%	100	Sekretariat Daerah
		2	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat beragama	Indeks	79,3	Kesbangpol
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya			Indeks Pembangunan Manusia		51,866	
		3	Meratanya Akses Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	4,06	Dinas Pendidikan
		4	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,63	Dinas Kesehatan
				Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Indeks	Meningkat	
		5	Optimalnya pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet yang Berprestasi Nasional	Jumlah	1	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		6	Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Pemuda Yang Berperan Dalam Pembangunan	%	100	Dinas Pemuda dan Olah Raga
				Indeks Pembangunan Kebudayaan		46,4	
		7	Meningkatnya efektifitas pengembangan dan pendidikan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Muatan Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Jenjang Pendidikan	%	100	Dinas Pendidikan
		8	Meningkatnya pelestarian budaya asli Papua	Cakupan Budaya Benda dan tak Benda Yang Dilestarikan	Jumlah	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pertumbuhan Penduduk		0,98	
		9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Berencana Yang Aktif	%	32	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		10	Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Keluarga Sejahtera	Jumlah	1672	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
				Angka Kemiskinan	%	34,82	
		11	Meningkatnya Daya Beli	Pengeluaran Perkapita (IPM)	Rupiah	4554,4	Dinas Perindakop dan

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA BUPATI

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA 2023	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Masyarakat				UKM
		12	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan Miskin	Indek Kedalaman Kemiskinan	Indeks	Menurun	Dinas Sosial
		13	Meningkatnya Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP)	Persentase Kegiatan Yang Melibatkan OAP	Persentase	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
3	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal			Tingkat Kesempatan Kerja	%	99,75	
		14	Meningkatnya Efektifitas Penyerapan Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja Yang Terserap Sesuai Tingkat Pendidikan	%	82,61	Dinas Tenaga Kerja
		15	Meningkatnya Produktivitas Tenaga kerja	Tingkat Produktifitas Regional	Rupiah	16.825	Dinas Tenaga Kerja
				Pertumbuhan Ekonomi Sektor- Sektor Produktif Ekonomi Kerakyatan		6	
		16	Meningkatnya Produktifitas Regional Sektor- Sektor Ekonomi Kerakyatan	Rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	Rasio	0,52	Dinas Perindakop dan UKM
		17	Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	%	0,54	Dinas Perindakop dan UKM
		18	Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal	Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar dan Eceran	%	7,42	Dinas Perindakop dan UKM
		19	Meningkatnya Koperasi Yang Berdaya saing	Pertumbuhan Koperasi Aktif	Jumlah	89	Dinas Perindakop dan UKM
		20	Berkembangnya Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Destinasi Pariwisata Yang Dipasarkan	Jumlah	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		21	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan penduduk	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	34,94	Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	40	
		22	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi	Pengeluaran Perkapita	Rupiah	4554,4	Dinas Perindakop dan UKM
				ICOR	Indeks	Meningkat	
		23	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	Meningkat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA BUPATI

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA 2023	OPD PENANGGUNG JAWAB
		24	Berkembangnya Potensi-Potensi Investasi Berbasis Sumber Daya Ekonomi Lokal	Tingkat Pertumbuhan Pengembangan Ekonomi Lokal	%	5,2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Rasio Gini		0,2485	
		25	Meningkatnya Pendapatan Penduduk Golongan Menengah Kebawah Dalam Distribusi Pendapatan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Meningkatkan Kesadaran Hukum, Sosial, Politik dan HAM			Indeks Kinerja Peduli HAM		Meningkat	
		26	Meningkatnya Pemenuhan HAM	Persentase Pelaksanaan HAM	%	100	Kesbangpol
		27	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	60	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
				Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Indeks	Meningkat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
				Indeks Keamanan		Meningkat	
		28	Menurunnya Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	%	1	Satuan Polisi Pamong Praja
		29	Menurunnya Kriminalitas, Kejahatan dan Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	7	Satuan Polisi Pamong Praja
				Indeks Kepuasan Pelayanan Sosial		Meningkat	
		30	Optimalnya Pelayanan Terhadap PMKS	Persentase Pelayanan PMKS	%	32	Dinas Sosial
		31	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemberdayaan KAT	Persentase Pemberdayaan KAT	Keterangan	Meningkat	Dinas Sosial
		32	Optimalnya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia	Cakupan Pelayanan Penduduk Lanjut Usia	%	32	Dinas Sosial
				Indeks Demokrasi		Meningkat	
		33	Meningkatnya Kebebasan Hak Sipil	Skor Aspek Kebebasan Hak Sipil	Angka	Meningkat	Kantor Kesbangpol
		34	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Politik	Skor Aspek Pemenuhan Hak-Hak Politik	Angka	Meningkat	Kantor Kesbangpol
		35	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi	Skor Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan Demokrasi	Angka	Meningkat	Kantor Kesbangpol
5	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan			Indeks Pembangunan nfrastruktur		Meningkat	
		36	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas penduduk antardistrik dan kampung	Pertumbuhan Tingkat Konektivitas Penduduk	%	35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA BUPATI

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA 2023	OPD PENANGGUNG JAWAB
		37	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar	%	25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		38	Meningkatnya tata Kelola pertanahan	Proporsi Sertifikat Kepemilikan Tanah	Keterangan	Meningkat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		39	Optimalnya penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang	Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang	%	65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Indeks Lingkungan Hidup		Meningkat	
		40	Meningkatnya Kualitas Dan Baku Mutu Air	Pencemaran Air	Keterangan	Tercemar Sedang	Dinas Lingkungan Hidup
		41	Meningkatnya Kualitas Udara	Kualitas Udara	Keterangan	Tercemar Ringan	Dinas Lingkungan Hidup
		42	Meningkatnya Tutupan Lahan	Tutupan Lahan	Keterangan	Meningkat	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Risiko Bencana		131,3	
		43	Menurunnya tingkat resiko bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana	Jumlah	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas	44	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik	Skor Relatif Mutu Pelayanan	Nilai	Meningkat	Sekretariat Daerah
				Indeks Kepuasan Masyarakat		Meningkat	
		45	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	Meningkat	Sekretariat Daerah
				Predikat Kinerja Pelayanan Publik		WDP	
				Indeks reformasi Birokrasi		C	
		46	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel dan Transparan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Meningkat	BPKAD
		47	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi	%	57	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		48	Meningkatnya Dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai Fungsinya	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Seketariat DPRD	Indeks	100	Sekretariat DPRD
		49	Meningkatnya kualitas perencanaan	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Cakupan Pemenuhan Data-Data Dasar Pembangunan		3	
		50	Meningkatnya ketersediaan data makro dan mikro statistik pembangunan	Cakupan Kelengkapan Data SPID	Jumlah	2	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA BUPATI

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA 2023	OPD PENANGGUNG JAWAB
			daerah				
		51	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi daerah secara optimal	Persentase Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Kabupaten	%	32	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		52	Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepustakaan dan Arsip Daerah Yang Berkualitas	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kepustakaan Dan Arsip Daerah	%	32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		53	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan	Persentase Data Dasar Kependudukan Terpilah	%	32	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		54	Optimalnya Pengelolaan E government	Indeks Egovernment	Indikator	Meningkat	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian



LAMPIRAN III REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD KABUPATEN YAHUKIMO

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD 2022-2026	CAPAIAN S/D 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	KETERANGAN
					TARGET RPJMD	REALISASI	% REALISASI			
			Indeks Kehidupan Beragama	Indeks	Meningkat	0	-	Meningkat	-	
1	Meningkatnya Budaya Religius	1	Proporsi penduduk terhadap tempat ibadah	Per 1000 Penduduk	18,64	0,14	0,75%	23,14	0,605%	
		2	Persentase Aktivitas tempat di lingkungan dan masyarakat	%	100	100	100,00%	100	100,00%	
2	Meningkatkan kerukunan Umat beragama	3	Indeks Kerukunan Umat beragama	Indeks	79,3	0	0,00%	79,5	0,00%	
			Indeks Pembangunan Manusia		51,87	51,97	100,20%	53,19	97,71%	
3	Meningkatkan akses Pendidikan	4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	4,06	4,35	107,14%	4,08	106,62%	
4	Meningkatkan Derajat Kesehatan	5	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,63	66,51	99,82%	66,97	99,31%	
			Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Indeks	Meningkat	0	-	Meningkat	-	
5	Optimalnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6	Cakupan Olahragawan Yang Berprestasi Nasional	Jumlah	1	0	0,00%	1	0,00%	
6	Meningkatnya Prestasi Pemuda dalam pembangunan	7	Persentase Prestasi Pemuda dalam pembangunan	%	100	0	0,00%	100	0,00%	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan		46,4	0	0,00%	46,5	0,00%	
7	Meningkatnya efektivitas pengembangan dan pendidikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat	8	Persentase Muatan nilai-nilai Budaya Lokal dalam jenjang pendidikan	%	100	37,5	37,50%	100	37,50%	
8	Meningkatnya pelestarian Budaya asli Papua	9	Cakupan budaya benda dan tak benda yang di lestarikan	Jumlah	1	5	500,00%	1	500,00%	

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD 2022-2026	CAPAIAN S/D 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	KETERANGAN
					TARGET RPJMD	REALISASI	% REALISASI			
			Pertumbuhan Penduduk		0,98	1,47	150,00%	1	147,00%	
9	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	10	Persentase Keluarga Berencana yang aktif	%	32	9,67	30,22%	34	28,44%	
10	Optimalnya Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Keluarga Sejahtera	11	Persentase Keluarga Sejahtera	Jumlah	1672	1533	91,69%	1872	81,89%	
			Angka Kemiskinan	%	34,82	33,82	97,13%	33,14	102,05%	
11	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	12	Pengeluaran Perkapita (IPM)	Rupiah	4554,4	5747	126,19%	4851,5	118,46%	
12	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan Miskin	13	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	Menurun	Menurun	100,00%	Menurun	100,00%	Menurun 0,36 poin indeks
13	Meningkatnya Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP)	14	Persentase Kegiatan Yang Melibatkan OAP	%	100	0	0,00%	100	0,00%	
			Tingkat Kesempatan Kerja	%	99,75	83,92	84,13%	99,9	84,00%	
14	Meningkatnya Efektivitas penyerapan tenaga kerja	15	Proporsi Tenaga Kerja yang terserap di semua tingkat pendidikan	%	82,61	85,67	103,70%	82,91	103,33%	
15	Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	16	Tingkat Pertumbuhan produktivitas regional	Rupiah	16.825	12106,89	71,96%	18.503	65,43%	
			Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Produktif Ekonomi Kerakyatan		6	3,99	66,50%	7	57,00%	
16	Meningkatnya Produktivitas Regional sektor-sektor ekonomi kerakyatan	17	Rasio Produktivitas Regional sektor-sektor ekonomi kerakyatan	Rasio	0,52	0	0,00%	0,54	0,00%	

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD 2022-2026	CAPAIAN S/D 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	KETERANGAN
					TARGET RPJMD	REALISASI	% REALISASI			
17	Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan kecil berbasis Pertanian	18	Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan kecil berbasis Pertanian	%	0,54	1,073	198,70%	0,56	191,61%	
18	Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar dan eceran berbasis muatan Lokal	19	Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar dan eceran berbasis muatan Lokal	%	7,42	6,06	81,67%	7,72	78,50%	
19	Meningkatnya Koperasi yang berdaya saing	20	Perrtumbuhan Koperasi aktif	Jumlah	89	29	32,58%	93	31,18%	
20	Berkembangnya Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	21	Cakupan Destinasi pariwisata yang di pasarkan	Jumlah	3	6	200,00%	5	120,00%	
21	Meningkatkan penanganan Kerawanan pangan penduduk	22	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	34,94	25,62	73,33%	35,04	73,12%	
		23	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	40	25	62,50%	50	50,00%	
22	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi	24	Pendapatan Perkapita	Rupiah	4554,4	5747	126,19%	4851,5	118,46%	
			ICOR	Indeks	Meningkat	0	-	Meningkat	-	
23	Meningkatkan daya saing Daerah	25	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	Meningkat	0	-	Meningkat	-	
24	Berkembangnya Potensi-Potensi Investasi Berbasis Sumber Daya Ekonomi lokal	26	Tingkat Pertumbuhan pengembangan ekonomi lokal	%	5,2	0	0,00%	5,5	0,00%	
			Rasio Gini		0,2485	0,244	98,19%	0,2475	98,59%	
25	Meningkatnya pendapatan penduduk golongan menengah kebawah	27	Persentase Distribusi Pendapatan Pada Golongan Menengah Kebawah	%	15	30,61	204,07%	25	122,44%	

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD 2022-2026	CAPAIAN S/D 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	KETERANGAN
					TARGET RPJMD	REALISASI	% REALISASI			
			Indeks Kinerja Peduli HAM		Meningkat	0	-	Meningkat	-	
26	Meningkatnya Pemenuhan HAM	28	Persentase Pemenuhan HAM	%	100	0	0,00%	100	0,00%	
27	Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak-anak	29	Indeks Pemberdayaan gender	Indeks	60	0	0,00%	60,2	0,00%	
		30	Indeks Komposit Kesejahteraan anak	Indeks	Meningkat	0	-	Meningkat	-	
			Indeks Keamanan		Meningkat	0	-	Meningkat	-	
28	Menurunnya Pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat	31	Persentase Pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat	%	1	37	- 3500,00%	1	-3500,00%	Indikator Rgresif
29	Menurunnya Kriminalitas, kejahatan dan konflik dalam kehidupan masyarakat	32	Angka Kriminalitas	Angka	7	7	100,00%	5	60,00%	Indikator Rgresif
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sosial		Meningkat	0	-	Meningkat	-	
30	Optimalnya pelayanan terhadap PMKS	33	Persentase pelayanan terhadap PMKS	%	32	12	37,50%	34	35,29%	
31	Optimalnya pelayanan sosial bagi Lanjut usia	34	Cakupan pelayanan sosial bagi Lanjut usia	Keterangan	Meningkat	0	-	Meningkat	-	
32	Meningkatnya pembinaan dan Pemberdayaan KAT	35	Persentase pembinaan dan Pemberdayaan KAT	%	32	0	0,00%	34	-	
			Indeks Demokrasi		Meningkat	0	-	Meningkat	-	
33	Meningkatnya kebebasan hak Sipil	36	Skor Aspek kebebasan Sipil	Angka	Meningkat	0	-	Meningkat	-	
34	Meningkatnya pemenuhan Hak-hak Politik	37	Skor Aspek pemenuhan Hak-hak Politik	Angka	Meningkat	0	-	Meningkat	-	

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD 2022-2026	CAPAIAN S/D 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	KETERANGAN
					TARGET RPJMD	REALISASI	% REALISASI			
35	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas kelembagaan Demokrasi	38	Skor Kualitas dan Kuantitas kelembagaan Demokrasi	Angka	Meningkat	0	-	Meningkat	-	
			Indeks Pembangunan Infrastruktur		Meningkat	0	-	Meningkat	-	
36	Meningkatnya Aksesibilitas dan konektivitas penduduk antar Distrik dan Kampung	39	Pertumbuhan tingkat konektivitas penduduk	%	35	5,93	16,94%	45	13,18%	
37	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas	40	Persentase pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	%	25	7,5	30,00%	35	21,43%	
38	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	41	Proporsi sertifikasi Kepemilikan tanah	Keterangan	Meningkat	0	-	Meningkat	-	
39	Optimalnya penyelenggaraan pemukiman dan tata ruang	42	Tingkat kepatuhan terhadap tata ruang	%	65	0	0,00%	75	0,00%	
			Indeks Lingkungan Hidup		Meningkat	0	-	Meningkat	-	
40	Meningkatnya kualitas dan baku mutu air	43	Indeks pencemaran air	Keterangan	62,5	70	112,00%	63,5	110,24%	
41	Meningkatnya kualitas udara	44	Indeks Kualitas udara	Keterangan	60	99,52	165,87%	65	153,11%	
42	Meningkatnya tutupan lahan	45	Indeks Tutupan Lahan	Keterangan	60	98,63	164,38%	65	151,74%	
			Indeks Risiko Bencana		131,3	0	0,00%	130,3	0,00%	
43	Menurunnya tingkat resiko bencana	46	Jumlah Kampung Siaga Bencana	Jumlah	3	0	0,00%	5	0,00%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Meningkat	0	-	Meningkat	-	
		47	Skor Relatif Mutu Pelayanan	Nilai	Meningkat	Meningkat	100,00%	Meningkat	100,00%	
44	Meningkatnya mutu pelayanan publik	48	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	Meningkat	Tidak tercapai	Tidak tercapai	Meningkat	Tidak tercapai	

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD 2022-2026	CAPAIAN S/D 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	KETERANGAN
					TARGET RPJMD	REALISASI	% REALISASI			
			Indeks reformasi Birokrasi		Meningkat	0	-	Meningkat	-	
45	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	49	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	60,94	57,38	94,16%	78	73,56%	
46	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	50	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	WDP	Proses Audit	Proses Audit	WDP	Proses Audit	
47	Meningkatnya pengembangan sumber daya aparatur	51	Persentase ASN yang sesuai standar kompetensi	%	57	23,22	40,74%	59	39,36%	
48	Meningkatnya dukungan sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	52	Indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	100	90,3	90,30%	100	90,30%	
49	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	53	Ketersediaan Dokumen perencanaan pembangunan	Dokumen	100	100	100,00%	100	100,00%	
			Cakupan Pemenuhan Data-Data Dasar Pembangunan		3	4	133,33%	4	100,00%	
50	Meningkatkan ketersediaan data makro dan mikro Statistik pembangunan daerah	54	Cakupan Kelengkapan Data SPID	Jumlah	2	2	100,00%	3	66,67%	
51	Meningkatnya Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah secara optimal	55	Persentase Penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten	%	32	32	100,00%	34	94,12%	
52	Optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kepustakaan dan arsip daerah yang berkualitas	56	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kepustakaan dan arsip daerah	%	32	0	0,00%	34	0,00%	
53	Meningkatnya ketersediaan data base kependudukan	57	Persentase Dasar kependudukan Terpilah	%	32	0	0,00%	34	0,00%	
54	Optimalnya pengelolaan E-Goverment	58	Indeks E-Government	Indikator	Meningkat	0	-	Meningkat	-	

